



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

Rancangan  
**RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH ( RPD )**

*Provinsi Kalimantan Timur*

**Tahun  
2024 - 2026**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempedomani sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036. Selain itu, dokumen RPD disusun dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### **1.3 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2016-2036. Selanjutnya, dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan. Penjelasan hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterkaitan RPD dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Kalimantan Timur.

2. Keterkaitan RPD dengan RPJPD Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan kelima RPJPD Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD guna mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.

3. Keterkaitan RPD dengan RTRW Tahun 2016-2036

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 melalui penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

4. Keterkaitan RPD dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan tujuan, sasaran dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program pada RPD masih bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

5. Keterkaitan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan. Keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam RPD.

6. Keterkaitan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan dokumen perencanaan lain antara lain dokumen RAD GRK, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan Rencana Induk IKN.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;

2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024-2026; dan
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif dan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
3. Menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD atau RPD kabupaten/kota.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 9 (Sembilan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJMD Tahun 2018-2023
- 2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)



- 2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN
- 2.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 4.2. Isu Strategis

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

- 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- 6.2. Program Prioritas Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2. Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 8.1. Indikator Kinerja Utama
- 8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya di luar Jawa termasuk di Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih dari 6 (enam) dasawarsa dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi (*natural resources based economy*). Alasannya tentu saja karena sumber daya tersebut telah tersedia dan secara mudah dengan langsung mengekstraksi dan memperdagangkan tanpa adanya upaya pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Akses yang mudah terhadap sumber daya alam ditambah pertumbuhan penduduk, peningkatan standar hidup dan tersedianya pasar atas komoditas sumber daya alam telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung/ekstraktif ini disadari sangat rentan bagi laju pertumbuhan karena dipengaruhi oleh harga pasar atas komoditas, terlebih bilamana orientasinya ekspor. Apabila harga baik maka baik pula laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dalam dasawarsa terakhir Provinsi Kalimantan Timur menyadari kualitas pertumbuhan sama pentingnya dengan laju pertumbuhan tersebut. Kualitas pertumbuhan yang diharapkan tentu saja yang mampu menghemat (terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan) dan/atau menjaga keberlanjutannya (sumber daya alam terbarukan), salah satunya adalah dengan melakukan transformasi ekonomi.

Strategi jangka panjang yang secara bertahap dilakukan, yaitu potensi sumber daya alam terbarukan terus dikembangkan, baik dari sektor pertanian dalam arti luas maupun sektor jasa lingkungan, sehingga diharapkan akan menggeser struktur ekonomi ekstraktif terhadap sumber daya alam tidak terbarukan. Disamping itu hilirisasi komoditas sektor pertanian melalui pembangunan dan pengembangan industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) produk, terjadinya penciptaan tenaga kerja dan perlahan menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian ke struktur perekonomian yang lebih berkelanjutan termasuk secara merata dan berkeadilan menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

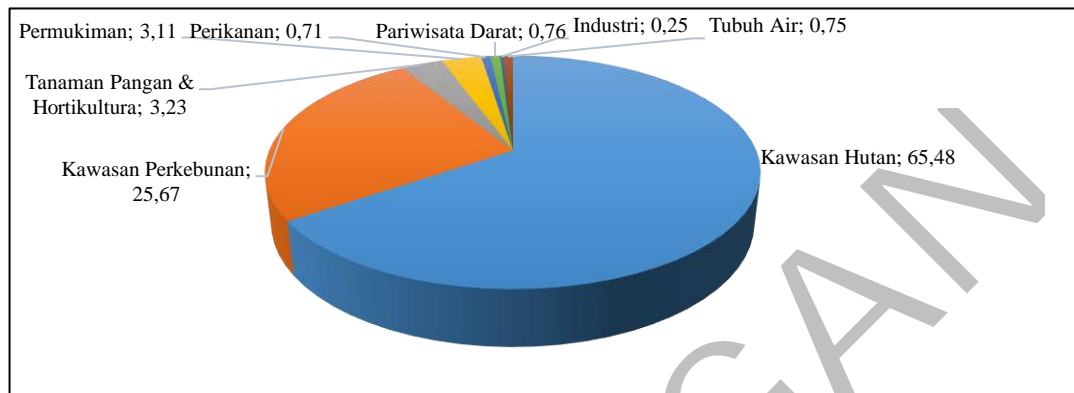
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai dokumen transisi rencana pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

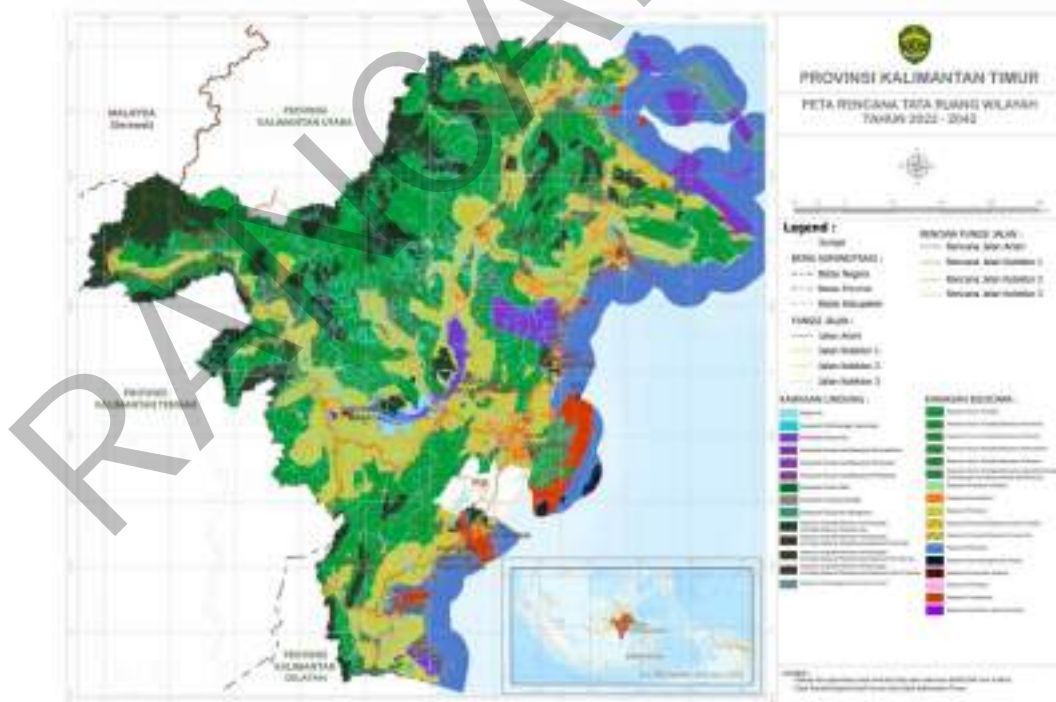
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Selat Makassar dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha dan wilayah laut yang mencapai 3.997.373 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.



Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2016

**Gambar II.1**  
**Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2035**



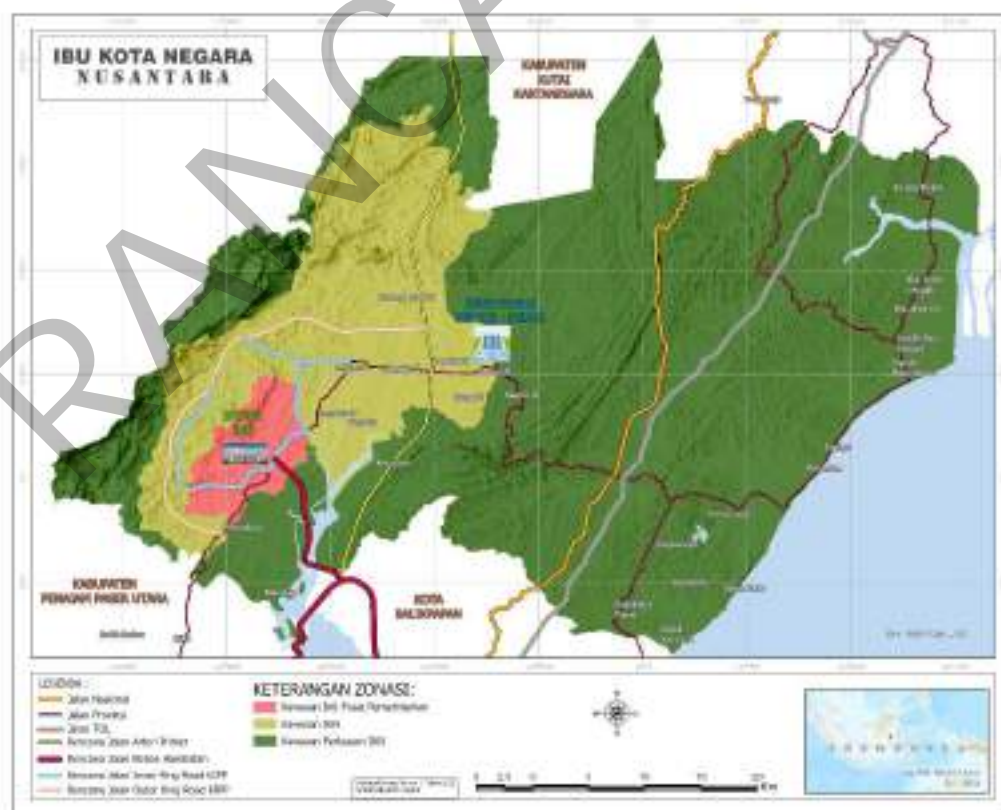
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.2**  
**Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai

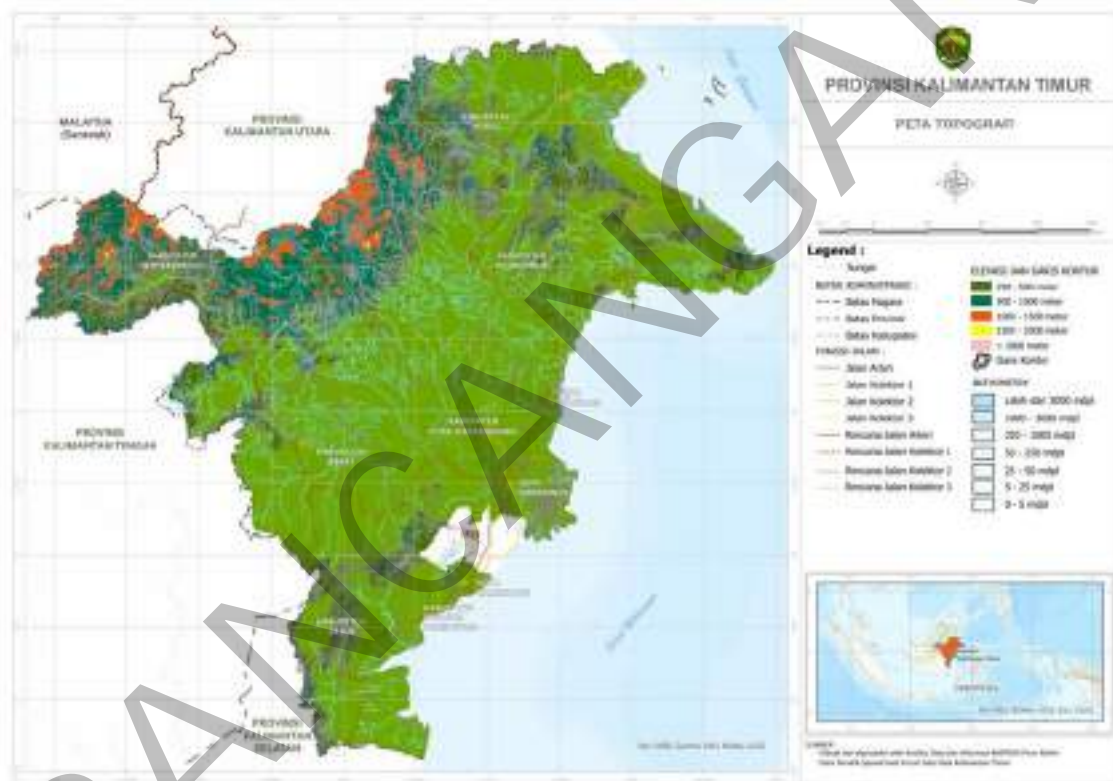
Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95.758 Ha (0,75%).

Setelah ditetapkan sebagai Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkan sebagai IKN Nusantara mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550 ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.



**Gambar II.3**  
**Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara**

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

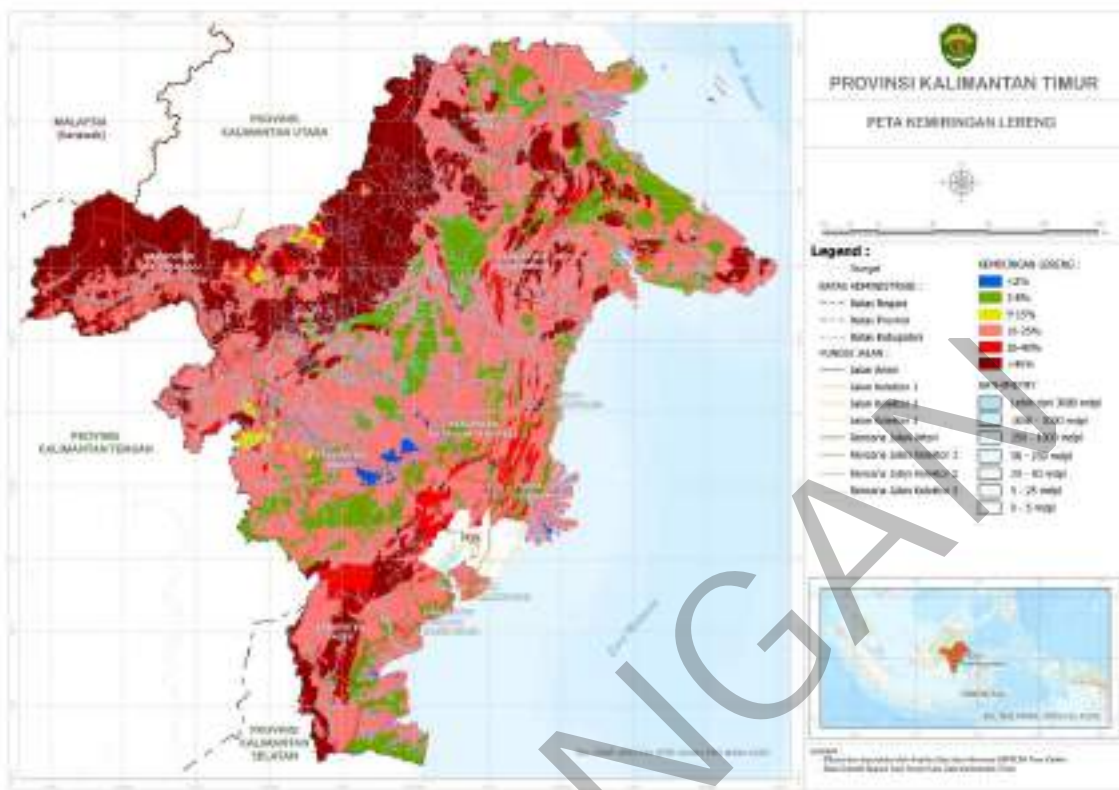


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.4**  
**Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di

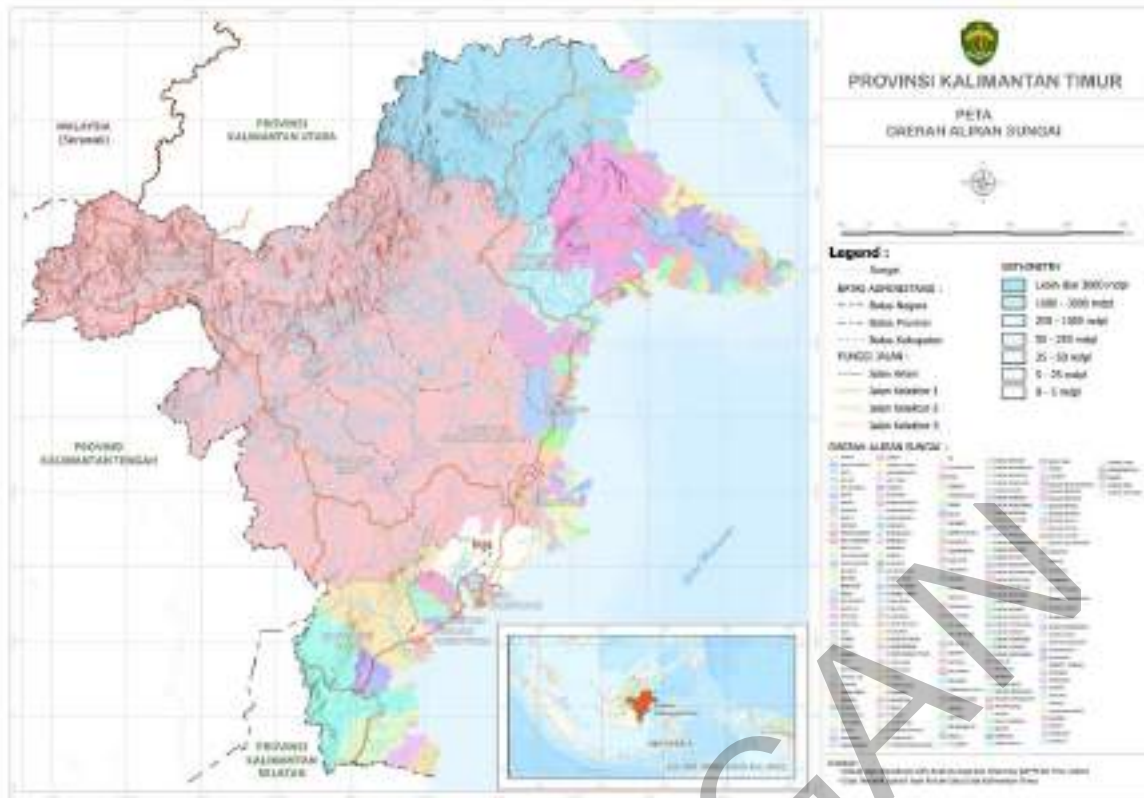
Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.5**  
**Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur**

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyuir, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.

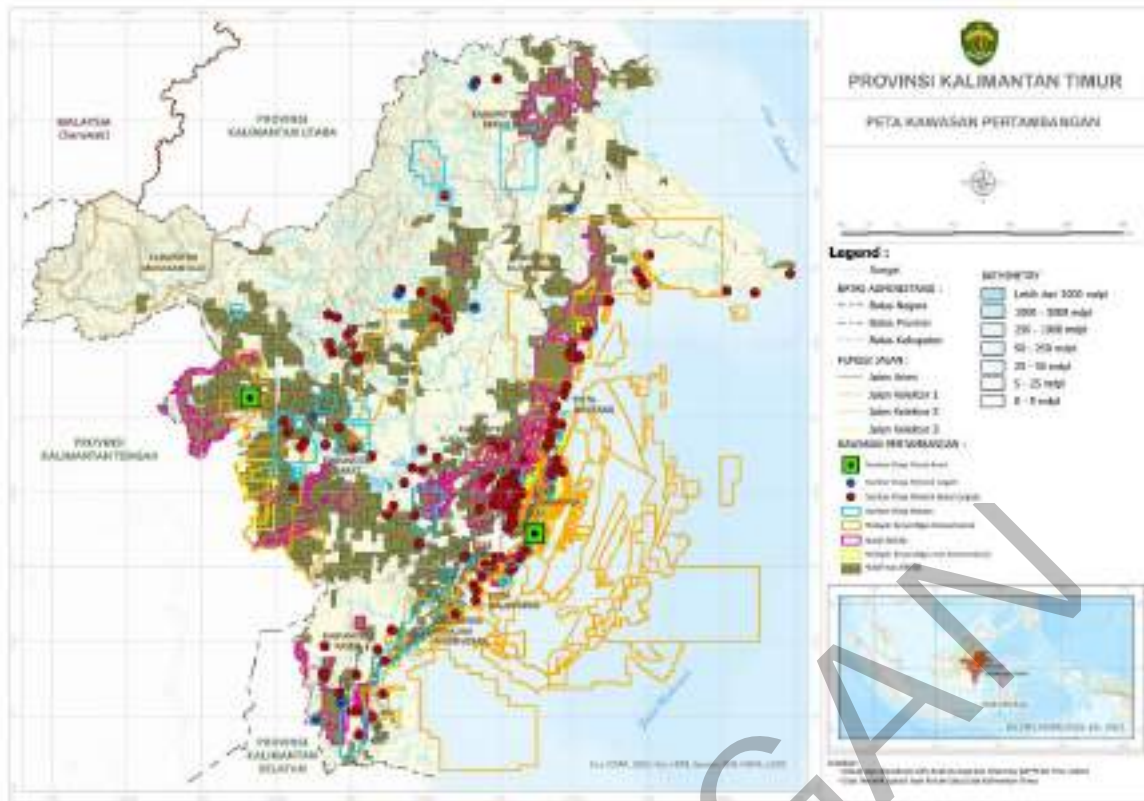


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.6**  
**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur**

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar II.6.





Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.7**  
**Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur**

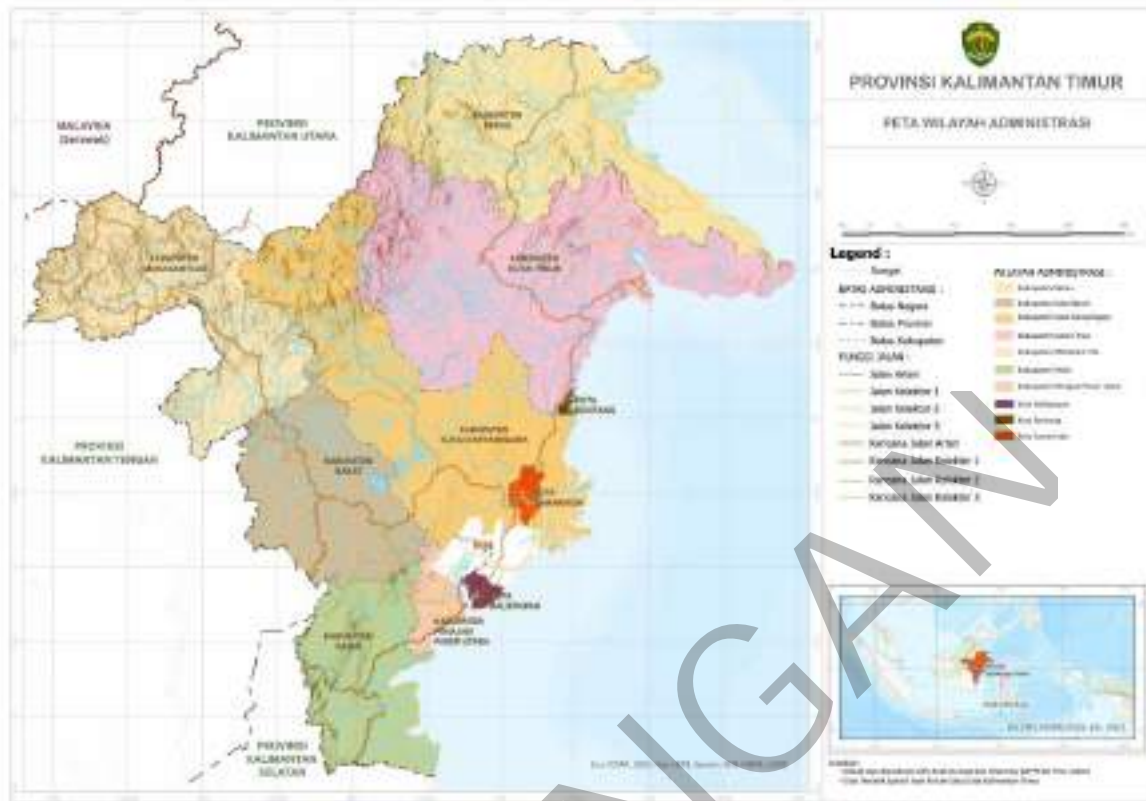
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.051	10	144
2	KUBAR	1.360.641	16	194
3	KUKAR	2.527.713	20	237
4	KUTIM	3.120.693	18	141
5	Berau	2.135.715	13	110
6	PPU	203.105	4	54
7	MAHULU	1.850.524	5	50
8	Balikpapan	50.954	6	34
9	Samarinda	71.622	10	59
10	Bontang	16.065	3	15
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>12.441.083</b>	<b>105</b>	<b>1.038</b>

Sumber: Bappeda Kaltim dan Kemendagri, 2022

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

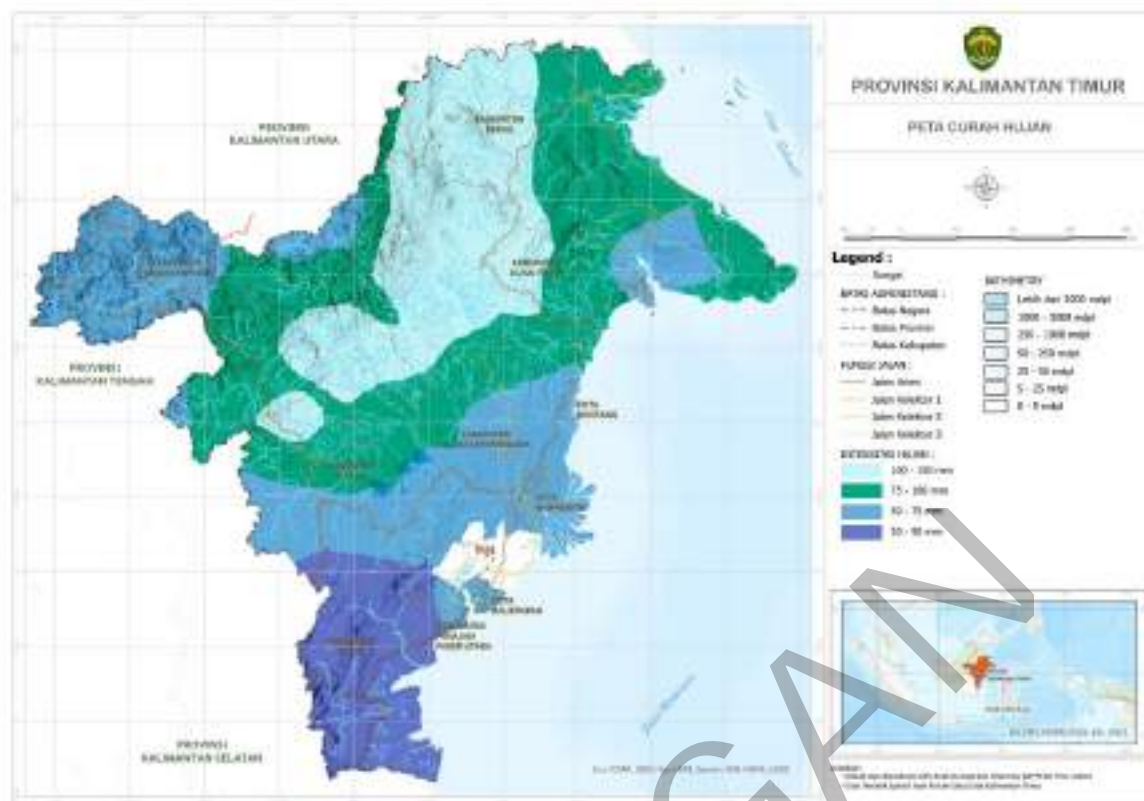
**Gambar II.8**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur**

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

**Tabel II.2**  
**Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82	83,30	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2.947	2.312
6	Penyinaran Matahari (%)	42	46	49

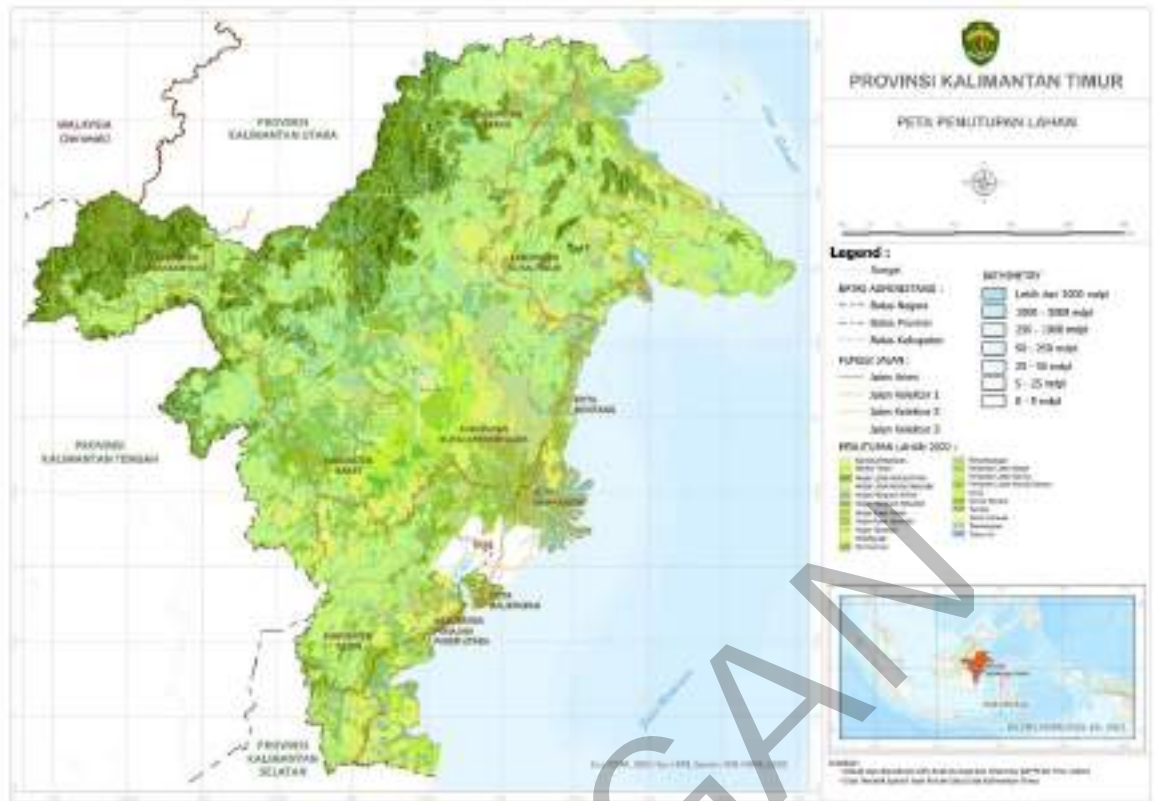
Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.9**  
**Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur**

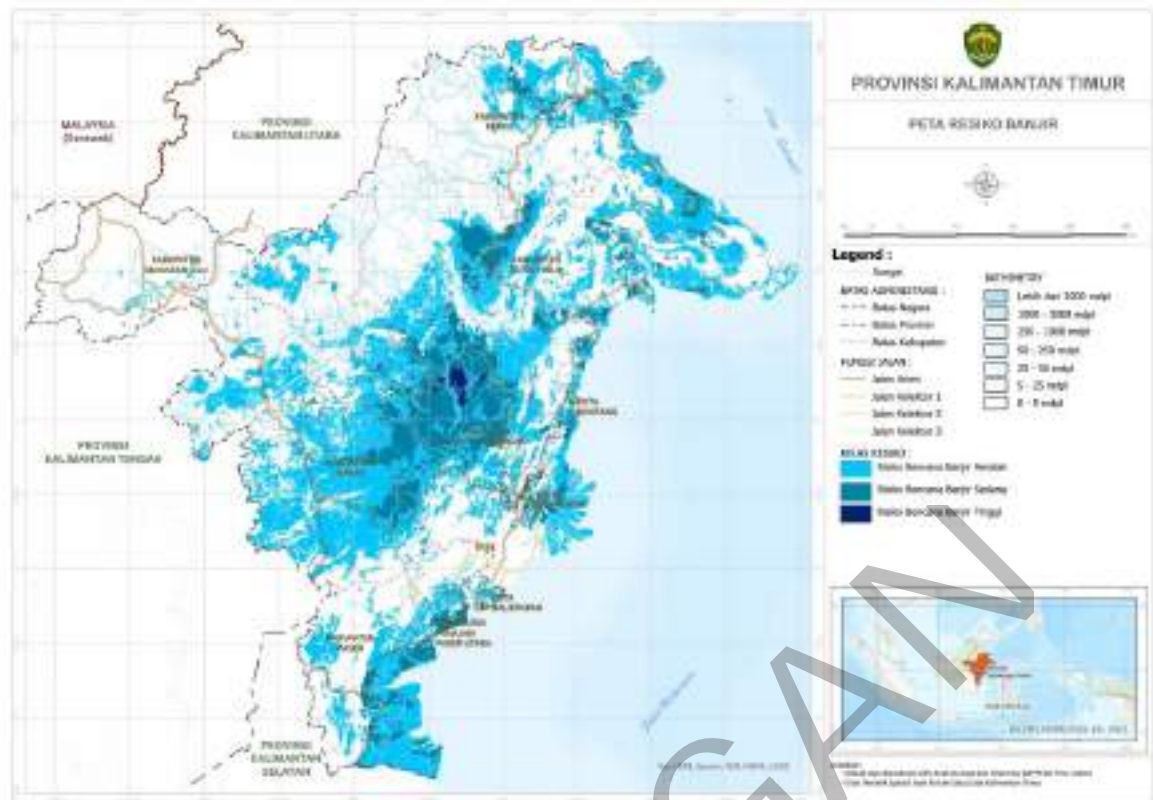
Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar II.9 dibawah ini.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.10**  
**Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur**

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022

**Gambar II.11**  
**Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur**

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

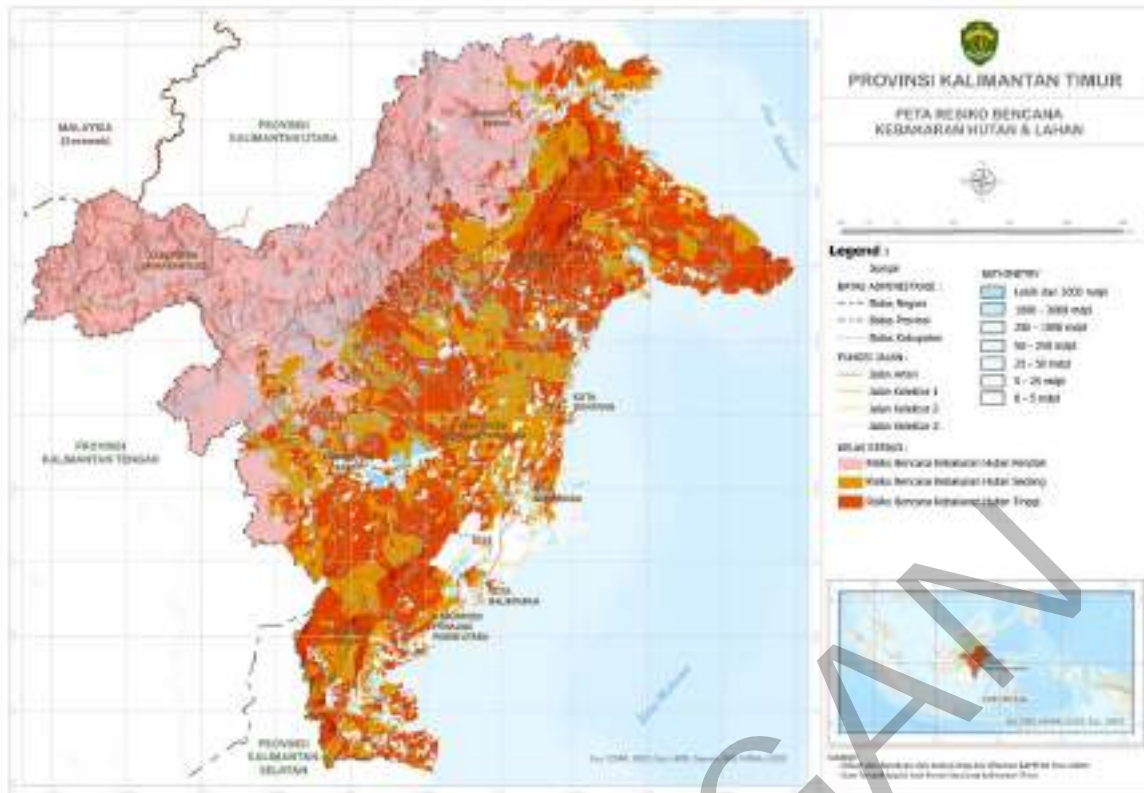
Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan

sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.

- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga akan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022

**Gambar II.12**  
**Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

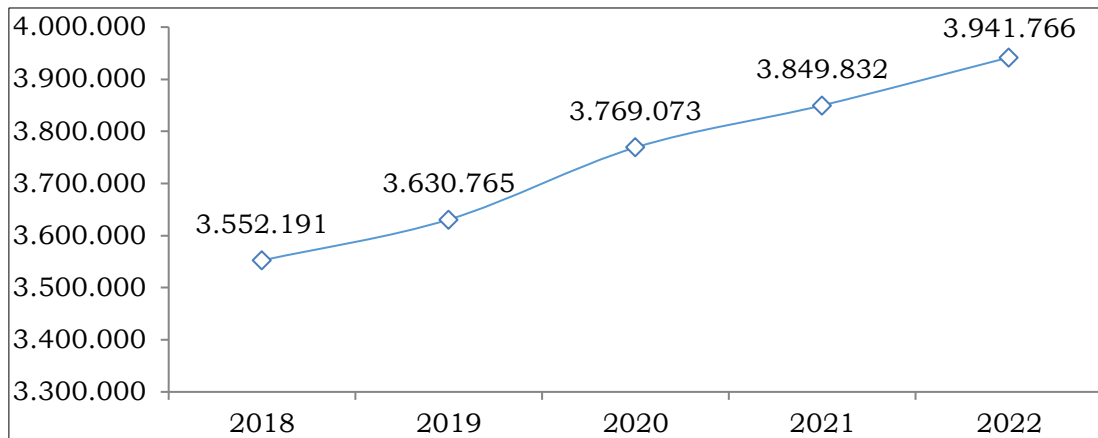
Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.
- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bentuk rencana aksi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana. Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memiliki indeks 153,28 dengan kategori tinggi.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.

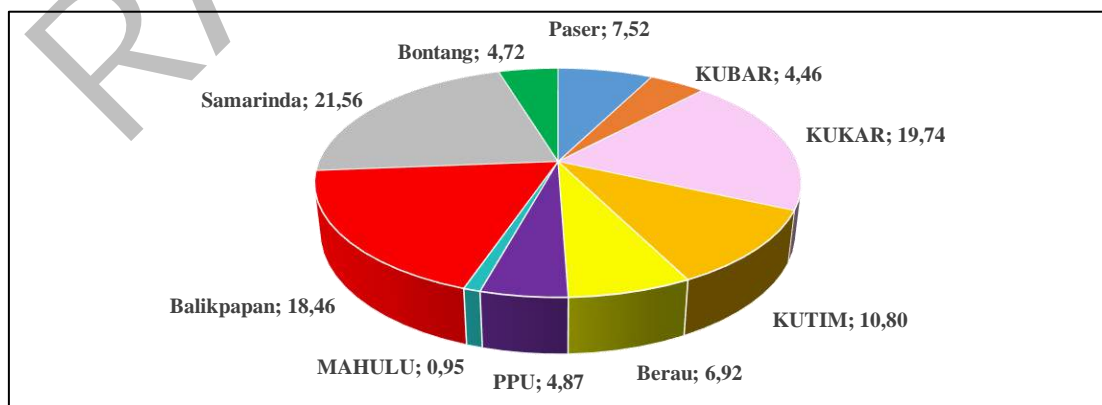




Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

**Gambar II.13**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

**Gambar II.14**  
**Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018–2022. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%)
1	Paser	259.417	265.148	277.401	288.225	296.582	2,26
2	KUBAR	162.200	164.048	165.938	170.871	175.610	1,33
3	KUKAR	677.755	696.784	734.485	753.862	778.096	2,33
4	KUTIM	420.760	422.905	424.334	424.743	425.787	0,20
5	Berau	224.654	232.189	251.439	263.150	272.887	3,29
6	PPU	170.475	173.671	181.349	186.801	191.967	2,00
7	MAHULU	28.833	30.321	35.010	35.274	37.318	4,39
8	Balikpapan	649.806	670.505	697.079	710.293	727.665	1,90
9	Samarinda	778.883	793.576	817.254	831.220	849.717	1,46
10	Bontang	179.408	181.618	184.784	185.393	186.137	0,62
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>3.505.161</b>	<b>3.552.191</b>	<b>3.630.765</b>	<b>3.849.832</b>	<b>3.941.766</b>	<b>1,98</b>

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.402,49 per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,86 per km<sup>2</sup>. Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,56 per km<sup>2</sup>.

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

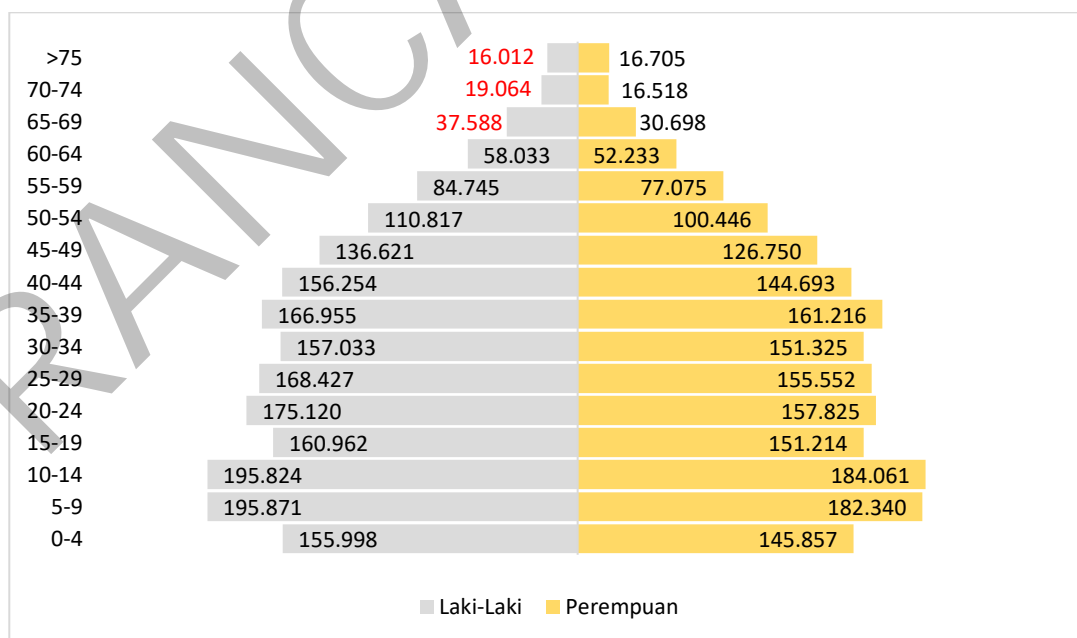
**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	153.455	143.127	296.582	107,22	26,86

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2	KUBAR	92.207	83.403	175.610	110,56	12,91
3	KUKAR	405.154	372.942	778.096	108,64	30,78
4	KUTIM	227.438	198.349	425.787	114,67	13,64
5	Berau	144.720	128.167	272.887	112,92	12,78
6	PPU	99.423	92.544	191.967	107,43	94,52
7	MAHULU	19.920	17.398	37.318	114,50	2,02
8	Balikpapan	371.777	355.888	727.665	104,46	1.428,08
9	Samarinda	432.306	417.411	849.717	103,57	1.186,39
10	Bontang	96.433	89.704	186.137	107,50	1.158,65
Kalimantan Timur		2.042.833	1.898.933	3.941.766	107,58	31,68

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.15**  
**Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

**Tabel II.5**  
**Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2021**

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki				
7-12	0,00	0,20	0,03	0,07
13-15	1,52	1,43	1,34	0,77
16-18	19,94	17,84	19,17	16,28
19-24	67,55	71,64	69,98	70,59
7-24	25,48	26,62	27,32	26,09
Perempuan				
7-12	0,00	0,13	0,26	0,00
13-15	0,12	0,48	0,43	0,26
16-18	16,05	18,40	16,66	19,66
19-24	72,30	67,62	70,38	69,60
7-24	24,96	24,19	25,10	25,66
Laki-Laki + Perempuan				
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04

13-15	0,86	0,98	0,88	0,52
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Tabel II.6**  
**Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021**

Kelompok Usia Sekolah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah			
	2018	2019	2020	2021
7-12	0,24	0,16	0,12	0,36
13-15	0,25	0,19	0,05	0,58
16-18	0,38	0,09	0,17	0,06
19-24	0,38	0,35	0,12	0,02
7-24	0,31	0,21	0,12	0,23
Kelompok Usia Sekolah	Masih Bersekolah			
	2018	2019	2020	2021
7-12	99,67	99,68	99,73	99,60
13-15	98,89	98,83	99,07	98,90
16-18	81,55	81,81	81,88	82,01
19-24	29,84	29,89	29,71	29,86
7-24	74,46	74,34	73,63	73,88
Kelompok Usia Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi			
	2018	2019	2020	2021
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04
13-15	0,86	0,98	0,88	0,52
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur.

**Tabel II.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya	Jumlah
1	Paser	272.788	9.769	9.299	488	530	0	5	292.879
2	KUBAR	82.408	54.238	36.078	141	36	1	99	173.001
3	KUKAR	706.546	41.426	14.400	2.569	254	6	83	765.284
4	KUTIM	345.969	41.996	34.964	2.522	133	6	23	425.613
5	Berau	224.748	24.263	15.961	224	649	22	8	265.875
6	PPU	179.143	7.046	2.603	91	39	0	1	188.923
7	MAHULU	8.528	5.422	22.137	60	3	0	3	36.153
8	Balikpapan	648.261	49.750	13.041	1.390	5.935	31	15	718.423
9	Samarinda	766.265	42.477	21.141	825	7.880	284	63	838.935
10	Bontang	167.023	15.248	3.221	298	138	0	0	185.928
Kalimantan Timur		3.401.679	291.635	172.845	8.608	15.597	350	300	3.891.014

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

### A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

**Tabel II.8**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.744.486	505.786.456	315.126.677
2021	696.584.498	584.205.939	338.613.743
2022	921.332.980	792.531.260	381.969.993

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.

RANCANGAN

**Tabel II.9**  
**Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.455.323 (8,80)	59.089.937 (8,48)	64.891.735 (7,04)
B	Pertambangan dan Penggalian	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	250.845.967 (41,27)	314.198.045 (45,11)	490.501.116 (53,24)
C	Industri Pengolahan	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	115.564.453 (19,02)	123.816.183 (17,77)	136.636.144 (15,05)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.062 (0,06)	395.471 (0,06)	422.609 (0,05)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.534 (0,05)	348.377 (0,05)	379.899 (0,04)
F	Konstruksi	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	58.308.248 (9,59)	62.313.147 (8,95)	70.945.215 (7,70)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.053.042 (6,43)	41.474.909 (5,95)	47.547.015 (5,16)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.067.334 (3,63)	23.218.927 (3,33)	28.980.671 (3,15)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.479.402 (1,07)	6.707.636 (0,96)	7.520.922 (0,82)
J	Informasi dan Komunikasi	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.390.805 (1,55)	10.206.752 (1,47)	11.087.181 (1,20)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.490.249 (1,73)	11.244.159 (1,61)	13.379.873 (1,45)
L	Real Estate	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.868.848 (0,97)	5.891.471 (0,85)	6.152.947 (0,67)
M,N	Jasa Perusahaan	1.299.480 (0,20)	1.346.710 (0,21)	1.334.744 (0,22)	1.384.556 (0,20)	1.516.507 (0,16)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.605 (2,10)	13.198.181 (1,89)	14.448.961 (1,57)
P	Jasa Pendidikan	10.107.377	10.995.564	11.724.048	12.340.328	13.132.703



Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
		(1,59)	(1,69)	(1,93)	(1,77)	(1,43)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.331.020 (0,88)	6.205.096 (0,89)	6.692.400 (0,73)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.368.801 (0,72)	4.551.864 (0,65)	5.097.080 (0,55)
<b>PDRB</b>		<b>635.498.680</b> <b>(100,00)</b>	<b>652.158.057</b> <b>(100,00)</b>	<b>607.744.486</b> <b>(100,00)</b>	<b>696.584.498</b> <b>(100,00)</b>	<b>921.332.980</b> <b>(100,00)</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

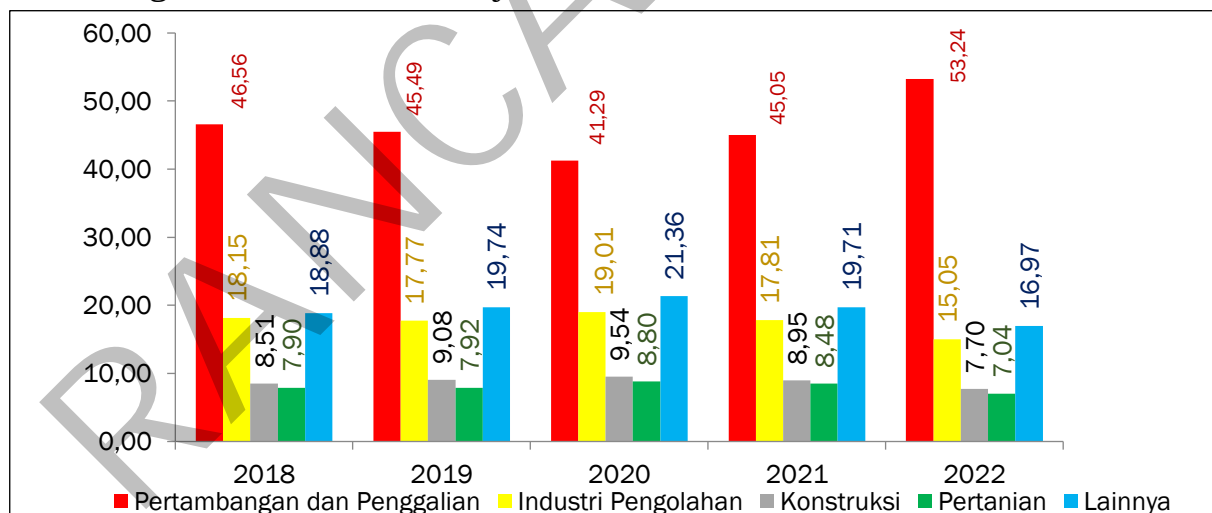
**Tabel II.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.026.690 (6,99)	33.001.680 (6,81)	33.649.338 (6,75)
B	Pertambangan dan Penggalian	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	222.909.197 (47,17)	227.991.366 (47,07)	235.949.043 (46,72)
C	Industri Pengolahan	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	93.909.767 (19,90)	96.208.521 (19,86)	99.651.978 (19,70)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.368 (0,07)	324.789 (0,07)	337.250 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.995 (0,05)	258.504 (0,05)	278.099 (0,06)
F	Konstruksi	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.601.166 (7,49)	37.005.238 (7,63)	39.887.735 (7,68)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.069.910 (5,76)	28.216.889 (5,83)	30.137.130 (5,94)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.281.104 (2,83)	13.667.051 (2,83)	15.301.391 (3,00)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.108.417 (0,87)	4.193.399 (0,86)	4.577.468 (0,90)
J	Informasi dan Komunikasi	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)	8.994.261 (1,86)	9.712.239 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.891 (1,51)	7.320.021 (1,51)	8.012.391 (1,58)
L	Real Estate	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.321.113 (0,91)	4.290.183 (0,89)	4.397.865 (0,88)
M,N	Jasa Perusahaan	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.600 (0,19)	911.510 (0,19)	960.338 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.951.124 (1,68)	8.108.290 (1,67)	8.727.045 (1,71)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	6.780.283 (1,46)	7.036.310 (1,45)	7.244.720 (1,53)	7.420.372 (1,53)	7.679.667 (1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.691.435 (0,58)	2.864.486 (0,59)	3.404.048 (0,72)	3.861.218 (0,80)	4.048.704 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.634.733 (0,56)	2.665.592 (0,55)	2.851.225 (0,56)
<b>PDRB</b>		<b>464.694.427</b> <b>(100,00)</b>	<b>486.712.237</b> <b>(100,00)</b>	<b>472.393.329</b> <b>(100,00)</b>	<b>484.438.884</b> <b>(100,00)</b>	<b>506.158.907</b> <b>(100,00)</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.16**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal

melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

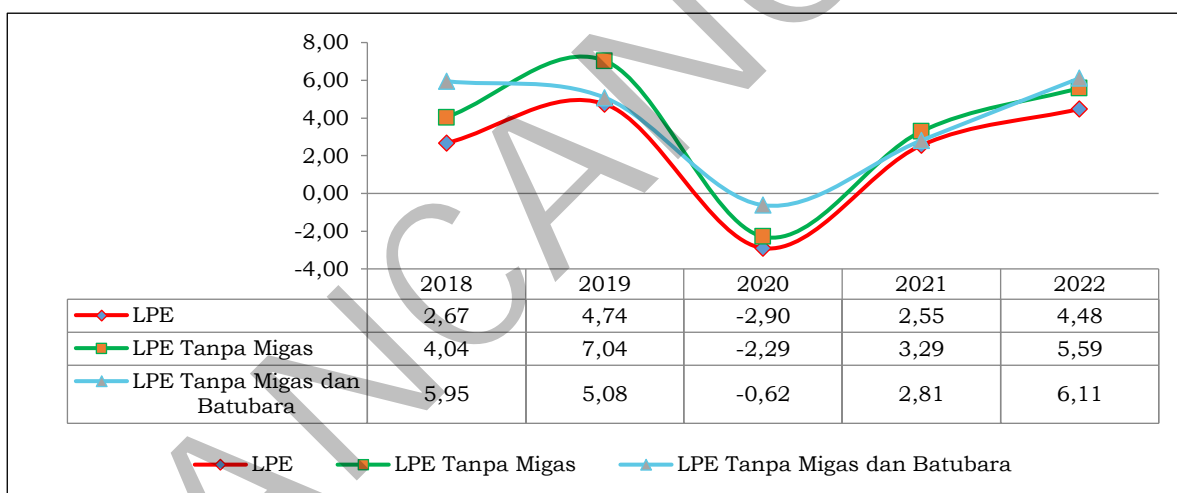
Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2021 kontribusinya hanya sebesar 5,42 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.17**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk

akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

RANCANGAN

Tabel II.11

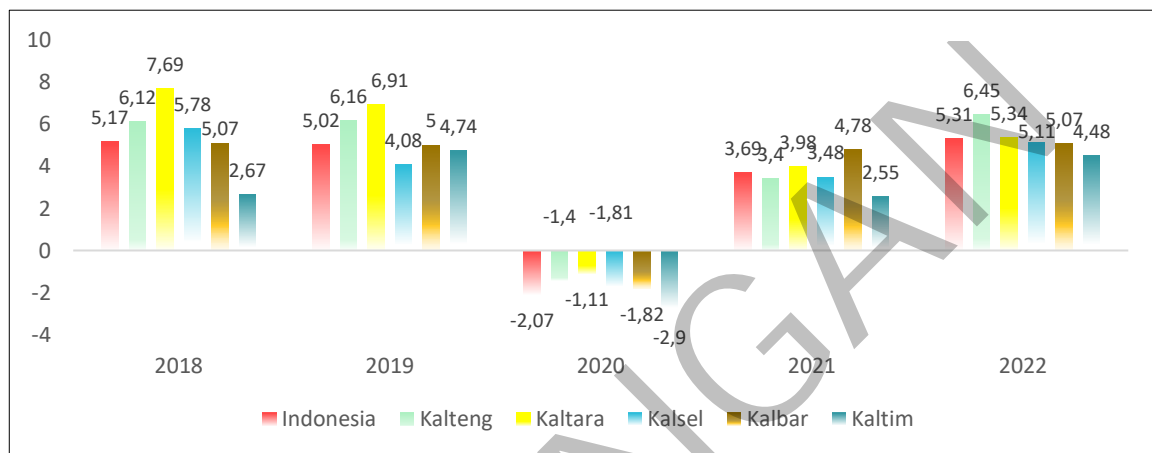
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	3,91	(0,98)	-0,08	1,96
B	Pertambangan dan Penggalian	1,07	6,89	(4,61)	2,28	3,49
C	Industri Pengolahan	0,69	0,03	(2,99)	2,45	3,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	8,67	11,47	2,34	3,84
E	Pengadaan Air	3,22	4,84	5,33	4,24	7,58
F	Konstruksi	7,91	5,71	(0,87)	3,94	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	5,24	0,57	4,24	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	5,80	2,34	(6,58)	2,91	11,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,70	6,37	(5,34)	2,07	9,16
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	6,86	7,56	7,86	7,98
K	Jasa Keuangan	4,05	3,17	2,47	2,55	9,46
L	<i>Real Estate</i>	4,83	2,12	0,69	(0,72)	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	4,96	2,00	(3,14)	2,46	5,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,92	(3,83)	1,98	7,63
P	Jasa Pendidikan	7,73	3,78	2,96	2,42	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	6,43	20,22	13,43	4,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,02	7,91	(3,01)	1,17	6,96
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>2,67</b>	<b>4,74</b>	<b>(2,90)</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.18**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)**

**Tabel II.12**

**Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.584,20	109.767,66	111.183,75	115.437,96	125.598,38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.958,20	3.238,86	3.250,60	3.407,57	3.689,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.760,62	26.298,93	26.257,95	27.422,86	31.283,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.474,79	187.939,11	188.195,89	210.237,72	232.491,11
5	Perubahan Inventori	1.613,95	722,91	1.238,58	383,59	401,29
6	Net Ekspor Barang & Jasa	331.106,93	324.190,59	277.049,17	338.268,63	527.869,49
	<b>PDRB</b>	<b>635.498,68</b>	<b>652.158,06</b>	<b>607.320,78</b>	<b>695.158,33</b>	<b>921.332,98</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel II.13**  
**Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,26	16,79	18,30	16,61	13,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,50	0,54	0,49	0,40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,73	4,03	4,32	3,94	3,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,25	28,72	30,97	30,24	25,24
5	Perubahan Inventori	0,25	0,11	0,20	0,06	0,04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	52,10	49,71	45,67	48,66	57,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

**Tabel II.14**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,15	(0,48)	1,20	3,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,57	6,77	(0,99)	0,30	3,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,91	7,70	(1,95)	2,03	8,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,54	4,79	(1,06)	8,03	5,47
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	0,17	5,17	(4,60)	5,99	4,05
<b>PDRB</b>		<b>2,64</b>	<b>4,74</b>	<b>-2,90</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

**Tabel II.15**  
**Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021 (Miliar Rp)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021
1	Paser	34.362,05	35.734,75	34.711,82	36.588,97
2	KUBAR	20.108,76	21.253,83	20.646,51	21.509,22
3	KUKAR	121.509,48	126.272,37	120.952,01	124.178,50
4	KUTIM	88.582,49	95.815,41	92.846,68	91.906,13
5	Berau	26.769,40	28.275,57	27.337,54	28.802,74
6	PPU	6.590,45	6.762,58	6.604,22	6.492,34
7	MAHULU	1.675,32	1.767,80	1.763,74	1.786,10
8	Balikpapan	79.807,11	83.793,41	83.010,71	86.796,99
9	Samarinda	43.323,57	45.491,36	45.039,69	46.282,12
10	Bontang	41.316,22	40.427,70	39.319,93	39.949,43

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2021 mencapai Rp 124,18 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 91,91 triliun dan Rp 86,80 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

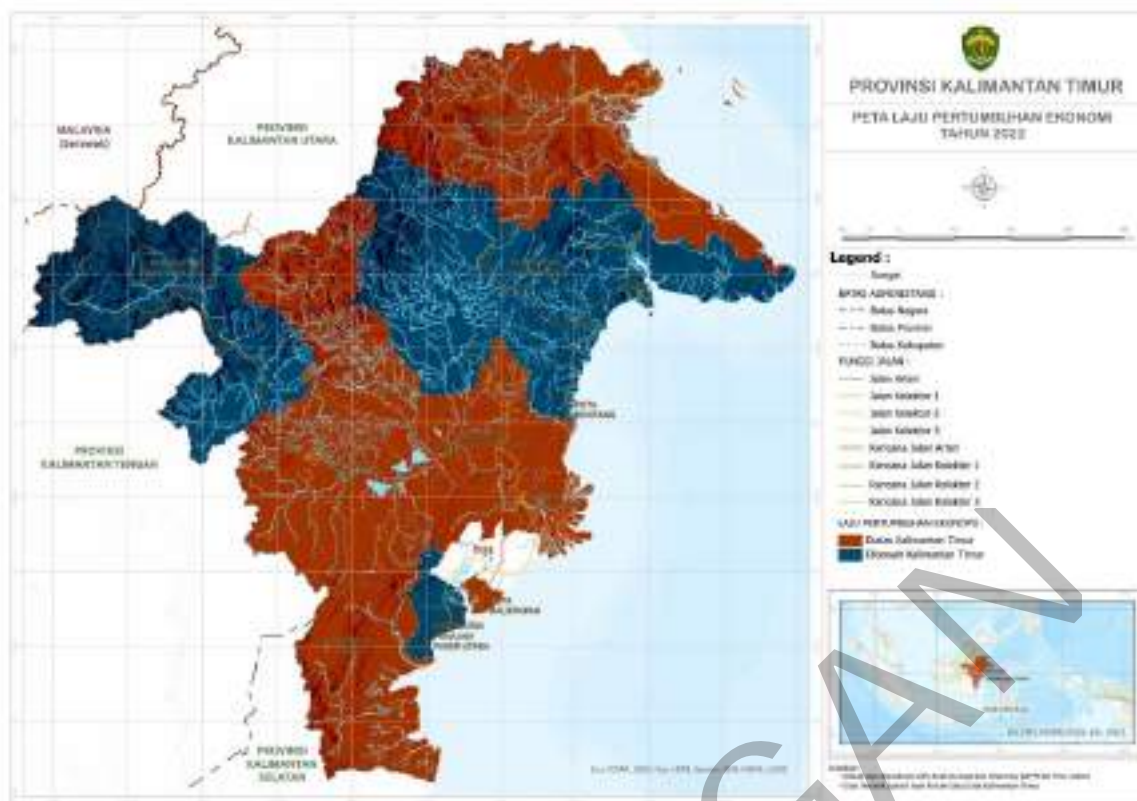
**Tabel II.16**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021 (%)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021
1	Paser	3,69	3,99	-2,86	5,41
2	KUBAR	5,06	5,69	-2,86	4,18
3	KUKAR	2,16	3,92	-4,21	2,67
4	KUTIM	2,38	8,17	-3,10	-1,01
5	Berau	2,07	5,63	-3,32	5,36
6	PPU	1,28	2,61	-2,34	-1,69
7	MAHULU	5,40	5,52	-0,23	1,27
8	Balikpapan	4,97	4,99	-0,93	4,56
9	Samarinda	4,96	5,00	-0,99	2,76
10	Bontang	-4,08	-2,15	-2,74	1,60

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

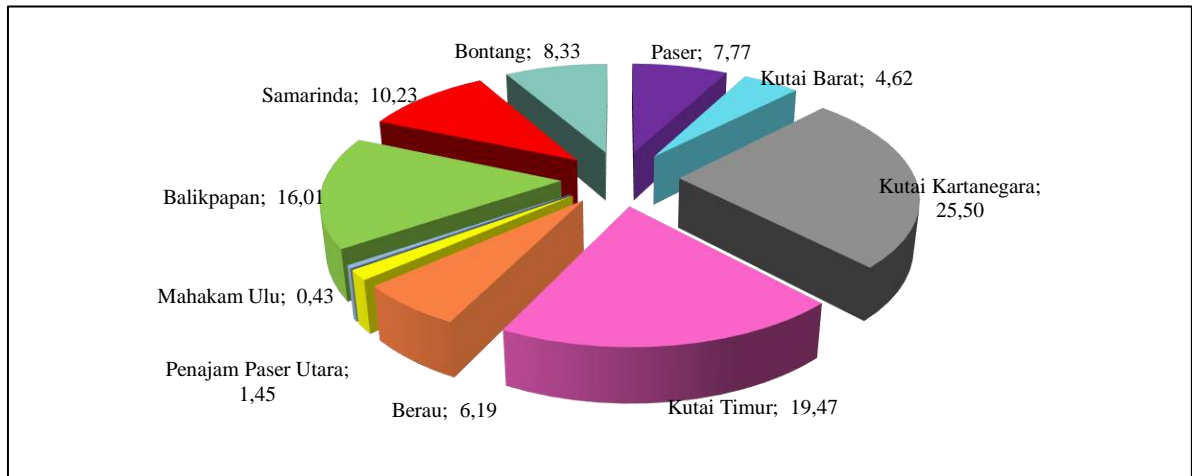
Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan negatif adalah Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar minus 1,01 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara minus 1,69 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan positif dengan Kabupaten Paser memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 5,41 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.19**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021**

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 25,50 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19,47 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 16,01 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 11 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.20**  
**Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021 (%)**

Pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,72 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

**Tabel II.17**  
**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral**  
**Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2021**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	70,95	Pertanian	12,02	Industri	5,28
KUBAR	Pertambangan	49,15	Pertanian	14,97	Konstruksi	10,84
KUKAR	Pertambangan	64,10	Pertanian	13,46	Konstruksi	7,52
KUTIM	Pertambangan	79,72	Pertanian	8,24	Industri	3,43
Berau	Pertambangan	56,43	Pertanian	11,64	Perdagangan	6,51
PPU	Pertambangan	23,51	Pertanian	22,98	Industri	16,21
MAHULU	Pertanian	74,72	Konstruksi	6,84	Pertambangan	6,63
Balikpapan	Industri	46,63	Konstruksi	17,56	Transportasi	9,17
Samarinda	Konstruksi	20,75	Perdagangan	16,62	Pertambangan	12,51
Bontang	Industri	79,41	Konstruksi	6,49	Perdagangan	3,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 70,95 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki

kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,10 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

**Tabel II.18**  
**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran**  
**Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2021**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	66,72	PMTB	17,83	K. Ruta	12,24
KUBAR	Net Ekspor	42,52	PMTB	34,53	K. Ruta	15,20
KUKAR	Net Ekspor	49,72	PMTB	36,23	K. Ruta	11,12
KUTIM	Net Ekspor	72,11	PMTB	19,57	K. Ruta	6,32
Berau	Net Ekspor	64,98	PMTB	19,06	K. Ruta	11,81
PPU	PMTB	40,51	K. Ruta	40,36	K. Pemerintah	10,98
MAHULU	Net Ekspor	32,41	PMTB	30,18	K. Ruta	24,08
Balikpapan	PMTB	42,57	Net Ekspor	29,12	K. Ruta	24,68
Samarinda	K. Ruta	45,16	PMTB	40,87	K. Pemerintah	12,87
Bontang	Net Ekspor	73,79	PMTB	13,14	K. Ruta	10,66

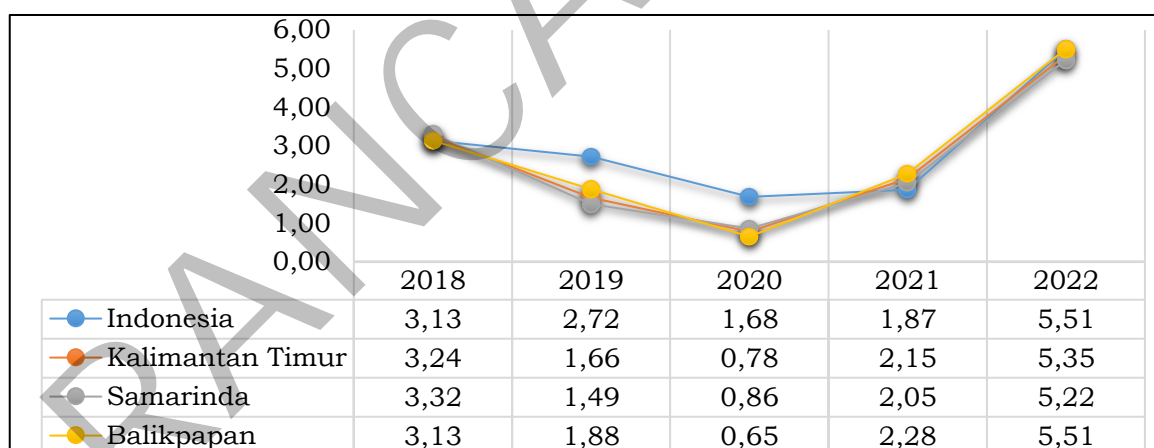
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada tahun 2021, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 40,51 persen dan 42,57 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 45,16.

Kabupaten/kota yang porsi terbanyak merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 73,79 persen. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 72,11 persen dan 66,72 persen. Sementara itu, Kabupaten Kutai Barat, Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 42,52 persen, 64,98 persen, 49,72 persen dan 32,41 persen.

## B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.21**  
**Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan.



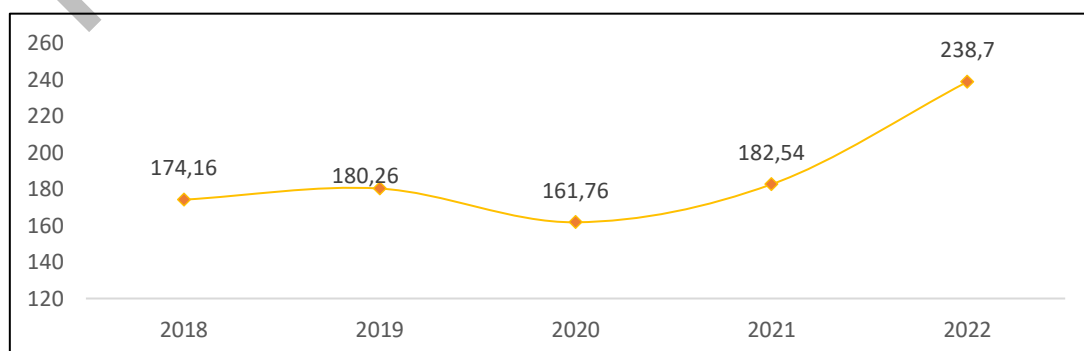
Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalinya kasus Covid-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 5,35 persen.

### C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 238,70 juta.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.22**  
**PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur**

**Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

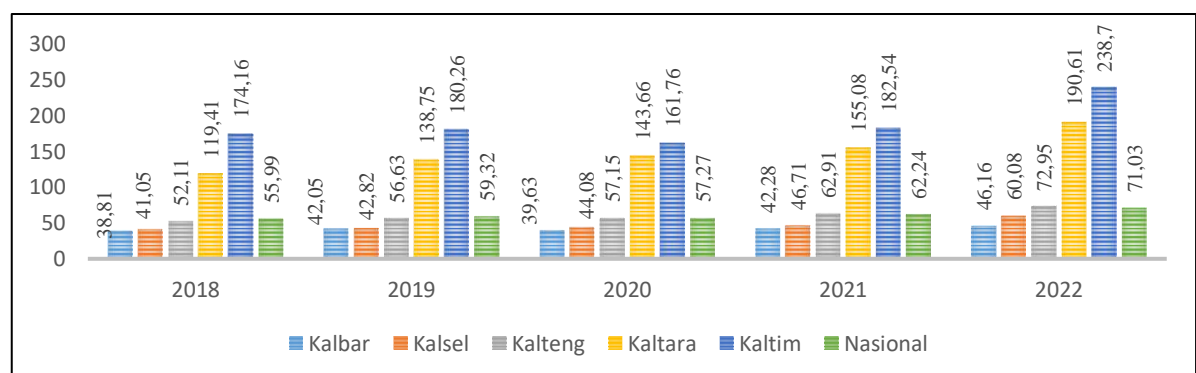
Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2021 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 320,44 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 301,40 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 241,70 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 55,84 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 85,58 juta.

**Tabel II.19**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota**  
**di Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Paser	171,64	173,34	157,20	194,51
2	KUBAR	192,10	195,40	158,05	184,46
3	KUKAR	210,47	212,76	204,50	241,70
4	KUTIM	353,74	367,11	268,81	301,40
5	Berau	166,27	173,83	143,66	170,29
6	PPU	55,70	57,76	50,79	55,84
7	MAHULU	95,32	102,45	85,37	90,16
8	Balikpapan	151,30	165,69	151,20	160,10
9	Samarinda	74,08	79,95	80,36	85,58
10	Bontang	337,45	327,06	311,88	320,44

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 238,70 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

**Gambar II.23**  
**PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan**  
**Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

**D. Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

**Tabel II.20**  
**Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp728.208/kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar 4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

**Tabel II.21**  
**Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan**  
**Menurut Daerah Tahun 2022**

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	69,33	Beras	73,30
2	Rokok Kretek Filter	11,14	Rokok Kretek Filter	14,24
3	Daging ayam ras	5,01	Telur ayam ras	4,35
4	Telur ayam ras	4,66	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,30
5	Mie Instan	3,50	Mie Instan	3,19
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,94	Daging Ayam Ras	2,99
7	Gula Pasir	2,18	Gula Pasir	2,61
8	Bawang Merah	1,92	Bawang merah	2,29
9	Cabe Rawit	1,84	Kembung	1,92
10	Tempe	1,65	Cabe Rawit	1,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

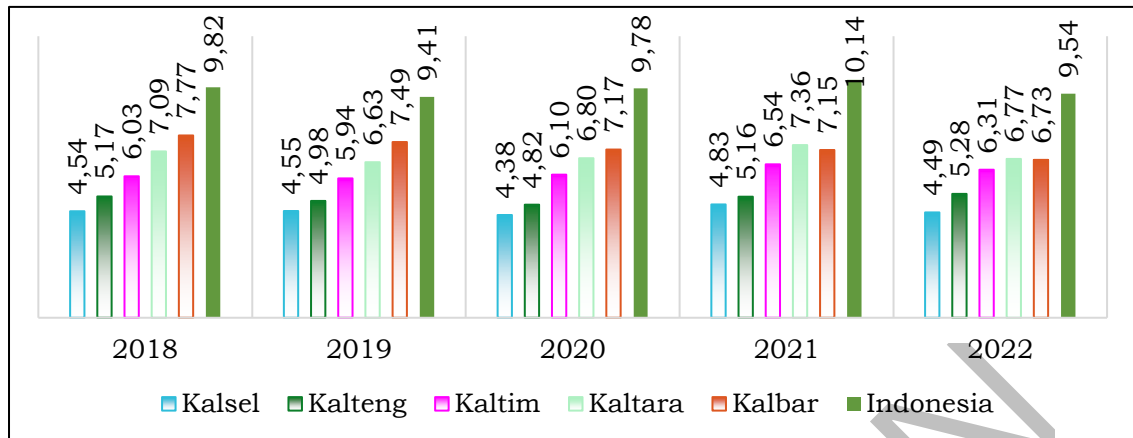
**Tabel II.22**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43
2	KUBAR	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20
3	KUKAR	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96
4	KUTIM	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28
5	Berau	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65
6	PPU	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25
7	MAHULU	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55
8	Balikpapan	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
9	Samarinda	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85
10	Bontang	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23

poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.24**  
**Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional**  
**Tahun 2018-2022**

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**Tabel II.23**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	25.140	25.450	26.770	27.560	27.020
2	KUBAR	13.490	13.450	13.780	15.380	15.380
3	KUKAR	56.560	56.340	58.420	62.360	62.870
4	KUTIM	33.020	35.310	36.980	37.780	36.840
5	Berau	11.330	11.620	12.300	13.620	13.310
6	PPU	11.760	11.520	11.930	12.130	11.590
7	MAHULU	3.250	3.190	3.260	3.180	3.100
8	Balikpapan	17.010	15.780	17.020	18.530	15.830
9	Samarinda	39.230	39.800	41.920	42.840	41.950
10	Bontang	8.100	7.470	7.910	8.410	8.390

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel II.24**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya**  
**Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah**  
**Tahun 2018-2022**

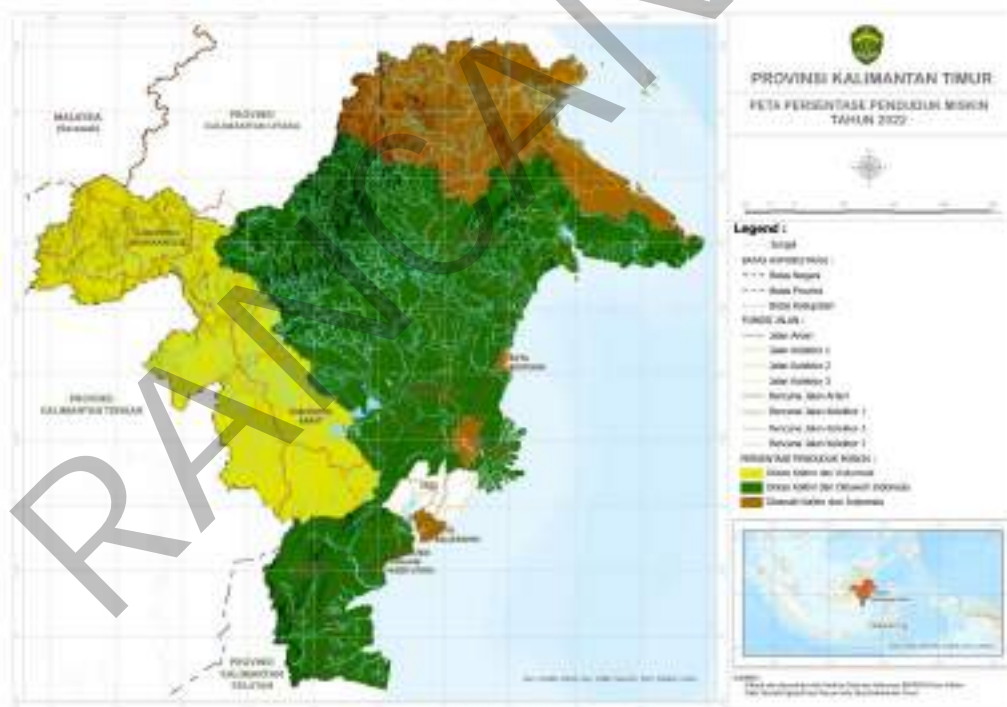
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Pada Tabel II.24 menggambarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat

menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.



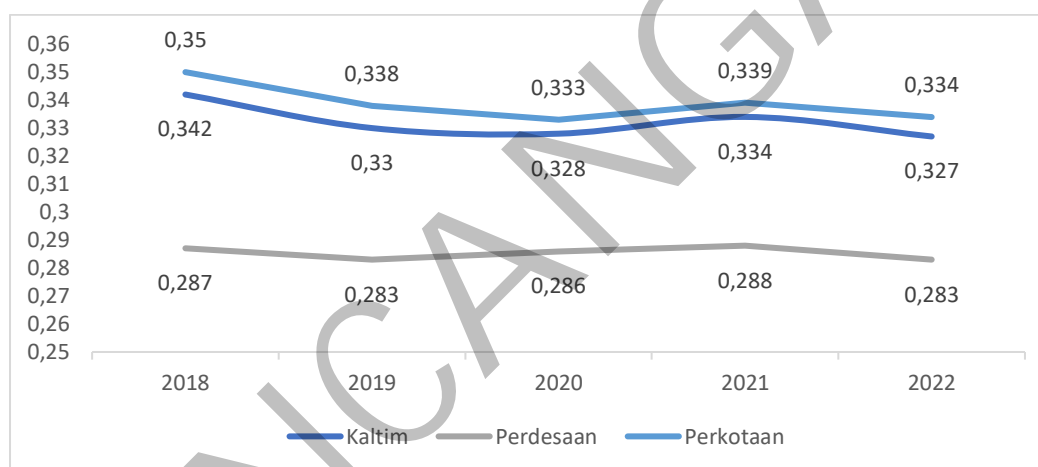
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.25**  
**Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022**

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir



mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.26**

### **Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

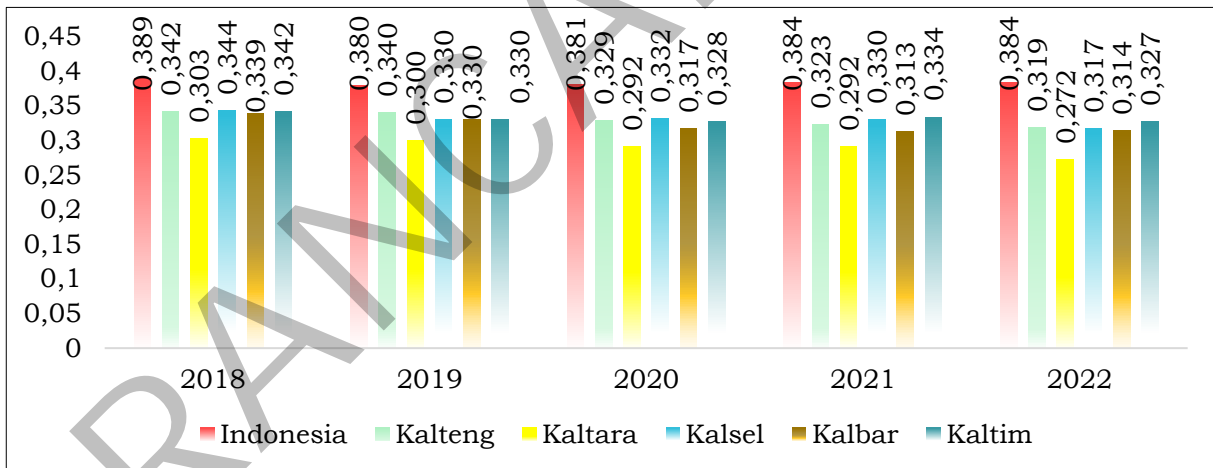
Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,352.

**Tabel II.25**  
**Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
2	KUBAR	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300
3	KUKAR	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
4	KUTIM	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
5	Berau	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
6	PPU	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
7	MAHULU	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288
8	Balikpapan	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
9	Samarinda	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
10	Bontang	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

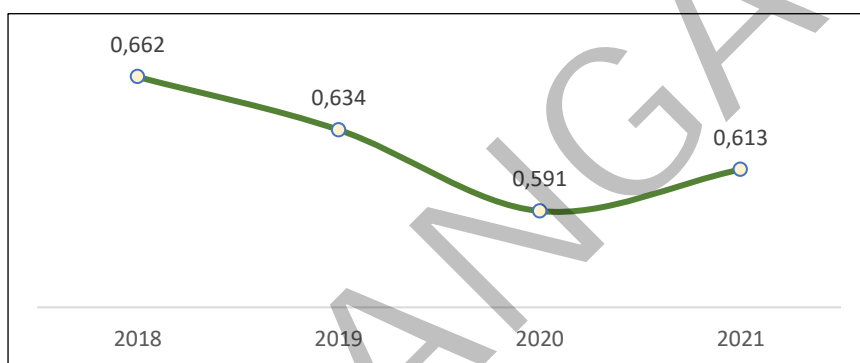


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.27**  
**Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022**

## E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2021 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,613.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

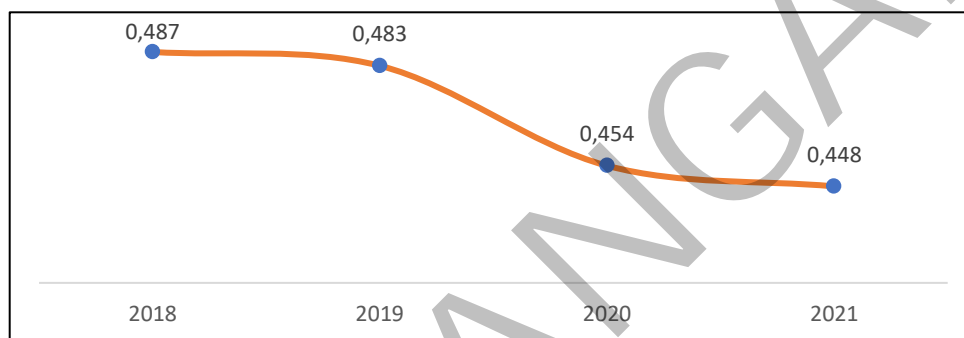
**Gambar II.28**  
**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**  
**Regional Kalimantan Tahun 2018-2021**

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2021, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 16,53 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 7,91 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi kedua

yakni mencapai 182,54 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 42,28 juta rupiah.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



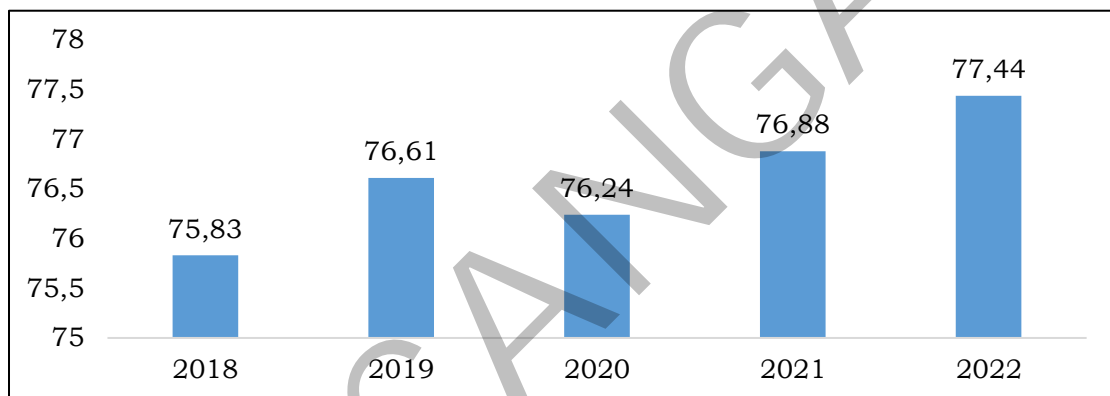
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.29**  
**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

## F. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.30**

### **Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

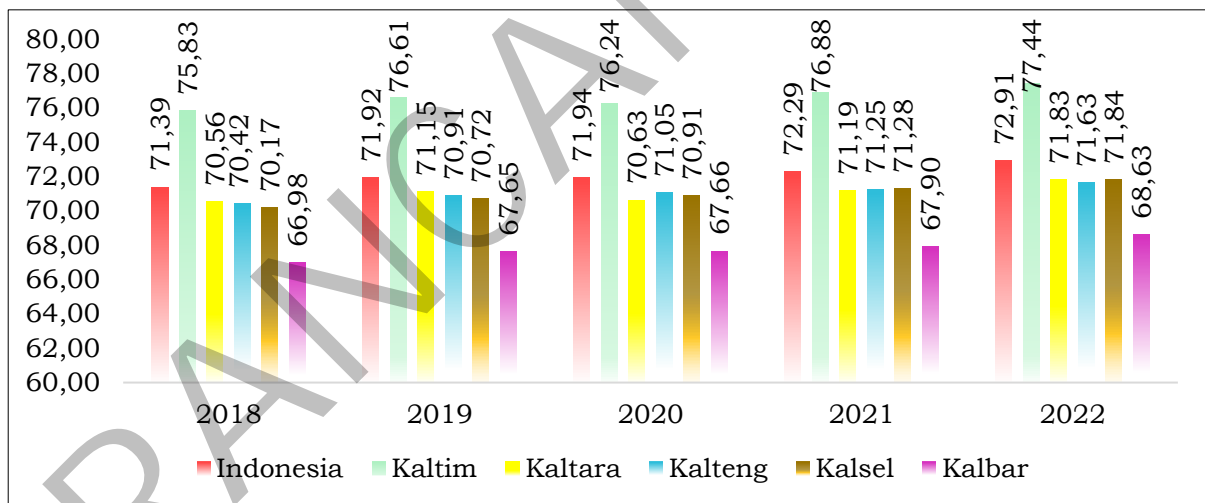
Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022. Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun 2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

**Tabel II.26**  
**Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
2	KUBAR	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
3	KUKAR	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
4	KUTIM	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35
5	Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74
6	PPU	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
7	MAHULU	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
8	Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
9	Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
10	Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 – 71,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



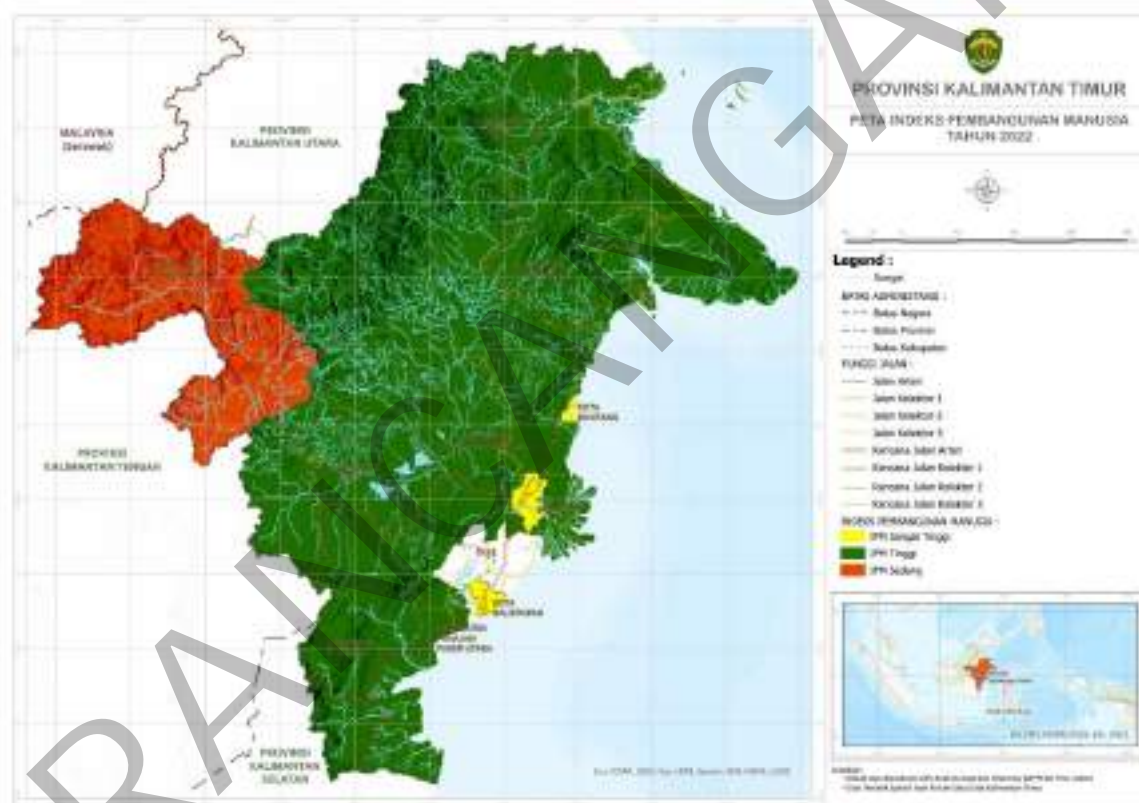
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.31**  
**Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia**

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh

karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.32**  
**Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022**

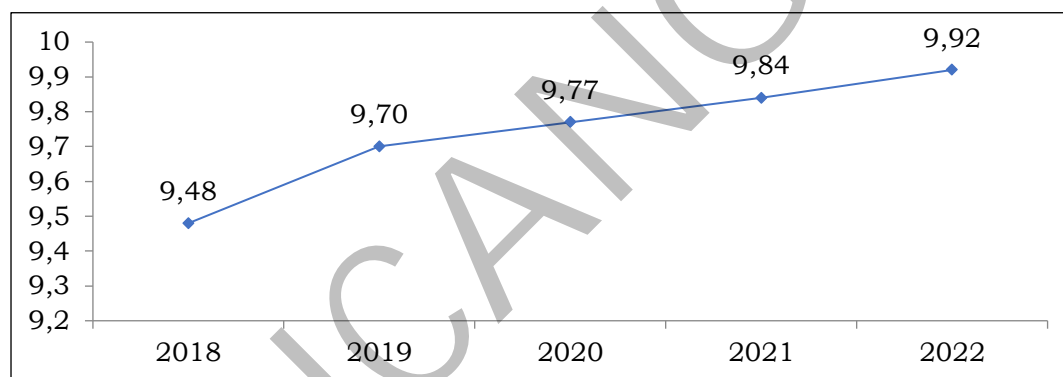
Pada tahun 2021 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki

status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

### 1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.33**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi di atas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan



hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

**Tabel II.27**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022 (tahun)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
2	KUBAR	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
3	KUKAR	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
4	KUTIM	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44
5	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
6	PPU	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
7	MAHULU	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
8	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
9	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
10	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

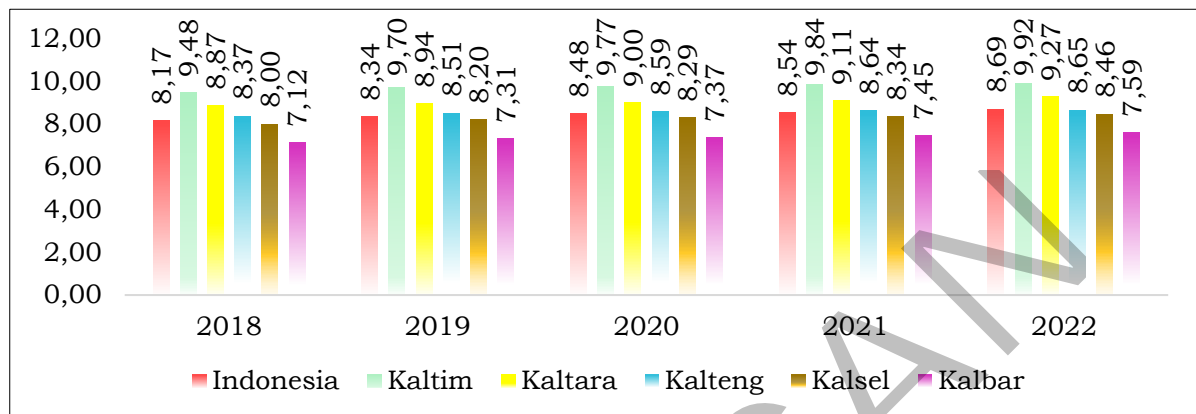
Seperti data yang tersaji pada Tabel II.27 diatas, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU, Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terlihat adanya trend kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

Dalam rangka pencapaian target rata-rata lama sekolah, maka perlu bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan program-program yang mempunyai relevansi satu sama lain serta menjadi daya ungkit terhadap pencapaian target rata-rata lama sekolah itu sendiri sehingga secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa

pencapaian target angka rata-rata lama sekolah merupakan upaya bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

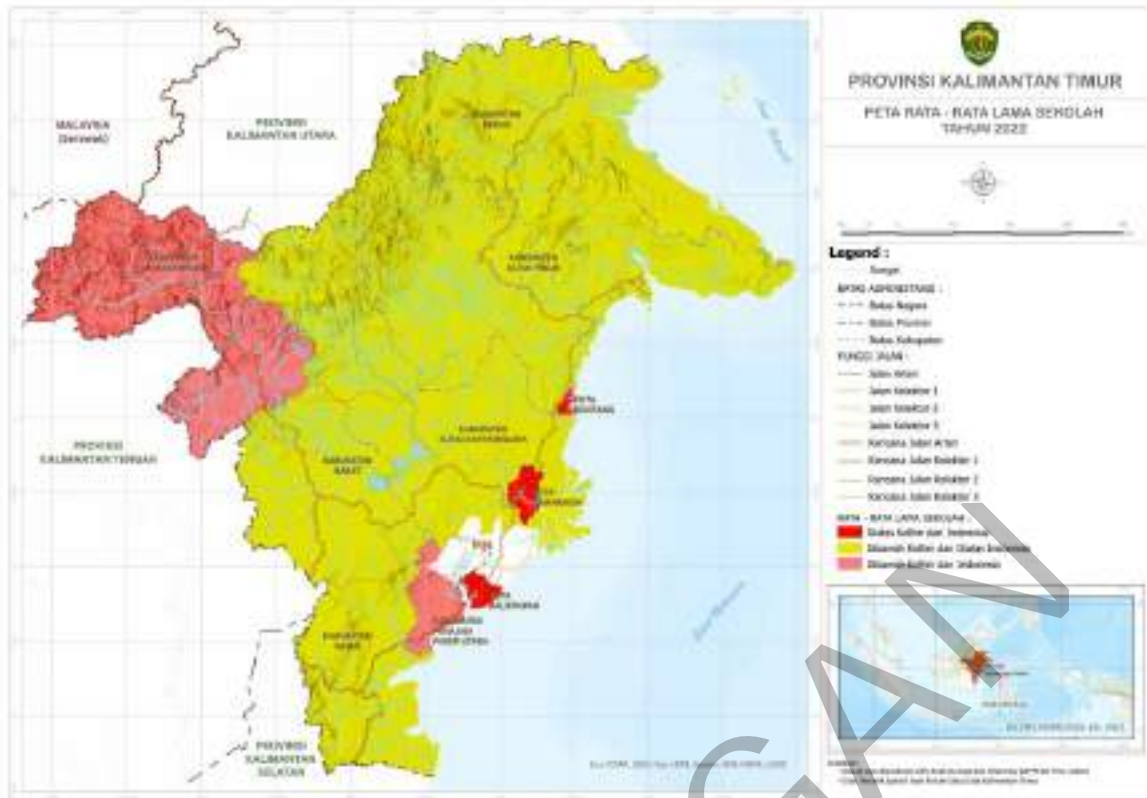
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.34**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2021 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

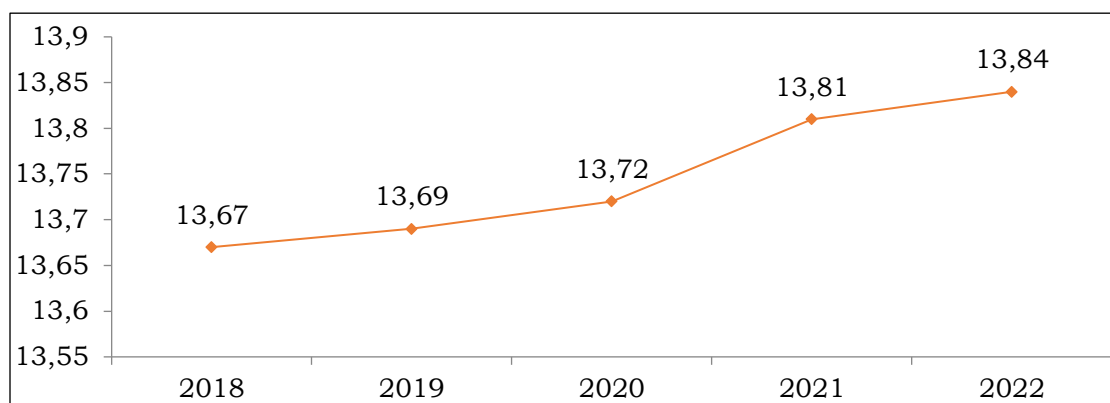


Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.35**  
**Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022**

## 2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Namun apabila dilihat pada capaian harapan lama sekolah di setiap kabupaten/kota maka pemerintah juga perlu untuk memberikan perhatian secara optimal khususnya pada kabupaten/kota yang harapan lama sekolahnya masih berada dibawah provinsi seperti: Mahulu, PPU, Kutim, Kubar, Bontang, Paser, Berau dan Kukar yang masih mempunya harapan lama sekolah dibawah rata-rata Provinsi yaitu sebesar 13,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.36**  
**Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

**Tabel II.28**  
**Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)**

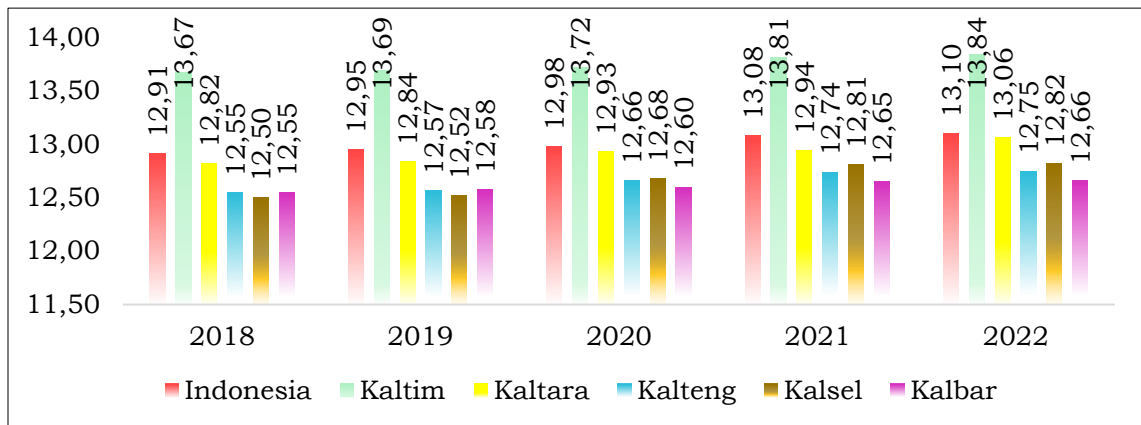
No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27
2	KUBAR	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09
3	KUKAR	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63
4	KUTIM	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00
5	Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35
6	PPU	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70
7	MAHULU	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62
8	Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23
9	Samarinda	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10
10	Bontang	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami trend kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2017-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.37**  
**Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2021 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



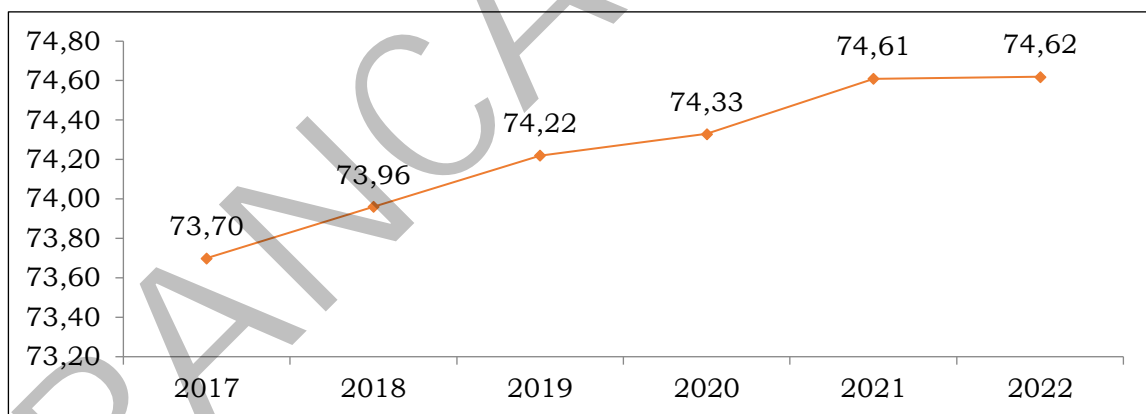
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.38**  
**Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022**

### 3) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambar upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.39**

#### **Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten

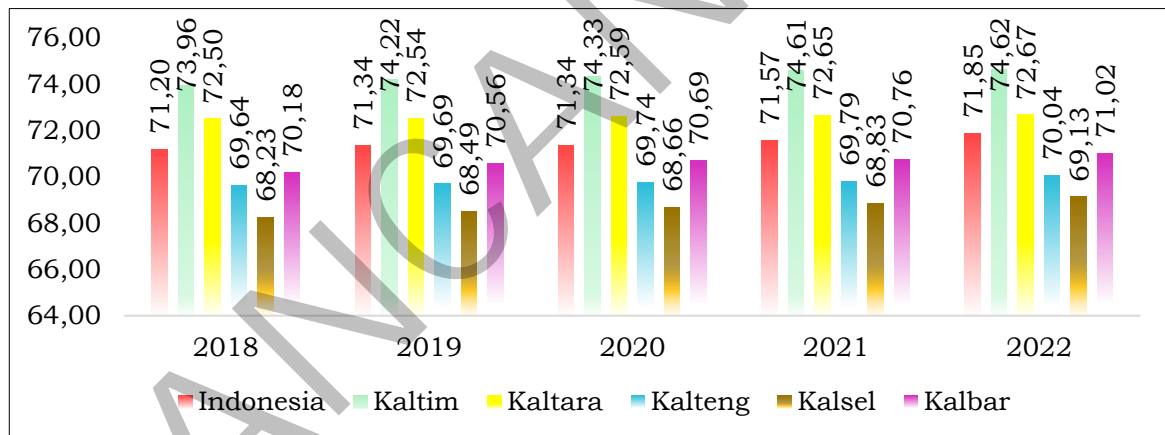
Penajam Paser Utara pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

**Tabel II.29**  
**Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2022 (tahun)**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	72,05	72,28	72,52	72,62	72,88	72,89
2	KUBAR	72,37	72,57	72,79	72,86	73,10	73,10
3	KUKAR	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64	72,65
4	KUTIM	72,51	72,76	73,03	73,16	73,46	73,47
5	Berau	71,44	71,68	71,94	72,06	72,32	72,32
6	PPU	70,82	71,05	71,30	71,41	71,68	71,71
7	MAHULU	71,25	71,56	71,90	72,10	72,33	72,35
8	Balikpapan	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76	74,78
9	Samarinda	73,71	73,93	74,17	74,27	74,54	74,56
10	Bontang	73,72	73,94	74,18	74,28	74,55	74,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.40**  
**Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia**  
**Tahun 2018-2022**

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.





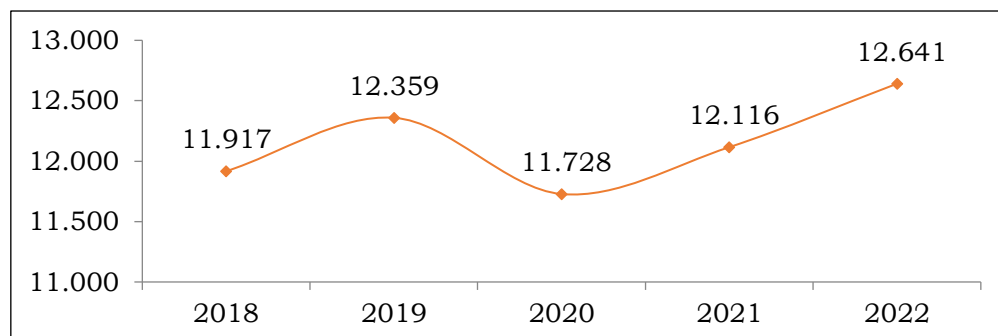
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.41**

### **Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022**

#### **4) Pengeluaran Per Kapita D disesuaikan**

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita D disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita D disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2021, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,12 juta per tahun, atau naik Rp 388 ribu dibandingkan tahun 2020.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.42**

### **Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Ribu Rp)**

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 16.765 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 7.802 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2021.

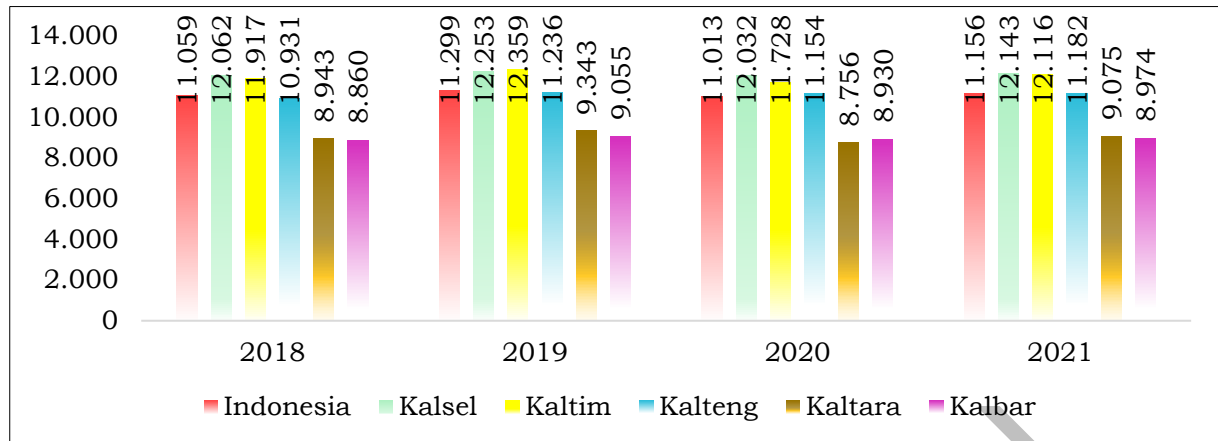
**Tabel II.30**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	10.280	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
2	KUBAR	9.532	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
3	KUKAR	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
4	KUTIM	10.273	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
5	Berau	11.843	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
6	PPU	11.126	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
7	MAHULU	7.364	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215
8	Balikpapan	14.254	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
9	Samarinda	14.175	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
10	Bontang	16.271	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327
	Kalimantan Timur	11.612	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2021, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar

kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

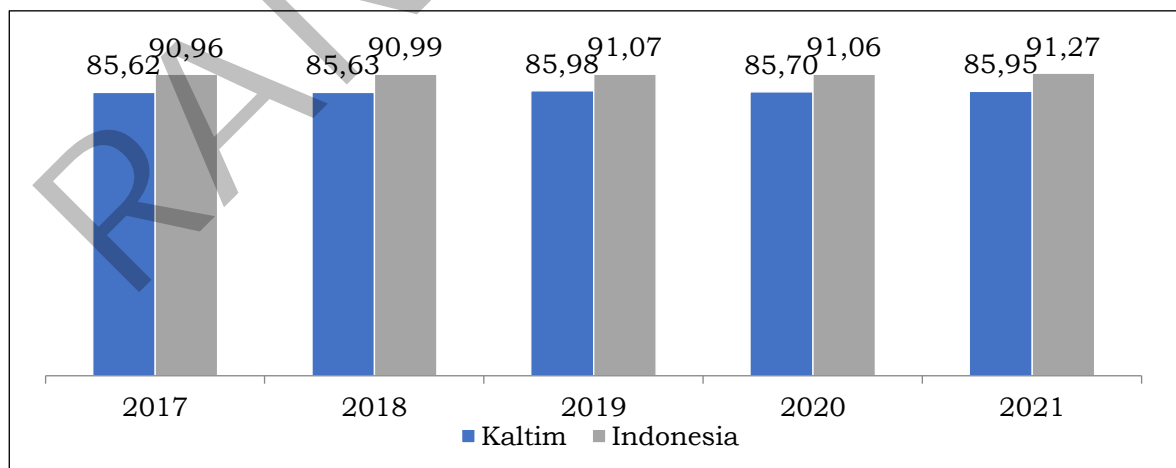


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.43**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**  
**Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)**

### G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.44**  
**Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2016-2021 (tahun)**

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu empat tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi di tahun 2019 sebesar 85,98. Dan capaian terakhir pada tahun 2021 Namun menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 85,95. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2021 sebesar 10,23 tahun sedangkan perempuan 9,24 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran perkapita untuk Laki-laki sebesar 18,56 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,16 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

**Tabel II.31**  
**Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender**

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,79	76,51
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,80	13,88
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,23	9,42
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	18,56	7,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

**Tabel II.32**  
**Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	69,78	70,64	71,41	71,15	71,19
2	KUBAR	83,30	83,52	83,84	83,87	84,28

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
3	KUKAR	78,54	78,83	79,14	78,90	79,12
4	KUTIM	75,48	76,03	76,51	76,26	76,40
5	Berau	87,77	87,92	87,93	87,61	87,76
6	PPU	86,31	86,34	86,22	86,39	86,57
7	MAHULU	79,82	80,18	80,89	80,98	81,65
8	Balikpapan	89,74	89,76	89,71	89,65	89,83
9	Samarinda	89,26	89,42	89,41	89,27	89,27
10	Bontang	86,44	86,61	86,72	86,87	87,12
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>85,62</b>	<b>85,63</b>	<b>85,98</b>	<b>85,70</b>	<b>85,95</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

## H. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel II.33**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)**

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67
2	KUBAR	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34
3	KUKAR	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76
4	KUTIM	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78
5	Berau	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48
6	PPU	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85
7	MAHULU	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43
8	Balikpapan	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62
9	Samarinda	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54
10	Bontang	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>56,64</b>	<b>57,53</b>	<b>65,65</b>	<b>65,54</b>	<b>66,64</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan capaian 56,64 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,64. Masih rendahnya indeks

pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,37 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,56 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 43,56 persen.

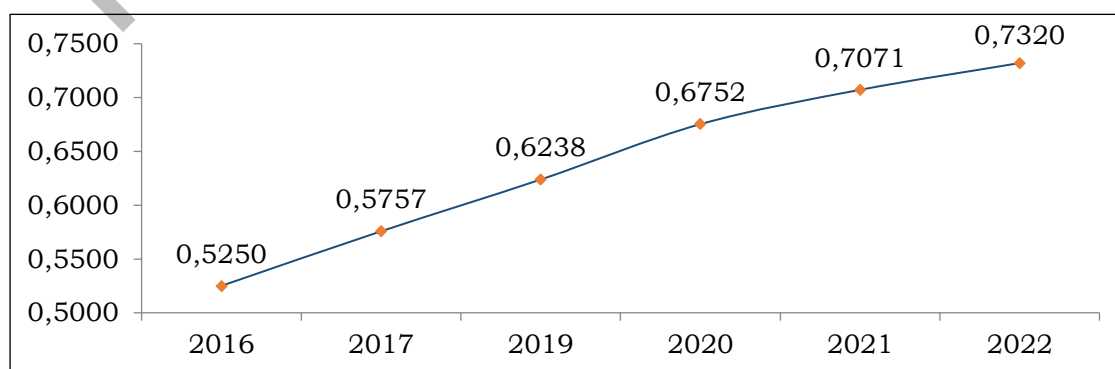
Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,43 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,85 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

### I. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah mencapai mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.45**

### Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2022

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

**Tabel II.34**  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017 - 2022**

No	Kab/Kota	2017	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
2	KUBAR	0,5233	0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
3	KUKAR	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
4	KUTIM	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305
5	Berau	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261
6	PPU	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769
7	MAHULU	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>0,5757</b>	<b>0,6238</b>	<b>0,6752</b>	<b>0,7071</b>	<b>0,7320</b>

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

**Tabel II.35**  
**Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	17	76	46	0	0
2	KUBAR	32	75	77	6	0
3	KUKAR	46	73	74	0	0
4	KUTIM	18	61	58	2	0
5	Berau	11	41	47	1	0
6	PPU	12	15	3	0	0
7	MAHULU	0	8	34	8	0
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>136</b>	<b>349</b>	<b>339</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2022

#### J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

**Tabel II.36**  
**Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	29,65	20,69
Pendidikan	72,20	68,71
Ketahanan Sosial Budaya	72,46	66,83
Warisan Budaya	37,44	46,63
Ekspresi Budaya	24,33	27,13
Budaya Literasi	60,09	54,29
Gender	55,88	58,55
<b>IPK</b>	<b>52,49</b>	<b>51,90</b>

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun



kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

### K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

**Tabel II.37**  
**Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Domain: Pendidikan	73,33	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>76,67</b>
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,92	10,72	11,24	11,28	
2. APK Sekolah Menengah	95,52	94,35	93,00	93,96	
3. APK Perguruan Tinggi	35,58	35,64	37,78	39,16	
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	67,50	<b>72,50</b>	<b>70,00</b>	<b>57,50</b>	<b>67,50</b>
1. Angka Kesakitan Pemuda	6,15	5,37	6,52	4,07	
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	1,37	0,93	1,37	1,67	
3. Pemuda Merokok	20,80	20,80	20,82	20,39	
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	7,99	2,52	25,55	
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	40,00	<b>35,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,40	0,24	0,48	0,70	
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,78	15,21	12,80	13,94	
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>	<b>30,00</b>
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	70,55	70,55	70,55	
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	4,87	4,87	4,87	
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	5,12	5,12	5,12	
Domain: Gender dan Diskriminasi	46,67	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>53,33</b>
1. Angka Perkawinan Usia Anak	13,90	11,54	12,36	11,79	
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,83	44,39	46,10	45,88	
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	24,21	25,29	27,96	24,48	
<b>Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim</b>	<b>53,50</b>	<b>54,83</b>	<b>56,33</b>	<b>54,83</b>	<b>52,50</b>
<b>Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia</b>	<b>49,33</b>	<b>51,50</b>	<b>52,67</b>	<b>51,00</b>	<b>53,33</b>

Sumber: BAPPENAS, 2022

Ket: \*) Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 2022

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja pada Aspek kesejahteraan Masyarakat di provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

RANCANGAN

Tabel II.38

## Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	-	-	15,04	15,04	15,13	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,92	0,96	1,03	1,06	10,47	
3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)					16,34	
4	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan Non Migas dan Batubara terhadap PDRB (%)			7,46	8,25	7,97	
5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,55	0,56	0,63	0,55	0,43
6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,30	0,31	0,33	0,37	0,33	0,27
7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,50	4,34	4,33	4,93	4,97	4,21
8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,45	1,48	1,52	1,67	1,56	1,28
9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,16	1,17	1,12	1,15	1,04	0,81
10	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,48	9,70	9,77	9,84	9,92
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,67	13,69	13,72	13,81	13,84
12	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,70	73,96	74,22	74,33	74,61	74,62

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Urusan Wajib

#### A. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

**Tabel II.39**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Angka Partisipasi Sekolah</b>					
7-12	99,76	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,21	99,07	98,90	98,75
16-18	81,55	82,07	81,88	82,10	81,43
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	108,02	106,84	105,75	105,26	105,21
SLTP	92,57	91,03	92,17	92,03	91,47
SLTA	96,08	94,96	95,23	95,52	95,09
<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	98,40	98,41	98,44	98,36	98,45
SLTP	79,68	80,42	81,28	81,30	82,65
SLTA	68,43	68,55	69,00	69,29	69,10

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang

kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah

mengambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

**Tabel II.40**  
**Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.652	347.886	22.323	15,58	210,84
Swasta	268	63.435	3.546	17,89	252,73
MI	133	30.179	2.194	13,76	226,91
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	453	127.778	8.593	14,87	285,86
Swasta	233	32.664	2.247	14,54	147,80
MTs	170	31.829	3.027	10,52	187,23
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	143	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	90	12.905	963	13,40	150,06
MA	80	10.890	1.565	6,96	136,13
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	131	12.905	963	13,40	150,06

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2021, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

**Tabel II.41**  
**Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...**

KABUPATEN/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN									TOTAL KESELURUHAN
	SMA			SMK			SLB			
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	15	4	19	8	6	14	1	0	1	34
Kab. Kutai Barat	17	5	22	7	7	14	1	0	1	37
Kab. Kutai Kartanegara	35	17	52	17	27	44	1	4	5	101
Kab. Kutai Timur	22	2	24	13	12	25	1	2	3	52
Kab. Mahakam Ulu	4	3	7	0	2	2	1	0	1	10
Kab. Paser	13	4	17	4	8	12	1	0	1	30
Kab. Penajam Paser Utara	7	3	10	6	4	10	1	0	1	21
Kota Balikpapan	9	19	28	6	27	33	1	3	4	65
Kota Bontang	3	8	11	4	9	13	1	5	6	30
Kota Samarinda	18	25	43	22	29	51	2	9	11	105
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>90</b>	<b>233</b>	<b>87</b>	<b>131</b>	<b>218</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>485</b>

**Tabel II.42**  
**Jumlah Peserta Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...**

KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK									TOTAL KESELURUHAN
	SMA			SMK			SLB			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
Kab. Berau	3445	3925	7370	2012	1468	3480	119	63	182	11032
Kab. Kutai Barat	2177	2366	4543	1784	1319	3103	76	35	111	7757
Kab. Kutai Kartanegara	7614	9194	16808	8594	5178	13772	227	106	333	30913
Kab. Kutai Timur	3269	4036	7305	4408	2880	7288	101	50	151	14744
Kab. Mahakam Ulu	654	611	1265	81	64	145	4	2	6	1416
Kab. Paser	2749	3072	5821	2697	1758	4455	41	25	66	10342
Kab. Penajam Paser Utara	1538	2243	3781	2542	1534	4076	73	39	112	7969
Kota Balikpapan	5023	7075	12098	10060	7333	17393	460	193	653	30144
Kota Bontang	1777	2744	4521	2748	1363	4111	172	58	230	8862
Kota Samarinda	7368	9524	16892	12538	10696	23234	459	268	727	40853
<b>TOTAL</b>	<b>35614</b>	<b>44790</b>	<b>80404</b>	<b>47464</b>	<b>33593</b>	<b>81057</b>	<b>1732</b>	<b>839</b>	<b>2571</b>	<b>164032</b>

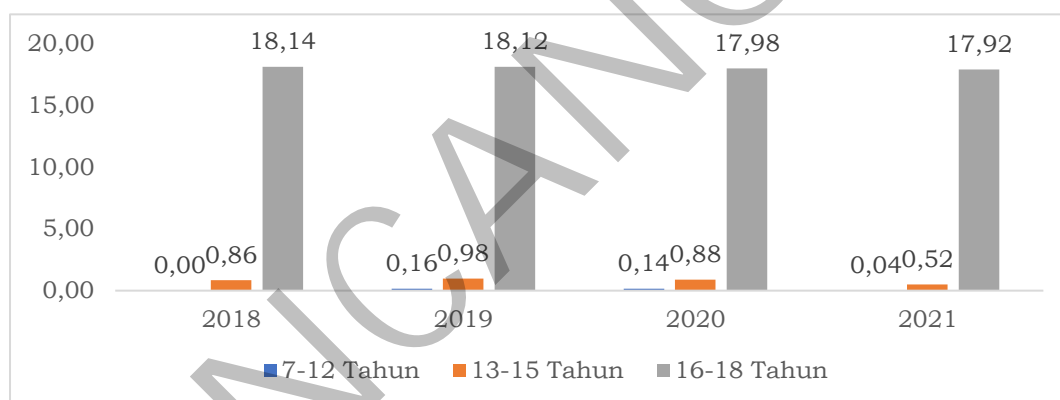


**Tabel II.43**  
**Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...**

KABUPATEN/KOTA	GURU									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	392	61	453	205	84	289	17	0	17	759
Kab. Kutai Barat	357	25	382	184	78	262	15	0	15	659
Kab. Kutai Kartanegara	885	136	1021	479	375	854	31	19	50	1925
Kab. Kutai Timur	440	15	455	323	140	463	17	7	24	942
Kab. Mahakam Ulu	96	5	101	0	21	21	2	0	2	124
Kab. Paser	360	33	393	218	102	320	17	0	17	730
Kab. Penajam Paser Utara	192	26	218	220	64	284	11	0	11	513
Kota Balikpapan	467	221	688	492	392	884	44	35	79	1651
Kota Bontang	132	173	305	190	117	307	23	24	47	659
Kota Samarinda	682	279	961	1014	366	1380	66	62	128	2469
<b>TOTAL</b>	<b>4003</b>	<b>974</b>	<b>4977</b>	<b>3325</b>	<b>1739</b>	<b>5064</b>	<b>243</b>	<b>147</b>	<b>390</b>	<b>10431</b>

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Sumber: BPS Kaltim, 2022

**Gambar II.46**  
**Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021 (persen)**

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 53 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2021, jumlah mahasiswa mencapai 96.613 dengan jumlah dosen sebanyak 4.246 orang.

**Tabel II.44**  
**Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	1.955	45.681
Swasta	48	2.291	50.932
Jumlah	53	4.246	96.613

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

## B. Kesehatan

### 1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017–2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan sudah mengalami penurunan.

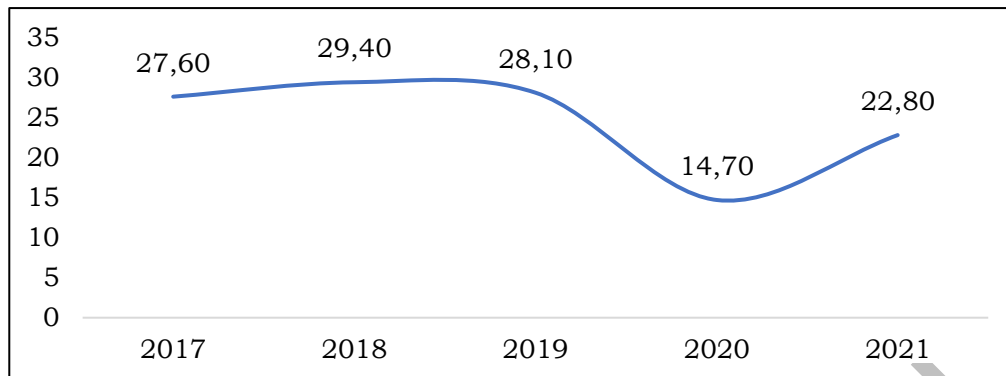
**Tabel II.45**  
**Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021 (Persen)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Paser	27,50	32,20	15,50	23,60
2	KUBAR	30,00	35,70	16,60	15,80
3	KUKAR	35,70	36,50	14,30	26,40
4	KUTIM	30,50	39,40	16,10	27,50
5	Berau	31,70	24,70	17,60	25,70
6	PPU	31,60	27,00	11,40	27,30
7	MAHULU	32,80	36,60	9,60	20,30
8	Balikpapan	23,80	14,00	13,30	17,60
9	Samarinda	26,30	24,70	11,90	21,60
10	Bontang	26,60	29,00	20,90	26,30

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2022

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021 masih tinggi yaitu

diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan yang masing-masing sudah mencapai 15,8 persen dan 17,6 persen.



Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.47**  
**Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021 berdasarkan Hasil Survei SSGI**

Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen tahun 2020 dari 36,62 persen yang diukur. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kaltim tercatat 22,8 persen yang berarti berada di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 24,4 persen.

Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 15 Rumah Sakit Umum, 6 Rumah Sakit Swasta, 28 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 221 terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten kota sudah merata. Dengan jumlah 59 Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki 2 RS.

Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

**Tabel II.46**  
**Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Umum	54	53	57	59
2	Rumah Sakit Swasta	19	19	22	22
3	RS Bersalin	15	9	7	10
4	Puskesmas	186	187	187	188
5	Puskesmas Pembantu	716	716	730	742
6	Pedagang Besar Farmasi	48	49	52	53
7	Apotek	637	704	759	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

**Tabel II.47**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Panajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>17</b>	<b>188</b>	<b>699</b>	<b>52</b>	<b>826</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

**Tabel II.48**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Dokter Umum	1.010	1.024	1.106	2.097
2	Dokter Gigi	309	314	320	411
3	Dokter Spesialis	503	597	649	768
4	Perawat	7.823	6.524	7.510	10.789

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

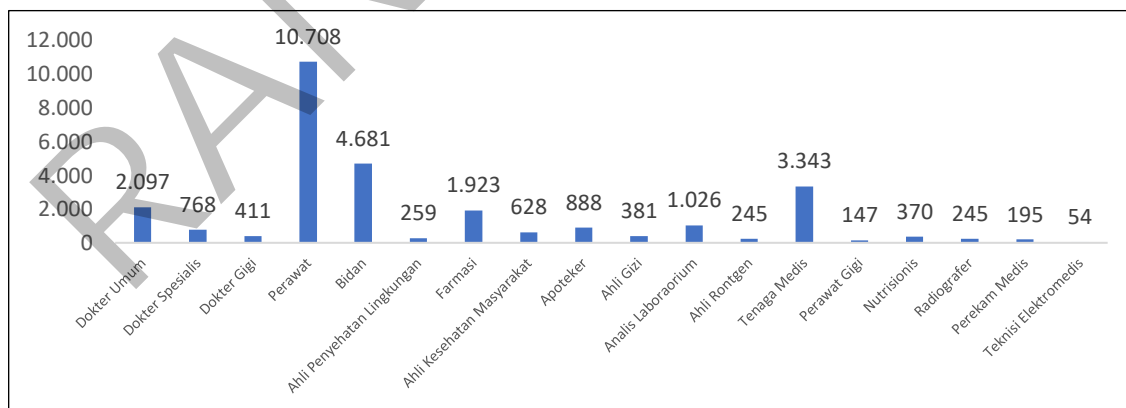
Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2017 sampai dengan 2022 penambahan Dokter umum bertambah 983 orang, Dokter gigi 91 orang, Dokter spesialis 90 orang, dan perawat sejumlah 4.127 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

**Tabel II.49**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858
5	Berau	108	23	25	665
6	Panajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
<b>JUMLAH</b>		<b>1.354</b>	<b>380</b>	<b>1.016</b>	<b>9.226</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

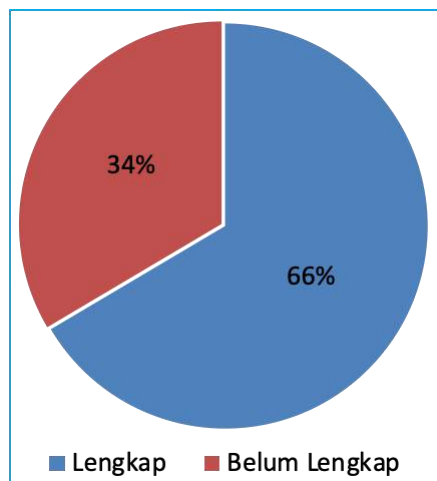
**Gambar II.48**  
**Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021**

**Gambar II.49**  
**Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89.47
2	Kutai Barat	19	4	15	21.05
3	Kutai Kartanegara	32	22	10	68.75
4	Kutai Timur	21	7	14	33.33
5	Berau	21	15	6	71.43
6	Penajam Paser Utara	11	5	6	45.45
7	Mahakam Hulu	6	1	5	16.67
8	Kota Balikpapan	27	26	1	96.30
9	Kota Samarinda	26	22	4	84.62
10	Kota Bontang	6	6	0	100.00
<b>Jumlah</b>		<b>188</b>	<b>125</b>	<b>63</b>	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.50**  
**Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**



Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

**Tabel II.50**  
**Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 2 jenis pelayanan SPM di bidang Pekerjaan Umum. Adapun capaian SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Penyediaan air minum curah kewenangan provinsi akan diupayakan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Terdapat lima SPAM Regional potensial yang tengah diupayakan pembangunannya. Dalam jangka waktu menengah, pembangunan akan diarahkan ke SPAM Regional sistem Kutai Kartanegara – Bontang yang akan mendapat suplai air baku dari Bendungan Marangkayu. Prioritas pembangunan selanjutnya akan diarahkan pada SPAM Regional sistem Kutai Timur – Bontang yang suplai air bakunya diperoleh dari lubang tambang (VOID) PT. Indominco dan Sungai Mayang. Pada tahun 2022, kedua prasarana air minum yang diprioritaskan tersebut tengah dalam proses finalisasi/penuntasan dokumen perencanaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kriteria kesiapan untuk pembangunan fisik antara lain dokumen studi kelayakan, detail desain, dokumen lingkungan dan dokumen pengadaan lahan.

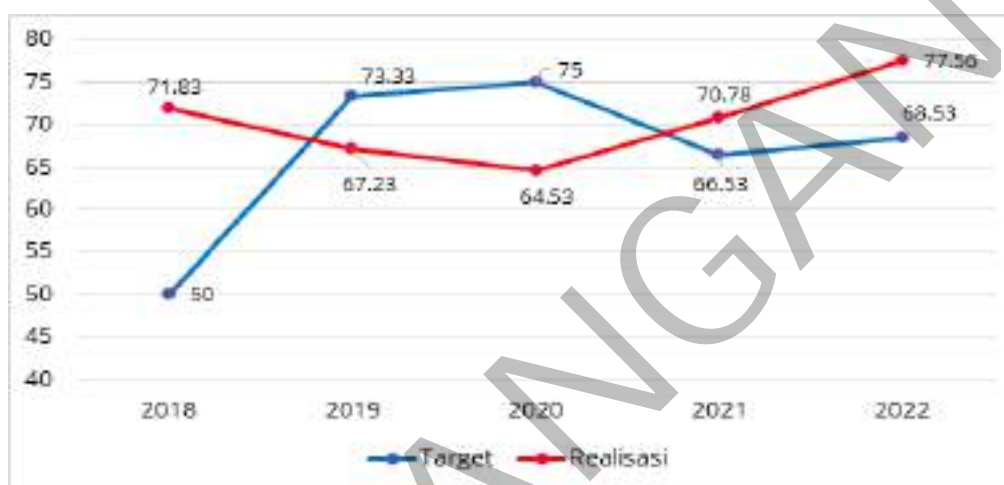
**Tabel II.51**  
**Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional**

No	Potensi Spam Regional	Area cakupan	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
1	KUKAR- Bontang	2 Kabupaten/Kota (5 Kec – 22 kelurahan)	Bendungan Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	Waduk Ex Tambang Indominco & S. Mayang	Up to 250 l/det
3	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	Bendali Sukarahmat	Up to 240 l/det
4	PPU – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	Up to 1.270 l/det
5	KUKAR – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Batu Lepek	5.000 l/det
6	Paser – PPU	2 Kab/Kota (2 Kec)	Bendung Telake	210 l/det

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Selain upaya pencapaian target SPM, Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum

layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui yang ditetapkan.



Sumber: DPUPRPERA Kaltim 2022 – Web SPM tahun 2022

**Gambar II.51**

**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2022 (%)**

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesnya baru mencapai 30.08%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Namun, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi seperti ini tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa resiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

**Tabel II.52**  
**Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 2022**

No	Kabupaten/Kota	Air minum layak (%)
1	Balikpapan	99.25
2	Penajam Paser Utara	30.08
3	Paser	70.14
4	Bontang	83.55
5	Kutai Timur	51.73
6	Berau	82.16
7	Samarinda	87.27
8	Kutai Kartanegara	70.85
9	Kutai Barat	86.02
10	Mahakam Ulu	64.13
<b>Provinsi</b>		<b>77.56</b>

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim,

rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu mensuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

## 2) Air Minum Layak perpipaan

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 68.98% dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024. Rentang antara target nasional dengan kondisi saat ini berkisar 2.77%.



**Gambar II.52**  
**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim**

## 3) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Kinerja layanan pengolahan air limbah domestik skala provinsi saat ini masih terbatas pada tahap awal/inisiasi. Telah tersusun dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) regional skala provinsi. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat enam zonasi layanan potensial, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai

Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara. Diperkirakan SPAL regional yang direncanakan dapat memberi layanan akses aman sanitasi untuk 766.571 jiwa pada tahun 2041. Tahun 2023, akan dilakukan studi kelayakan untuk zonasi SPAL regional di Kota Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel II.53**  
**Target Layanan Akses Aman Sanitasi (Air Limbah Regional) Kaltim**

Zona-area		Tahun 2020		Renc. Tahap 1 (s.d 2023)		Renc. Tahap 2 (s.d 2028)		Renc. Tahap 3 (s.d 2041)	
		%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
Zona 1	Bontang, Kutim, Kukar	1.8	1429	15	15709	50	58553	60	96009
Zona 2A	Samarinda-Kukar (Sambutan-Anggana)	1.4	815	15	12828	50	48724	60	83136
Zona 2B	Samarinda-Kukar (Palaran-Sanga-sanga)	0.7	366	15	11585	50	44656	60	78145
Zona 2C	Samarinda-Kukar (Samarinda Seberang-Loa Janan-Loa Janan Hilir)	2.51	3330	15	27968	50	106600	60	182989
Zona 3	Balikpapan-Kukar-PPU (Balikpapan Barat-Loa Janan-Samboja-Sepaku)	2.33	2977	15	25606	50	94369	60	151627
Zona 4	Balikpapan-Kukar (Balikpapan Utara-Samboja)	4.38	6649	15	28541	50	106458	60	174665
<b>TOTAL RENCANA LAYANAN</b>			<b>15,566</b>		<b>122,237</b>		<b>459,360</b>		<b>766,571</b>

Sumber: Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kaltim, 2020

Penanganan yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

**Tabel II.54**  
**Capaian Sektor Air Limbah s.d September 2022**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	718.423	91.40%	9.18%
Penajam Paser Utara	186.801	87.00%	3.70%
Paser	288.225	70.14%	0.71%
Bontang	185.928	94.93%	7.63%
Kutai Timur	424.743	89.10%	2.70%
Berau	263.150	88.45%	3.35%

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Samarinda	838.935	78.02%	7.95%
Kutai Kartanegara	753.862	75.02%	0.32%
Kutai Barat	170.871	59.82%	1.59%
Mahakam Ulu	35.274	52.50%	2.91%
<b>Kaltim 2022 (s.d September)</b>	<b>3.866.212</b>	<b>81.47%</b>	<b>4.71%</b>

Sumber: ...

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2021, hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

#### 4) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang 409,00 km, kondisi rusak ringan 104,81 km, dan kondisi rusak berat 96,42 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

**Tabel II.55**  
**Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.428,99	16,25	0	265,72
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2022 menunjukkan cukup besarnya rasio jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

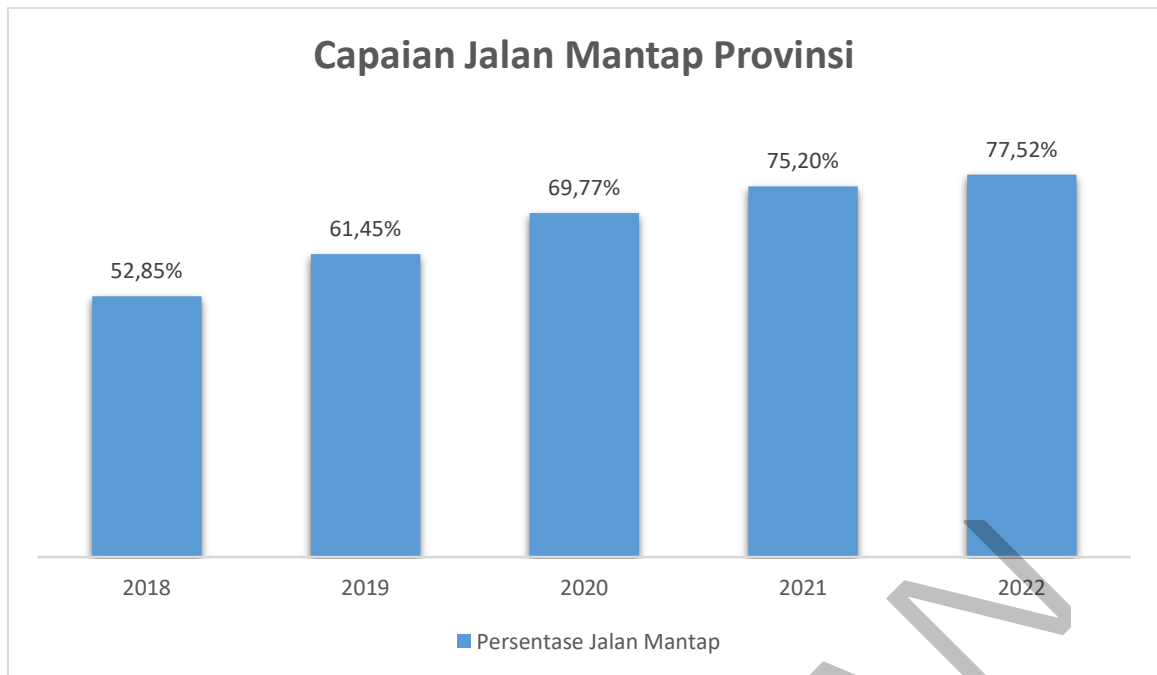
**Tabel II.56**  
**Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	305,83	1.104,11	223,89	77,12
2	Provinsi	284,86	409,00	104,81	96,42
3	Kabupaten/ Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.450,39	3.778,24	2.364,59	2.529,03

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 693,86 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb-Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian. Peningkatan persentase jalan mantap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.



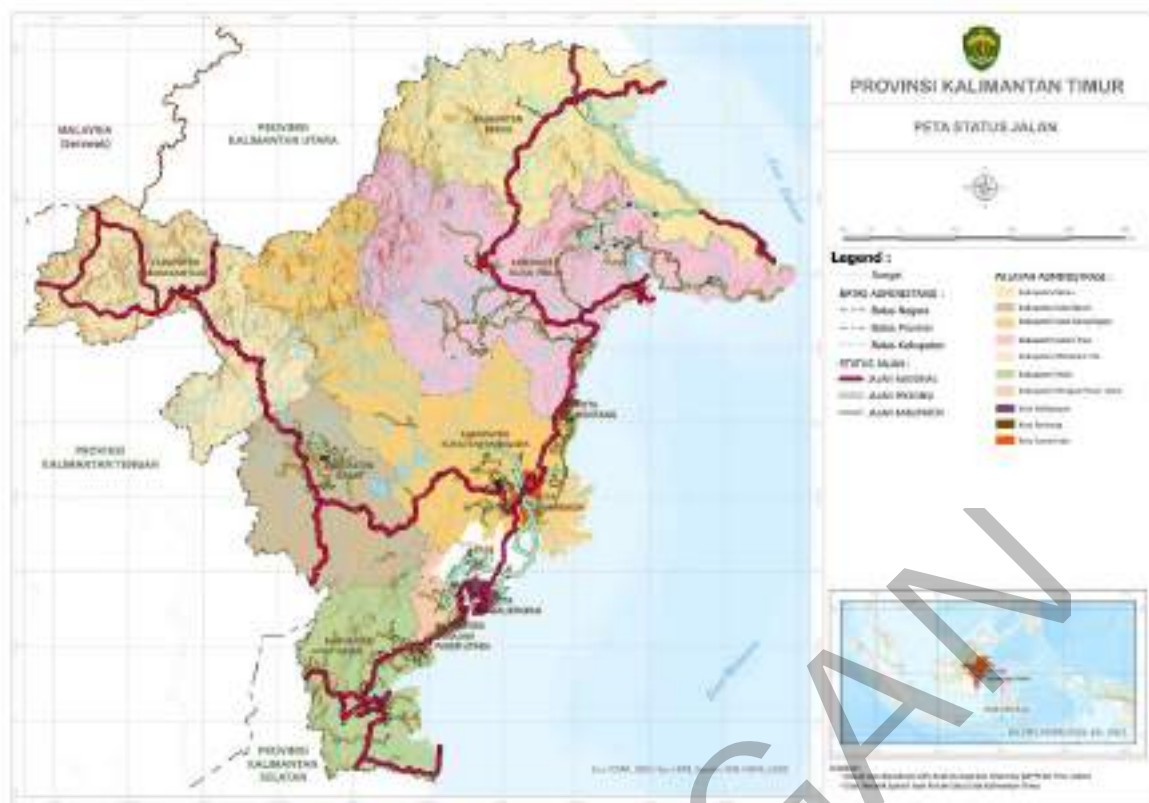


Sumber: Dinas PUPR Pera Tahun 2022

**Gambar II.53**  
**Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022**

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.54**  
**Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur**

### 5) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

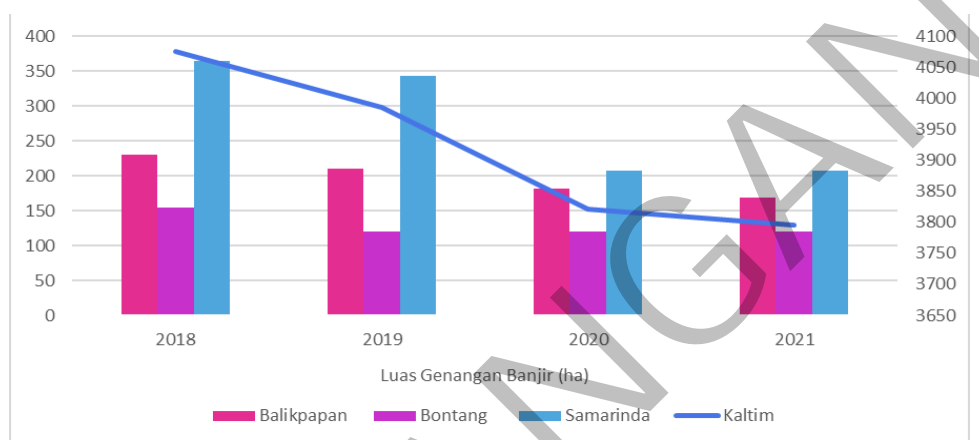
Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan factor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.55, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap

tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



**Gambar II.55**  
**Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021 (Ha)**

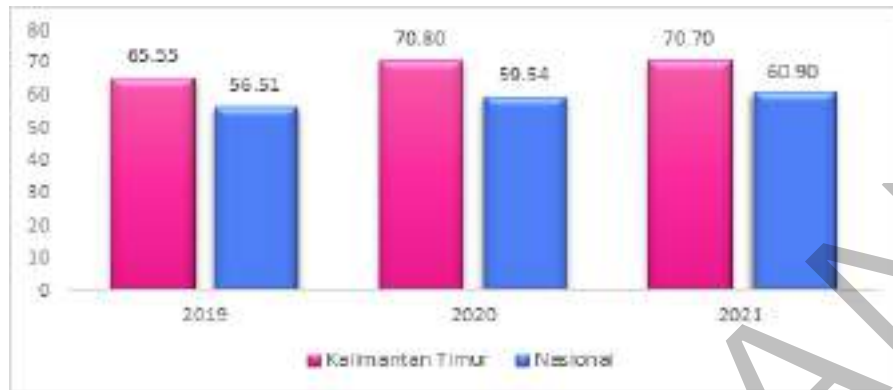
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

#### **D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **1) Rumah Tidak Layak Huni**

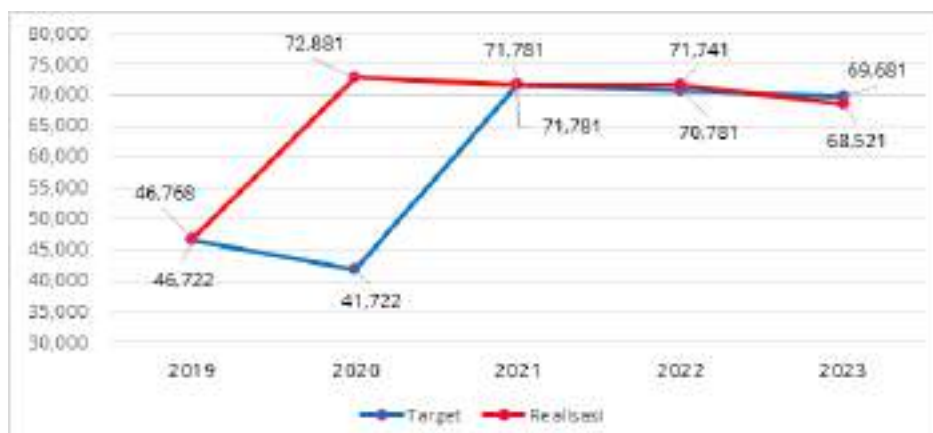
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pada tahun 2021, data

SUSENAS KOR menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 70,70%. Kondisi ini naik sekitar 7,86% dari dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 370.302 Rumah Tangga (29,30%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.



**Gambar II.56**  
**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2021**

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Hingga tahun 2022 (September) terdapat 71.741 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian suatu bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Ket: Angka 2023 merupakan angka perkiraan sementara

### Gambar II.57

#### Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni

Salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH adalah konsistensi data. Walaupun dilakukan penanganan, jumlah RTLH terus bertambah yang menyebabkan perubahan basis perhitungan, terutama angka pembagi. Hal ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

#### 2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penentuan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Tabel II.57

Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh

Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	673.42	620.06	1287.82	1237.82	1187.82
Realisasi		645.47	1287.82	1,190.14	1190.14

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menangani areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2022 (September), luas

kawasan kumuh tersisa 1.190,14 Ha. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 335,33 Ha dari kondisi tahun 2019 (1,525.47 Ha). Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

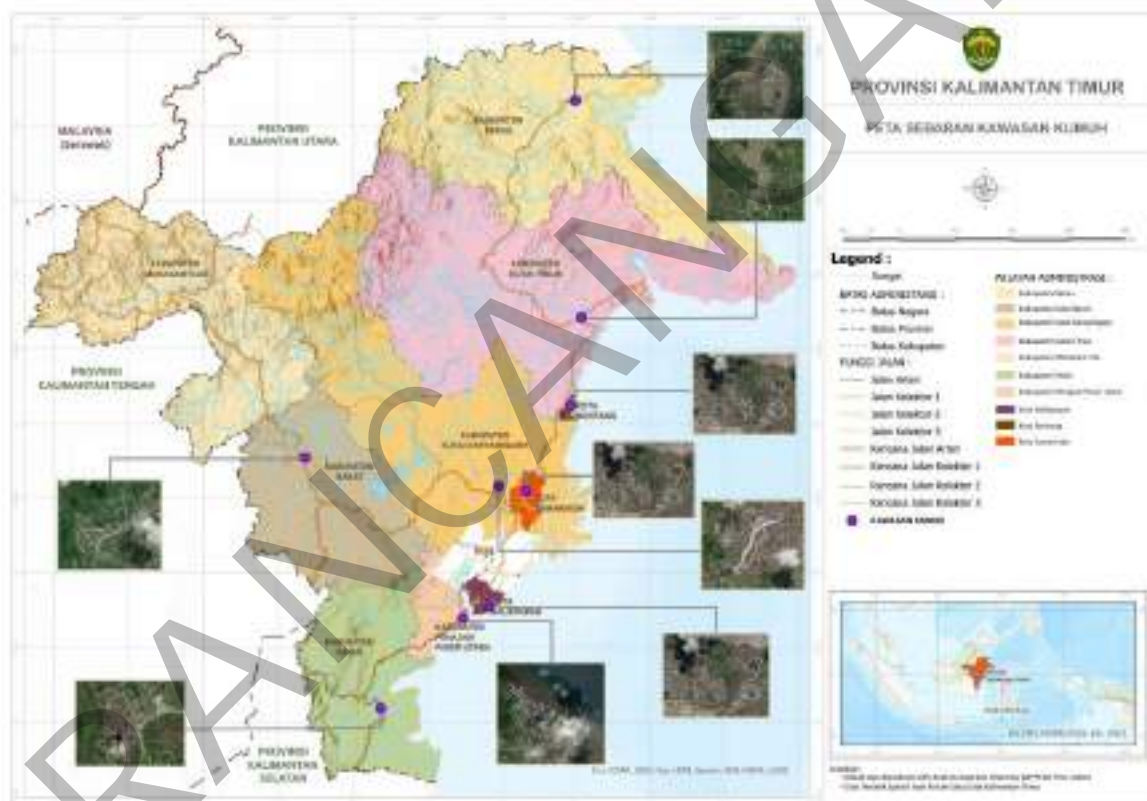
RANCANGAN

**Tabel II.58**

**Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota**

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)		SK Bupati/Walikota
		Total	Kew. Provinsi	
1	Paser	224,52	35,06	No. 653/KEP-332/2020
2	KUBAR	1,032.38	345,05	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	98,49	50,07	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	106,47	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	51,52	25,79	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	39,6	0	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	153,3	32,78	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	52.76	23,54	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	73,56	33,35	No. 188.45/509/DPKP2/2020
<b>Kaltim</b>		<b>1,881.67</b>	<b>545,64</b>	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.58**

**Peta Sebaran Kawasan Kumuh**

**3) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi Kalimantan Timur tidak dilakukan sebab tidak ada kejadian bencana alam, sehingga tidak ada data korban bencana alam yang tertangani. Capaian SPM jenis pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi



Rumah layak huni bagi korban bencana adalah 100% walaupun pada Tahun 2021 tidak terjadi bencana di Kalimantan Timur, namun telah disiapkan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

**Tabel II.59**  
**Risiko Bencana dan Permukiman Pada Area Beresiko**

Risiko Bencana	Total Area (Ha)	Permukiman pada area Beresiko (Ha)
<b>Risiko tanah longsor</b>	<b>3,179,299.92</b>	<b>76.59</b>
Tinggi	2,431,916.85	48.63
Sedang	739,261.71	9.30
Rendah	8,121.36	18.67
<b>Risiko kebakaran hutan</b>	<b>11,337,251.96</b>	<b>13,396.50</b>
Tinggi	4,436,219.74	6,569.90
Sedang	2,438,406.17	6,557.48
Rendah	4,462,626.05	269.12
<b>Risiko banjir</b>	<b>5,278,811.89</b>	<b>90,741.89</b>
Tinggi	39,703.97	2,510.46
Sedang	1,556,180.47	61,564.28
Rendah	3,682,927.45	26,667.15
<b>Risiko cuaca ekstrem</b>	<b>5,846,803.21</b>	<b>106,827.75</b>
Tinggi	401,091.26	68,667.65
Sedang	4,522,662.64	35,455.64
Rendah	923,049.31	2,704.47

Sumber: Analisis Spasial Peta Potensi Bencana Kaltim & sebaran permukiman di Kaltim 2021

#### **4) Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**

Berdasarkan laporan SPM dalam LPPD Tahun 2021, capaian SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 22%.

Pencapaian dua jenis pelayanan dasar yang merupakan SPM bidang perumahan rakyat diatas belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data yang akurat dan mutakhir terkait jumlah rumah serta penduduk yang perlu penanganan skala provinsi. Upaya yang dilakukan pada tahun 2022 adalah dengan melakukan pendataan awal SPM. Selain itu, tengah dilakukan dokumen Rencana Aksi SPM yang saat ini dalam proses perumusan dan akan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sinkronisasi untuk pencapaian SPM perumahan rakyat sesuai kewenangan provinsi. Diantaranya adalah koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah serta identifikasi proyek-proyek strategis yang berpotensi memerlukan relokasi penduduk. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa terdapat lingkungan hunian di Kaltim yang masuk dalam area risiko bencana, baik tinggi, sedang, maupun rendah.

#### **E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum, Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi
  - 1) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil.
  - 2) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.
- b) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
  - 1) Penegakan Perda sesuai SOP;
  - 2) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar;



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangnda Kemendagri

**Gambar II.59**  
**Capaian SPM Trantibum Tahun 2022**

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketentraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

**Tabel II.60**  
**Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2016-2020**

No	Jenis Kriminal	Jumlah Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Narkoba	2438	1635	1582	1700	1419
2	Kasus Pembunuhan	33	23	19	12	12
3	Kasus Kejahatan Seksual	56	96	77	80	129
4	Kasus Penganiayaan	821	499	444	296	214
5	Kasus Pencurian	1824	1242	981	680	624
6	Kasus Penipuan	370	350	331	130	105
7	Kasus Pemalsuan Uang	6	8	7	1	1
	Jumlah	5548	3853	3441	2899	2504

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program

satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

**Tabel II.61**  
**Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat**  
**Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020**

Elemen Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
Aparat dan Sarana Keamanan	12.875	8.106	23.026	23.028	23.811	Orang	Jumlah Aparat Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	1.825	1.649	439	441	1.224	orang	Jumlah PNS dan Non PNS
a. Provinsi	148	147	143	145	172	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
b. Kabupaten/ Kota	1.643	1.502	1.502	1.502	1.052	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	11.050	6.457	22.587	22.587	22.587	Orang	Linmas Cadangan Umum
a. Provinsi	30	30	30	30	30	Orang	jumlah non PNS
b. Kabupaten/ Kota	11.020	6.427	22.557	22.557	22.557	Orang	Jumlah Linmas
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	63	211	2.793	2.793	2.793	kali	24 Jam (1 Tahun)
Jumlah Pos Siskamling	2.242	3.111	1.927	1.927	1.927	Unit	pos jaga
- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa	2	3	2	2	2		
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	852	5.672	138	138	138	Kasus	
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	130	5.958	365	365	365	Kasus	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	15	105	264	264	264	%	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	5	4	4	4	3		

Sumber: SIDATA Kalimantan Timur, 2021

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018

terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71 persen. Pada tahun 2020, persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mencapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara.

**Tabel II.62**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	1.696	85,00	6,01

Sumber: POLDA KALTIM, 2022

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2021, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 29 demonstrasi dimana sebanyak 31,03 persen (9 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 51,72 persen (15 demonstrasi) terkait sosial dan 17,24 persen (5 demonstrasi) terkait politik.

**Tabel II.63**  
**Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	
<b>2017</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>64</b>
2018	2	9	22	33
2019	-	9	15	24
2020	6	1	14	21
2021	5	9	15	29

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim, 2022

## F. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat.

Perkembangan jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambar pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

**Tabel II.64**  
**Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Jumlah PMKS	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	Orang	243.459	251.234	251.234	247.465
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1	1	1	1
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	78.387	81.247	108.434
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.200	1.052	1.134	2.708
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,53	1,34	1,40	2,50
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,1	1,34	1,4	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	46.510	23.355
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	n/a	100	100	24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan (promotive) seperti meningkatkan

jumlah Keluarga miskin dan PMKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



Tabel II.65

## Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
<b>JUMLAH</b>		<b>21.998</b>	<b>3.876</b>	<b>28.199</b>	<b>3.648</b>	<b>34.899</b>	<b>4.980</b>	<b>15.770</b>	<b>3.418</b>	<b>87.726</b>	<b>18.586</b>	<b>20.648</b>	<b>4.170</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

**Tabel II.56 Lanjutan**

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
<b>JUMLAH</b>		<b>13.014</b>	<b>2.624</b>	<b>17.101</b>	<b>3.357</b>	<b>7.892</b>	<b>1.338</b>	<b>2.645</b>	<b>513</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

## G. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah, dampaknya mengurangi proporsi tenaga kerja usia muda.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

**Tabel II.66**  
**Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022**

No	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD ke Bawah	443.488	477.106	482.844	493.889	491.456	453.853
		(28,79)	(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)
2	SMP	236.959	260.843	273.257	267.721	260.789	259.693
		(15,38)	(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)
3	SMA/SMK	593.161	609.994	659.047	643.105	666.878	760.250
		(38,50)	(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)
4	Diploma I/II/III	68.636	64.291	57.174	64.507	64.906	56.923
		(4,45)	(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)
5	Universitas/DIV	198.431	208.735	221.159	223.574	236.332	216.201
		(12,88)	(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)
Kalimantan Timur		1.540.675	1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

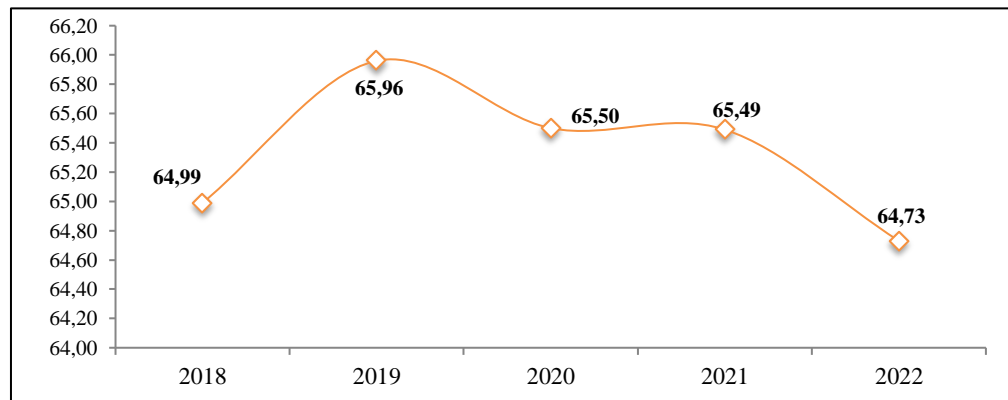
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III.. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,98 persen menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 28,57 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar

belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022.

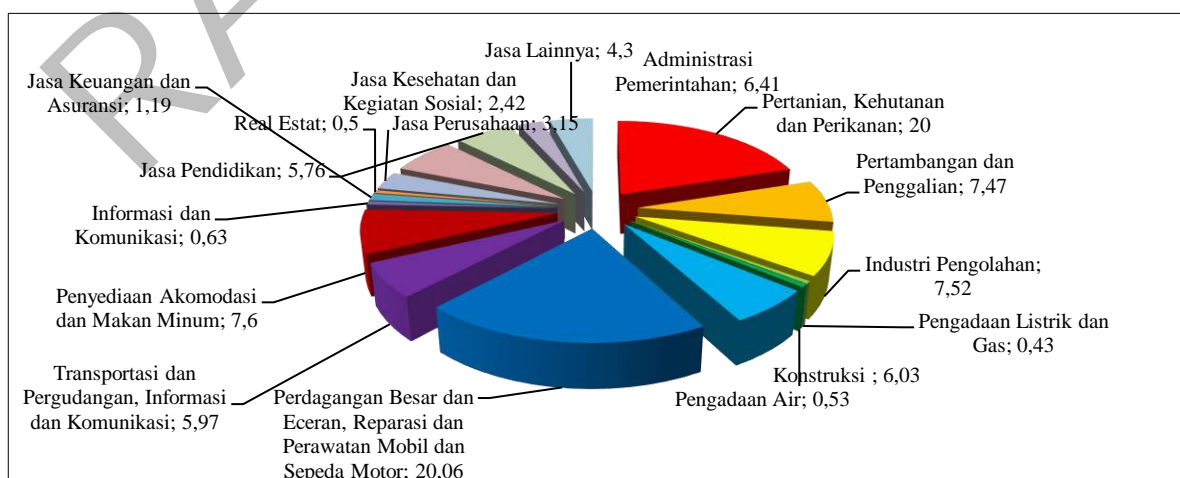
Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.60**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

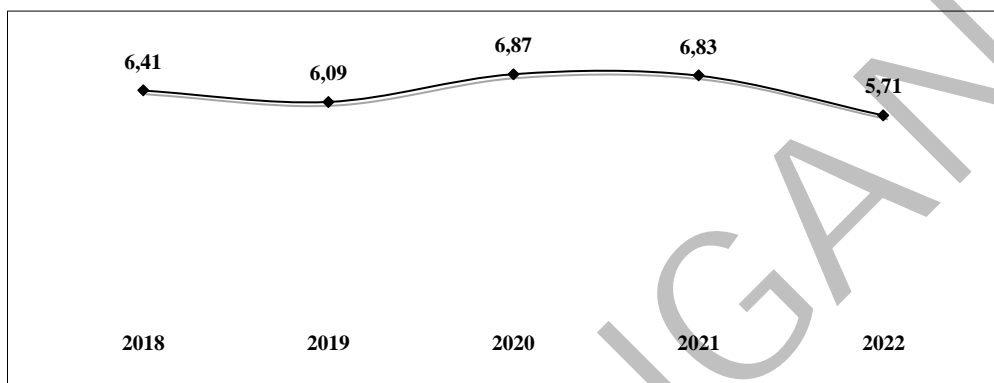
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.61**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**  
**Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)**

Tahun 2022, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,06 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,00 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,43 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.62**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,71 persen, penurunan terjadi dikarenakan di tahun 2022 pandemi COVID-19

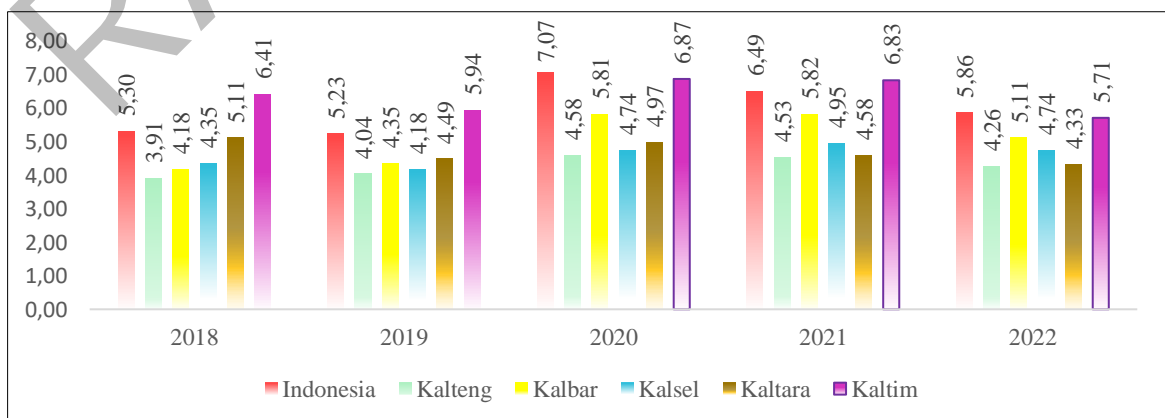
sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

**Tabel II.67**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	5,00	4,55	4,52	5,70	4,88
2	KUBAR	4,86	5,08	4,97	5,14	4,62
3	KUKAR	5,96	5,98	5,70	5,66	4,14
4	KUTIM	5,93	5,53	5,45	5,35	6,48
5	Berau	5,62	5,08	5,08	5,82	5,02
6	PPU	4,76	6,26	6,22	2,95	2,12
7	MAHULU	4,17	3,69	3,49	3,14	2,44
8	Balikpapan	9,52	7,29	9,00	8,94	6,90
9	Samarinda	6,16	5,87	8,26	8,16	6,78
10	Bontang	9,61	9,19	9,46	9,92	7,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,81 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,90 persen, dan Kota Samarinda sebesar 6,78 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,12 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,86 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.

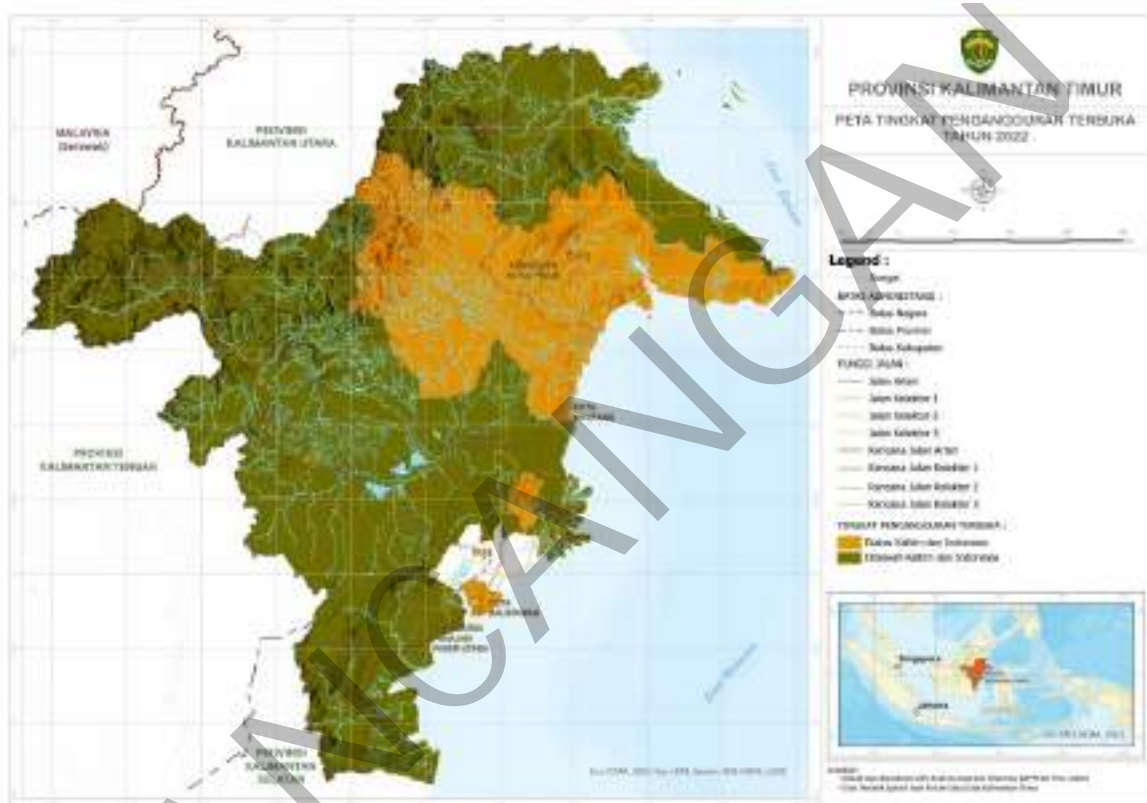


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.63**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia**



Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2022 sebesar 6,77% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,83%



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.64**  
**Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2022**

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah

satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

**Tabel II.68**  
**Persentase Penempatan Tenaga Kerja**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	45.834	49.552	26.148	30.719	22.358
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	10.365	11.266	7.690	5.538	3.531
3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	32.879	26.969	36.158	22.819	18.827
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,61	22,74	29,41	18,03	15,79

Sumber: Disnakertrans Prov Kaltim, 2022

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2021 adalah Kota Samarinda mencapai 33,59 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kabupaten Berau yang mencapai 29,29 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 25,64 persen.

**Tabel II.69**  
**Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	504	11	2,18
2	KUBAR	3.603	122	3,39
3	KUKAR	3.018	89	2,95
4	KUTIM	-	-	-
5	Berau	6.105	1.788	29,29
6	PPU	433	111	25,64
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	357	70	19,61
9	Samarinda	2.441	820	33,59
10	Bontang	5.897	520	8,82

Sumber: Disnakertrans Prov Kaltim, 2022

## H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

### I. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi,

**Tabel II.70**  
**Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit IKP 2021
1.	Paser	82,75	85,36	75,13	80,48
2.	KUBAR	5,72	86,56	75,18	57,76
3.	KUKAR	81,4	91,71	81,99	84,73
4.	KUTIM	30,53	86,26	77,87	66,19
5.	Berau	86,54	94,4	81,22	86,77
6.	PPU	88,95	89,88	81,49	86,24
7.	MAHULU	-	82,07	70,32	52,75
8.	Balikpapan	-	98,01	81,06	88,68
9.	Samarinda	-	89,13	79,29	83,72
10.	Bontang	-	93,41	82,18	87,24
<b>Kalimantan Timur (2021)</b>		<b>53,7</b>	<b>89,68</b>	<b>78,57</b>	<b>77,46</b>
<b>Kalimantan Timur (2020)</b>		<b>60,64</b>	<b>89,25</b>	<b>77,68</b>	<b>78,24</b>

Sumber: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021, 2022

IKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar 77,46 mengalami penurunan dari IKP Tahun 2020 yang sebesar 78,24. Penurunan ini

diakibatkan penurunan dari segi akses ketersediaan pangan (Produksi Pangan Domestik, Cadangan Pangan, dan Ekspor-Impor Pangan) .

**Tabel II.71**  
**Perkembangan IKP Provinsi Kaltim 2020-2021**

Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
60.64	89.25	77.68	78.24
53.7	89.68	78.57	77.46

Sumber: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021, 2022

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat hingga level desa masih terdapat 287 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa rawan pangan ini merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbesar terjadinya desa rawan pangan disebabkan oleh factor Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu dan stok), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan persentase angka kesakitan/angka harapan hidup.

**Tabel II.72**  
**Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021**

No	KAB/KOTA	Jumlah			% Per Kab/Kota	% Provinsi
		Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan		
1.	Paser	10	144	35	24,31	12,20
2.	KUBAR	16	194	50	25,77	17,42
3.	KUKAR	18	237	60	25,32	20,91
4.	KUTIM	18	141	44	31,21	15,33
5.	Berau	13	110	19	17,27	6,62
6.	PPU	4	54	11	20,37	3,83
7.	MAHULU	5	50	21	42,00	7,32
8.	Balikpapan	6	34	16	47,06	5,57
9.	Samarinda	10	59	26	44,07	9,06
10.	Bontang	3	15	5	33,33	1,74
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>103</b>	<b>1.038</b>	<b>287</b>	<b>27,65</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, 2022

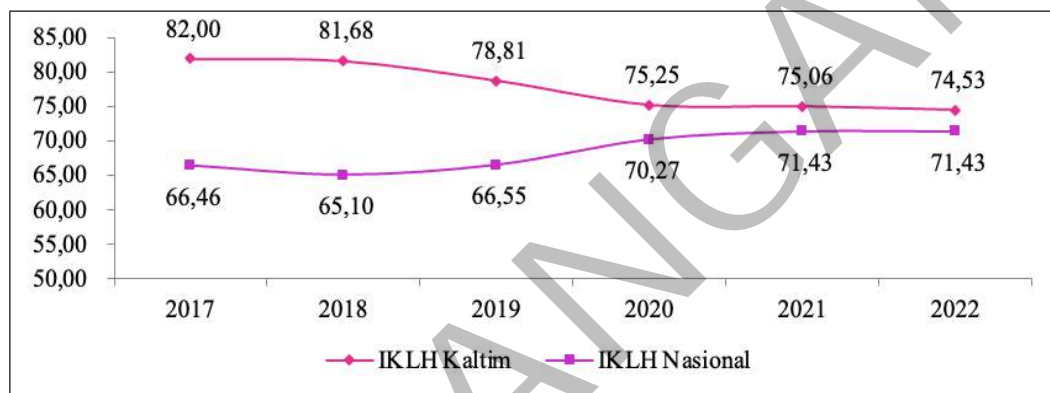
## J. Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanian menjadi kewenangan urusan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan Indikator Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai

tepat waktu sebesar 100% pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

### K. Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.65**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

IKLH Kaltim dari tahun 2017-2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) yang dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga meningkat. Namun, pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 78,71 (predikat baik,  $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 75,06. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,53 (Data per tanggal 9 Desember 2022). Capaian ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 yakni, 76,05. Capaian IKLH Tahun 2022 ini menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

**Tabel II.73**  
**Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022**

INDEKS	2019*)	2020	2021	2022*)	KET
IKA	77,09	53,7	51,92	53,02	*)IKAL/Indeks Kualitas Air Laut masih belum masuk menjadi salah satu penilaian IKLH pada Tahun 2019. *)Update Data per Tanggal 9 Desember 2022
IKU	89,42	89,06	88,84	87,59	
IKL	72,12	79,76	82,21	82,35	
IKAL	-	83,51	85,4	81,45	

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 83,86 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

**Tabel II.74**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Kutai Timur	50,00	86,61	81,09	71,64	70,44	BAIK
2	Kota Balikpapan	50,00	84,29	49,79	63,84	68,15	SEDANG
3	Kota Bontang	60,00	86,60	36,30	65,58	65,33	SEDANG
4	Kabupaten Kutai Barat	62,31	91,50	66,09	74,96	70,08	BAIK
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	53,08	89,31	70,87	71,65	73,14	BAIK
6	Kota Samarinda	45,81	81,81	25,90	56,03	58,25	SEDANG
7	Kabupaten Mahakam Ulu	61,88	92,56	100,00	82,65	83,86	BAIK
8	Kabupaten Paser	54,09	89,53	72,02	72,37	71,43	BAIK
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	48,33	89,90	61,70	68,09	73,18	SEDANG
10	Kabupaten Berau	53,48	83,76	94,73	74,77	76,71	BAIK

Sumber: [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Jika melihat dari tabel di atas, dapat terlihat kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alihguna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah

disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap.

Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah IP sementara (Semester 1 Tahun 2022) dengan hasil nilai perhitungan sementara adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar pada Provinsi Kalimantan Timur.





**Gambar II.66**  
**Indeks Pencemaran Lingkungan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)* pada Oktober 2015. Program *FCPF Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

**Tabel II.75**  
**Angka Penurunan Emisi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41	20,89	36,4

\*)Data Sementara Tahun 2022 Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur Tahun 2022 (Sementara), menggunakan 2 rumus dalam mendapatkan nilai presentase penurunan emisi dari BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan:

$\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} = \text{BAU Baseline Total} - \text{Total Emisi GRK}$ $\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = (\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} : \text{BAU Baseline Total}) \times 100\%$
---

Saat ini merujuk pada data sementara Tahun 2022, Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 36,4 Juta Ton CO<sub>2</sub> eq atau sebanyak 70,68%. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 28,50. Sehingga dapat dikatakan sementara ini capaian penurunan emisi dari BAU telah melampaui target pada P-RPJMD. Menurut Data Tahun 2021, potensi penurunan emisi sebesar 20,89 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, dimana penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan sebesar 18.9 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, energi dan transportasi sebesar 1.6 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, sektor limbah sebesar 0.2 Juta ton CO<sub>2</sub> eq dan pertanian-peternakan sebesar 0.098 Juta ton CO<sub>2</sub> eq. Total Penurunan Emisi pada tahun tersebut sebesar 41.96%, penurunan ini jauh dari targetan dalam dokumen RAD GRK 2010-2030 yang sebesar 27.75% untuk tahun 2021. Besaran capaian penurunan Emisi jika di bandingkan target sebesar 151.21%. Fluktuatif capaian ini jelas sangat terlihat dari tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

#### **L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2021 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 107 kerjasama sebanyak 7 Kabupaten/Kota dari 37 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.76**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan**  
**Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)	84,49	82,84	84,83	n/a		
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,33	92,30	92,69	n/a		
3	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)			0	0	6	6
4	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)			0	0	6	6
5	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)			0	0	5	5
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)					100%	
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (OPD)					18.919	

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

### **M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.77**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan**  
**Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa				27	
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya				8	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan				15	
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan				30	
5	Persentase pengentasan desa tertinggal				90	
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				0.658 %	
7	Indeks Desa Membangun			0.6752 %	0,7070 %	
8	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan		35	35		
9	Jumlah Bumdes Yang Aktif		15	360		
10	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		80	80		
11	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat		1	1		
12	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar		18	18		
13	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan		150	165		
14	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat		1	1		
15	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran		15	363		
16	Jumlah Desa berkembang		15	329		
17	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	-	40		

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
18	Desa Tertinggal (Desa)	381	285	128	78	28
19	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)				30	35
20	Desa yang telah melaksanakan Penataan				7	7
21	Kampung/Desa Iklim + (Desa				25	27
22	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	381	285	128	30	35
23	Desa Berkembang				30	30
24	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	289	304	323	30	35
25	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan				30	30
26	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	323	338	363		

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

#### N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.78**

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga		100		
2	terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk		100		

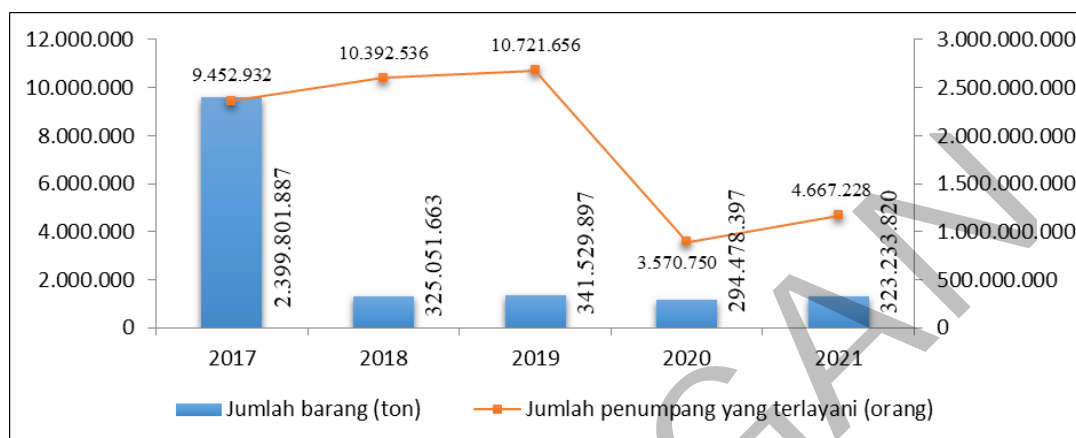
No	Indikator	2018	2019	2020	2021
3	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)		100 org		
4	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50	-	70	
5	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	0	0	1	1
6	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	33	40
7	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1	1
8	Kebijakan tentang pengendalian penduduk				1
9	Jumlah dokumen grand desai pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek				1
10	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				160
11	Peningkatan jumlah peserta KB				160
12	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				140
13	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				140
14	TFR (Angka Kelahiran Total)				2,51
15	Kampung KB	154	160	175	

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

## O. Perhubungan

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan

penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi Covid-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton.



Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.67**  
**Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang**  
**Tahun 2017-2021**

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 846 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 418 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar stakeholders untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan Stakeholders lainnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kecelakaan menjadi sebanyak 510 kasus kecelakaan, hal ini diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang berkendara di jalan terus meningkat karena pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan perekonomian pasca kasus Covid-19.



Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.68**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2022**

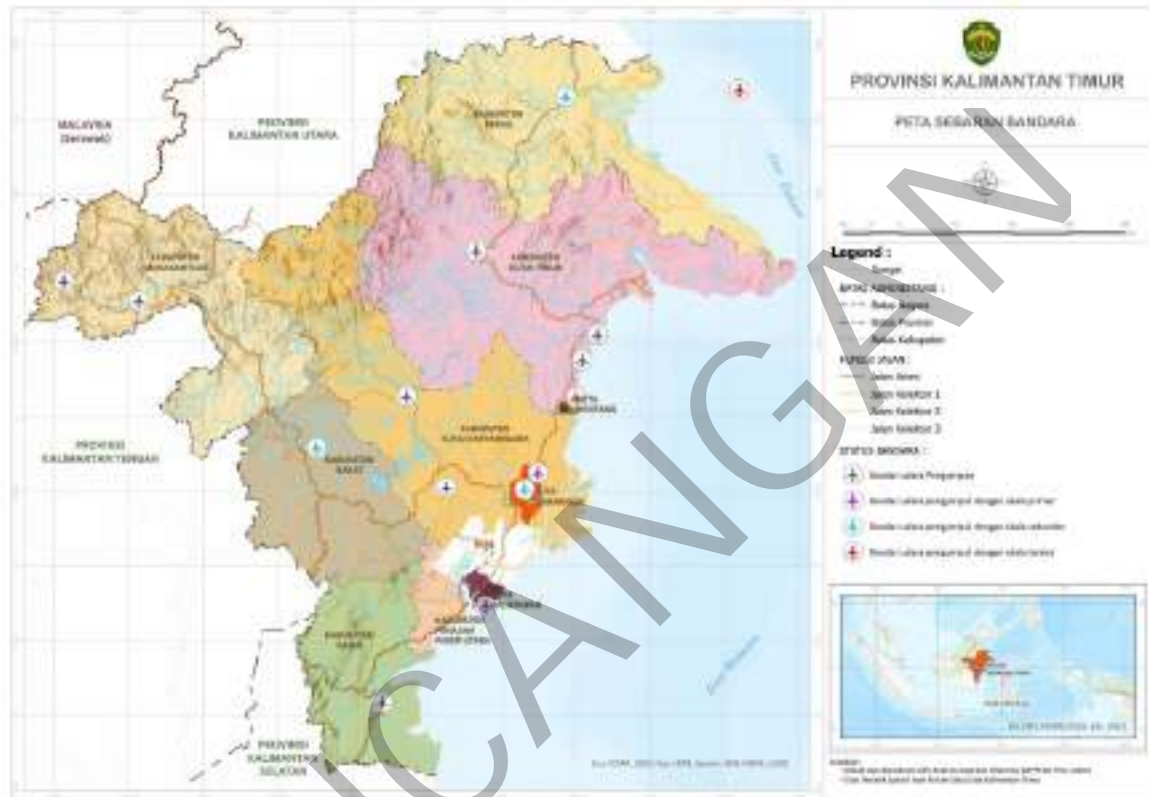
Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datarah Dawai.



Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

**Gambar II.69**  
**Peta Bandara Kalimantan Timur**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan

3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

**Tabel II.79**  
**Rencana Induk Pelabuhan Nasional**  
**Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017**

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

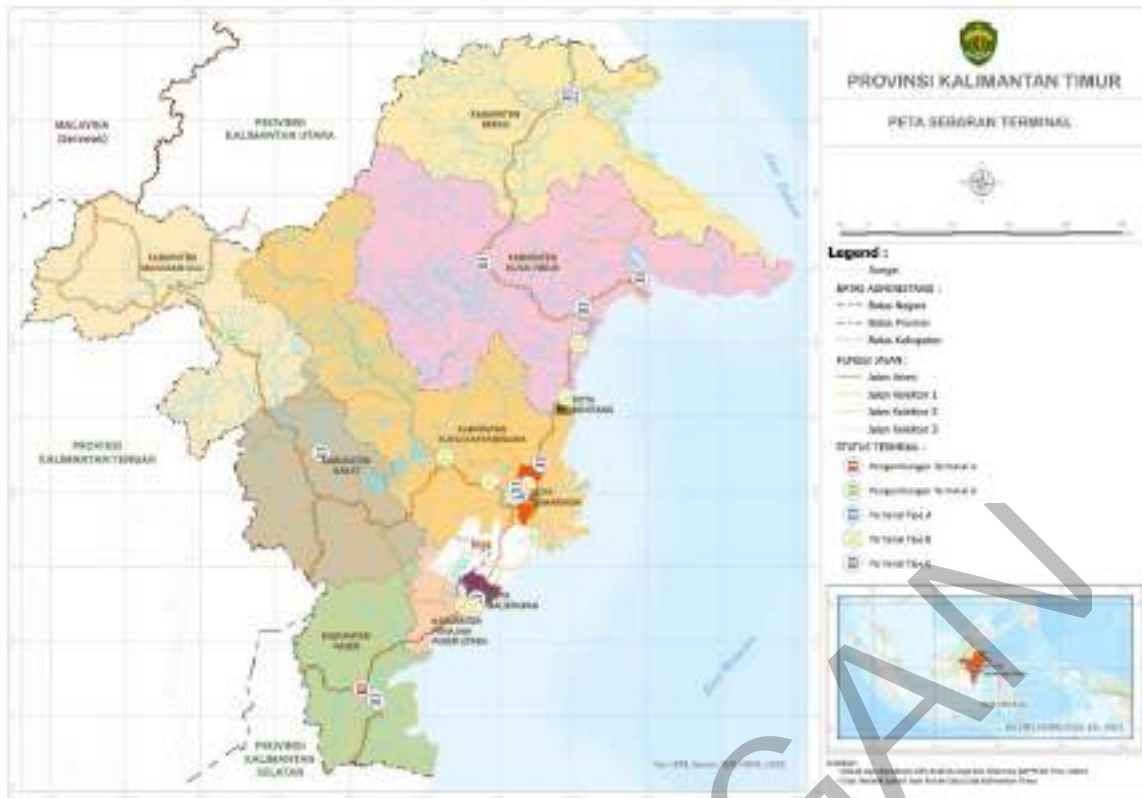
Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.70**  
**Peta Pelabuhan Kalimantan Timur**

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.71**  
**Peta Terminal Kalimantan Timur**

## **P. Komunikasi Dan Informatika**

### **1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Gerakan menuju 100 Smart City yang diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan untuk mengarahkan setiap provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga. Dengan demikian SPBE akan

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan Good Governance. Melalui SPBE, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Selain itu, unsur-unsur penyimpangan dapat diminimalkan ataupun dihindarkan serta dapat meningkatkan aspek pelayanan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel II.80**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>INDEKS SPBE</b>	<b>2.89</b>	<b>3.04</b>	<b>3.14</b>	<b>2.22</b>	<b>3.44</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Pada tahun 2021 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun permasalahan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a. Pemahaman tentang SPBE yang belum komprehensif oleh Tim Koordinasi Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Belum terjadi kolaborasi yang berkelanjutan antara Tim Koordinasi SPBE Provinsi dengan Perangkat Daerah pelaksana layanan SPBE.
- c. Sumber Daya Manusia secara khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masing masing perangkat daerah belum menguasai dan memahami SPBE secara mendalam.
- d. Belum adanya Peraturan Gubernur terkait penyelenggaraan SPBE Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel II.81**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	1,36	KURANG
Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	KURANG
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	CUKUP
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	KURANG
Pemerintah Kota Samarinda	2,46	CUKUP
Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	CUKUP
Pemerintah Kota Bontang	2,11	CUKUP

Sumber: Keputusan MENPAN RB No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada seluruh Instansi Pemerintah Se-Indonesia Tahun 2021.

#### L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2021 adalah sebanyak 2.844 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 5.676 Koperasi. Sedangkan jumlah UKM di Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebanyak 344.581 UKM. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel II.82**  
**Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2021**

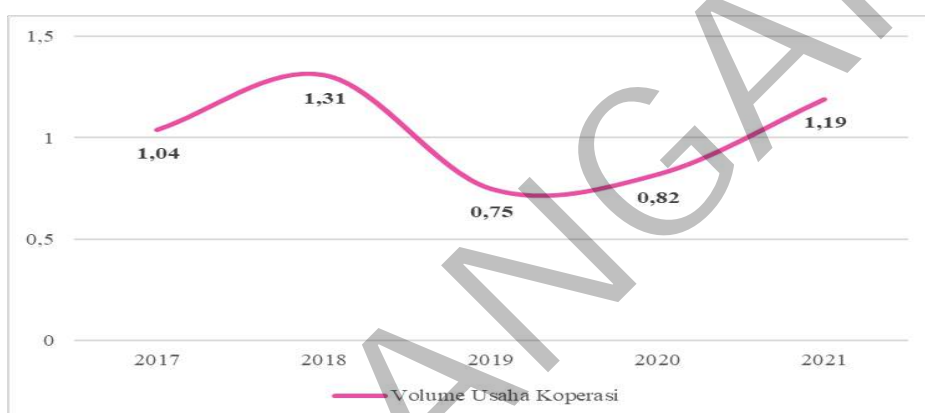
No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	3.428	2.832	2.751	2.844
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	657	583	351	457
3	Jumlah Seluruh Koperasi	5.406	5.664	5.619	5.676
4	Jumlah Anggota Koperasi	86.297	82.054	57.381	68.580

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi.

Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada Gambar II.58 berikut.



Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim

**Gambar II.72**  
**Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2016 – 2021 (dalam Triliun Rupiah)**

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2021 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 1,19 Triliun Rupiah yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi Covid-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel II.83**  
**Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2021**

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	12.029	3.809	651	35.209	10.782	62.480
2	KUBAR	1.224	1.574	719	6.061	1.459	11.037
3	KUKAR	25.245	721	85	9.541	325	35.917
4	KUTIM	311	1.204	18	878	578	2.989
5	Berau	4.009	62	53	8.122	851	13.097
6	PPU	3.087	1.076	-	19.040	24	23.227
7	MAHULU	22	1	-	10	-	33
8	Balikpapan	28.861	1.999	6	47.069	18	77.953
9	Samarinda	34.966	111	104	99.167	24.276	158.624
10	Bontang	13.644	994	16	5.287	101	20.042
	<b>Jumlah</b>	<b>122.580</b>	<b>11.551</b>	<b>1.652</b>	<b>180.384</b>	<b>28.414</b>	<b>344.581</b>

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim

Jumlah UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebanyak 344.581 UKM. UKM terbanyak berada di Kota Samarinda dengan jumlah 158.624 UKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kota Balikpapan sebanyak 77.953 UKM. Jenis usaha UKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha UKM di Provinsi Kalimantan Timur didominasi pada usaha dagang sebanyak 180.384 UKM dan industri kuliner sebanyak 122.580 UKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 1.652 UKM dimana jenis usaha ini tidak terdapat pada Kabupaten PPU dan Kabupaten Mahulu.

## **M. Penanaman Modal**

### **1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)**

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.



**Tabel II.84**  
**Jumlah Proyek PMDN/PMA**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Tahun	PMDN	PMA	Total
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022*)	4.938	742	5.680

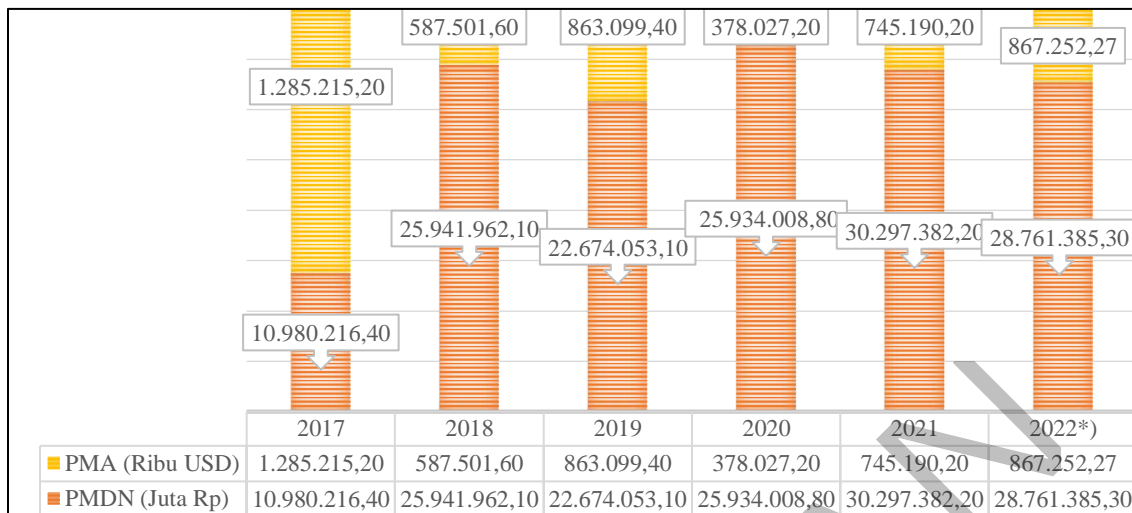
\*) s/d triwulan III Tahun 2022; Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Pada triwulan III tahun 2022 jumlah proyek PMDN sebesar 4.938 proyek dan PMA sebesar 742 proyek. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 1.357 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 1.237 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 245 proyek.

## **2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)**

Nilai realisasi investasi dalam negeri sampai triwulan III tahun 2022 mencapai Rp 28,76 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni pertambangan (33,66%), Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (22,98%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (16,53%), Konstruksi (7,21%), dan Listrik, Gas dan Air (5,58%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 867,25 Juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu pertambangan (49,27%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (14,96%), Industri makanan (10,67%), Listrik, Gas dan Air (7,79%) dan Transportasi, Gudang dan telekomunikasi (5,48%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa

pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



\*) s/d triwulan III Tahun 2022; Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.73**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2017-2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

yakni Rp 11.379,95 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 9.589,54 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 3.134,85 miliar.

RANCANGAN

**Tabel II.85**  
**Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)**

No.	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
I.	Sektor Primer						
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	2.886.876,90	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.134.852,30
2.	Kehutanan	25.144,20	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60	209.549,10
3.	Perikanan	.	.	.	3,00	0,50	2,00
4.	Pertambangan	4.714.508,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	11.379.948,70
II.	Sektor Sekunder						
1.	Industri Makanan	551.959,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.085.115,50
2.	Industri Tekstil	.	.	.	-	2,00	431,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	316.482	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00	12.807,70
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	0	5,00	500,00
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	9.351,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	9.589.537,30
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	9.000	70,80	-	708,90
8.	Industri Mineral Non-Logam	748,30	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351	18.173,70
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	27.566	.	.	5.000	10,30	389.561,00
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.	0	39,50	3.747,80
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	.	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80	12.966,80
12.	Industri lainnya	248	.	509,50	70.348,60	5.200,50	48.228,90
III.	Sektor Tersier						

No.	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
1.	Listrik, Gas, dan Air	2.297.726,20	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	97.986,20
2.	Konstruksi	375,30	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	39.097,70
3.	Perdagangan dan Reparasi	136.787,70	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00	553.649,70
4.	Hotel dan Restoran	530	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90	136.911,10
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4.322,20	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	389.501,60
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	2.850	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30	236.791,30
7.	Jasa Lainnya	4.740,10	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80	421.317,00
Total		10.980.216,40	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	28.761.385,30

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2017-2022 mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 449.190,34 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 252.125,2, Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2022 yang hanya mencapai US\$ 76.967,99 Ribu diikuti sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, serta industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

**Tabel II.86**  
**Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022 (US\$)**

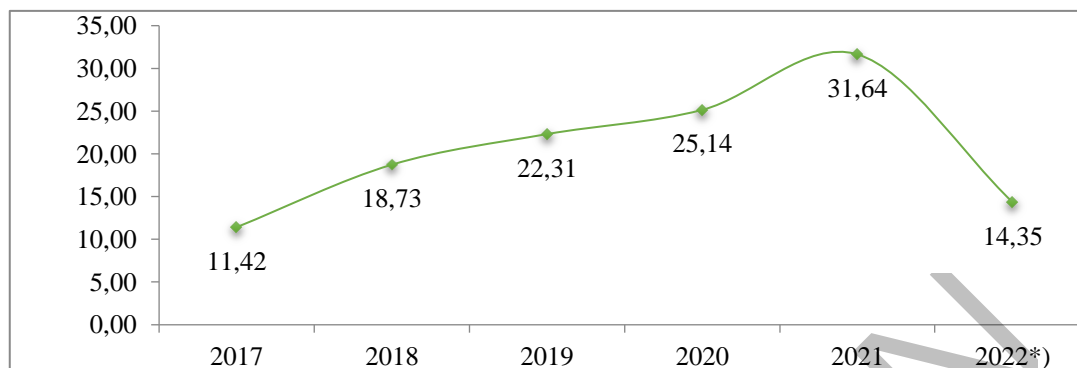
No	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
I.	Sektor Primer						
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	160.567.800	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000	104.840.992
2.	Kehutanan	82.734.000	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000	21.509.291
3.	Perikanan	.	135.500	.	-	-	-
4.	Pertambangan	900.503.500	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200	449.190.340
II.	Sektor Sekunder						
1.	Industri Makanan	72.145.900	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000	76.967.992
2.	Industri Tekstil	.	.	.	-	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	.	6.600	33.300	-	15.291.200	1.578.499
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	-	-	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	9.552.500	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000	35.081.292
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	9.494.000	256.700	561.100	986.400	990.600	114.100
8.	Industri Mineral Non-Logam	16.586.100	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700	100.181.782
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	3.607.700	22.600	1.879.400	276.400	24.600	31.161.393
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.865.100
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	58.500	.	43.800	-	-	10.091.596
12.	Industri lainnya	.	526.100	134.600	-	-	-
III.	Sektor Tersier						

No	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
1.	Listrik, Gas, dan Air	21.413.400	53.012.000	280.607.900	278.800	-	-
2.	Konstruksi	.	5.093.100	.	-	-	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	13.289.100	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.355.600
4.	Hotel dan Restoran	704.800	2.245.800	1.297.000	791.000	586.000	2.949.499
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	67.399.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300	14.790.098
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1.115.400	301.200	146.900	221.300	9.379.800	5.970.598
7.	Jasa Lainnya	503.900	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300	1.604.100
Total		1.285.215.200	587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200	867.252.270

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022



Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 31,64 triliun pada tahun 2021.



\*) semester 1 2022; Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.74**  
**Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Triliun Rp)**

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Selanjutnya nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2022 ditargetkan di angka Rp 35 triliun. Hingga Triwulan III nilai investasi sektor non migas dan batubara baru tercapai Rp 23,38 triliun dan di Triwulan IV diperkirakan target akan tercapai sebesar Rp 36,17 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 35,67 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

## **N. Kepemudaan Dan Olah Raga**

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan

Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

**Tabel II.87**  
**Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2021**

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107	305
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45	38
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109	1.112
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161	120
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2022

#### O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.88**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Indikator	2021
1	Tersedianya buku profil daerah	1
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1

No	Indikator	2021
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statitik sectoral	100
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50
11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

## P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 bernilai 1,73, dimana didapat dari hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI), yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: 1. Fase Persiapan : 2,54 2. Fase Aksi 1,76 3. Fase Tindak Lanjut 0,90. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.89**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Indikator	2021
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	40
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	63,28
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	54,69
4	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	84,33
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173.333
6	Indeks keamanan informasi	Level 2
7	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Level 2

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

## Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

**Tabel II.90**  
**Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur**  
**yang Telah Dipatenkan Tahun 2021**

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Sulikng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar
2.	SAMARINDA	Sarung Tenun Samarinda	Nasional	
3.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
		Kanjet Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekengjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

**Tabel II.91**  
**Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kab/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	KUBAR	13	1	81	31	19
3	KUKAR	187	2	69	39	8
4	KUTIM	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	MAHULU	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

## R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2018 berjumlah 137.841 orang, meningkat di tahun 2019 menjadi 145.731 orang, namun menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 77.884 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.92**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk				5,49
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat				1,43
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				0,001
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				6.16
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				19
6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun				575
7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah				3050
8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah				5
9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah				575
10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				30
11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa				0
12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				150
13	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi				8,1
14	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat				100
15	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan				2

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
	Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif				
16	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	137.841	145.731	77.884	

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

## S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, Indikator kinerja bidang Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel II.93**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Indikator	2021
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	73,09
2	Persentase arsip in - aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	80,48
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	16991
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0
7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	3552
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	23115
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	625
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	33
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64.38 %
12	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 % 111 kehidupan	7,39

No	Indikator	2021
	berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	
13	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90
14	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipa	10
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	125
16	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD
17	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta	200
18	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi	2 OPD

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

### 2.3.2. Urusan Pilihan

#### A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 321.644 Ton atau menurun dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.





Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

**Gambar II.75**  
**Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022\***

## B. Pariwisata

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami trend penurunan. Penurunan terjadi akibat terjadinya wabah Covid – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 sehingga terjadinya pembatasan social berskala besar seperti adanya larangan berpergian ke dalam maupun luar negeri. Di samping itu belum optimalnya kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi dan destinasi pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,511,419 orang tercapai 125,26 dari target 2022 sebesar 2,005,000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

**Tabel II.94**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2018–2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	Tw III 2022
1	Kota Balikpapan	2,837,034	2,878,561	1,072,569	1,431,862	1,214,958
2	Kota Samarinda	2,036,236	1,643,536	654,984	1,119,174	700,798
3	Kota Bontang	409,319	472,037	215,029	156,212	93,965
4	Kabupaten Paser	39,566	7,501	32,965	89,931	44,534
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	86,375	57,576	20,263	114,869	49,824
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	1,715,660	1,394,171	692,689	617,018	221,918
7	Kabupaten Kutai Timur	36,717	70,560	40,129	72,438	12,757
8	Kabupaten Kutai Barat	32,205	56,125	25,929	10,871	54,126
9	Kabupaten Mahulu	3,464	3,058	2,596	5,590	5,002
10	Kabupaten Berau	283,294	292,692	127,176	141,398	102,770
<b>Jumlah Se-Kalimantan Timur</b>		<b>7,479,870</b>	<b>6,875,817</b>	<b>2,884,329</b>	<b>3,759,363</b>	<b>2,500,652</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

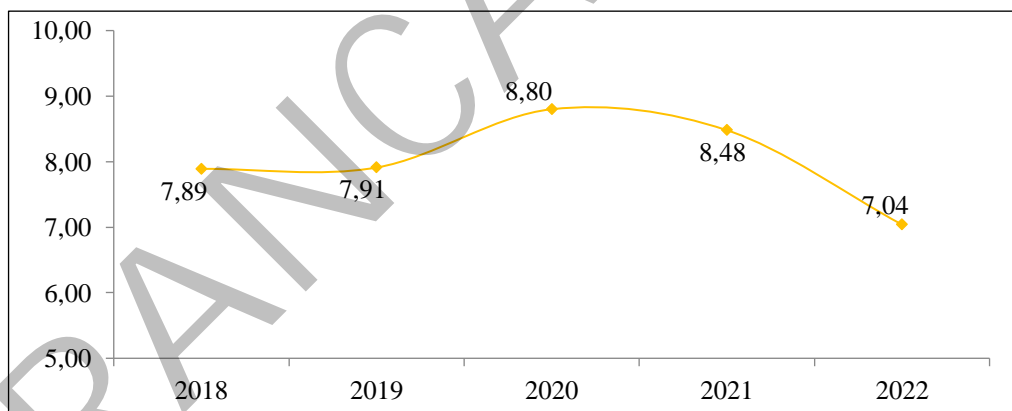
**Tabel II.95**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2017–2021**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	TW III 2022
1	Kota Balikpapan	47,040	56,577	16,510	17,458	8,860
2	Kota Samarinda	4,835	2,735	2,075	444	80
3	Kota Bontang	174	168	-	-	1,024
4	Kabupaten Paser	431	-	-	1	1
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	135	8	26	-	-
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,557	3,872	557	46	4
7	Kabupaten Kutai Timur	2,340	345	365	6	2
8	Kabupaten Kutai Barat	279	273	28	5	190
9	Kabupaten Mahulu	47	-	5	-	562
10	Kabupaten Berau	2,586	8,323	220	85	44
<b>Jumlah Se-Kalimantan Timur</b>		<b>62,424</b>	<b>72,301</b>	<b>19,786</b>	<b>18,045</b>	<b>10,767</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

### C. Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2018-2022 secara umum mengalami trend fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2022 kontribusi sektor mencapai 7,04%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Subsektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

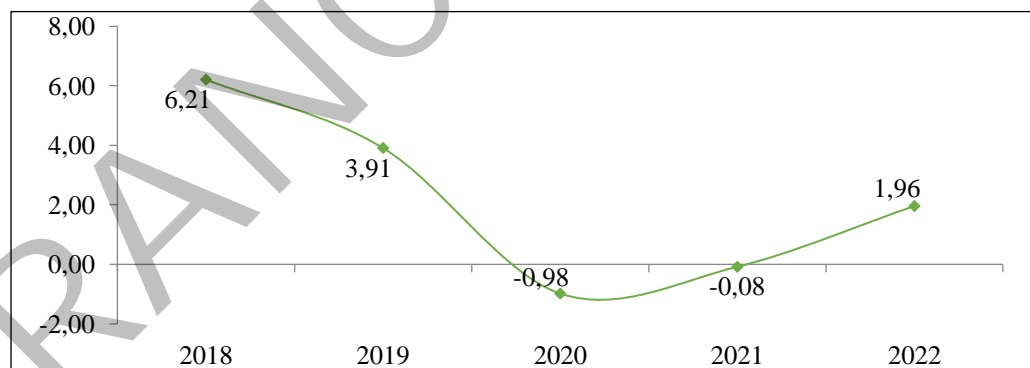


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.76**  
**Kontribusi Sektor Pertanian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

Pada Gambar II.76 terlihat pada tahun 2022 masih mengalami penurunan dimana target kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun 2022 sebesar 8,99 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, belum berhasilnya pencapaian target pada tahun 2022 ini salah satunya dikarenakan sektor pertanian masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun memiliki trend penurunan. Tercatat pada Tahun 2021 Laju Pertumbuhan ekonomi Subsektor Pertanian Arti Luas mencapai -0,08% dan pada tahun 2022 tumbuh sekitar 1,98%. Anomali ini disebabkan salah satunya adanya penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi lebih dalam di tahun 2021 menjadi -6,16 persen. Pada awal pandemic tahun 2020, saat subsector lain mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, justru subsector tanaman pangan mengalami laju pertumbuhan yang positif walaupun akhirnya pada tahun 2021 juga mengalami laju pertumbuhan yang negative. Yang menarik adalah yang terjadi pada subsector tanaman hortikultura, peternakan, jasa pertanian dan perburuan serta subsector perikanan yang sejak 2017 hingga 2021 walaupun terjadi penurunan nilai laju pertumbuhan tetapi sepanjang tahun-tahun tersebut tidak pernah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang negative. Dengan demikian, subsector tersebut telah terbukti menjadi subsector yang mampu bertahan ditengah hantaman ekonomi akibat pandemic covid19. Yang mengembirakan bahwa pada tahun 2022 Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar 1,96 persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.77**  
**Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

## 1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,04 ton per hektar dan menurun hingga 3,69 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

**Tabel II.96**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57
2021	66.269	244.678	3,69

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

## 2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,59 juta Ha dan memiliki produksi mencapai 17,36 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi

karet yang cukup tinggi mencapai 68,46 ribu ton pada Tahun 2021. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2021 sehingga semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidaya. Namun disamping peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih terdapat pula tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/ rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

**Tabel II.97**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	118.626	68.456	1,28
2.	Kelapa	20.018	10.170	0,63
3.	Kopi	1.488	167	0,25
4.	Lada	8.221	4.173	0,72
5.	Kakao	7.617	2.181	0,51
6.	Kelapa Sawit	1.392.965	17.277.404	16,77

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dan Kabupaten Kutai Timur memiliki produksi terbanyak dengan jumlah produksi sebanyak 6,97 juta ton pada tahun 2021, Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet sebesar 30,70 Ribu Ton, sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan produksi lada terbesar dengan jumlah produksi 2.432 ton dan Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 3.283 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, perlu dilakukan pengembangan salah satunya dengan kawasan korporasi sehingga produksi yang ada dapat dipasarkan dan dihilirisasi sehingga meningkatkan nilai produksi perkebunan tersebut.

**Tabel II.98**  
**Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman**  
**di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2021**

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	2.014.529	3.283	8.334	72	3	15
2	KUBAR	743.193	208	30.703	21	20	5
3	KUKAR	2.959.954	2.355	14.811	7	39	2.432

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
4	KUTIM	6.972.556	1.060	1.789	51	1.414	128
5	Berau	4.144.842	1.569	6.950	13	411	457
6	PPU	305.680	1.021	1.498	2	2	1.019
7	MAHULU	127.323	5	-	-	288	-
8	Balikpapan	487	480	4.066	1	1	104
9	Samarinda	8.719	178	305	-	3	13
10	Bontang	121	11	-	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih berbeda jauh dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani membuat produktivitas perkebunan rakyat kalah dibanding dengan perkebunan swasta. Usia kelapa sawit yang sudah tua, kurangnya akses terhadap bibit bersertifikat, serta pengelolaan perkebunan yang bersifat tradisional membuat produktivitas perkebunan rakyat masih tertinggal.

**Tabel II.99**

**Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)**

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	14.92	9.75	0.63	0.65
2. Kutai Timur	14.81	11.37	0.01	0.11
3. Kutai Barat	6.54	0.87	0.02	0.73
4. Penajam Paser Utara	10.80	4.51		0.24
5. Paser	13.42	8.80	0.75	0.48
6. Berau	22.52	15.97		0.01
7. Mahakam Ulu	5.88	0.00		0.00
8. Samarinda		7.21		0.54
9. Balikpapan		12.82		0.60
10. Bontang	13.60	0.75		
Kalimantan Timur	14.06	11.85	0.09	0.52

Sumber: Dinas Perkebunan, 2022 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 97 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa

*Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

**Tabel II.100**  
**Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	18	975	858.87
2. Kutai Timur	35	1917	1746.32
3. Kutai Barat	8	460	446.99
4. Penajam Paser Utara	7	360	238.33
5. Paser	17	890	674.67
6. Berau	11	685	636
7. Mahakam Ulu	1	60	50.5
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0
10. Bontang	0	0	0
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>97</b>	<b>5347</b>	<b>4651.68</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2022

### 3) Peternakan

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 63,97 juta ekor, ayam kampung 4,65 juta ekor dan ayam ras petelur 1.102,99 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 120,45 ribu ekor dan babi sebanyak 82,98 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

**Tabel II.101**  
**Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2021 (ekor)**

No	Hewan	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Sapi Potong	119.123	117.504	119.485	119.974	120.446
2	Sapi Perah	107	110	91	87	94
3	Kambing	61.526	66.378	67.892	69.929	73.426
4	Domba	281	439	590	635	565



No	Hewan	2017	2018	2019	2020	2021*)
5	Babi	85.749	78.968	82.546	83.652	82.980
6	Kerbau	7.055	6.157	6.194	6.552	6.522
7	Kuda	91	97	102	95	97
8	Kelinci	15.005	14.189	8.859	10.830	11.044
9	Ayam Kampung	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.654.618
10	Ayam Ras Pedaging	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	63.971.068
11	Ayam Ras Petelur	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	1.102.995
12	Itik	219.149	248.978	254.683	254.749	247.956

\*) Data Sementara, Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Program pengembangan populasi sapi potong yang efisien dan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah dan menjadi lumbung ternak sapi nasional. Untuk mendukung dan mencapai upaya tersebut diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan peternakan berbasis *Mini Ranch*. *Mini Ranch* adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah. Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Dengan program *Mini Ranch* ini diharapkan dapat membuat produksi dari sektor peternakan menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membuat lahan-lahan bekas tambang menjadi lebih bermanfaat lagi. Tercatat pada tiap tahun jumlah miniranch di Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan penggunaan bahan dan keterlibatan pengusaha lokal. Namun dalam proses pengembangannya juga tidak lepas dari beberapa masalah yakni faktor cuaca, kondisi lokasi banjir dan ketersediaan bahan material yang tidak tersedia jumlahnya.

**Tabel II.102**  
**Jumlah Miniranch di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022*
1	Paser	1	2	3	9
2	KUBAR	1	2	3	6
3	KUKAR	-	3	5	12
4	KUTIM	2	-	4	5
5	Berau	-	1	5	8
6	PPU	1	2	3	4
7	MAHULU	-	2	-	2
8	Balikpapan	-	-	-	2
9	Samarinda	-	-	-	1
10	Bontang	-	-	1	1

Kalimantan Timur	5	12	24	49
------------------	---	----	----	----

Sumber: Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2022

#### D. Kehutanan

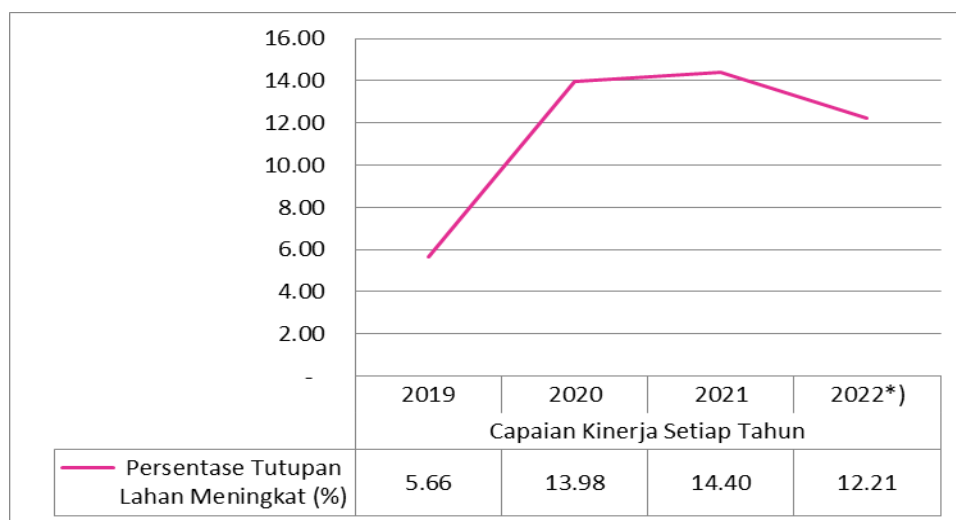
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PNBP diperhitungkan dari jumlah distribusi persentase total PNBP dari subsektor kehutanan. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PNBP dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.



Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

**Gambar II.78**  
**Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PNBP**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)**

Persentase tutup lahan meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 sebesar 5,66%, pada tahun 2020 sebesar 13,98%, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 14,40%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12,21% disebabkan penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan.



**Gambar II.79**  
**Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019 – 2022 (%)**

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

**Gambar II.80**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80
5.	2022	1.144,00
TOTAL		184.856,64

Sumber: Dinas Kehutanan KALTIM, 2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang

direhabilitasi seluas 1.144,00 hektar. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 184.856,64 hektar dengan persentase 67,15%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

**Gambar II.81**  
**Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Illegal Logging Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Jumlah Luas Hutan yang Rusak/ Terbakar/Perambahan/Illegal Logging (dalam Ha)
1.	Kab. Berau	1.823
2.	Kab. Kutai Timur	2.260
3.	Kab. Kutai Kartanegara	2.454
4.	Kab. Kutai Barat	471
5.	Kab. PPU	1.096
6.	Kab. Paser	2.050
7.	Kab. Mahakam Ulu	16
8.	Kota Bontang	13
9.	Kota Balikpapan	13,84
TOTAL		10.197

Sumber: Dinas Kehutanan KALTIM, 2022

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas

terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m<sup>3</sup> menjadi 3.042.557,42 m<sup>3</sup> di triwulan ketiga tahun 2022, hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yaitu curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu, dan biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November 2022). Perkiraan capaian hasil hutan kayu akan meningkat sebesar 4.247.600,41 m<sup>3</sup>. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendorong yaitu sudah ada peraturan yang menegaskan batas minimal realisasi produksi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu minimal 50%. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021). Tidak hanya hasil

hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 658,26 ton di triwulan ketiga tahun 2022 dengan target 700 ton. Walaupun demikian, perkiraan capaian di triwulan keempat optimis 100% target akan tercapai, hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

**Gambar II.82**  
**Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)**  
**Revisi VII Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6,703.20	11,483.43	3,421.56	23,528.38	45,136.57
2	Kutai Barat	13,809.10	10,806.60	-	5,271.50	29,887.19
3	Kutai Kartanegara	5,264.61	30,362.96	1,497.82	19,193.10	56,318.49
4	Kutai Timur	11,395.93	15,947.34	685.74	9,017.65	37,046.67
5	Berau	20,963.55	18,183.52	181.72	2,615.23	41,944.01
6	Penajam Paser Utara	-	2,421.47	-	-	2,421.47
7	Mahakam Ulu	11,742.98	6,863.48	318.73	25,332.58	44,257.77
8	Balikpapan	-	127.55	-	-	127.55
9	Bontang	-	-	61.98	-	61.98
<b>TOTAL</b>		<b>69,879.36</b>	<b>96,196.35</b>	<b>6,167.55</b>	<b>84,958.44</b>	<b>257,201.70</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Kaltim, 2022

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan

hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

**Gambar II.83**  
**Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

N O	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	Jumlah	Luas (Ha)
1	Berau	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	81.610
2	Kutai Timur	5	3	9	1	-	24.945	2.996	9.482	109	-	18	37.532
3	Kutai Kartanegara	12	29	4	-	-	43.550	8.375	3.574	-	-	45	55.499
4	Kutai Barat	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
5	Paser	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
6	Mahakam Ulu	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	-	-	11	1.897
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>200.616</b>	<b>13.268</b>	<b>15.141</b>	<b>630</b>	<b>7.770,85</b>	<b>111</b>	<b>237.426</b>

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektar.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya

dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Mencermati hasil identifikasi permasalahan Perhutanan Sosial di atas bisa disimpulkan bahwa lambatnya implementasi disebabkan oleh faktor karakter program yang tidak luwes dalam menghadapi kondisi riil di lapangan seperti keterbatasan areal, rendahnya kapasitas banyak kelompok masyarakat dan ruang yang terbatas bagi modifikasi skema di tingkat lapangan. Paling tidak teridentifikasi akar masalah yang harus dijadikan sebagai arahan kebijakan agar keberhasilan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur dapat ditingkatkan. Mencermati kondisi lapangan yang begitu kompleks terutama dengan kehadiran berbagai sektor usaha di luar kehutanan di dalam dan sekitar kawasan hutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan kesempatan berusaha yang semakin luas melalui berbagai skema perhutanan sosial. Perkembangan positif ini bukan tanpa dampak negatif dan konsekuensi yang berat bagi Pemerintah Provinsi, terutama karena tingginya minat dan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi. Proses cukup panjang dan membutuhkan pendampingan intensif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan berakibat pada tingginya beban kerja Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan. Dirumuskan bahwa masalah utama pada Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

**Gambar II.84**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**  
**Di Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	Kabupaten / Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN					
		Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS
			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue	
1	Berau	80.089			6	7	13						
2	Kutai Barat	19.706			15	6	21						
3	Kutai Kartanegara	43.55			-	8	8	12.771		1	1	12	14
4	Kutai Timur	24.895			-	7	7	2.996		-	-	-	-
5	Mahakam Ulu	30.776			15	4	19						



6	Paser	1.55			-	-	-						
7	Balikpapan							1.4		1		24	25
	<b>TOTAL</b>	200.56 6			36	32	68	12.771		2	1	36	39

KUPS sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan Tabel II.76 dapat dilihat di Kalimantan Timur hingga tahun 2022 baru mencapai 2 KUPS dengan Kategori Gold. Melalui Dinas Kehutanan, Kalimantan Timur berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial.

## **E. Energi Dan Sumber Daya Mineral**

### **1) Ketenagalistrikan**

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

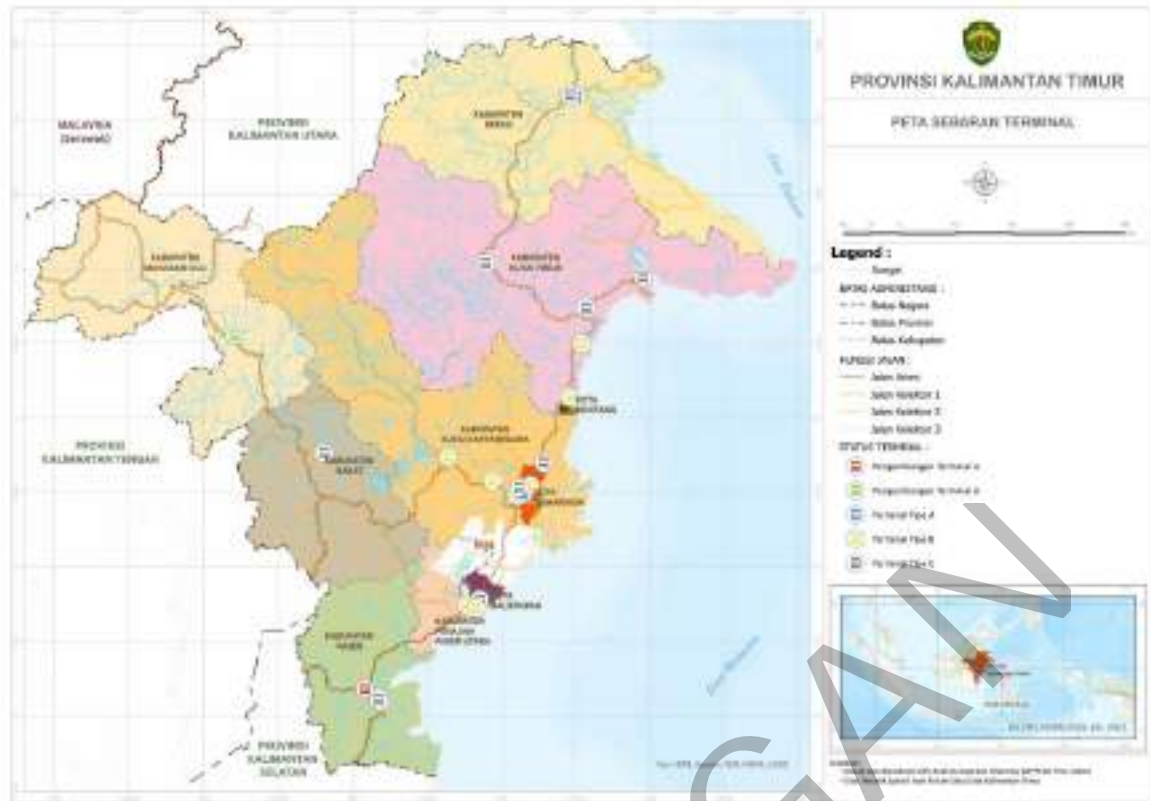
**Tabel II.103**  
**Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi**

DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI													
PER KABUPATEN/KOTA													
KALIMANTAN TIMUR													
TAHUN 2022 TW III													
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	13=(8/3)*100	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	240.079	710.293	34	0	34	0	224.999	416	225.415	100,00%	93,89%
II	Berau	110	88.427	263.150	82	28	110	0	68.252	13.104	81.356	100,00%	92,00%
III	Kutai Kartanegara	237	243.862	753.862	221	16	237	0	198.502	13.426	211.928	100,00%	86,90%
IV	Samarinda	59	272.054	831.220	59	0	59	0	281.599	0	281.599	100,00%	100,00%
V	Kutai Timur	141	139.068	424.743	96	45	141	0	84.798	30.053	114.851	100,00%	82,59%
VI	Bontang	15	58.292	185.393	15	0	15	0	52.447	1.123	53.570	100,00%	91,90%
VII	Penajam Paser Utara	54	59.995	186.801	54	0	54	0	46.687	2.963	49.650	100,00%	82,76%
VIII	Paser	144	94.080	288.225	133	11	144	0	77.728	6.652	84.380	100,00%	89,69%
IX	Kutai Barat	194	55.789	170.871	124	70	194	0	44.152	8.383	52.535	100,00%	94,17%
X	Mahulu	50	12.185	35.274	21	29	50	0	4.596	6.461	11.057	100,00%	90,74%
<b>TOTAL KALTIM</b>		<b>1.038</b>	<b>1.263.831</b>	<b>3.849.832</b>	<b>839</b>	<b>199</b>	<b>1.038</b>	<b>0</b>	<b>1.083.760</b>	<b>82.581</b>	<b>1.166.341</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,29%</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026



**DESA BERLISTRIK NON PLN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

Kab. Paser (11 Desa)		Kab. Berau (28 Desa)		Kab. Kutai Barat (70 Desa)							Kab. Mahulu (29 Desa)		
1	Desa Rantau Buta	28	Desa Merabu	57	Desa Ujoh Halang	86	Desa Randa Empas	115	Desa A bit	143	Desa Long Lees	171	Desa Long Hurai
2	Desa Rantau Layung	29	Desa Panaan	58	Desa Kelian Luar	87	Desa Tukug	116	Desa Rambayan	144	Desa Mekar Baru	172	Desa Long Melaham
3	Desa Keladen	30	Desa Merapun	59	Desa Besiq	88	Desa Tende	117	Desa Gunung Rampah	145	Desa Rantau Sentosa	173	Desa Memahak Besar/Ilir
4	Desa Labuangkalo	31	Desa Muara Lesan	60	Desa Bermal	89	Desa Sambung	118	Desa Jengan	146	Desa Long Nyelong	174	Desa Memahak Ulu
5	Desa Selengot	32	Desa Lesan Dayak	61	Desa Muara Niliq	90	Desa Arian Jaya	119	Desa Muara Kalaq	147	Desa Long Noran	175	Desa Batu Majang
6	Desa Random	33	Desa Long Beliu	62	Desa Mantar	91	Desa Jelmu Sibak	120	Desa Tondoh	148	Desa Rantau Panjang	176	Desa Long Merah
7	Desa Senipah	34	Desa Long Duhung	63	Desa Muara Bombo	92	Desa Suakong	121	Desa Tukul	149	Desa Sekerat	177	Desa Rukun Darul
8	Desa Harapan Baru	35	Desa Long Lamcin	64	Desa Lumpat Dahug	93	Desa Penarung	122	Desa Muyub Ulu	150	Desa Tepian Langsat	178	Desa Matalbaq
9	Desa Kepala Telake	36	Desa Long Keluh	65	Desa Muara Tokong	94	Desa Intu Lingau	123	Desa Muyub Aket	151	Desa Tebangan Lembaik	179	Desa Tri Pariq Makmur
10	Desa Luan	37	Desa Long Pelay	66	Desa Muara Nyahing	95	Desa Lakan Bilem	124	Desa Linggang Muyub Ilir	152	Desa Muara Bengalon	180	Desa Muara Pariq
11	Desa Muara Andeh	38	Desa M apulu	67	Desa Kelian Luar	96	Desa Sentalar	125	Desa Gabung Baru	153	Desa Sandaran	181	Desa Laham
		39	Desa Long Sului	68	Desa Muara Begai	97	Desa Beflung		<b>Kab. Kutai Timur (45 Desa)</b>	154	Desa Manubar	182	Desa Long Gelawang
12	Desa Tanjung Batuq Hara	40	Desa Long Lalai	69	Desa Lofaq	98	Desa Kiaq	126	Desa Long Pog Baru	155	Desa Tadon	183	Desa Muara Ratah
13	Desa Sepatin	41	Desa Punan Segah	70	Desa Jerang Dayak	99	Desa Tendo	127	Desa Senambah	156	Desa Maruanagan	184	Desa Danum Paroy
14	Desa Muhuran	42	Desa Long Ayap	71	Desa Mendung	100	Desa Penawang	128	Desa Mukupan	157	Desa Susuk Luar	185	Desa Nharibungan
15	Desa Sembelimbangan	43	Desa Long Ayan	72	Desa Jerang Melayu	101	Desa Lendan Ujung Nayu	129	Desa Kerayaan	158	Desa Susuk Dalam	186	Desa Naha Tifab
16	Desa Lamn Telhan	44	Desa Punan Malinau	73	Desa Dabaq	102	Desa Kenyarian	130	Desa Tanjung Manis	159	Desa Tanjung Mangkalat	187	Desa Naha Slat
17	Desa Lamn Pulul	45	Desa Punan Mahaka	74	Desa Tanjung Pagay	103	Desa Rikong	131	Desa Perdan	160	Desa Susuk Tengah	188	Desa Long Apari
18	Desa Teluk Muda	46	Desa Baru Rajang	75	Desa Gunung Bayar	104	Desa Kendiq	132	Desa Saka	161	Desa Manubar Dalam	189	Desa Delang Kerohong
19	Desa Tunjungan	47	Desa Sidung Indah	76	Desa Muara Belan	105	Desa Muara Ponaq	133	Desa Mandu Dalam	162	Desa Kadungan Jaya	190	Desa Long Pakaq
20	Desa Menambang Kiri	48	Desa Pegat Batumbi	77	Desa Muara Ohong	106	Desa Sakaq Lotog	134	Desa Sempayau	163	Desa Pempangan Baru	191	Desa Long Lunuk
21	Desa Menambang Kanan	49	Desa Teluk Sumbari	78	Desa Tanjung Jone	107	Desa Sakaq Tada	135	Desa Pelawan	164	Desa Mata Air	192	Desa Long Isun
22	Desa Kupang Baru	50	Desa Tabakar Muara	79	Desa Getungiq	108	Desa Gemuruh	136	Desa Tepian Terap	165	Desa Bukit Permata	193	Desa Naha Aru
23	Desa Bukit Jering	51	Desa Tabakar Ulu	80	Desa Pereng taliq	109	Desa Karangan	137	Desa Kolek	166	Desa Beno Harapan	194	Desa Datar Naha
24	Desa Liang Buaya	52	Desa Teluk Alulu	81	Desa Tanjung Soke	110	Desa Merayaq	138	Desa Pulau Miang	167	Desa Mugi Rahayu	195	Desa Lunung Ubinq
25	Desa M elintang	53	Desa Balkukup	82	Desa Deraya	111	Desa Linggang Marimun	139	Desa Perupuk	168	Desa Mawai Indah	196	Desa Long Tuvoq
26	Desa Enggelam	54	Desa Bisan Ulu	83	Desa Lempur	112	Desa Gadur	140	Desa Mandu Pantai Sejat	169	Desa Himba Lestari	197	Desa Liu Mulang
27	Desa Muara Enggelam	55	Desa Bukit Makmur	84	Desa Loa Deras	113	Desa Linggang Muara Bat	141	Desa Long Bantug	170	Desa Melan	198	Desa Long Pakaq Baru
		56	Desa Kelwai	85	Desa Minta	114	Desa Muara Jawaq	142	Desa Long Pejeng			199	Desa Long Lunuk Baru

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

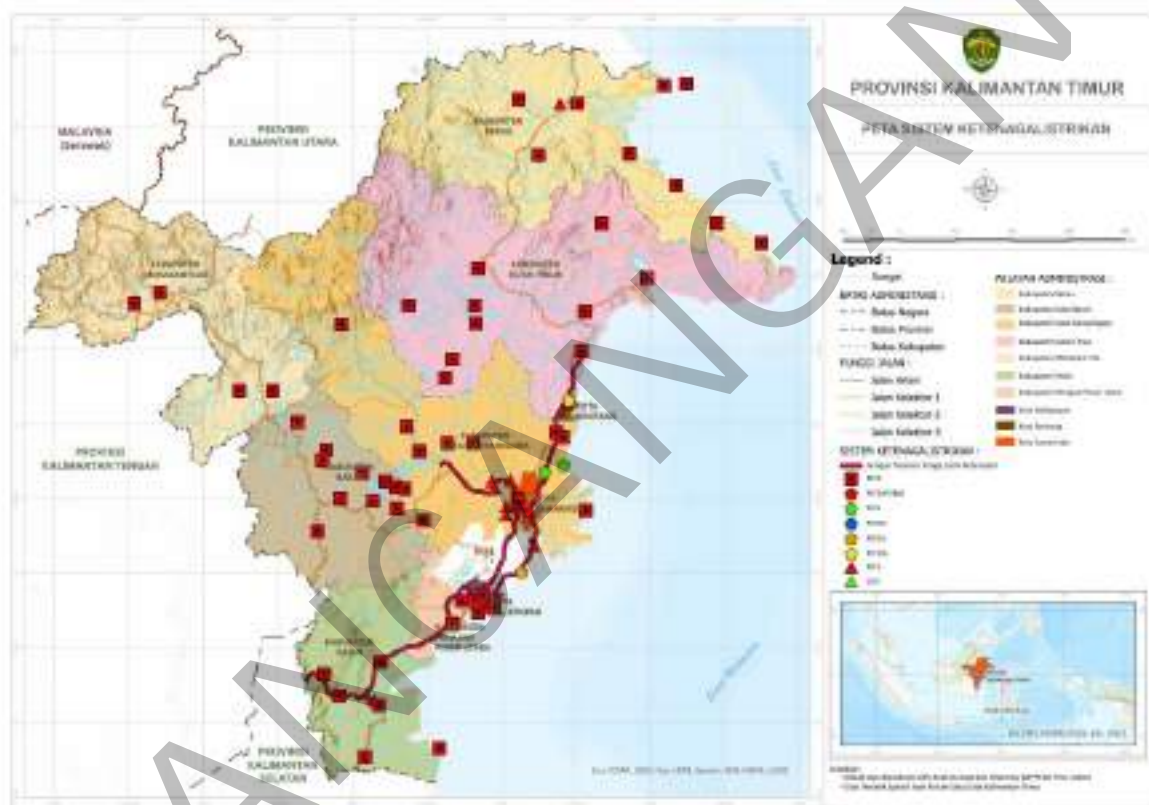
**Gambar II.85**  
**Data Desa Berlistrik Non PLN**

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup

besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.86**  
**Peta Sistem Ketenagalistrikan**

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan

&Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.104**  
**Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal**

NO.	TAHUN	AKTIFITAS	LOKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT/OUTCOME
1	2019				
2	2020	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Rantau Buta, Kec. Batu Sopang, Kab.Paser Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur		51 Pelanggan, kapasitas 23 kWp 130 Pelanggan, kapasitas 65.34 kWp 54 Pelanggan, kapasitas 27.72 kWp
3	2021	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Tadoan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara Dusun Ketibeh Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara Desa Long Lamcin, Kec. Kelay, Kab. Berau Desa Rantau Layung, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser Desa Tanjung Söke, Kab. Bongan, Kab. Kutai Barat		203 Pelanggan, kapasitas 58.80 kWp 201 Pelanggan, kapasitas 83.16 kWp 91 Pelanggan, kapasitas 47.04 kWp 67 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp 79 Pelanggan, kapasitas 33.60 kWp 49 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp
4	2022	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau Desa Menamang Kanan, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara Desa Menaman Kiri, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara Desa Long Duhung, Kec. Kelay, Kab. Berau	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	293 Pelanggan, kapasitas 73.65 kWp 139 Pelanggan, kapasitas 40.45 kWp 208 Pelanggan, kapasitas 65.54 kWp 141 Pelanggan, kapasitas 37.45 kWp 69 Pelanggan, kapasitas 21.89 kWp
5	2023	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau Desa Long Sului, Kec. Kelay, Kab. Berau Desa Lemper dan Desa Seraya, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat Desa Mata Libaq, Kec. Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu Desa Ujoh Halang, Kec. Long Iram, Kab. Kutai Barat Dusun Mulu Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam, Kab. Paser Desa Labuan Kallo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat

dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini masih dalam proses pembangunan.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 839 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 199 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

**Tabel II.105**  
**Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.163.243
2	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh)	1.801,72	1.748,94	2.053,4	2.213,4	2.379,9

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

## 2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air,

surya, angin, bioenergy, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

**Tabel II.106**  
**Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan EBT (Realisasi Capaian 6,97)**

Rincian data kualitatif/absolut terkait presentasi pemanfaatan EBT (Realisasi Capaian 6,97)						
Jenis Energi	Unit	2022	Konversi Ke BOE	Satuan Energi		
				BOE	TOE	
<b>Minyak Bumi</b>						
Total Konsumsi						
1. BBM						
Avgas	KL	4	5,53	22,12	3,0968	
Avtur	KL	64882	5,8907	382200,3974	53508,05564	
MFO 180/380	KL		6,9612	0	0	
RON 95/98	KL	3258	5,8275	28985,995	2658,0393	
RON 88	KL	189932,4	5,8275	2206831,061	154956,3485	
RON 89/90	KL	603244,8	5,8275	3515409,072	492157,2701	
RON 92	KL	48939	5,8275	285192,0225	39926,88315	
IDO	KL	112928,946	6,6078	74621,8894	104469,6645	
CN 48 (Murni)	KL		6,4871	0	0	
CN 51 (Murni)	KL		6,4871	0	0	
CN 53 (Murni)	KL		6,4871	0	0	
Koresene	KL	570	5,9274	3378,618	473,00652	
Biogasoil (820/830)	KL	213353	6,4871	968829,5724	135636,1401	
2. LPG	MT	112073	8,5246	955377,4958	133752,8494	
<b>Total</b>				<b>7982438,243</b>	<b>1117541,354</b>	
<b>Batu Bara</b>						
Total Konsumsi						
1. Bahan Bakar Pembangkit						
	Ton	4813988	4,2	20218749,6	2830624,944	
2. Bahan Bakar Industri						
	Ton		4,2	0	0	
<b>Total</b>		<b>4813988</b>		<b>20218749,6</b>	<b>2830624,944</b>	
<b>Gas Bumi</b>						
Total Konsumsi						
1. Bahan Bakar Pembangkit						
	mms cf	371,029	0,1796	66,6368084	9,329153318	
2. Bahan Bakar Industri						
	mms cf	264,996	0,1797	47,5932816	6,663059424	
3. Jargas Rumah Tangga						
	Sambungan RT/mms cf	62735	0,1798	11267,206	1577,40884	
4. Sektor Komersial						
	m3		0,1799	0	0	
<b>Total</b>				<b>11381,43609</b>	<b>1593,401053</b>	
<b>Energi Baru Terbarukan (EBT)</b>						
<b>Non Listrik</b>						
Total Konsumsi						
1. FAME						
	KL	213353	6,4871	1384042,246	193765,9145	
2. Etanol						
	KL		2,2979	0	0	
3. Biomassa						
	Ton		3,2979	0	0	
4. Kapasitas Biogas RT						
	m3/tahun	183898,4	0,00634	1165,915856	163,2282198	
<b>Total</b>				<b>1385208,162</b>	<b>193929,1427</b>	
<b>Listrik</b>						
Kapasitas Terpasang On Grid Off Grid						
			Cf	Eff		
			E	F		
1. PLTA	MW		0,6	0,33	0,00	0
2. PLTB	MW		0,5	0,25	0,00	0
3. PLT BIOGAS	MW	9	0,8	0,25	154652,54	21651,35616
4. PLT BIOMASSA	MW	28,5	0,8	0,25	489733,06	68562,62784
5. PLTM	MW		0,6	0,25	0	0
6. PLTMH	MW	0,529	0,6	0,25	6817,6	954,4639507
7. PLTP	MW		0,9	0,33	0,00	0
8. PLTS/PLTS ATAP	MW	9,16	0,2	0,13	75674	10594,36017
9. PLTS HYBRID	MW	0,15	0,17	0,13	1053,32	147,4651662
10. PLT SAMPAH	MW		0,8	0,25	0,00	0
11. PJUTS	MW				0,00	0
12. LTHSE	MW				0,00	0
<b>Total</b>				<b>727930,52</b>	<b>101910,2733</b>	
<b>Total EBT</b>				<b>2113138,69</b>	<b>295839,416</b>	
<b>Perhitungan Bauran Energi 2022</b>						
Energi Primer		MTOE		%		
Minyak Bumi		1117541,354		26,32234754		
Batubara		2830624,944		66,67197885		
Gas Bumi		1593,401053		0,037530653		
EBT		295839,416		6,968142963		
<b>Total</b>		<b>4245599,115</b>		<b>100</b>		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang

paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Wattpeak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapan seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, biomassa seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

**Tabel II.107**  
**Potensi Bioenergi dari Pome**

Potensi Bioenergi dari Pome : Kalimantan Timur						
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pabrik Minyak Sawit	TBS Diolah / Tahun (ton)	Pome Yang Dihasilkan (m3)	Listrik Yang Dihasilkan (MWh)	Kabupaten Pembangkitan (MW)
1	Kutai Timur	34	8.325.264	4.995.158	264.978	32,6
2	Kutai Kartanegara	18	4.260.823	2.556.494	135.614	16,7
3	Berau	11	3.064.374	1.838.624	97.534	12
4	Kutai Barat	6	1.736.580	1.058.148	56.132	6,9
5	Penajam Paser Utara	7	1.405.494	843.296	44.734	5,5
6	Paser	17	3.080.340	1.848.204	98.942	12,1
7	Mahakam Ulu	1	152.550	91.530	4.855	0,60
	<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>22.025.425</b>	<b>13.231.454</b>	<b>702.789</b>	<b>86,4</b>

Sumber : Disbun Kaltim, 2021 (Data Diolah)

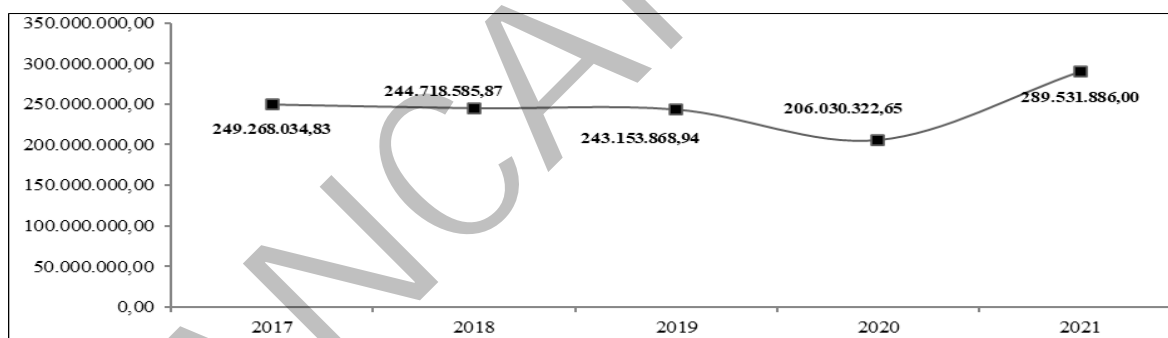
**Tabel II.108**  
**Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi**



Unit Usaha	Lokasi (Kab)	Luas (ha)	Kelas Perusahaan	Luas Alokasi HTE	Rencana Penanaman 2015-2024	Jenis Tanaman Energi
<b>Unit Usaha yang telah mengembangkan THE di Kaltim</b>						
PT. Dharma Hutani Makmur	Kutai Kartanegara	41,545	Pertukangan dan energi	7,500	7,500	Akasia, Gamal, Giant Bamboo
<b>Unit Usaha yang Berkomitmen untuk Mengembangkan Bioenergi di Kaltim</b>						
PT. Inhutani I	Paser	16,816		0	0	
PT. Hutan Mahligai	Kutai Barat	11,275		100	0	
PT. Belantara Pusaka	Berau	14,010		500	500	
PT. Oceanic Timber Product	Berau	16,600		3000	0	

### 3) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.87**  
**Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2021 (Ton)**

Pada tahun 2021 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

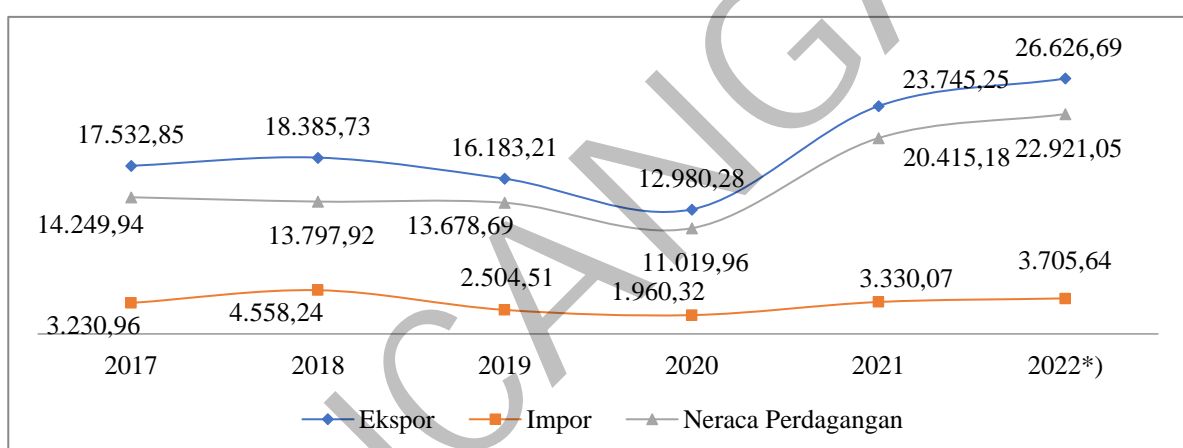
**Tabel II.109**  
**Produksi Pertambangan Unggulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2018	244.718.585,87	23.720,00	296.830,00
2019	243.153.868,94	21.038,83	231.067,41
2020	206.030.322,65	19.296,85	203.955,18
2021	294.252.801,68	17.742,36	172.829,53

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

## F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



\*) s/d September 2022; Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.88**  
**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2017-2021, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

**Tabel II.110**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017 – 2022 (Juta US\$)**

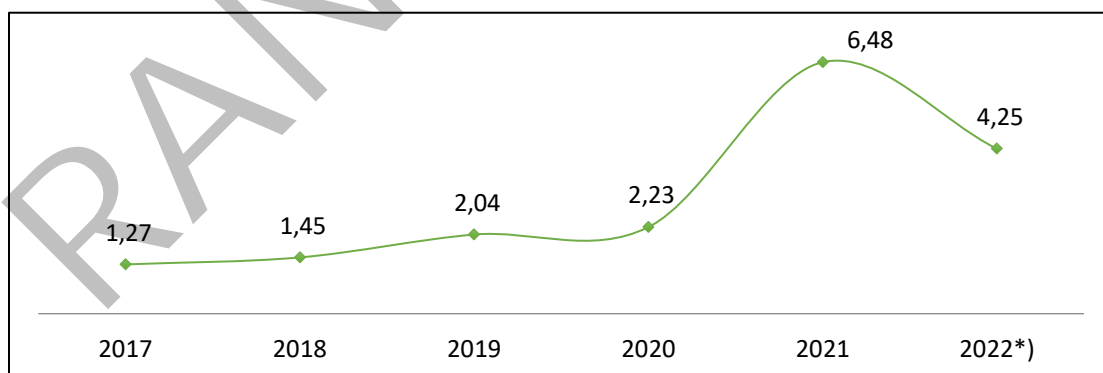
No	Golongan Barang	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
Migas		3.781,67	4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.102,65
1	Minyak Mentah	922,56	334,70	12,63	7,27	-	13,93

No	Golongan Barang	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
2	Hasil Minyak	188,97	12,97	224,05	108,64	7,40	588,30
3	Gas	3.140,97	2.977,57	1.831,52	1.032,38	1.597,75	1.500,42
Non Migas		10.072,71	13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.140,09	24.524,04
1	Hasil Tambang	11.957,04	13.580,80	12.408	9.600,36	17.364,22	20.271,85
2	Hasil Industri	1.266,53	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.769,25	4.247,59
3	Hasil Pertanian	4,82	4,21	8,87	9,11	6,63	4,60
Total Ekspor		17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28	23.745,24	26.626,69

\*) s/d September 2022; Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 82,93 persen dibanding tahun 2020 yaitu dari US\$ 12,98 miliar menjadi US\$ 23,75 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2021 disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas, hanya komoditas hasil minyak dan hasil pertanian yang mengalami penurunan. Ekspor barang migas tahun 2021 mencapai US\$ 1,61 miliar naik sebesar 39,79 persen dibanding tahun 2020. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 22,14 miliar naik sebesar 87,12 persen dibanding tahun 2020.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 6,48 miliar US\$ pada tahun 2021 mengalami peningkatan 190,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,23 miliar US\$. Sampai dengan bulan September tahun 2022, Nilai ekspor komoditas non migas dan batubara telah mencapai 4,23 miliar US\$



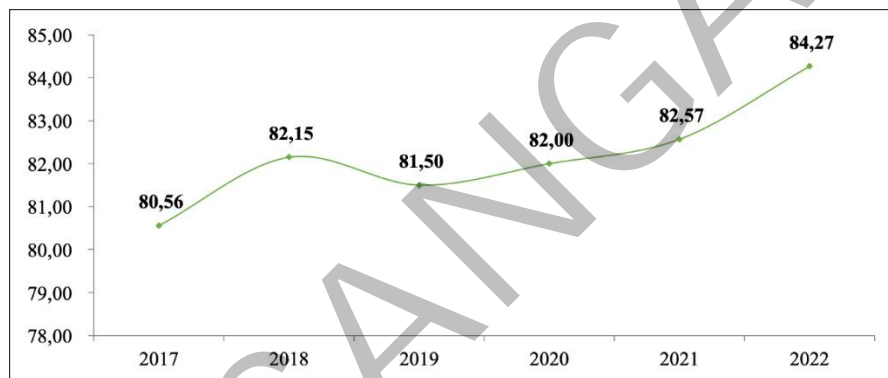
\*) s/d September 2022; Sumber: BPS Prov KALTIM, 2022

**Gambar II.89**  
**Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022 (Miliar US\$)**

### 2.3.3. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022 meningkat di angka sementara 84,27 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,57. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM

**Gambar II.90**  
**Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

## 2) Nilai SAKIP

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

**Tabel II.111**  
**Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur**

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30	25.35	25.59	25.92	25.94	26,06
b. Pengukuran Kinerja	25	18.28	18.77	18.97	18.99	22,50
c. Pelaporan Kinerja	15	12.47	12.54	12.75	12.76	12,84
d. Evaluasi Kinerja	10	5.13	5.91	6.21	6.21	
e. Capaian Kinerja	20	13.66	13.74	13.82	13.92	
Nilai Hasil Evaluasi	<b>100</b>	<b>77,50</b>	<b>74,89</b>	<b>76,55</b>	<b>77,67</b>	<b>78,10</b>
Predikat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
Persentase Kenaikan / Penurunan		<b>0.2%</b>	<b>-3.4%</b>	<b>2.2%</b>	<b>3.7%</b>	<b>0,6%</b>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh nilai 78,10 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat baik. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,6% berada di angka 78,10 dengan predikat BB.

Peningkatan ini belum sepenuhnya berkualitas baik, beberapa aspek yang menjadi catatan dalam implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Antara lain adalah perumusan sasaran strategis pada beberapa Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan akan dicapai dan indikator kinerja yang dimiliki belum memenuhi kriteria yang sesuai untuk mencapai target yang seharusnya. Kemudian permasalahan belum selaras antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pada kinerja sehingga evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja tidak sebanding dengan yang diharapkan.

### **3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas

pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

#### **2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **A. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Indikator kinerja bidang Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### **Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah				76,19
2	Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan				75
3	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Yang Digunakan Dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				90
4	Persentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan Yang Dilaksanakan Mendukung Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi				75
5	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				94,02
6	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				100
7	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran				85
8	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran				85
9	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	89,42	87	

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

## B. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah.

Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2021 adalah 53,93 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel II.112**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Total Pendapatan (Ribuan Rupiah)	DOF (Persen)
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
Rata-rata	5.200.813.725,65	9.595.145.984,16	53,93

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2022

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2021. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam



pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2.3.5. Pengawasan**

#### **1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)**

Tugas dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPK adalah pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui kematangan penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah perlu adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah. Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil Quality Assurance tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap:
  - (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan

Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (Fraud Control System) dan Impelementasinya.

**Tabel II.113**  
**Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Rekapitulasi seluruh capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel II.114**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	-	72	25	150	205	215
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	-	30	25	55	70	75
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	68,23	68,43	68,55	69,00	69,29	69,10
1.4	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)					95,74	92,95
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	-	791	2.178	13.000	48.085	14.281
1.5	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	-	635	6.952	2.500	3.369	3.652
1.6	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	-	0	25	90	85	93
1.7	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	-	60	65	70	60	80,99
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan					60	70
2.2	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Kesehatan (rumah sakit)					87,66	86,26
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	-	-	23,50	23,50	23,50	23,50

RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
2.4	Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang Memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan					88.707	88.329
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1	Persentase Capaian Layanan SDA (%)					67,99	74,62
3.2	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	51,50	54,30	68,46	62,64	64,64	68,98
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36.722	51.722	46.768	72.881	71.781	71.741
3.4	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang					0,87	0,92
<b>4</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat</b>						
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	-	67,18	61,38	50	67,50	76,67
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	55	60	60	61,33	66,67	82,67
<b>5</b>	<b>Sosial</b>						
5.1	jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	-	300	385	405	23.350	2.655
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>						
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-	50	29,41	-0,27	26,04	26,04
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	-	80	80	80	70	77,22
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	30	-	0,09	30	31,86	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64	
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	-	70	70	82	90	
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	-	34	37	62	47,98	64
2.4	Rasio KDRT (%)	27,11	0,066	18,16	27,20	0,029	0,016

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
2.5	Kampung KB	175	154	160	175	299	229
<b>3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	640	670	592	679	755	836
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	2,700 (Cemar Ringan)	9,304 (Cemar Sedang)	5,299 (Cemar Sedang)	6,509 (Cemar Sedang)	2,797 (Cemar Ringan)	3,34 (Cemar Ringan)
3.3	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)		5,60	25,18	50,72	41,96	70,68
3.4	Indeks Kualitas Air Sungai			77,09	53,70	51,92	53,02 *Data per Tanggal 9 Desember 2022
3.5	Indeks Kualitas Udara			89,42	89,06	88,84	87,59 *Data per Tanggal 9 Desember 2022
3.6	Indeks Kualitas Air Laut			-	83,51	85,40	81,45 *Data per Tanggal 9 Desember 2022
3.7	Indeks Kualitas Lahan			72,12	79,76	82,21	82,35 *Data per Tanggal 9 Desember 2022
3.8	Indeks Risiko Bencana			154,49	154,02	153,28	
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
4.1	Indeks Desa Membangun			0,6238	0,6752	0,7071	0,7320

RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
4.2	Jumlah desa tertinggal (desa)			285	128	78	38
4.3	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	275	320	335	360	390	428
4.4	Desa berkembang (Desa)	140	289	304	323	27	38
4.5	Desa yang mampu menjalankan Pemerintah Desa secara optimal (Desa)			338	363	30	35
4.6	Jumlah kampung iklim	-	-	335	363	35	40
<b>5</b>	<b>Perhubungan</b>						
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	9.452.932	10.392.536	10.721.656	3.570.750	4.667.228	5.902.660
5.2	Jumlah barang (ton)	2.399.801.887	325.051.663	341.529.897	294.478.397	323.233.820	268.282.159
5.3	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	82	83	83	84	85	85
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	1.193	846	570	448	418	510
<b>6</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,49	3,04	3,14	2,22	3,3
<b>7</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>						
7.1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	-	-	-	-	1	2,62
7.2	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	-	-	-	-	2,75	2,2
<b>8</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82	56,33	56,74	57,23	54,83	
8.2	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	-	-	0,13	0,78
8.3	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)					20,59	55,00
<b>9</b>	<b>Kebudayaan</b>						

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
9.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola					45	55
9.2	Persentase kebudayaan yang dikembangkan					65	85
9.3	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)					60,00	30,00
<b>10</b>	<b>Perpustakaan</b>						
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	-	137.841	469.997	199.772	110.802	157.564
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>						
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>						
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)		2	3	3	2	3
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>						
2.1	Luas lahan kelompok tani tanaman pangan yang difasilitasi (Ha)					7.000	8.000
2.2	Jumlah fasilitas pengembangan prasarana tanaman hortikultura (unit)					6	7
2.3	Jumlah produksi padi (Ton)	356.680	262.773	253.820	262.430	244.678	190.000
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	-	258.565	126.986		345.230	145.036,48
2.5	Jumlah aparatur Non aparatur yang dibina (orang)					91	183
2.6	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibina (unit lembaga)					4	4
2.7	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	-	-	5	12	24	43
2.8	Angka Kelahiran Sapi (%)	-	19,00	17,49	20,10	19,00	19,54
2.9	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta Ton CO2eq)				2.916	6,73	7,85
2.10	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (kelompok tani)					34	36



RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
2.11	Luas kebun yang dibangun (Ha)			1.389.845	1.389.078	1.551.343	1.551.345
2.12	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13.250.778	13.478.263	18.416.921	16.809.560	17.363.298	17.363.298
2.13	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)					1	
2.14	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Jumlah Perusahaan)			18	35	41	36
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>						
3.1	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	-	-	1,12	1,13	1,04	1,17
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	-	-	0,77	1,75	0,12	-
3.3	Persentase Tutupan Lahan Meningkat (%)	-	-	5,66	13,98	14,40	12,21
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	118.000	31.368	32.000	19.178	26.452
3.5	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)			5.221.923,52	4.808.965,74	4.104.271,21	3.347.625,04
3.6	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (ton)			1.428,65	864,9	1.175,38	658,26
<b>4</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	-	3,13	4,40	4,80	6,53	6,97
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	905.821	945.607	1.032.475	1.105.227	1.143.533	1.197.475
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>						
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)			2,04	2,23	4,75	4,25
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara					116,56	102,7
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>						
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	3,47	0,52	0,19	-2,77		
6.2	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan Peruntukan Industri (industri)	-	-	2	1	2	1

RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

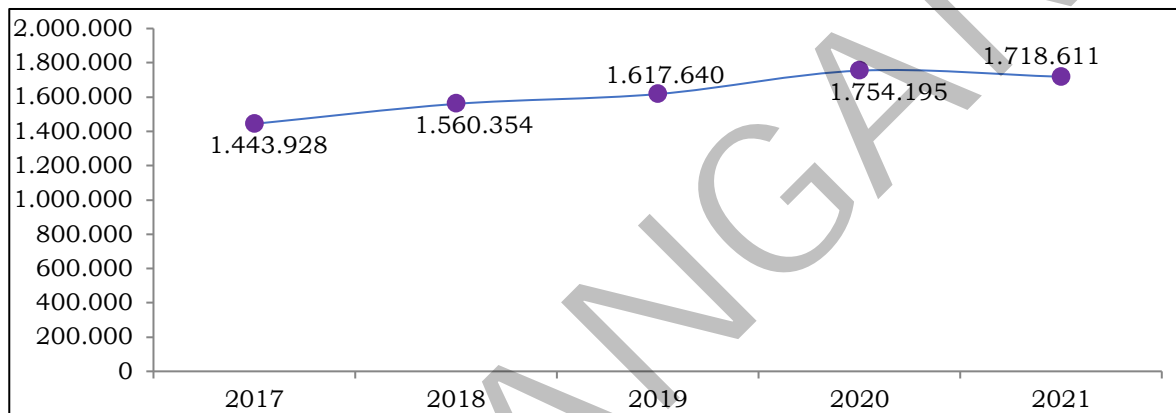
No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
<b>7</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	173.622	151.918	148.197	155.000	160.240	123.331
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	159.345	149.039	176.049	158.709	173.996	121.945
7.3	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)					289.048	223.354,43
7.4	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)					36	30
7.5	Jumlah izin usaha pengolahan dan pemasaran (IUP)					36	30
<b>D</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>						
1.1	Persentase perangkat daerah nilai SAKIPnya memperoleh predikat Minimal (Baik) (%)	71	71,05	73,68	74,00	75,67	89,19
1.2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) (%)	-	86	84	87	92	92
1.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) (%)		49	13,16	61	83,44	64,96
1.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)		52,63	60,53	60,53	63,04	
<b>E</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>						
1.1	Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan (%)					78,50	98,59
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>						
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru			2	2		

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
2.2	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)			11.775	10.132	10.220	9.699
2.3	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)					92,98	82,82
2.4	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)					114,69	93,48
2.5	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)					692	309
<b>F</b>	<b>Pengawasan</b>						
1	Hasil Penilaian Integritas	-	60	65	66,67	66,33	
2	Level kapasitas APIP	2	2	3	3	3	

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Penyebab turunnya pengeluaran rata-rata per kapita adalah menurunnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2021 yang mencapai Rp 736.465 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 790.469 (45,06 persen).



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.91**  
**Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Rupiah)**

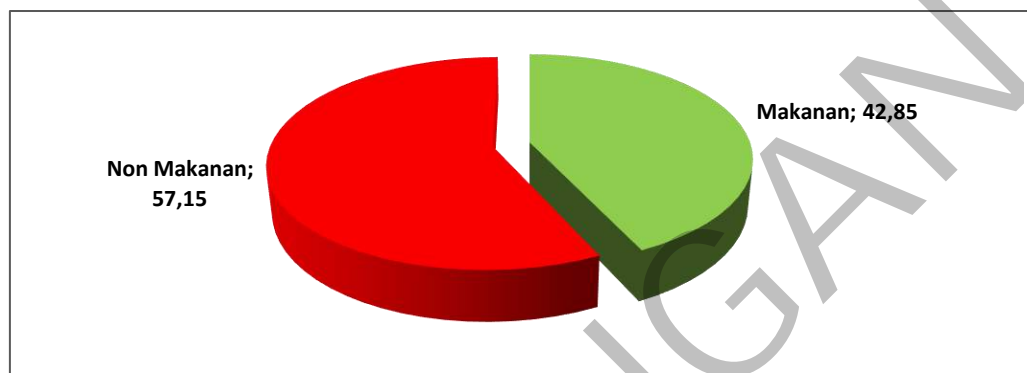
### B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

**Tabel II.115**  
**Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2021**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	857.449	893.217	963.725	982.146
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,95	55,22	54,94	57,15

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.92**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

### C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu ukuran dalam penentuan kesejahteraan petani atau dapat juga digunakan sebagai tolok ukur kemampuan nilai tukar produk hasil pertanian yang dijual dari petani dengan biaya yang diperlukan untuk berbagai produk yang dibutuhkan pada proses produksi pertanian dan konsumsi rumah tangga. Sehingga besar kecilnya angka NTP akan menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk-produk lain. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel II.116**  
**Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	121,96	123,77	107,91	116,96	128,25	140,84
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	125,54	128,75	102,41	104,76	106,05	113,40
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,15	96,14	105,38	111,65	120,94	124,20

\*) Oktober 2022; Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Peningkatan NTP tahun 2022 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP subsector Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan februari dan terus menurun hingga bulan mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan juni tahun 2022. Bahkan pada bulan mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 subsector perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima subsector dalam pembentukan NTP, petani pada subsector perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan subsector yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk subsector yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.

**Tabel II.117**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Subsektor Tahun 2021-2022 (2012=100)**

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2021	2022*)	
	NTP Gabungan	120,94	124,25	2,74
1.	Tanaman Pangan	95,28	91,65	-3,81
2.	Hortikultura	106,07	112,35	5,92
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	151,10	158,33	4,78
4.	Peternakan	104,28	109,92	5,41
5.	Perikanan	103,01	97,98	-4,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani subsector perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan subsector yang lain. Sementara subsector tanaman pangan dan perikanan merupakan subsector yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 104,64. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 124,20, dibawah Kalimantan Barat sebesar 136,95.

**Tabel II.118**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional**  
**Menurut Subsektor Tahun 2022**

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	124,20	136,95	115,56	104,39	108,93	107,27
1.	Tanaman Pangan	91,65	91,49	95,59	100,06	96,03	100,41
2.	Hortikultura	112,35	99,65	111,59	100,93	101,77	107,97
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	158,33	161,36	128,36	112,51	156,08	123,52
4.	Peternakan	109,92	100,91	105,97	103,77	104,06	100,85
5.	Perikanan	97,98	102,64	94,46	100,60	104,29	105,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

#### **D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.119**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	PMDN				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.935	20.837	19.952	21.596	24.829
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	520	2.227	3.924	9.291	4.938
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,88	9,36	5,08	2,32	5,03
No	Uraian	PMA				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	12.500	15.166	5.868	5.650	11.609
2	Jumlah proyek seluruh PMA	513	903	778	1.034	742
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,37	16,80	7,54	5,46	15,65

\*) Triwulan III Tahun 2022; Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

Berdasarkan tabel di atas, sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 38,37 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 32,64 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 49,97 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,44 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga

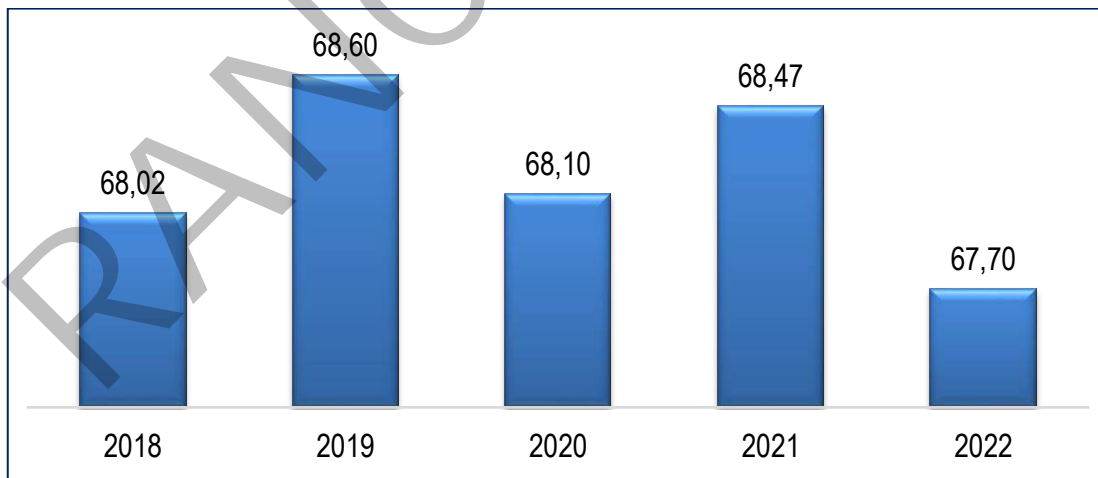


dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

#### **E. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan perbaikan guna menunjang reformasi birokrasi yang baik dan mengarah kearah tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,10 dengan predikat B (Cukup Baik), sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54% berada di angka 68,47 dengan predikat B (cukup baik).



Sumber: Biro Organisasi

**Gambar II.93**

#### **Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur**

#### **F. Luas Wilayah Produktif**

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian,

perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.120**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

No.	KAB/KOTA	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Paser	301.226	445.964	67,54
2.	KUBAR dan MAHULU	515.012	862.681	59,70
3.	KUKAR	420.324	936.710	44,87
4.	KUTIM	472.421	942.679	50,11
5.	Berau	370.716	536.320	62,12
6.	PPU	113.402	145.011	78,20
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
9.	Bontang	5.643	10.002	56,42
<b>J u m l a h</b>		<b>2.234.602</b>	<b>3.982.325</b>	<b>56,11</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan pencegahan dan meminimalisir dampak banjir. Kegiatan ini lebih kepada peran serta masyarakat secara berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 17.274 meter pantai kritis di Kalimantan Timur, sedangkan pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022 triwulan III, baru mencapai 619 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun

penanganan kedepan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

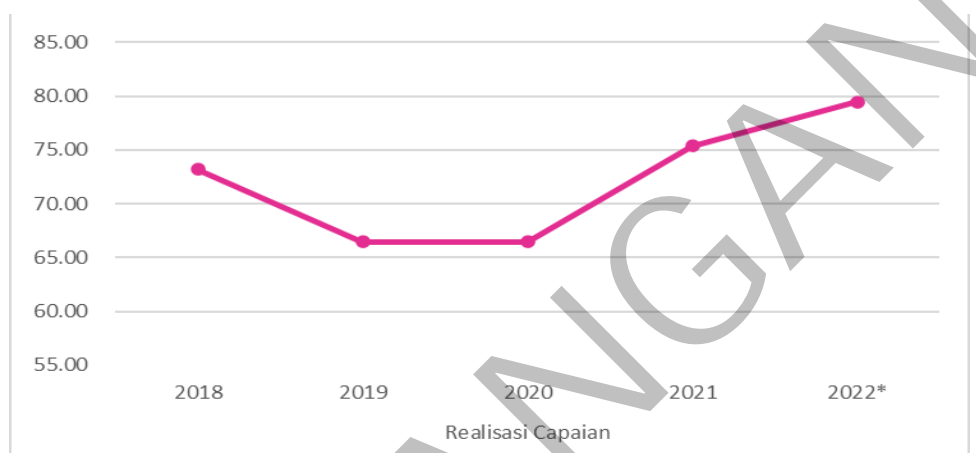


**Gambar II.94**  
**Penanganan Pantai Kritis Provinsi Kalimantan Timur**

Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perkonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Provinsi yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 66.46 dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Penurunan tersebut diakibatkan adanya penyesuaian terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Namun demikian, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38 dan 79,46 dikarenakan progress revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.

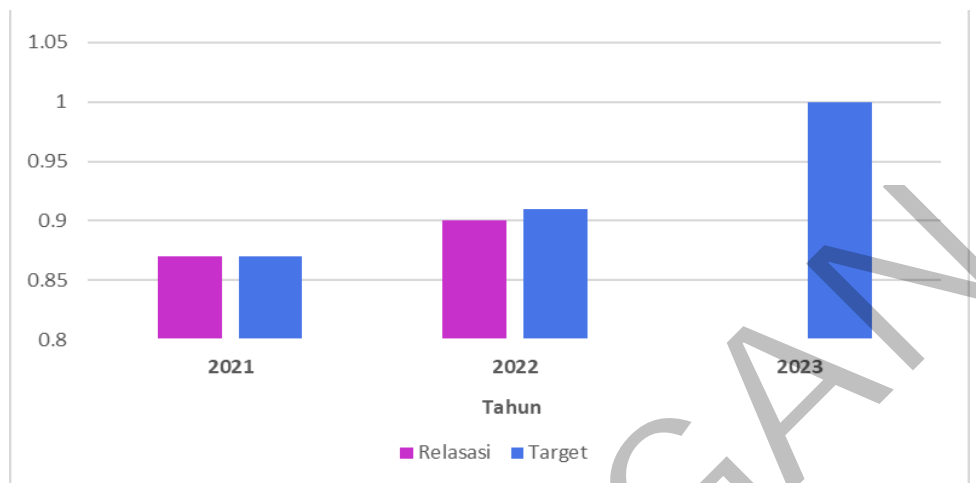


**Gambar II.95**  
**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10 dimana diperlukan peningkatan sebesar 7,72. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan revisi perda dapat mengacu perda RTRWP, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diukur dengan penilaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sejauh ini penyelenggaraan penataan ruang belum sepenuhnya memenuhi tujuan penataan ruang itu sendiri untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berbagai isu strategis penyelenggaraan penataan ruang daerah bermunculan, seperti belum

efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, belum efektifnya kelembagaan penataan ruang, dan dokumen RTRW belum dijadikan sebagai acuan pembangunan sektor dan daerah. Kondisi demikian juga diperkuat dengan potret kinerja penyelenggaraan penataan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat dari capaian indeks penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan pada gambar di bawah.



**Gambar II.96**  
**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**

Berdasarkan grafik diatas, capaian indeks penyelenggaraan penataan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian target ini dikarenakan telah memenuhi penilaian pada komponen indeks perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, seperti tersusunnya materi teknis RTRWP, pelaksanaan evaluasi RTR Kab/Kota, dan pelaksanaan audit pemanfaatan ruang. Capaian kinerja ini akan berdampak penting jika target berikutnya berupa penetapan Perda RTRWP bisa dicapai, sehingga dapat menjadi acuan evaluasi Perda RTR Kab/Kota dan pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang dan audit pemanfaatan ruang. Sehingga penyelenggaraan penataan ruang tetap harus diprioritaskan untuk menjadi nilai penting dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah dan kesesuaian lahan yang sesuai dengan peruntukannya.

Peran RTRWP sebagai pedoman perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, juga sebagai pedoman perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Adanya dinamika dan arah pengembangan

pembangunan memberikan dampak intensitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tinggi.

Terhadap adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, baik berupa alih fungsi lahan dan konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dalam upaya menjaga kualitas kawasan yang berfungsi lindung, maka kegiatan yang juga harus terus dilanjutkan adalah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

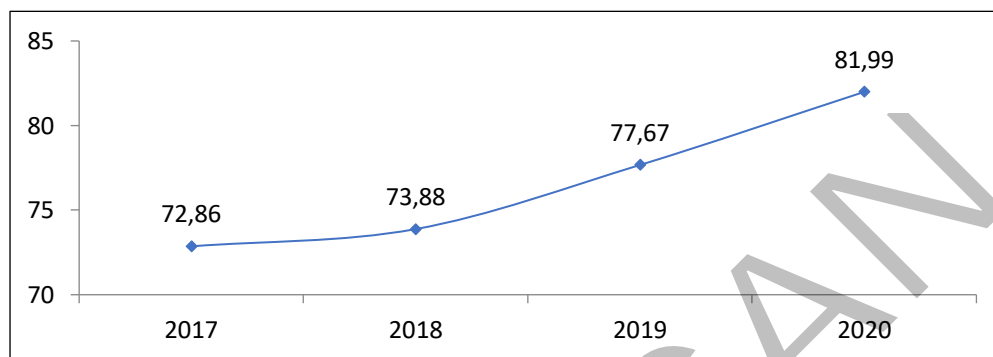
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kaltim. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*).

Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur sebesar 66,81 masuk dalam kategori baik, dan naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 62,15 Atau naik sebesar 7,52 persen. Hal tersebut menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Kaltim sudah cukup baik, besaran alokasi pendanaan infrasktruktur dan pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan prioritas target pembangunan yang adalah faktor penyebab kenaikan kepuasan tersebut.

## **G. Indeks Demokrasi**

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik

dengan indeksinya mencapai 81,02 persen pada tahun 2021 dan di level nasional berada pada peringkat ke Lima, nilai indeks ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan metode dalam perhitungan indeks demokrasi mengalami perubahan. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”.



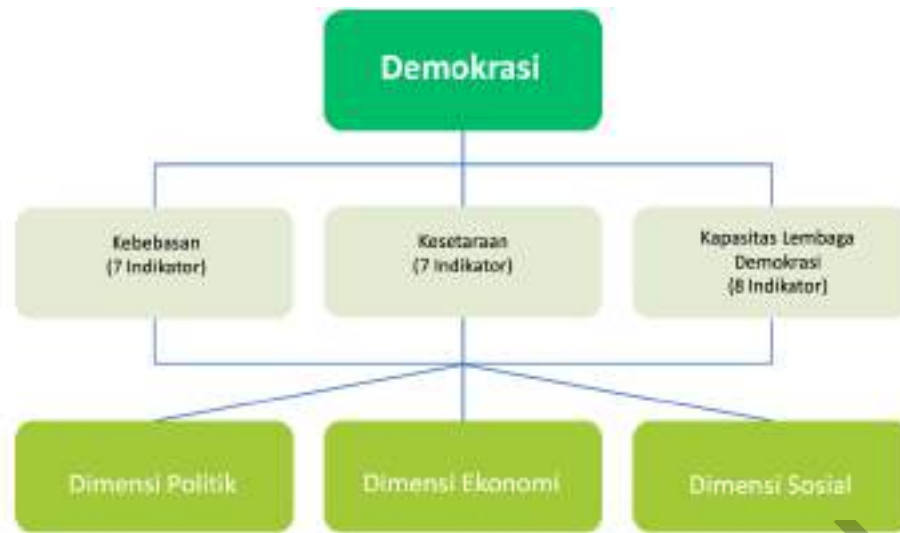
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

**Gambar II.97**

**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2016-2021**

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama focus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada institutional democracy seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru focus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran institutional democracy dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lamaterdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.



### **Kebebasan**

Proses sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri.

### **Kesetaraan**

Proses sejauh mana kelompok minoritas atau pun sub-altern secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun sosial (masyarakat sipil).

### **Kapasitas Lembaga Demokrasi**

Proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial.

<b>Aspek 1 Kebebasan</b>		<b>89,46</b>	<b>TINGGI</b>
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	92,65	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	63,27	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	90,91	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97,97	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	95,00	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	82,27	-
<b>Aspek 2 Kesetaraan</b>		<b>76,67</b>	<b>SEDANG</b>
8	Kesetaraan Gender	87,88	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,50	-



11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	63,58	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	93,17	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,41	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,49	-
<b>Aspek 3 Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>		<b>77,90</b>	<b>SEDANG</b>
15	Kinerja Lembaga Legislatif	53,33	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	85,68	-
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	77,27	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	72,73	-
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,06	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	78,00	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	72,00	-

Masih terdapat 2 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu:

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif

Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2021.

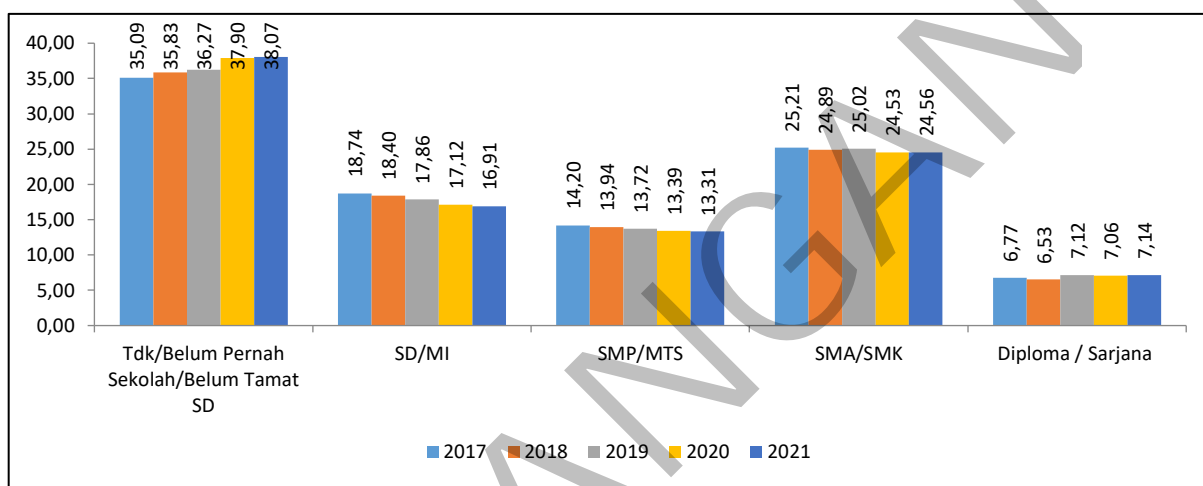
#### H. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan

presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

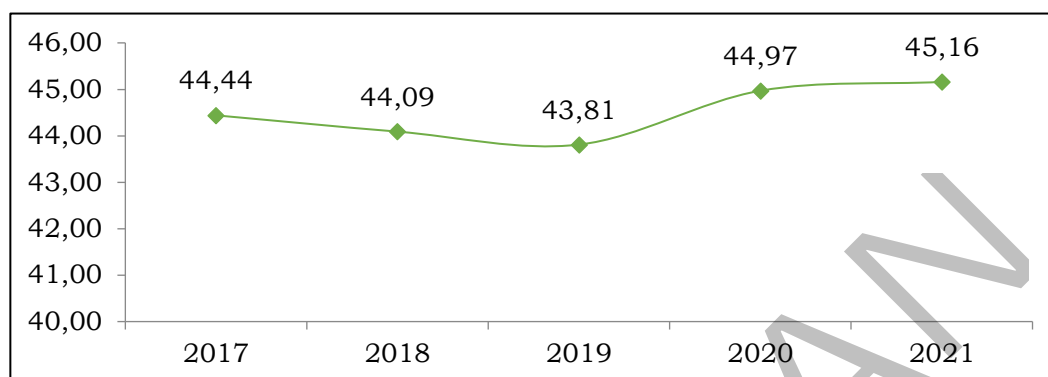
**Gambar II.98**

**Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

**I. Rasio Ketergantungan**

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus

menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

**Gambar II.99**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

Seluruh capaian indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.121

## Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	63,46	52,85	61,45	69,77	75,20	77,52
2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3	2	2	2	4	5
3	Capaian akses air minum layak (%)	77	71,83	56,84*	64,53*	70,78	77,56
4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,50	13.618,50	13.728,50	13.878,50	14.078,50	14.108,50
5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	-	730	641	477	406	368
6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,59	673,42	1.525,47	1.287,82	1.190,14	
7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09	73,18	66,46	66,46	75,44	79,46
8	Rasio elektrifikasi (%)	84,07	84,21	88,93	90,21	91,98	92,07
9	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73	25,53	35,62	31,38	31,05	14,35
10	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12	15	14	12	5	5
11	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)			100	100	100	75
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71	76,55	76,55	76,60	77,82	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,56	82,22	81,50	82,00	82,57	
14	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

\*) : Data Triwulan III Tahun 2022

\*: Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif; Perubahan baseline luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh baru serta penanganan yang telah dilaksanakan oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/ Kota.

## **2.5. Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJMD Tahun 2019-2023**

Evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dilakukan pada tahun 2022 memberikan informasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan triwulan IV 2022. Secara umum sebagian besar capaian indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Indikator Tujuan yang memiliki nilai capaian yang sangat tinggi, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (305,50%). Capaian ini disebabkan adanya faktor lonjakan peningkatan perdagangan ekspor dan harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati di pasar internasional. Selanjutnya, terdapat 4 indikator tujuan yang masih membutuhkan upaya dalam mencapai kinerja yang ideal (100%) yaitu: Indikator Tingkat Kemiskinan (94,83%); Indeks Gini (95,53%); Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (97,91%); dan Indeks Reformasi Birokrasi (95,76%).

Beberapa faktor penyebab masih adanya indikator yang membutuhkan upaya pencapaian, yaitu:

- a. Tingkat kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) belum mencapai kinerja ideal.
- b. Capaian kinerja tingkat kemiskinan dan indeks gini dipengaruhi adanya peningkatan garis kemiskinan dari tahun 2021 (Rp. 689.035,00) ke tahun 2022 (Rp. 728.208,00), namun persentase penduduk miskin di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,31%, dimana tahun 2021 sebanyak 241.770 ribu jiwa menjadi 236.250 ribu jiwa. Selain itu adanya pemulihan ekonomi pasca pandemik mengakibatkan adanya pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha dan pemerataan pengeluaran.
- c. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dipengaruhi adanya salah satu daya ungkit capaian IRB yaitu nilai integritas kinerja yang masih rendah dan masih ditemukannya pola administrasi pembangunan antar Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tidak berjalan optimal.

**Tabel II.122**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
<b>[ MISI ] 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas</b>				
<b>[ TUJUAN ] 1</b> <b>Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakhlak dan berakhlak mulia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>77,25</b>	<b>77,44</b>	<b>100,25%</b>
[ SASARAN ] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	13,84	98,72%
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,04	9,92	98,80%
[ SASARAN ] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,85	0,88	103,53%
[ SASARAN ] 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,6	74,62	100,03%
[ SASARAN ] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,64	66,64	101,52%
<b>[ TUJUAN ] 2</b> <b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>6</b>	<b>6,31</b>	<b>94,83%</b>
	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,75</b>	<b>5,71</b>	<b>115,41%</b>
[ SASARAN ] 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6825	0,732	107,25%
[ SASARAN ] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	35	25,08	71,66%
<b>[ MISI ] 2 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan</b>				
<b>[ TUJUAN ] 3</b> <b>Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>3,5±1</b>	<b>4,48</b>	<b>128,00%</b>
	<b>PDRB per Kapita (Juta Rp)</b>	<b>172</b>	<b>238,7</b>	<b>138,78%</b>
	<b>LPE Non Migas dan Batubara (%)</b>	<b>2</b>	<b>6,11</b>	<b>305,50%</b>
	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>113</b>	<b>126,03</b>	<b>111,53%</b>
[ SASARAN ] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.038	15.909	144,13%
[ SASARAN ] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,72	5,05	293,60%
[ SASARAN ] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan	9,64	8,24	85,48%

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
pengolahan Non Migas dan Batubara	Batubara thd PDRB (%)			
[ SASARAN ] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,65	0,43*	66,15%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	0,27*	72,97%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,2	4,21*	80,96%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,7	1,28*	75,29%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,07	0,81*	75,70%
[ SASARAN ] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35	36,17	103,34%
[ SASARAN ] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13	15,13	116,38%
[ SASARAN ] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,67	8,58	88,73%
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,23	14,38	94,42%
<b>[ MISI ] 3 Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan</b>				
<b>[ TUJUAN ] 4 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,313</b>	<b>0,327</b>	<b>104,47%</b>
[ SASARAN ] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	6.000.000	8.513.323	141,89%
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	337.000.000	513.031.229	152,23%
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan )	5	5	100,00%
	Capaian akses air minum layak (%)	68,53	78	113,82%
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.278,5	14.278,5	100,00%
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.187,82	1.185,14	99,77%
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	374	318,9	85,27%

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	76,74	78,57	102,38%
	Rasio elektrifikasi (%)	93	93,09	100,10%
<b>[ MISI ] 4 Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</b>				
<b>[ TUJUAN ] 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>76,05</b>	<b>74,46</b>	<b>97,91%</b>
[ SASARAN ] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	28,5	70,68	248,00%
[ SASARAN ] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	151,49	146,67	96,82%
<b>[ MISI ] 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>				
<b>[ TUJUAN ] 6 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B (71,50)</b>	<b>B (67,70)</b>	<b>94,69%</b>
[ SASARAN ] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,41	102,32%
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	2,11	64,92%
[ SASARAN ] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	78,1	101,43%
[ SASARAN ] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	100,00%

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

\*) Data Sementara Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi pada tahun 2022, terdapat 27 Indikator Sasaran yang memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Selain itu terdapat 1 Indikator Sasaran yang memiliki capaian kinerja yang masih sedang, yaitu Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) (71,66%) dan Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) (66,15%). Selain itu, masih terdapat beberapa indikator yang tidak relevan digunakan untuk sistem perencanaan yang masa depan di Kaltim, seperti Jumlah Penumpang dan Barang yang terlayani, luas genangan banjir di kota, luasan kumuh, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Beberapa faktor penyebab masih adanya indikator sasaran yang membutuhkan upaya pencapaian, yaitu:



- a. Indikator sasaran Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan dan Indeks Pemberdayaan Gender, sebenarnya belum relevan ataupun belum berkorelasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan, terutama terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Indikator Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%), terbilang rendah bukan karena kinerja dari sektor pertanian yang menurun, tetapi dikarenakan sektor pertambangan yang sedang tinggi-tingginya.

Selain informasi capaian indikator tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, evaluasi hasil RPJMD juga memberikan gambaran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2022. Evaluasi menunjukkan dari 10 IKU pada tahun 2022 yang mencapai target sebanyak 6 indikator. Indikator yang belum mencapai target adalah Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, IKLH dan Indeks Reformasi Birokrasi.

**Tabel II.123**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			2022		Target 2023
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,88	77,25	77,44	77,75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6,54	6,00	6,31	5,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94	6,87	6,83	6,75	5,71	6,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	-2,87	2,48	3,5±1	4,48	3,5±1
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	182,54	172,00	238,70	175,00
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	2,69	2,00	6,11	2,50
7	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	120,94	119	126,03	120
8	Indeks Gini	0,330	0,328	0,334	0,313	0,327	0,308
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,81	75,25	75,06	76,05	74,46	76,15
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	68,10	B (71,50)	B (67,70)	B (72,00)

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

## 2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal mengatur tentang amanat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Perangkat daerah pelaksana 6 (enam) urusan wajib pemerintahan daerah telah melaksanakan SPM. Adapun realisasi pelaksanaan SPM tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

### 1. SPM Pendidikan

Berdasarkan indikator dan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi pada tahun 2021 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada jenis Pelayanan Dasar, sebagai berikut:

**Tabel II.124**

**Realisasi Target dan Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Disdikbud Prov Kaltim Tahun 2021**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Capaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	158.532	163.819	96,77%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam Penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	2.479	3.139	78,97%

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada setiap jenis pelayanan dasar. Pada pendidikan menengah jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 163.819 dan jumlah penduduk yang bersekolah sebanyak 158.532 sehingga mendapatkan capaian sebesar 96,77%.

Sedangkan pendidikan khusus jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 3.139 dan jumlah penduduk bersekolah sebanyak 2.479 sehingga mendapatkan capaian sebesar 78,97%.

Berdasarkan indikator dan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi pada tahun 2021 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Mutu Pendidikanya.

**Tabel II.125**  
**Realisasi Target dan Indikator Pencapaian SPM Mutu Pendidikan**  
**Bidang Urusan Pendidikan Disdikbud Prov Kaltim Tahun 2021**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pendidikan	Jumlah Yang Harus Diayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Menengah Atas	1. Buku teks pelajaran	78413	78413	100%
		2. Perlengkapan belajar	78413	78413	100%
		3. Jumlah rombongan Belajar di satuan pendidikan	2592	2592	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	78413	64877	82.74 %
		5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5182	5035	97.16 %
		6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	227	224	98.68 %
		7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1612	1435	89.02 %
		8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	231	221	95.67 %
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	1. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5494	5236	95.30 %
		2. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	217	213	98.16 %
		3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2969	2969	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	80119	52238	65.20 %
		5. Perlengkapan belajar	80119	80119	100%
		6. Buku teks pelajaran	80119	80119	100%
		7. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang	1584	1373	86.68 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pendidikan	Jumlah Yang Harus Diayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
		berkualifikasi SMA/ sederajat			
		8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	223	215	96.41 %
3	Pendidikan Khusus	1. Perlengkapan belajar	2479	2479	100%
		2. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	38	29	76.32 %
		3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	518	518	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2479	1621	65.39 %
		5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	406	360	88.67 %
		6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	22	21	95.45 %
		7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	146	122	83.56 %
		8. kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat			
		9. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	82	82	100 %

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada setiap jenis Mutu Pendidikan yang masing-masing jenis pelayanan dasar diantaranya memiliki 8 indikator. Pada Pendidikan menengah atas jika diakumulasikan dari target dan capaiannya 95,41%. Pada Pendidikan Menengah Kejuruan capaiannya sebesar 92,72% dan pada Pendidikan Khusus sebesar 78,97%.

## 2. SPM Kesehatan

Indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya bencana/potensi bencana yang terjadi.

**Tabel II.126**  
**Realisasi Bidang Urusan Kesehatan**

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	833.578	Tidak Terjadi Bencana/Pote	-

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	%
	kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		nsiBencana Provinsi	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Pandemi Covid-19)	130.959	130.959	100

### 3. SPM Pekerjaan Umum

Realisasi penerapan SPM Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pekerjaan Umum pada jenis pelayanan dasar terdiri dari Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota Tahun 2021 ialah belum dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi kewilayahan yang belum terkoneksi secara baik dengan jumlah penduduk yang jarang dan terpencar. Namun, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota terus dilakukan perencanaannya serta kegiatan-kegiatan lain pendukung dari SPM tersebut.

**Tabel II.127**

**Realisasi Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Perencanaan
2	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negarayang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Perencanaan
3	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Perencanaan

Tahapan yang saat ini dilakukan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan air minum regional lintas (SPAM) dan standar pelayanan air limbah domestik (SPALD) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

RANCANGAN

**Tabel II.128**  
**Realisasi Penerapan SPM Provinsi Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Kegiatan	Progres Capaian	Keterangan
1.	Pengumpulan data	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Minum), data dasar potensi layanan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota sebenarnya sudah bisa dihitung berdasarkan rencana layanan SPAM dalam Dokumen RISPAM Provinsi. Data tersebut bisa dihitung berdasarkan rencana debit/kapasitas layanan SPAM Regional, sebagai contoh SPAM Regional Marangkayu dengan Kapasitas 450 L/det, dimana asumsi 1 L/det dapat memenuhi standar kebutuhan air minum/bersih 100 KK, atau sekitar 500 jiwa. Sehingga 450 L/det kapasitas rencana SPAM Regional Marangkayu potensial melayani s.d 225.000 Jiwa dari lintas kabupaten/kota yang dilayani, dalam hal ini Kota Bontang dan Kab. Kutai Kartanegara.</li> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Limbah), data dasar potensi layanan SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota bisa dihitung berdasarkan hasil kajian Dokumen Rencana Induk SPALD Regiona Kaltim. Dimana terdapat 6 zonasi pelayanan yang ditargetkan (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara), yang keseluruhan potensi layanannya mencapai 118.000 jiwa.</li> <li>- Dalam menampilkan data capaian dan target SPAM/SPALD Regional, kurang tepat menurut kami bila menempatkan target rencana dan capaian apabila infrastruktur belum terbangunsama sekali (masih dalam tahap perencanaan). Sehinga data target dan capaian belum bisa ditampilkan.</li> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Minum), dalam Dokumen RISPAM Provinsi Kaltim, yakni pada periode jangka pendek - menengah terdapat setidaknya 2 SPAM Regional yang sedang dalam proses perencanaan. Yakni SPAM Regional Marangkayu (Layanan Kutai Kartanegara - Bontang) dengan kapasitas rencana 450 L/det, dan SPAM Regional Sistem Void Indominco (Layanan Kutai Timur -Bontang).dengan kapasitas rencana 150 L/det. Sehingga bila ditotal potensi layanan SPM Provinsi bisa mencapai 300.000 jiwa (tersebar diKutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang).</li> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Limbah), saat ini telah disusun Dokumen Rencana Induk SPALD Regional, dimana menghasilkan 6 zonasi rencana layanan SPALD Regional. Dalam perhitungan layanan pada 6 zona</li> </ul>

No.	Kegiatan	Progres Capaian	Keterangan
			SPALD Regional ini, didapatkan pendekatan jumlah jiwa yang akan dilayani yakni 118.000 Jiwa (Layanan Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Penajam)
2.	Perhitungan kebutuhan	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Minum), dalam Dokumen RISPAM Provinsi Kaltim, yakni pada periode jangka pendek - menengah terdapat setidaknya 2 SPAM Regional yang sedang dalam proses perencanaan. Yakni SPAM Regional Marangkayu (Layanan Kutai Kartanegara - Bontang) dengan kapasitas rencana 450 L/det, dan SPAM Regional Sistem Void Indominco (Layanan Kutai Timur -Bontang).dengan kapasitas rencana 150 L/det. Sehingga bila ditotal potensi layanan SPM Provinsi bisa mencapai 300.000 jiwa (tersebar diKutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang)</li> <li>- Terkait SPM PU Provinsi (Air Limbah), saat ini telah disusun Dokumen Rencana Induk SPALD Regional, dimana menghasilkan 6 zonasi rencana layanan SPALD Regional. Dalam perhitungan layanan pada 6 zona SPALD Regional ini, didapatkan pendekatan jumlah jiwa yang akan dilayani yakni 118.000 Jiwa (Layanan Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Penajam)</li> </ul>
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Evaluasi	Perencanaan dan Penganggaran untuk SPM PU Provinsi (Air Minum dan Air Limbah) saat ini masih terbatas pada penyiapan pembangunan SPAM/SPALD Regional, pemutakhiran data, dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM/SPALD di Kabupaten/Kota.
4.	Pelaksanaan	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat ini masih belum ada SPAM/SPALD Regional yang tersedia (terbangun), sehingga tidak ada pelaksanaan operasional layanan air minum/air limbah secara regional di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>- Direncanakan pelaksanaan fisik pada tahun 2024.</li> </ul>

#### 4. SPM Perumahan Rakyat

Berdasarkan indikator dan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi pada tahun 2020 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur oleh Dinas PUPR & PERA Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur.

Capaian SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana:



- 1) Tahun 2021 tidak terjadi bencana di Kalimantan Timur
- 2) SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di arahkan kegiatan swakelola;
- 3) Koordinasi SPM
- 4) Koordinasi Pokja PKP
- 5) Website Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi Kalimantan Timur tidak ada kejadian bencana alam, sehingga tidak ada data korban bencana alam yang tertangani. Sementara capaian SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 22 persen.

#### **5. SPM Trantibumlinmas**

Realisasi Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu adalah sebesar Rp.488.104.324,- atau sebesar 93,53% sedangkan untuk realisasi Pelayanan ganti rugi (kerugian materiil dan pengobatan) adalah sebesar Rp. 0,- atau tidak ada realisasi.

#### **6. SPM Sosial**

Berikut realisasi penerapan dan capaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 yang belum mencapai 100% namun berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dasar, khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk Gelandangan dan Pengemis didalam Panti, dikarenakan pada tahun ini belum tersedia fasilitas terkait hal tersebut.

#### **2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN**

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengatur proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Indonesia. PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Proyek strategis nasional di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
- b. Pelabuhan KEK Maloy
- c. Bendungan Marangkayu
- d. Bendungan Sepaku Semoi
- e. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake
- f. Kilang Minyak Bontang
- g. Upgrading Kilang-Kilang Eksisting I Refinery Development Master Plan (RDMP)
- h. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project I IDDI)
- i. Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur

## **2.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa BUMD. Adapun rincian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Tahun Buku 2021 BUMD, sebagai berikut:

1. Perusda Melati Bakti Satya (MBS) sebesar Rp 3.040.432.476,00.
2. Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) sebesar Rp 67.431.984,00
3. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) sebesar Rp 15.371.128.120,00
4. PT. Ketenagalistrikan Kaltim sebesar Rp 0,-
5. PT.BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp114.315.000.000,00
6. PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) sebesar Rp 65.593.687.598,00
7. PT. Jamkrida Kaltim sebesar Rp 0,-
8. PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.641.392.123,00

Profil masing-masing BUMD berdasarkan data tahun buku 2021 disajikan sebagai berikut:

- 1) **NAMA BUMD** : **PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau yang disingkat PT. BPD Kaltimtura dengan callname Bankaltimtura.**
- 2) **BIDANG USAHA** : Sesuai dengan anggaran dasar PT. BPD Kaltim Kaltara dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. Memberikan kredit;
  3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
    - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh perseroan yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
    - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
    - d. Sertifikat Bank Indonesia (BSI);
    - e. Obligasi;
    - f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. Menempatkan Dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk berkepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan Dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan, menghimpun Dana dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; dan
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh usaha Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### 3) KERJASAMA / PENYERTAAN MODAL

No	Penyertaan Posisi 31 Desember 2020	Nilai Share Saham (dalam jutaan)	
		Perusda	Mitra
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	-	2.460
2	PT. Sarana Kaltim Ventura (SKV)	-	4.342
3	PT. BPR Kutai Timur	-	1.748
3	PT. BPR Bepede Kutai Sejahtera	-	13.140

### 4) KINERJA KEUANGAN

#### a) Laba Bersih (dalam rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi
2017	441.969	464.056
2018	501.145	442.224
2019	506.911	254.944
2020	355.804	277.023
2021	300.446	308.784

#### b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Dividen Pemprov. Kaltim	Dana Pembangunan Daerah
2017	90.981	80.357
2018	85.789	76.576
2019	48.782	44.146
2020	52.434	47.970
2021	60.845	53.470

5) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Tahun	Dasar Pendirian	Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nilai Ekuitas Perusahaan - Audited (Rp)
2015	Peraturan Daerah No. 3/P.D/64 Tanggal 19 September 1964	1.211.715.000.000	39.69	
2016	Peraturan Daerah No. 3/P.D/64 Tanggal 19 September 1964	1.211.715.000.000	37.75	
2017	Akta Pendirian PT. BPD Kaltim Kaltara No. 12 Tanggal 14 September 2017	1.211.715.000.000	37.48	
2018	Akta Pendirian PT. BPD Kaltim Kaltara No. 12 Tanggal 14 September 2017	1.211.715.000.000	37.12	
2019	Akta Pendirian PT. BPD Kaltim Kaltara No. 12 Tanggal 14 September 2017	1.211.715.000.000	36.53	
2020	Akta Pendirian PT. BPD Kaltim Kaltara No. 12 Tanggal 14 September 2017	1.211.715.000.000	38.14	
2021		1.311.715.000.000	37.81	
2022		1.548.315.000.000	41.10	

- 1) **NAMA BUMD : Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS)**
- 2) **BIDANG USAHA : Transportasi, Pariwisata, dan Jasa Umum Lainnya.**
- 3) **KERJASAMA / PENYERTAAN**

No	Kerjasama/Penyertaan/BOT/KSO/lainnya	Nilai Share Saham (dalam jutaan)	
		Perusda (Rp.)	Nama
1	PENYERTAAN	250.000.000	PT. INTAN
2	PENYERTAAN	292.104.800	PT. KALTIM VIATIONS
3	PENYERTAAN	62.500.000	PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
3	PENYERTAAN	123.800.000	PT. AGRO MINA USANTARA
4	PENYERTAAN	36.400.000	PT. KALTIM INASARANA KONSTRUKSI
5	PENYERTAAN	100.000.000	PT. JAMKRIDA KALTIM
6	PENYERTAAN	1.000.000.000	PT. JAYA ABADI MULIA SEJATI
7	BOT	114.667.000.000	PT. SINAR BALIKPAPAN DEVELOPMENT
8	KSO	54.100.977.199	PT. BUMI LIPUTAN JAYA
9	PENYERTAAN	292.104.800	PT. KALTIM AVIATIONS

- 4) **KINERJA KEUANGAN**
  - a) **Profit/Loss (dalam rupiah)**

Profit/Loss (dalam jutaan rupiah)			
2021		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.456.060.407	5.528.059.048	1.328.322.385	2.093.188.517

Profit/Loss (dalam jutaan rupiah)			
2019		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi

3.987.208.301	4.285.518.067	1.513.472.500	2.412.703.918
---------------	---------------	---------------	---------------

Profit/Loss (dalam jutaan rupiah)	
2019	
Rencana	Realisasi
1.513.472.500	(3.866.730.563)

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
800.833.224	3.040.432.476	√	-	8 Juli 2022

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
730.577.312	1.151.253.684	√	-	1 Juli 2021

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
2.192.964.566	2.357.034.937	√	-	25 Agustus 2020

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
832.409.875	1.326.987.155	√	-	18 November 2019

Tahun 2017

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
832.409.875	Rugi	-	-	-

\* PAD merupakan penjumlahan antara Deviden yang dibagikan, Dana Pembangunan Daerah, Jasa Giro, dan Bunga Deposito.

\* Tanggal Penyetoran disesuaikan dengan tanggal setor Deviden dan Dana Pembangunan Daerah.

5) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Tahun	Dasar Pendirian	Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nilai Ekuitas Perusahaan Audited (Rp)
1996	Perda No. 5 Tahun 1996	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
2004	Perda No. 5 Tahun 2004	32.500.000.000	100%	32.500.000.000
2008	Perda No 18 Tahun 2008	201.267.977.199	100%	201.267.977.199
2018	Pergub No 87 Tahun 2016	1.225.736.308.530	100%	1.204.368.240.145

- 1) **NAMA BUMD** : Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera
- 2) **BIDANG USAHA** : Pertambangan Batu Bara
- 3) **KERJASAMA / PENYERTAAN**

Kerjasama/Penyertaan /BOT/KSO/lainya	Nilai Share Saham	
	Perusda	Mitra
MOU	Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	PT. Mahakam Sumber Jaya

4) **KINERJA KEUANGAN**

a) Profit/Loss (dalam rupiah)

Profit/Loss (dalam rupiah)			
2021		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
17.932.648.372	27.947.505.672	20.156.158.774	16.685.387.152
2019		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
31.208.801.132	25.303.538.899	26.244.986.762	28.865.759.893
2017			
Rencana	Realisasi		
37.349.003.044	36.135.051.229		

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
9.809.331.605	15.371.128.120	√	-	11 September 2022

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
11.085.887.325	9.176.962.934	√	-	2 Maret 2022

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
17.164.840.623	13.916.946.394	√	-	23 November 2020

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
14.434.742.719	15.876.167.941	√	-	16 Desember 2019

\* PAD merupakan penjumlahan antara Deviden yang dibagikan, Dana Pembangunan Daerah, Jasa Giro, dan Bunga Deposito.

\* Tanggal Penyetoran disesuaikan dengan tanggal setor Deviden dan Dana Pembangunan Daerah.

5) RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Tahun 2021

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
17.932.648.372	27.947.505.672	9.809.331.605	15.371.128.120	Perda No. 4 Th. 2000

Tahun 2020

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
20.156.158.774	16.685.387.152	11.085.887.326	Belum Terbit SK	Perda No. 4 Th. 2000

Tahun 2019

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
31.208.801.132	25.303.538.899	17.164.840.623	13.916.946.394	Perda No. 4 Th. 2000

Tahun 2018

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
26.244.986.762	28.865.759.893	14.434.742.719	15.876.167.941	Perda No. 4 Th. 2000

Tahun 2017

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
37.349.003.044	36.135.051.229	10.093.033.578	19.874.278.176	Perda No. 4 Th. 2000



- 1) **NAMA BUMD : PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur**
- 2) **BIDANG USAHA : - Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
- Usaha Penunjang Tenaga Listrik**
- 3) **KERJASAMA / PENYERTAAN**

Kerjasama/ Penyertaan/BOT /KSO/lainya	Nilai Share Saham	
	Perusda	Mitra
a) PT. Cahaya Fajar Kaltim Mitra: PT. Kaltim Elektrik Power Tn. Dahlan Iskan	17,06% atau Rp.96.000.000.000,- (96.000 lembar saham)	- 78.50% PT Kaltim Elektrik Power atau Rp 441.849.850.000,-  - 4.44% Dahlan Iskan atau Rp.25.000.000.000,-
b) PT. Energi Kusuma Negara Mitra: PT.Artha Indera Mahakam Perkasa Tn.Wari Kusuma Negara	30,00 % atau Rp.2.700.000.000,- (2.700 lembar saham)	- 40% PT.Artha Indera Mahakam Perkasa Rp.3.600.000.000,-  - 30% Wari Kusuma Negara Rp.2.700.000.000,-

- 4) **KINERJA KEUANGAN**
  - a) Profit/Loss (dalam rupiah)

Profit/Loss (dalam rupiah)			
2021		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2.856.391.816	6.761.390.113	3.791.983.361	3.451.906.731
2019		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
9.572.293.392	2.989.103.813	9.026.402.040	2.040.780.160
2017			
Rencana	Realisasi		
4.935.721.843	4.100.319.884		

- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	-		√	-

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	-		√	-

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	1.644.007.097	√		19/01/2021

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	1.142.784.711	√		26/12/2019

Tahun 2017

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	1.640.127.953	√		27/11/2018

5) RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Tahun 2021

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	RUPS belum disahkan
2.856.391.816	6.761.390.113	-	-	

Tahun 2020

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	RUPS belum disahkan
3.167.308.288	3.451.906.731	-	-	

Tahun 2019

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	RUPS
9.572.293.392	2.989.103.813	-	1.644.007.097	

Tahun 2018

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	RUPS
9.026.402.040	2.040.780.160	-	1.147.784.711	

Tahun 2017

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	RUPS
4.935.721.843	4.100.319.884	-	1.640.127.953	

6) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Dasar Pendirian	Modal Disetor	Presentase Kepemilikan (%)			Nilai Ekuitas Perusahaan – Audited (Rp)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Perda No. 05 Tahun 2011	126.000.000.000.000	100%	100%	100%	132.408.149.069	134.172.837.833	137.624.744.564

- 1) **NAMA BUMD : Sylva Kaltim Sejahtera**
- 2) **BIDANG USAHA : Budidaya Kehutanan, Penangkaran Satwa Liar, Pariwisata Alam, Taman Buru / Kebun Buru, Persuteraan Alam, Jasa Konstruksi Kehutanan, dan Industri Hasil Hutan**

3) KERJASAMA / PENYERTAAN

Kerjasama/Partnership/BOT/KSO/other	Nilai Share Saham	
	Perusda	Mitra
PT. Daisy Tiber	10%	- KUD Mufakat 20% - Ponpes Albanjari 10% - Teluk Sulaiman 60%
PT. Hutansanggam Labanan Lestari	20%	- Pemkab Berau 30% - Inhutani 50%
PT. Kideco (Rehab Das)	7.5%	PT. Desindo 92.5%

4) KINERJA KEUANGAN

a) Profit/Loss (dalam rupiah)

Profit/Loss (dalam rupiah)			
2021		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
62.500.000	120.205.127	182.500.000	12.310.671
2019		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
43.750.000	17.122.081	32.500.000	16.231.878
2019			
Rencana	Realisasi		
29.000.000	(14.038.369)		

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
100.375.000	6.770.869	√	-	14 Desember 2021

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
24.062.500	9.417.144	√	-	22 Desember 2020

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
17.875.000	8.927.532	√	-	23 Agustus 2019

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
15.950.000	(14.038.369)	-	√	-

Tahun 2017

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
36.850.000	(14.038.369)	√	-	7 Desember 2017

5) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Tahun	Dasar Pendirian	Modal Disetor	Presentase Kepemilikan (%)	Nilai Ekuitas Perusahaan Audited (Rp)
2015	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.168.247.699
2016	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.185.088.970
2017	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.171.050.601
2018	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.187.282.479
2019	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.204.404.560
2020	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.216.715.231
2021	Perda No. 5 Tahun 2000	-	100 % Pemprov	3.336.861.078

1) **NAMA BUMD** : **PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur**

2) **BIDANG USAHA** : **MINYAK DAN GAS BUMI ( MIGAS )**

3) **KERJASAMA / PENYERTAAN**

Kerjasama/Penyertaan/BOT/KSO/lainya	Nilai Share Saham	
	Bumd	Mitra
a. PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim.	9.900.000.000,-	100.000.000.-
b. PT. Migas Mandiri Pratama Marin Kaltim.	2.475.000.000,-	25.000.000,-
c. PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam.	1.662.500.000,-	837.500.000,-

4) KINERJA KEUANGAN

a) Profit/Loss (dalam jutaan rupiah)

Profit/Loss (dalam rupiah)			
2021		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
7.718.102.658	124.715.795.633	4.495.836.053	(36.608.440.051)
2019		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi

134.647.236.027	35.361.443.450	(26.840.678.279)	378.293.133.329
<b>2017</b>			
<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>		
1.578.838.787	(10.998.257.056)		

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
4.244.956.462	68.593.687.598		√	

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
2.472.709.829	Rugi		√	

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
74.055.979.815	19.448.793.898	√	-	03 Agustus 2021

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
-	208.061.223.331	√	-	29 November 2019

Tahun 2017

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
867.361.333	Rugi	-	√	-

5) RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Tahun 2021

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Perda No. 11 Th. 2009 & Perda No. 06 Th. 2014
7.718.102.658	124.715.795.633	4.244.956.462	68.593.687.598	

Tahun 2020

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Perda No. 11 Th. 2009 & Perda No. 06 Th. 2014
4.495.836.053	(36.608.440.051)	2.472.709.829	-	

Tahun 2019

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	

134.647.236.027	35.361.443.450	74.055.979.815	19.448.793.898	Perda No. 11 Th. 2009 & Perda No. 06 Th. 2014
-----------------	----------------	----------------	----------------	---

Tahun 2018

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Perda No. 11 Th. 2009 & Perda No. 06 Th. 2014
(26.840.678.279)	378.293.133.329	-	208.061.223.331	

6) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Tahun	Dasar Pendirian	Modal Disetor	Presentase Kepemilikan (%)	Nilai Ekuitas Perusahaan Audited (Rp)
2015	Perda No. 11 Th. 2009	159.600.000.000	99.75	173.959.034.188
2016	Perda No. 11 Th. 2009	159.600.000.000	99.75	157.063.293.001
2017	Perda No. 11 Th. 2009	159.600.000.000	99.75	148.554.612.581
2018	Perda No. 09 Th. 2018 Pasal 13 Ayat 1 (a)	160.000.000.000	100	720.273.230.993
2019	Perda No. 09 Th. 2018 Pasal 13 Ayat 1 (a)	160.000.000.000	100	393.090.917.029
2020	Perda No. 09 Th. 2018 Pasal 13 Ayat 1 (a)	160.000.000.000	100	299.424.307.461
2021		160.000.000.000	100	394.345.110.204

1) **NAMA PERUSDA : PT. Penjaminan Kredit Daerah Prov. Kaltim (PT. Jamkrida Kaltim)**

2) **BIDANG USAHA** : Penjaminan Kredit sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3) **KINERJA KEUANGAN**

a) Profit/Loss (dalam rupiah)

Profit/Loss (dalam rupiah)			
2017		2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
431.378.987	106.492.877	180.145.541	(1.282.458.277)
2019		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
151.682.269	1.514.643.038	351.438.652	87.947.459
2021			
Rencana	Realisasi		
444.854.790	(744.649.680)		

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2017

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
236.783.925	58.571.082	√	-	26 Juli 2018

Tahun 2018

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
98.881.887	(1.282.458.277)	-	-	-

Tahun 2019

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
83.258.397,45	127.446.215	√	-	21 September 2020

Tahun 2020

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
192.904.676,08	48.274.359,80	√	-	28 Juni 2021

Tahun 2021

Rencana	Realisasi	Disetor		Tgl Penyetoran
		Sudah	Belum	
444.854.790	-	-	-	-

4) RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Tahun 2017

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
431.378.987	106.492.877	236.783.925	58.571.082	-

Tahun 2018

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
180.145.541	(1.282.458.277)	98.881.887	-	-

Tahun 2019

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
151.682.269	1.514.643.038	83.258.397.	127.446.215	-

Tahun 2020

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
351.438.652	87.947.459	192.904.676	48.274.359	-

Tahun 2021

Profit/Loss		P A D		Dasar Pembagian Laba
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
444.854.790	(744.649.680)	244.180.794	-	-

5) NILAI INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

Tahun	Dasar Pendirian	Modal Disetor	Presentase Kepemilikan	Nilai Ekuitas Perusahaan-Audited (Rp)
2015	Perda No. 9 Tahun 2012 & Perda No. 5 Tahun 2014	50.000.000.000	99.8	50.838.243.087
2016		50.000.000.000	99.8	50.508.366.522
2017		50.000.000.000	99.8	50.871.585.440
2018		50.000.000.000	99.8	48.877.169.262
2019		50.000.000.000	99.8	50.802.924.357
2020		50.000.000.000	99.8	51.457.170.984
2021		50.000.000.000	99.8	50.457.846.582



## BAB III

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur merupakan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta pertanggung-jawaban keuangan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dan rangka pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum peran pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembangunan, pemerintah menetapkan APBD dengan merumuskan strategi kebijakan pendapatan dan belanja dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi daerah. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat

(3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk menentukan kerangka pendanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan hambatan yang akan dihadapi diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah. Dalam melakukan analisis perlu memahami struktur APBD yang terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang disertai dengan jenis objek masing-masing komponen tersebut.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Komponen APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2020 terdapat perbedaan karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Komponen APBD pada tahun 2018-2020 terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di

dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sedangkan perbedaan komponen APBD Provinsi tahun 2018-2020 dengan APBD Provinsi tahun 2021-2022 terletak pada: 1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Namun dalam penyajian pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2020 pada bab ini telah disesuaikan penyajiannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum realisasi kinerja APBD Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 110 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya dan rata-rata realisasi pada tahun 2018-2022 mencapai 89 persen. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan, tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan rata-rata capaian mencapai 102 persen, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 tidak direalisasikan dan target tahun 2020 tidak tercapai. Kinerja pelaksanaan APBD pada realisasi belanja daerah yang cenderung mengalami penurunan, perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran yang lebih matang untuk meningkatkan realisasi belanja. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel III.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan**  
**Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Pendapatan Daerah</b>				
2018	9.591.235.184.518	10.671.715.200.487	111,27	1.080.480.015.969
2019	11.137.939.446.363	11.775.086.836.200	105,72	637.147.389.837
2020	8.584.526.835.525	9.987.385.879.199	116,34	1.402.859.043.674
2021	9.589.762.859.000	10.220.142.967.274	106,57	630.380.108.274
2022	12.469.541.473.625	16.442.341.253.591	131,86	3.972.799.779.965
<b>Belanja Daerah</b>				
2018	10.128.810.000.000	9.345.057.063.691	92,26	(783.752.936.309)
2019	12.900.000.000.000	11.387.618.509.351	88,28	(1.512.381.490.649)
2020	10.706.850.002.651	9.328.504.462.478	87,13	(1.378.345.540.173)
2021	12.260.598.307.059	10.723.529.422.431	87,46	(1.537.068.884.628)
2022	14.679.878.053.600	12.254.119.047.138	83,48	(2.425.759.006.461)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
2018	541.264.815.482	541.264.815.482	100,00	-
2019	1.862.060.553.637	1.861.926.227.625	99,99	(134.326.012)
2020	2.249.394.164.475	2.249.383.814.348	100,00	(10.350.127)
2021	2.674.485.448.059	2.953.994.981.532	110,45	279.509.533.473
2022	2.446.958.526.374	2.446.958.526.374	100,00	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
2018	3.690.000.000	3.690.000.000	100,00	-
2019	100.000.000.000	-	-	(100.000.000.000)
2020	150.000.000.000	100.000.000.000	66,67	(50.000.000.000)
2021	3.650.000.000	3.650.000.000	100,00	-
2022	236.621.946.400	236.600.000.000	99,99	(21.946.400)

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2018-2022, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan

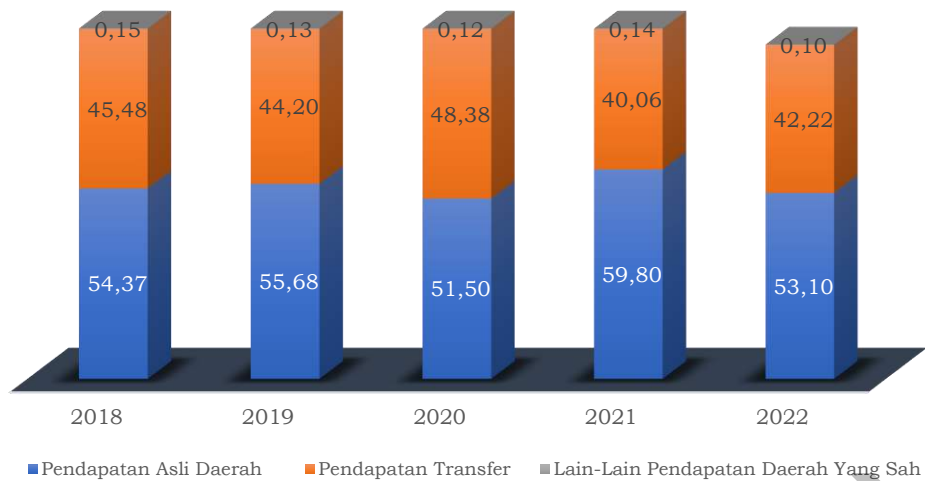
nasional terkait dana perimbangan. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel III.2**  
**Target dan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi (Miliar Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.802</b>	<b>6.556</b>	<b>5.144</b>	<b>6.112</b>	<b>8.731</b>	<b>10,12</b>
4.1.01	Pajak Daerah	4.717	4.985	3.900	4.775	7.623	2,12
4.1.02	Retribusi Daerah	21	26	10	14	20	(0,71)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	199	392	111	215	310	39,51
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	865	1.152	1.122	1.109	778	9,79
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>4.854</b>	<b>5.204</b>	<b>4.832</b>	<b>4.094</b>	<b>7.694</b>	<b>4,37</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.830	5.186	4.832	4.094	7.694	4,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.830	5.176	4.760	4.057	-	(5,21)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.991	3.207	3.545	2.592	-	(3,04)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	768	816	831	828	-	2,59
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.071	1.153	383	637	-	2,34
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	10	72	37	-	291,85
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>2,54</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6	3	3	14	17	75,70
4.3.02	Pendapatan Lainnya	10	12	9	-	-	(2,92)
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>10.672</b>	<b>11.775</b>	<b>9.987</b>	<b>10.220</b>	<b>16.442</b>	<b>7,16</b>

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Analisis Pendapatan Daerah dilakukan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2018 hingga 2022 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 7,16 persen. Capaian realisasi terendah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,98 triliun, capaian ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp16,44 triliun, seiring dengan pulihnya perekonomian daerah.



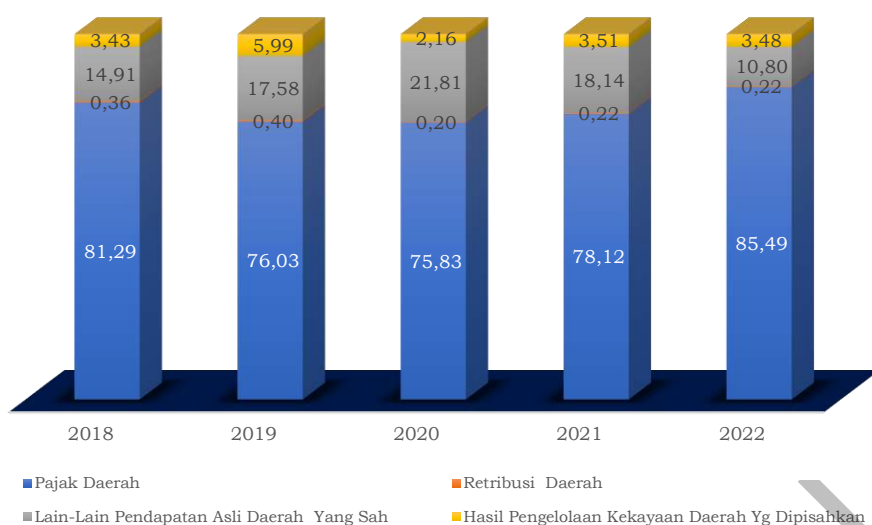
**Gambar III.1**

**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Jika dilihat dari tren persentase realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 dan kontribusi PAD mengalami fluktuasi namun tetap menjadi mayoritas komponen pembentuk pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama pendapatan daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 77,85 persen. Secara absolut, realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar Rp3,9 triliun dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dan lesunya aktifitas perekonomian ekstraktif yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).



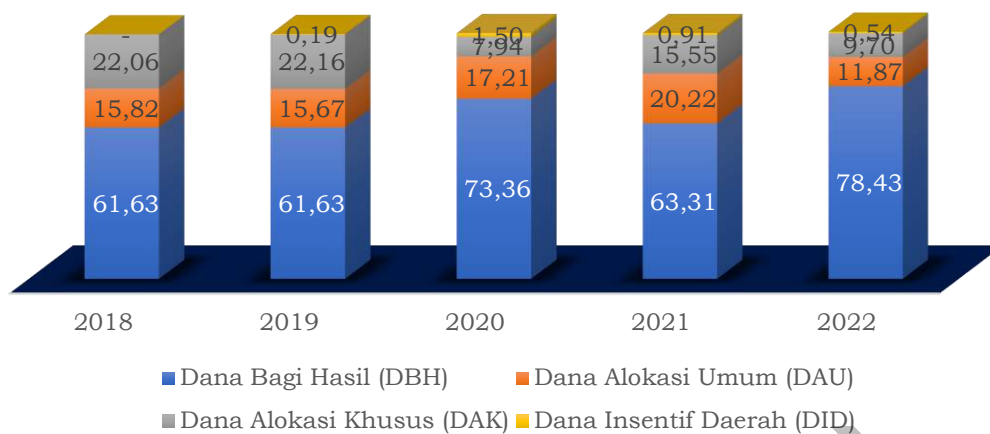
**Gambar III.2**

**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar III.2) terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak daerah masih didominasi oleh 3 komponen pembentuk utama yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adapun Retribusi Daerah memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen pendapatan daerah terbesar kedua setelah PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian berfluktuasi pada kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir mencapai 44 persen. Penurunan realisasi DBH pada tahun 2021 menjadi Rp4,09 triliun sangat erat kaitannya dengan melemahnya perekonomian daerah yang terjadi di tahun 2020 terutama pada sektor lapangan usaha utama Kalimantan Timur yakni pertambangan penggalan dan industri pengolahan. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memberikan dampak pada meningkatnya DBH terutama yang bersumber dari DBH Mineral dan Batubara seiring dengan tingginya permintaan global serta membaiknya harga batubara acuan.



**Gambar III.3**  
**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Berdasarkan proporsi komponen pembentuk Pendapatan Transfer yang dimuat pada gambar di atas, terlihat bahwa tren realisasi pendapatan transfer terjadi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi semenjak tahun 2020 dan berbanding terbalik dengan kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) yang cenderung meningkat disetiap tahun. Komponen yang memiliki peran sangat tinggi terhadap realisasi pendapatan transfer adalah DBH yang dengan sumbangan terbesar berasal dari DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Sedangkan yang memiliki peran terendah terhadap pendapatan transfer adalah Dana Insentif Daerah (DID)

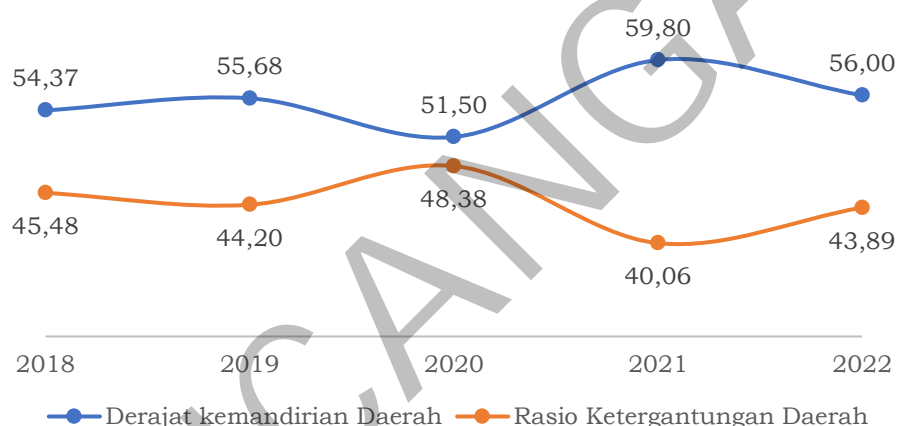
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi pada kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,1 persen dengan rata-rata pertumbuhan 2,54 persen. Capaian komponen ini juga berfluktuasi semenjak tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2021 – 2022. Sumber pendapatan pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 73 persen dan sisanya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian



Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.



**Gambar III.4**

**Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)**

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi Kalimantan timur selama 5 tahun menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat, semula derajat kemandirian pada tahun 2018 sebesar 54,37 persen hingga sebesar 9,36 persen pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 59,80 persen. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berfluktuasi dengan kecendrungan menurun dari yang semula sebesar 45,48 persen pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 43,89 persen pada tahun 2022 dan puncaknya pada tahun 2020 sebesar 48,38 persen. Kondisi pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur relatif baik, yang dapat mengarah pada terwujudnya kemandirian daerah.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pengalokasian belanja daerah wajib memprioritaskan belanja pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Selain untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode tahun 2018-2022, analisis belanja daerah juga digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan struktur sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 yang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Namun penyajiannya akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada tahun 2018 sebesar Rp9,36 triliun menjadi sebesar Rp6,08 triliun pada tahun 2022 dengan belanja daerah tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar Rp11,39 triliun dan belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp9,33 triliun dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,24 persen. Realisasi belanja pada tahun 2020 paling rendah dikarenakan

terjadi penurunan pada belanja hibah, belanja modal dan belanja transfer yang dipengaruhi oleh belanja yang tidak direalisasikan optimal karena dampak pandemi COVID-19.

**Tabel III.3**  
**Target dan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>5.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.418.399</b>	<b>5.279.509</b>	<b>4.624.450</b>	<b>4.983.150</b>	<b>5.900.060</b>	<b>-7,15</b>
5.01.01	Belanja Pegawai	1.509.100	1.697.114	1.668.091	2.105.589	2.333.724	0,35
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.874.300	2.767.688	2.779.848	2.634.942	3.083.330	-2,74
5.01.03	Belanja Hibah	1.029.946	806.274	163.933	228.665	432.066	-13,50
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	5.052	8.433	12.578	13.955	50.940	6,75
<b>5.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.829.260</b>	<b>1.207.816</b>	<b>1.066.606</b>	<b>1.514.465</b>	<b>1.942.103</b>	<b>-19,01</b>
5.02.01	Tanah	1.311	4	24	25.313	85.070	25.981,52
5.02.02	Peralatan dan Mesin	223.326	328.324	418.050	300.194	727.639	-3,63
5.02.03	Bangunan dan Gedung	101.556	299.304	247.161	537.517	421.593	53,38
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	1.489.316	549.190	374.809	638.223	702.084	-23,41
5.02.05	Aset tetap lainnya	13.750	30.994	26.561	13.218	5.717	-9,08
5.02.06	Aset lainnya	-	-	-	-	-	
<b>5.03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>394</b>	<b>904</b>	<b>226.176</b>	<b>221.409</b>	<b>6.689</b>	<b>6.239,36</b>
<b>5.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.097.004</b>	<b>4.899.390</b>	<b>3.411.273</b>	<b>4.004.505</b>	<b>4.405.267</b>	<b>3,99</b>
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.406.281	2.892.136	1.863.238	2.455.934	3.542.722	5,15
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	690.723	2.007.254	1.548.035	1.548.570	862.545	21,36
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>9.345.057</b>	<b>11.387.619</b>	<b>9.328.504</b>	<b>10.723.529</b>	<b>11.652.846</b>	<b>-6,15</b>

Ket: \*) Data realisasi belanja tahun 2022 per 6 Desember 2022 (DJPK)

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hingga tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masih terbatasnya belanja aset tetap lainnya dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Penurunan belanja modal tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu anggaran akibat dari upaya *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.



**Gambar III.5**  
**Proporsi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2018-2022 tergambar dalam tabel di bawah.

**Tabel III.4**  
**Target dan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi (Miliar Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
1.	Penggunaan SiLPA	1.625,43	2.206,09	2.249,38	2.953,99	2.446,96	18,08
2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah						
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.	Penerimaan Piutang Daerah						
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>1.625,4 3</b>	<b>2.206,0 9</b>	<b>2.249,3 8</b>	<b>2.953,9 9</b>	<b>2.446,9 6</b>	<b>18,08</b>
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
1.	Pembentukan Dana Cadangan						
2.	Penyertaan Modal Investasi Pemda	3,69	-	100,00	3,65	236,60	1.571,45
3.	Pembayaran PokokUtang						
4.	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah						
5.	Pemberian Pinjaman Daerah						
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>3,69</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>3,65</b>	<b>236,60</b>	<b>1.571,45</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>1.621,74</b>	<b>2.206,09</b>	<b>2.149,38</b>	<b>2.950,34</b>	<b>2.210,36</b>	<b>15,51</b>
<b>SILPA</b>		<b>1.862,06</b>	<b>2.249,39</b>	<b>2.953,99</b>	<b>2.446,96</b>	<b>6.398,58</b>	<b>1,65</b>

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah hanya diperoleh melalui SiLPA. Pengalokasian SiLPA cenderung meningkat dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2,45 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp1,62 triliun.

Pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk menambah penyertaan modal ke BUMD rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada penyertaan modal BUMD yang bertujuan

peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah Neraca Daerah. Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,35 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset yaitu Aset lancar yang pertumbuhannya yaitu sebesar -4,67 persen, Investasi Jangka Panjang sebesar 5,27 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,37 persen, dan Aset lainnya sebesar -3,07 persen.

#### b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan namun di tahun 2021 menurun, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar -2,41 persen.

Peningkatan kewajiban ini berasal dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi, dengan posisi tertinggi pada tahun 2020 mencapai Rp32.535.085.129.207. Namun pada tahun 2021, nilai ekuitas turun menjadi Rp31.895.376.447.986.

RANCANGAN

**Tabel III.5**  
**Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2022**

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	2022 (audited)
<b>1</b>	<b>Aset</b>	<b>33.931.464.699.549</b>	<b>33.873.059.601.255</b>	<b>34.958.123.211.320</b>	<b>33.527.012.177.542</b>	<b>-0,35%</b>	
1.1	Aset Lancar	4.711.582.578.883	3.613.788.154.289	4.404.786.818.401	3.849.951.495.437	-4,67%	
1.2	Investasi Jangka Panjang	3.163.853.338.255	3.405.946.252.521	3.508.090.971.515	3.689.224.624.205	5,27%	
1.3	Aset Tetap	23.940.372.213.635	24.512.546.855.263	24.424.856.141.865	24.200.299.838.868	0,37%	
1.4	Aset Lainnya	2.115.656.568.776	2.340.778.339.182	2.620.389.279.539	1.787.536.219.032	-3,07%	
<b>2</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>1.918.335.078.859</b>	<b>1.997.838.824.220</b>	<b>2.423.038.082.113</b>	<b>1.631.635.729.556</b>	<b>-2,41%</b>	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	637.394.054.235	302.167.251.216	451.905.062.835	483.723.538.906	1,33%	
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.280.941.024.624	1.695.671.573.004	1.971.133.019.278	1.147.912.190.650	2,29%	
<b>3</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>32.013.129.620.690</b>	<b>31.875.220.777.035</b>	<b>32.535.085.129.207</b>	<b>31.895.376.447.986</b>	<b>-0,11%</b>	
3.1	Jumlah Ekuitas	32.013.129.620.691	31.875.220.777.035	32.535.085.129.207	31.895.376.447.986	-0,11%	

Sumber: Neraca Tahun 2018 s/d 2021, diolah



Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Secara rinci disajikan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel III.6**  
**Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Persediaan (Rp.)
2018	2.476.747.485.202
2019	1.076.273.198.749
2020	1.356.850.995.168
2021	
2022	
Rata-rata pertumbuhan (%)	-0,04

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio cepat, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 8,33, sedangkan rasio lancar memiliki rata-rata 4,46. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup sebesar 1,25 persen. Adapun kondisi rasio cepat yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun cepat perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

**Tabel III.7**  
**Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	Rasio Lancar	7,39	12	9,75	7,96		8,33
	(Current Ratio) (%)						
2	Rasio Cepat	3,51	8,4	6,74	5,26		4,46
	(Quick Ratio) (%)						

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

B. Rasio Solvabilitas

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.8**  
**Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun**  
**2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,06	0,06	0,07	0,05		0,06
2	Rasio hutang terhadap modal	0,06	0,06	0,07	0,05		0,06

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2018 hingga 2022.

C. Rasio Aktivitas

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang,

yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel III.9**  
**Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)
2018	372.006.311.051
2019	285.372.793.813
2020	88.568.656.755
2021	96.690.250.711
2022	

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM, 2021

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran

tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 adalah 53,77 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel III.10**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	PAD (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	DOFD (%)
2018	5.802.442.683.946,67	10.671.715.200.487,20	54,37
2019	6.555.853.195.408,37	11.775.086.836.200,40	55,68
2020	5.143.521.676.422,02	9.987.385.879.199,02	51,50
2021	6.111.918.272.284,00	10.220.142.967.274,00	59,80
2022	8.731.281.736.065,00	16.442.341.253.591,00	53,1
Rata-rata	6.469.003.512.825,21	11.819.334.427.350,30	54,89

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

realisasi dari kebijakan belanja Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2018-2022 dengan disajikannya analisis proporsi realisasi terhadap anggaran diuraikan pada subbab ini.

#### **a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Realisasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2018–2022 sebesar ..... persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja operasi sebesar ..... persen dan Belanja modal sebesar ..... persen. Belanja Tidak Terduga sebesar .....serta Belanja Transfer sebesar ..... persen.

**Tabel III.11**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022**

Kode Rekening	Uraian	2018			2019			2020			2021			2022			Rata-rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	
<b>5.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>4.418.399</b>		5.940.391	<b>5.279.509</b>	<b>88,9</b>	<b>5.365.251</b>	<b>4.624.450</b>	<b>86,2</b>	<b>5.762.438</b>	<b>4.983.150</b>	<b>86,5</b>	<b>2.819.499</b>			
5.01.01	Belanja Pegawai	1.509.100			1.959.661	1.697.114	86,6	1.922.926	1.668.091	86,7	2.329.088	2.105.589	90,4	1.356.365			
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.874.300			3.155.831	2.767.688	87,7	3.203.205	2.779.848	86,8	3.134.163	2.634.942	84,1	1.216.447			
5.01.03	Belanja Hibah	1.029.946			815.124	806.274	98,9	223.050	163.933	73,5	280.469	228.665	81,5	246.688			
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	5.052			9.775	8.433	86,3	16.071	12.578	78,3	18.718	13.955	74,6	-			
<b>5.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.829.260</b>		1.825.021	<b>1.207.816</b>	<b>66,2</b>	<b>1.331.587</b>	<b>1.066.606</b>	<b>80,1</b>	<b>1.880.880</b>	<b>1.514.465</b>	<b>80,5</b>	<b>418.464</b>			
5.02.01	Tanah	1.311			354	4	1,1	24	24	98,3	39.039	25.313	64,8	1.608			
5.02.02	Peralatan dan Mesin	223.326			572.042	328.324	57,4	556.723	418.050	75,1	334.116	300.194	89,8	118.119			
5.02.03	Bangunan dan Gedung	101.556			409.409	299.304	73,1	280.503	247.161	88,1	733.597	537.517	73,3	100.711			
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	1.489.316			809.526	549.190	67,8	465.161	374.809	80,6	760.265	638.223	83,9	197.653			
5.02.05	Aset tetap lainnya	13.750			33.690	30.994	92,0	29.175	26.561	91,0	13.864	13.218	95,3	374			
5.02.06	Aset lainnya	-			-	-	#VALUE!	0	-	#VALUE!	0	-	#VALUE!	-			
<b>5.03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>394</b>		25.000	<b>904</b>	<b>3,6</b>	<b>500.000</b>	<b>226.176</b>	<b>45,2</b>	<b>394.152</b>	<b>221.409</b>	<b>56,2</b>	<b>6.682</b>			
<b>5.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>3.097.004</b>		5.109.588	<b>4.899.390</b>	<b>95,9</b>	<b>3.510.011</b>	<b>3.411.273</b>	<b>97,2</b>	<b>4.223.128</b>	<b>4.004.505</b>	<b>94,8</b>	<b>2.832.497</b>			
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.406.281			3.087.792	2.892.136	93,7	1.911.308	1.863.238	97,5	2.514.486	2.455.934	97,7	2.558.408			
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	690.723			2.021.796	2.007.254	99,3	15.987.030	1.548.035	9,7	1.708.642	1.548.570	90,6	274.089			
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>9.345.057</b>		12.900.000	<b>11.387.619</b>	<b>88,3</b>	<b>10.706.850</b>	<b>9.328.504</b>	<b>87,1</b>	<b>12.260.598</b>	<b>10.723.529</b>	<b>87,5</b>	<b>6.077.143</b>			

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah. juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami trend meningkat. Proporsi selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya didalam APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Tabel 3.12 di bawah menyajikan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020.

**Tabel III.12**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
			(d)	(e)=(c)/(d)*100%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)/(d)*100%
1	2018	1.646.255.134.945	10.870.432.071.874	15,14
2	2019	1.670.230.950.000	7.397.629.233.306	22,58
3	2020	N.A	9.428.251.817.708	N.A
4	2021		12.264.248.307.058	
5	2022			

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

**3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah. Secara umum berikut dimuat analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, melihat penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh SiLPA. Perkembangan defisit riil anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel III.13**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	7.985.727.918.251	8.158.103.650.157	10.671.715.200.487	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	7.601.242.338.859	8.227.956.959.422	9.345.057.063.691	11.287.763.575.489	9.811.126.773.547
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3.690.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000
A	Defisit riil	384.485.579.392	-69.853.309.265	1.320.795.738.155	387.323.260.711	26.259.105.652
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	226.681.020.888	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	226.681.020.888	611.118.124.747	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.275.642.920.000

Sumber: BPKAD Provindi KALTIM, 2021

Secara riil kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2017 ketika APBD mengalami defisit, yakni menjadi penutup defisit belanja daerah. Penutup defisit tersebut terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016, 2018 hingga 2020 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

## 2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2016-2020 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

**Tabel III.14**  
**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020**

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>449.734.484.026,79</b>	<b>100,00</b>	<b>545.491.000.183,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1.625.434.831.455,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2.206.090.542.483,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.947.756.080.958,10</b>	<b>100,00</b>
1	Pelampauan penerimaan PAD	107.999.975.809,52	24,01	421.162.210.390,12	77,21	673.385.809.370,67	41,43	243.697.539.011,03	11,05	970.117.544.356,28	24,57
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	128.499.421.929,43	28,57	-491.637.254.661,00	-90,13	404.858.194.977,00	24,91	1.044.465.047,00	0,05	567.177.252.127,00	14,37
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-13.445.934.600,00	-2,99	4.847.919.707,90	0,89	2.236.011.626,40	0,14	-577.689.200,00	-0,03	11.067.120.000,00	0,28
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	226.681.020.887,84	50,40	611.118.124.746,55	112,03	541.264.815.481,88	33,30	1.861.926.227.625,08	84,40	2.249.394.164.474,82	56,98
5	Pelampauan pembiayaan netto	N/A	-	N/A	-	3.690.000.000,00	0,23	100.000.000.000,00	4,53	150.000.000.000,00	3,80

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari *pertama*, strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk tiga tahun mendatang.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut.

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 30, terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan daerah yang memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, dalam merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 akan mempertimbangkan kondisi dan asumsi dasar ekonomi makro nasional jangka menengah tahun 2024-2026 seperti pada tabel berikut.

**Tabel III.15**  
**Tabel Ekonomi Global dan Nasional**

Indikator (1)	Tahun 2024 (2)	Tahun 2025 (3)	Tahun 2026 (4)
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,4-6,3	5,5-6,5	5,5-6,6
Inflasi (% ,yoy)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400- 14.800	14.400- 14.800	14.500- 14.900
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,24-7,90	6,25-8,10	6,27-8,29
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70-90	70-90	70-90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	644-723	682-786	695-835
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.051-1.155	1.131-1.289	1.230-1.428

Sejalan dengan perbaikan perekonomian global dan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memproyeksikan perkiraan pendapatan dan belanja daerah mempertimbangkan asumsi makro ekonomi yang pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh pada tahun 2024 pada kisaran 4-5 % (yoy), pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4-5 % (yoy) serta pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 4-5 % (yoy). Selanjutnya inflasi pada 2024-2026 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2023 namun berada di kisaran target  $1 \pm 3\%$  (yoy).

Pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

#### A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam tiga tahun kedepan sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi serta bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih mengandalkan pada Pajak Daerah yang akan berkontribusi pada kisaran 87-88 persen yang diperoleh terutama melalui pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak

kendaraan bermotor. Selain itu pula, Lain-Lain PAD yang Sah juga diperkirakan akan terus meningkat pada kisaran 11-12 persen seiring dengan peningkatan kualitas dan cakupan layanan yang oleh rumah sakit pemerintah.

Pendapatan daerah Kalimantan Timur diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2024-2026 sebesar 9,17 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2022, penetapan APBD tahun 2023. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 hingga tahun 2026 serta pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan diberlakukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya UU HKPD, yaitu pada tanggal 5 Januari 2025. Melalui PERDA baru tersebut terdapat perubahan tarif PKB dan BBNKB dan kebijakan opsen sebagai pengganti bagi hasil Pemerintah Kabupaten/Kota serta penambahan objek pajak baru, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi:
  - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - b. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  - c. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
  - e. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
  - f. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  - g. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
  - h. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - i. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
  - j. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - k. Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - l. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
  - m. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
2. Komponen Pendapatan Transfer bagi Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
  - b. Peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
  - c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
3. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
  - b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. terutama dalam hal dana transfer.



**Tabel III.16**  
**Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026**

Kode Rek	Uraian	Target			Proyeksi			
		2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>16.442.341.253.591</b>	<b>14.621.856.687.106</b>	<b>-11,07</b>	<b>16.224.886.190.490</b>	<b>17.841.559.589.081</b>	<b>19.336.104.581.775</b>	9,17
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.731.281.736.065	8.045.500.965.106	-7,85	9.162.333.562.580	10.321.882.916.398	11.240.655.408.217	10,78
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.604.003.377	7.010.000.000.000	-8,05	7.952.500.000.000	9.035.100.000.000	9.865.700.000.000	11,40
4.1.02	Retribusi Daerah	19.866.174.340	20.052.388.240	0,94	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210	7,35
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	-24,99	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416	9,93
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	777.548.891.826	782.707.685.568	0,66	951.308.953.588	1.007.373.953.589	1.063.423.953.590	5,73
4.2	Pendapatan Transfer	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000	-14,71	7.048.691.091.947	7.505.812.280.166	8.081.581.923.900	7,08
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000	-14,71	7.048.691.091.947	7.505.812.280.166	8.081.581.923.900	7,08
4.2.01.01	Dana Perimbangan		6.562.497.042.000	#DIV/0!	7.038.691.091.947	7.495.812.280.166	8.071.581.923.900	7,09
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)		5.021.968.600.000	#DIV/0!	5.495.021.432.110	5.934.852.021.371	6.493.048.575.856	8,70
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)		857.919.020.000	#DIV/0!	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095	1,68
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		190.152.584.000	#DIV/0!	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256	1,35

Kode Rek	Uraian	Target			Proyeksi			
		2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		492.456.838.000	#DIV/0!	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			#DIV/0!	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.147.080.000	13.858.680.000	-19,18	13.861.535.964	13.864.392.517	13.867.249.658	0,02
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	-19,18	13.861.535.964	13.864.392.517	13.867.249.658	0,02

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2022

## B. Rencana Belanja Daerah

Perhitungan belanja daerah harus dilakukan memperhatikan kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah, karena pengalokasian belanja menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan melalui strategi perencanaan berbasis kinerja yang berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Disamping itu alokasi belanja daerah disusun dengan strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun proyeksi belanja daerah tahun 2022-2026 untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimuat pada tabel di bawah.

**Tabel III.17**  
**Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026**

Uraian	Target		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2022	2023		2024	2025	2026	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.254.119.047.139</b>	<b>17.031.194.223.080</b>	<b>38,98</b>	<b>16.555.842.110.030</b>	<b>18.272.276.868.666</b>	<b>19.866.582.884.518</b>	<b>9,55</b>
BELANJA OPERASI	5.900.060.438.024	7.414.552.277.521	25,67	7.272.758.764.170	7.595.910.348.851	7.933.592.312.723	4,44
Belanja Pegawai	2.333.723.802.442	2.796.363.758.450	19,82	2.578.256.951.255	2.707.169.798.818	2.842.528.288.759	5,00
Belanja Barang dan Jasa	3.083.330.472.969	4.207.685.257.571	36,47	4.379.873.970.576	4.559.109.064.447	4.745.678.894.224	4,09
Belanja Hibah	432.065.962.614	395.879.061.500	-8,38	300.000.000.000	315.000.000.000	330.750.000.000	5,00
Belanja Bantuan Sosial	50.940.200.000	14.624.200.000	-71,29	14.627.842.339	14.631.485.586	14.635.129.740	0,02
BELANJA MODAL	1.942.103.130.958	4.097.300.945.741	110,97	3.763.563.884.584	4.896.268.350.846	6.358.613.448.554	29,98
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.688.799.413	129.340.999.818	1.833,70	129.519.461.276	129.698.168.970	129.877.123.241	0,14
BELANJA TRANSFER	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000	22,35	5.390.000.000.000	5.650.400.000.000	5.444.500.000.000	0,59

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2022

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya atau pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

**Tabel III.18**  
**Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Target		Rata-rata pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023		2024	2025	2026	
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>							
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>							
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.958.526.374	2.578.143.312.894	5,36	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000	18,33
6.1.0 2	Pencairan Dana Cadangan							
6.1.0 4	Penerimaan Pinjaman Daerah							
6.1.0 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
6.1	Penerimaan Piutang Daerah							
6.1.0 8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir							
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>							
6.2.0 1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo							
6.2.0 2	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	-28,65	169.044.080.460	169.282.720.414	169.521.697.257	0,14
6.2.0 3	Pembentukan Dana Cadangan							
6.2.0 4	Pemberian Pinjaman Daerah							
6.2.0 5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2022, diolah

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

- 1) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)  
Perhitungan Proyeksi SiLPA tahun 2024-2026 dilakun berdasarkan proyeksi realisasi besaran SiLPA periode tahun 2022 berdasarkan P-APBD serta APBD 2023.

**Tabel III.19**  
**Target dan Proyeksi SiLPA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022-2026**

Tahun	SiLPA (Rp)
2022	876.592.908.438
2023	2.578.143.312.894
2024	500.000.000.000
2025	600.000.000.000
2026	700.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2022, diolah

- 2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat  
Perhitungan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dikarenakan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel III.20**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Target				Proyeksi					
		2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
<b>A</b>	<b>Belanja Mengikat</b>	<b>3.076.713.870.381</b>	<b>26,75</b>	<b>2.796.363.758.450</b>	<b>16,42</b>	<b>2.578.256.951.255</b>	<b>21,6</b>	<b>2.707.169.798.818</b>	<b>21,7</b>	<b>2.842.528.288.759</b>	<b>21,9</b>
1	Belanja Pegawai	3.076.713.870.381	26,75	2.796.363.758.450	16,42	2.578.256.951.255	21,6	2.707.169.798.818	21,7	2.842.528.288.759	21,9
2	Belanja Bunga		0,00								
			0,00								
<b>B</b>	<b>Belanja Wajib</b>	<b>6.700.970.412.644</b>	<b>58,26</b>	<b>8.148.698.413.234</b>	<b>47,85</b>	<b>8.352.415.873.565</b>	<b>69,9</b>	<b>8.561.226.270.404</b>	<b>68,7</b>	<b>8.775.256.927.164</b>	<b>67,7</b>
1	Pendidikan	2.886.349.164.653	25,09	3.372.478.018.684	19,80	2.091.079.553.661	17,5	2.373.362.061.971	19,1	2.628.168.599.553	20,3
2	Kesehatan	1.909.862.294.684	16,60	1.609.918.858.436	9,45	1.241.209.646.494	10,4	1.350.696.937.681	10,8	1.486.301.001.807	11,5
3	Infrastruktur	1.841.078.583.927	16,01	3.075.268.987.142	18,06	3.152.150.711.821	26,4	3.230.954.479.616	25,9	3.311.728.341.606	25,5
4	Peningkatan Kapasitas SDM	52.270.625.316	0,45	46.263.493.532	0,27	41.691.400.168	0,3	46.797.355.197	0,4	51.451.576.343	0,4
5	Penguatan APIP	11.409.744.064	0,10	44.769.055.440	0,26	32.946.473.646	0,3	37.259.725.288	0,3	41.164.788.069	0,3
			<b>0,00</b>								
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>236.621.946.400</b>	<b>2,06</b>	<b>168.805.776.920</b>	<b>0,99</b>	<b>169.044.080.460</b>	<b>1,4</b>	<b>169.282.720.414</b>	<b>1,4</b>	<b>169.521.697.257</b>	<b>1,3</b>
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		0,00								
2	Penyertaan Modal Daerah	236.621.946.400	2,06	168.805.776.920	0,99	169.044.080.460	1,4	169.282.720.414	1,4	169.521.697.257	1,3
3	Pembentukan Dana Cadangan										
4	Pemberian Pinjaman Daerah										
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.										

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2022, diolah

3) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas Riil merupakan perhitungan kemampuan keuangan daerah provinsi Kalimantan timur tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, perhitungan tersebut berdasarkan perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai penerimaan, serta pengeluaran yang terdiri atas Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

RANCANGAN



**Tabel III.21**  
**Target dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2026**

Kode Rek	Uraian	Target		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>16.442.341.253.591</b>	<b>14.621.856.687.106</b>	<b>16.224.886.190.490</b>	<b>17.841.559.589.081</b>	<b>19.336.104.581.775</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>8.731.281.736.065</b>	<b>8.045.500.965.106</b>	<b>9.162.333.562.580</b>	<b>10.321.882.916.398</b>	<b>11.240.655.408.217</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.604.003.377	7.010.000.000.000	7.952.500.000.000	9.035.100.000.000	9.865.700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.866.174.340	20.052.388.240	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	777.548.891.826	782.707.685.568	951.308.953.588	1.007.373.953.589	1.063.423.953.590
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>7.693.912.437.526</b>	<b>6.562.497.042.000</b>	<b>7.048.691.091.947</b>	<b>7.505.812.280.166</b>	<b>8.081.581.923.900</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000	7.048.691.091.947	7.505.812.280.166	8.081.581.923.900
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	6.562.497.042.000	7.038.691.091.947	7.495.812.280.166	8.071.581.923.900
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5.021.968.600.000	5.495.021.432.110	5.934.852.021.371	6.493.048.575.856
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	857.919.020.000	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	190.152.584.000	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	492.456.838.000	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>17.147.080.000</b>	<b>13.858.680.000</b>	<b>13.861.535.964</b>	<b>13.864.392.517</b>	<b>13.867.249.658</b>
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	13.861.535.964	13.864.392.517	13.867.249.658
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.446.958.526.374</b>	<b>2.578.143.312.894</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.958.526.374	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000

Kode Rek	Uraian	Target		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.1	Penerimaan Piutang Daerah					
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
	<b>Total Penerimaan Daerah</b>	<b>18.889.299.779.965</b>	<b>17.200.000.000.000</b>	<b>16.724.886.190.490</b>	<b>18.441.559.589.081</b>	<b>20.036.104.581.775</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.254.119.047.139</b>	<b>17.031.194.223.080</b>	<b>16.555.842.110.030</b>	<b>18.272.276.868.666</b>	<b>19.866.582.884.518</b>
<b>5.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.900.060.438.024</b>	<b>7.414.552.277.521</b>	<b>7.272.758.764.170</b>	<b>7.595.910.348.851</b>	<b>7.933.592.312.723</b>
5.01.01	Belanja Pegawai	2.333.723.802.442	2.796.363.758.450	2.578.256.951.255	2.707.169.798.818	2.842.528.288.759
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.083.330.472.969	4.207.685.257.571	4.379.873.970.576	4.559.109.064.447	4.745.678.894.224
5.01.05	Belanja Hibah	432.065.962.614	395.879.061.500	300.000.000.000	315.000.000.000	330.750.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.940.200.000	14.624.200.000	14.627.842.339	14.631.485.586	14.635.129.740
<b>5.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.942.103.130.958</b>	<b>4.097.300.945.741</b>	<b>3.763.563.884.584</b>	<b>4.896.268.350.846</b>	<b>6.358.613.448.554</b>
<b>5.03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.688.799.413</b>	<b>129.340.999.818</b>	<b>129.519.461.276</b>	<b>129.698.168.970</b>	<b>129.877.123.241</b>
<b>5.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>4.405.266.678.744</b>	<b>5.390.000.000.000</b>	<b>5.390.000.000.000</b>	<b>5.650.400.000.000</b>	<b>5.444.500.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>236.600.000.000</b>	<b>168.805.776.920</b>	<b>169.044.080.460</b>	<b>169.282.720.414</b>	<b>169.521.697.257</b>
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	169.044.080.460	169.282.720.414	169.521.697.257
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	<b>Total Pengerluaran Daerah</b>	<b>12.490.719.047.139</b>	<b>17.200.000.000.000</b>	<b>16.724.886.190.490</b>	<b>18.441.559.589.081</b>	<b>20.036.104.581.775</b>

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2022, diolah

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 4.1. Permasalahan

Kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir baik yang disajikan pada Bab II dokumen RPD ini maupun evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memberi masukan untuk perumusan permasalahan daerah. Permasalahan pembangunan Kalimantan Timur dapat dibagi 2 (dua) kelompok yaitu permasalahan terkait pencapaian indikator makro daerah dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rumusan permasalahan menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis daerah maupun pengambilan kebijakan di masa datang.

##### 4.1.1. Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan indikator makro daerah dirumuskan berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD periode lalu atau kebijakan untuk mencapai target/kondisi yang lebih baik. Permasalahan disajikan dengan pengelompokan masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
<b>Aspek Sumber Daya Manusia</b>				
1	Belum meratanya nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	Belum tercapainya target rata-rata lama sekolah	Belum terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan	
		Belum tercapainya target harapan lama sekolah	Tenaga kependidikan belum terpenuhi secara maksimal terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan	
		Belum meratanya capaian usia harapan hidup		Belum meratanya tenaga kesehatan berkualitas
				Ketimpangan pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan
				Belum terpenuhinya fasilitas kesehatan rujukan untuk masyarakat
				Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
				Masih tingginya angka stunting

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Meningkatnya kemiskinan	Inflasi yang tidak terkendali	Kerentanan kenaikan harga eceran komoditas bahan pokok dan barang penting akibat keterbatasan ketersediaan
			Kerentanan kenaikan harga eceran komoditas bahan pokok dan barang penting akibat kenaikan biaya distribusi
		Masih tingginya ketimpangan pengeluaran per kapita kabupaten/kota	Kekeliruan dalam pola konsumsi masyarakat (pengeluaran masyarakat miskin untuk rokok 11% kota, 14% desa)
			Belum terbukanya lapangan usaha produktif bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan
		Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Ketimpangan pendapatan masyarakat di Bontang dan Berau yang memiliki perusahaan besar
		Tingginya angka pengangguran khusus Kab. Mahulu, perlu strategi terkait pekerjaan layak (decent work)	Pengurangan tenaga kerja dan/atau pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19
			Tutupnya beberapa perusahaan akibat pandemi COVID-19
			Angkatan kerja tidak dapat terserap secara optimal sebab tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
			Migrasi tenaga kerja dari luar daerah
			Perencanaan ketenagakerjaan daerah belum menjadi perhatian utama dalam mengakomodir kebutuhan tenaga kerja
<b>Aspek Ekonomi Wilayah</b>			
3	Struktur ekonomi yang belum sesuai dengan karakteristik Sosial/Ekonomi-Demografi	Pertumbuhan sektor unggulan belum maksimal (pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata dan ekraf, UMKM)	Produksi dan Produktivitas masih rendah
			Masih kurangnya pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
			Belum optimalnya pengelolaan produk lokal oleh UMKM
			Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
		Industri hilir sektor pertanian dalam arti luas masih kurang	Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kaltim
Ketidakcocokannya antara pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan ( <i>mismatch</i> )	Pendidikan/BLK belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		
	Tamatan SMK belum mampu memenuhi kualifikasi lapangan usaha yang ada		
4	Laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah regional Kalimantan dan Nasional	Ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian (batubara dan migas)	Rendahnya permintaan ekspor batubara dan CPO
			Perusahaan kategori pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tercatat mengalami penurunan volume produksi
		Inflasi daerah cenderung meningkat walaupun masih terkendali dan berada dalam rentang target inflasi nasional (3±1%)	Inflasi utamanya didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, kenaikan cukai rokok, pemberlakuan tarif pajak baru yaitu PPN dan PPh, peningkatan harga LPG nonsubsidi.
			Rendahnya daya saing produk selain komoditas migas dan batubara
		Belum optimalnya LPE non migas dan batubara	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Konektivitas & Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan belum optimal Masih rendahnya ketersediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal Belum seluruh penduduk Kaltim memperoleh layanan infrastruktur dasar minimal, khususnya sektor air minum dan sanitasi
<b>Aspek Lingkungan Hidup</b>			
5	Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan di semua sektor	Kurang terjaganya kualitas air	Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air Belum maksimalnya frekuensi dan titik pemantauan lingkungan
		Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berbasis lahan	Masih tingginya tingkat kerusakan lahan Kurang terjaganya pembukaan lahan Kurang pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan
		Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup	Masih tingginya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Masih tingginya pelaku usaha yang harus diawasi
6		Belum terpenuhinya kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi dan pusat industri (intra dan inter)	Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan belum optimal
<b>Aspek Tata Kelola Pemerintahan</b>			
7	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Pelayanan publik belum sepenuhnya memiliki dan menerapkan SOP Minimnya tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat
		Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah	Masih ada unit layanan yang belum menyusun standar pelayanan Standar pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten Masih ada pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan Inovasi pelayanan yang belum optimal Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal Sarana dan prasarana menunjang layanan yang belum optimal
		Belum optimalnya implementasi sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian daerah	Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan Belum teridentifikasinya seluruh analisis jabatan, beban kerja dan perencanaan kebutuhan ASN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum adanya model pengembangan kompetensi dan evaluasi ASN
			Belum ditetapkannya standar kompetensi jabatan
		Belum optimalnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan	Belum optimalnya pemanfaatan informasi teknologi dalam pelayanan publik
			Belum optimalnya integrasi SPBE antar perangkat daerah
		Belum semua perangkat daerah memiliki predikat SAKIP B	Capaian kinerja tidak sesuai dengan perencanaan
		Capaian opini BPK terhadap LKPD tetap perlu dipertahankan untuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.	Kinerja keuangan daerah yang dinilai dalam opini BPK belum terhubung dengan kinerja indikator pembangunan daerah, belum terintegrasi dan menggambarkan keterkaitan.

Sumber: hasil analisis, 2022

#### 4.1.2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dengan berbagai indikator yang menggambarkan kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja dari berbagai indikator tersebut maka diketahui indikator apa saja dari masing-masing urusan yang sudah tercapai atau belum tercapai. Kinerja yang belum tercapai atau masih membutuhkan upaya untuk mencapai dan/atau mempertahankan kinerja menjadi masukan untuk merumuskan permasalahan pembangunan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 4.2**

#### Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	Masalah	Akar Masalah
<b>Pendidikan</b>		
Belum meratanya Wajar Pendidikan 12 tahun.	Rendahnya APM dan APK SMA/SMK di beberapa wilayah Kalimantan Timur	Belum terpenuhi USB untuk wilayah yang telah perhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan ketersediaan sekolah dasar di wilayah tersebut
Belum semua jenjang pendidikan dasar dan menengah memenuhi SPM	Peningkatan pemenuhan standar pendidikan secara kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana prasarana Satuan Pendidikan SMA/SMK	Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombongan belajar dan ruang kelas dapat terpenuhi
<b>Kesehatan</b>		

	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan penduduk	Masih tingginya kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang	<p>Keterbatasan SDM, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga profesi gizi</li> <li>2) Belum semua Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas terlatih dalam Tata Laksana Gizi Buruk, Konselor ASI &amp; MP-ASI dan PMBA, dan Pemantauan Pertumbuhan Balita</li> </ol> <p>Keterbatasan sarana dan alat bantu kerja TPG Puskesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih banyak dijumpai TPG Puskesmas tidak memiliki ruang kerja, meja dan kursi kerja</li> <li>2) Belum semua TPG Puskesmas/Puskesmas memiliki alat bantu kerja untuk media KIE (buku panduan, food model &amp; lembar balik, konseling kit, dll)</li> </ol> <p>Keterbatasan obat dan logistik program perbaikan gizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum semua kabupaten/kota mampu memenuhi kewajibannya untuk mencukupi ketersediaan obat dan logistik gizi seperti MP-ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah, Fe bagi Ibu Hamil maupun bagi Remaja Putri, Vitamin A biru (100.000 IU) dan Vitamin A merah (200.000 IU), Mineral Mix, Taburia, Iodium test, dll sehingga Provinsi yang awalnya berfungsi hanya sebagai <i>bufferstock</i> mengalami kekurangan dalam pendistribusian obat <p>Kematian Ibu penyebab terbesar adalah karena perdarahan, Usia ibu pada saat hamil, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu pada saat kehamilan, nutrisi ibu selama hamil dan nifas.</p> <p>Penyebab kematian bayi terbesar disebabkan oleh bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR) dan Asfeksia. BBLR dan Asfeksia dapat disebabkan karena nutrisi ibu hamil yang kurang baik selama kehamilan.</p> </li></ol>	
	Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular	<p>Masih cukup tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</p> <p>Belum optimalnya sosialisasi dan aksi pencegahan penyakit</p> <p>Pola hidup masyarakat yang belum menerapkan hidup bersih dan sehat, antara lain kurang aktivitas fisik, kurang mengonsumsi buah dan sayur, sering minum alkohol, merokok, dan buang air besar di sembarang tempat.</p>	
	<b>RSUD KANUJOSO</b>		
	Adanya IKN berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk pendatang di Kalimantan Timur.	Dengan adanya ikn dimungkinkan akan bertambah jumlah pasien diluar kapasitas rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah IKN masih kurang.
	Dengan adanya IKN maka RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menjadi Rumah Sakit Rujukan tipe A	Sarana dan Prasarana yang ada masih belum lengkap.	Masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diinginkan.
	SDM yang ada masih kurang terutama tenaga dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi sub spesialis, dokter gigi spsialsi serta nakes lainnya.	kurang nya tenaga kesehatan	Minat dokter spesialis yang mendaftar di RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masih kurang

	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan PONEK di rumah sakit masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan	pelaksanaan RS PONEK belum maksimal	Belum adanya ruang perawatan khusus ibu dan anak
<b>RSJD ATMA HUSADA</b>		
Belum tercapainya tingkat kompetensi pegawai sesuai target	Belum tercapainya tingkat kompetensi pegawai sesuai target	1. Realisasi TW III masih rendah karena terhambat belum terkumpulnya semua sertifikat hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan di semua bidang 2. Anggaran yang kurang di APBD sehingga dibantu dengan dana BLUD. 3. Adanya pandemi COVID - 19 yang berdampak pelaksanaan Bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai tidak dapat tercapai sesuai target.
Belum tercapainya Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun sesuai target	Belum tercapainya Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun sesuai target	
<b>RSUD A Wahab Sjahranie</b>		
Belum optimalnya kualitas tata kelola dan manajemen	Belum optimalnya sistem remunerasi	1. Penilaian kinerja pegawai belum optimal 2. Pembayaran tunai masih menggunakan perhitungan fee for service dan untuk BPJS menyesuaikan
	Belum sepenuhnya perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terintegrasi	1. Masih adanya usulan kebutuhan yang belum diakomodir oleh karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi 2. Tingginya permintaan diluar perencanaan (bersifat Cito) 3. Pelaksanaan sistem Inventory belum maksimal 4. Kurang optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai rencana aksi dari unit /bidang/ instalasi sehingga proses kompilasi data terhambat 5. Belum ada sistem aplikasi yang terintegrasi mulai proses pengusulan perencanaan sampai proses evaluasi realisasi capaian kinerja
Belum optimalnya pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan serta efisiensi anggaran	Adanya kecenderungan gangguan cash flow	1. Sumber Pendapatan RS tahun 2022 > 75 % bersumber BPJS 2. Tim Case mix di internal RS belum optimal karena tergantung laporan dari unit / intsalasi 3. Regulasi tentang tarif belum update
	Tingginya biaya operasional (KSO Obat Alkes, tindakan medis/ operatif dll )	1. Monev KSO alat kesehatan belum optimal 2. Kurang optimalnya penghitungan unit cost di RS 3. Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Forkit masih rendah
Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS	Implementasi waktu tunggu poliklinik dan respon time di beberapa unit pelayanan masih belum mencapai standar dan unsur kecepatan pelayanan yang masih yang rendah dari hasil SKM	1. Sistem pendaftaran online yang belum semua terintegrasi 2. Tingginya jumlah kunjungan pasien poliklinik dan rujukan pasien ke RS 3. RS belum mengoptimalkan sistem e-Rekam Medik 4. Kompetensi dan soft skill petugas pemberi layanan kesehatan yang kurang
	Belum tercukupinya sarana, prasarana dan peralatan RS dengan kebutuhan pelayanan	1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya 2. Belum optimalnya kerjasama operasional alat dengan pihak ketiga 3. Banyak alat yang rusak karena utilitas yang tinggi sebagai RS Rujukan Nasional dan kutangnya maintenance 4. Lemahnya perencanaan yang dilakukan dari unit/ instalasi
	Pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan belum optimal	1. Beban anggaran untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan canggih yang tinggi 2. Evaluasi tingkat utilisasi alat yang kurang optimal 3. Jadwal kalibrasi alat menyesuaikan dengan jadwal dari pusat 4. Belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kontrak service alat kedokteran canggih



	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM RS	Implementasi akreditasi pendidikan dan pelatihan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya anggaran untuk pelatihan bagi SDM dengan target 20 jam /tahun/orang</li> <li>2. Masih ada usulan pelatihan dari instalasi dan unit yang belum terakomodir</li> <li>3. Pemanfaatan tenaga terlatih yang belum optimal</li> </ol>
	Belum efisiennya pelayanan sebagai manifestasi proses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi DPJP/Provider layanan teradap anak didik masih lemah</li> <li>2. Lemahnya integrasi pelayanan dan institusi pendidikan</li> <li>3. Kurang optimalnya dukungan dari institusi kesehatan terhadap penyelenggaraan pendidikan di RS</li> </ol>
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan	Belum efektifnya implementasi kerjasama yang dibangun di lintas sektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama belum optimal</li> <li>2. Pelaksanaan rekruitment kerjasama perlu update sesuai aturan / regulasi</li> <li>3. Kompetensi petugas dalam membangun jejaring belum optimal</li> </ol>
	Belum optimalnya upaya promosi kesehatan masyarakat	1. Ketersediaan sarana pendukung PKRS
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Konektivitas & Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik	Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan
		Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai
		Kelas Jalan belum sesuai dengan peruntukan
		Masih terdapat daerah minim aksesibilitas dan konektivitas
		Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik
		Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan
		Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan
	Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan
		Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan
		Koordinasi antar stakeholders belum maksimal
		Geometric Jalan yang belum sesuai
		Keterampilan Pengemudi yang belum memadai
		Kondisi kendaraan yang tidak layak
	Belum optimalnya distribusi barang dan penumpang	Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai
		Sarana dan prasarana transportasi belum optimal
		Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik
Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah		
Masih rendahnya ketersediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air	Belum terbangunnya jaringan irigasi teknis	
	Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai	
	Belum terbangunnya bendung/embung	
	Terbatasnya sumber air baku	

\	Masalah	Akar Masalah
		Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan)
		Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksisting
		Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi
		Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP
	Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air	Belum terbangunnya pengendali banjir
		Masalah sosial dan lahan
		Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS
		Belum optimalnya sistem pengendali banjir
		Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali
		Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik
		Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP
		Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis
		Belum optimalnya penanganan pantai kritis
		Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis
		Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi
	Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	Belum selesainya RTRWN
		Belum selesainya RTRWP
		Belum selesainya RTRWK/K dan RDTR
		Belum optimal sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan
	Masih ada penduduk yang belum mendapatkan layanan air minum layak dan aman.	Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang
		Belum memiliki kelembagaan pengelolaan SPAM Regional
		Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas
		Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas Kab/Kota
		Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak
		Kondisi geografis dan pemusatan penduduk yang sporadis menyebabkan penyediaan layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan
		Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal
	Belum seluruh penduduk Kaltim memperoleh layanan air limbah dan sanitasi layak (terutama	Tingkat pelayanan air limbah terpusat sangat rendah
		Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional

	Masalah	Akar Masalah
	yang berada dalam cakupan kewenangan provinsi).	Pengelolaan air limbah domestik skala regional di Kaltim hanya mampu menangani 110 Desa/kelurahan dari 841 Desa/kelurahan.
	Belum optimalnya Penanganan Sampah Domestik	<p>Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)</p> <p>Capaian akses penanganan sampah domestik baru mencapai 71,68%</p> <p>Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir).</p> <p>Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R);</p>
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
Penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal	Masih ada penduduk yang tinggal di permukiman tidak layak yakni dengan kondisi dan kualitas lingkungan dibawah standar kelayakan	<p>Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi</p> <p>Sebagian besar rumah dikawasan kumuh berada di kawasan bantaran sungai - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat</p> <p>Update SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian</p> <p>Penanganan belum tepat sasaran - pelaksanaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang dapat mengurangi skor kekumuhan</p> <p>Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang</p> <p>Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah</p> <p>Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan</p>
	Masih ada Rumah Tangga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni	<p>Proses Pendataan yang belum sempurna</p> <p>Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni</p> <p>Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya</p> <p>Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana</p> <p>Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi</p> <p>Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi</p> <p>Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah</p>
<b>Trantibumlinmas</b>		
Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas	Pelaksanaan Tugas di Lapangan Pada Saat Penegakan Perda dan Perkada Pada Saat Unjuk rasa Tidak Maksimal	<p>Kurangnya Tenaga Anggota Personil di Lapangan dan Keseterdiaanya Sarana dan Prasarana</p> <p>Kurangnya Jumlah Tenaga PPNS dan Kurang Berminatnya ASN Sarjana S1 Kurang Berminat Menjadi PPNS</p> <p>PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya</p>

	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kebakaran	Data Peta Daerah Rawan Kebakaran Belum Mencukupi	Belum aktif dalam menghimpun laporan kebencanaan kebakaran
		Kurang diresponya Permintaan Data Daerah Rawan Bencana Kebakaran
Rendahnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1. Belum maksimalnya Sistem Tata Kerja Penanggulangan Bencana di Provinsi	Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi
	2. Belum Maksimalnya Tingkat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Rendahnya Penanggulangan pada Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Kedaruratan dan Logistik serta pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		2. Rendahnya kualitas SDM aparatur
3. Minimnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Tingginya Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Belum maksimalnya Sistem Tata Kerja Penanggulangan Karhutla di Provinsi	Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi
	Belum maksimalnya Sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya	1. Rendahnya Penanggulangan karhutla pada Tingkat Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadaman, dan penanganan Pasca Karhutla
		2. Rendahnya kualitas maupun Kuantitas SDM aparatur
		3. Minimnya Sarana dan Prasarana Karhutla
		4. Rendahnya Sistem Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Karhutla
5. Rendahnya Tingkat penyidikan kejadian karhutla		
<b>Sosial</b>		
Kemiskinan	bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rencana perpindahan Ibukota Negara menuju Kalimantan Timur secara langsung berdampak bagi pertumbuhan penduduk sehingga akan memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pengangguran di Kalimantan Timur sehingga dapat menimbulkan potensi munculnya PMKS baru.	Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kaltim
	Belum maksimalnya penggunaan data DTKS dalam penanganan PMKS di Kab/Kota sehingga menjadi penghambat pada pelaksanaan program dan kegiatan untuk Kab/Kota	Terdapat Blank Spot di beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur hal ini menyebabkan keterlambatan dalam mengupdate data pada daerah yang bersangkutan.
	Belum maksimalnya penanganan Program-program Kesejahteraan Sosial	Belum Optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dalam proses perencanaan dan Implementasi penanganan Program-program Kesejahteraan Sosial
<b>Tenaga Kerja</b>		
Tingkat pengangguran Kaltim masih tertinggi kedua se-Kalimantan	Peralihan kondisi Perusahaan sejak pandemi sehingga perusahaan membatasi penerimaan, dan kurangnya sosialisasi terkait program yang mengatasi pengangguran serta kurangnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja yang diinginkan oleh perusahaan	melaksanakan sosialisasi tentang program pengurangan angka pengangguran kepada perusahaan dan pencari kerja. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Melaksanakan seminar terkait keminatan terkait keminatan dan persiapan untuk pencari kerja terhadap pasar kerja

	Masalah	Akar Masalah
	serta minat pasar kerja tersedia	
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
Belum optimalnya kesetaraan gender	OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program dan Kegiatan	<p>Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.</p> <p>Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.</p> <p>Lembaga PUG belum berperan sesuai tugas fungsi</p>
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Ditunjang dengan kurangnya informasi lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbatasnya jumlah lembaga layanan rehabilitasi	Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya
Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.	Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.
Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak	Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas anak, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.	Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif
<b>Lingkungan Hidup</b>		
Belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berperspektif perubahan iklim	Rendahnya Perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS</li> <li>2. Belum jelasnya teknis kajian dampak lingkungan hidup.</li> <li>3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.</li> <li>4. Minimnya Pendanaan untuk program kegiatan prioritas</li> <li>5. Perubahan pada Metode Perhitungan IKLH dan validasi Nilai IKLH</li> <li>6. Jumlah Pengawas LH dengan izin usaha yang diawasi belum sebanding (kekurangan SDM)</li> </ol>

\	Masalah	Akar Masalah
	Belum efektifnya upaya pengelolaan sampah dan limbah B3	<p>7. Jumlah dana untuk kegiatan pengawasan tidak sebanding dengan target yang wajib diawasi</p> <p>1. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di wilayah lintas kabupaten/kota serta pesisir dan laut</p> <p>2. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3</p> <p>3. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota</p> <p>4. Belum ditetapkannya lokasi TPA/TPST regional</p> <p>5. Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam Penanganan Sampah khususnya penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>6. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal, karena kendala teknis administrasi penganggaran (seperti Dana POKIR)</p> <p>7. Belum ditetapkannya lokasi rencana pembangunan incinerator</p> <p>8. Masih pada tahap proses penyusunan Peraturan Gubernur sebagai instrumen untuk dasar pengukuran mercuri.</p>
	Belum maksimalnya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan	<p>1. Belum maksimalnya frekuensi dan titik pemantauan lingkungan</p> <p>2. a. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air</p> <p>b. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara</p> <p>3. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut</p> <p>4. Panjangnya Alur Proses Mekanisme dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan</p> <p>5. Perubahan metode perhitungan IKLH dan validasi nilai IKLH</p> <p>6. Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan kabupaten/kota, terkait data lingkungan</p> <p>7. Tidak sinkronnya data antara OPD terkait</p> <p>8. Minimnya pendanaan untuk program kegiatan prioritas</p> <p>9. Panjangnya alur proses mekanisme dalam pemulihan kerusakan lingkungan</p> <p>10. Adanya aturan yang tidak selaras</p>
	<p>a. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup</p> <p>b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>1. Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</p> <p>2. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi</p> <p>3. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lh</p> <p>4. Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>5. Sarana dan prasarana penunjang (kendaraan lapangan medan berat, APD, peralatan sampling in situ, drone, handy talky, dll) untuk pelaksanaan verifikasi kelengkapan tidak/kurang memadai.</p> <p>6. Jumlah SDM masih kurang</p> <p>7. Kualitas SDM perlu ditingkatkan</p>
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
Masih adanya desa tertinggal di Kalimantan timur	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas Bumdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan bumdes
	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan	Kompetensi SDA desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana

	Masalah	Akar Masalah
	kelurahan belum berjalan dengan baik	dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai
	Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemsayarakat desa dan lembaga adat
	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES
		Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
Masih rendahnya layanan kepada Pengguna SPBE	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
		Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota
		Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
		Keterbatasan data Bidang kominfo/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK
		Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
		Keterbatasan SDM analisis data dan informasi
		Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat
		Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online karena aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi
	<b>Koperasi dan UKM</b>	
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi
		Rendahnya Kualitas SDM Koperasi
		Lemahnya sistem pengawasan koperasi
	Rendahnya produktivitas UKM	Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital
		Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19
		Rendahnya daya saing produk UKM
		Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya
	<b>Penanaman Modal</b>	
Belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier	Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara	Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM
		Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi
		Belum optimalnya komitmen perizinan
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	
Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Belum berkembangnya daya saing generasi pemuda	Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN
		Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja

\	Masalah	Akar Masalah
		<p>Masih Kurangnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda</p> <p>Masih rendahnya prestasi olahraga</p> <p>Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani ke Olahraga sehingga beberapa prestasi atlit pada event event Olahraga seperti PON dan Seagames cenderung menurun dari tahun ke tahun</p> <p>Kurangnya pengetahuan masyarakat arti pentingnya olahraga bagi Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup</p> <p>Pembina, Pengurus, pelatih dan Insan Olahraga kurang Profesional baik ditingkat Provinsi, Kab/Kota serta Klub Cabor</p>
<b>Perpustakaan</b>		
Masih rendahnya pelayanan perpustakaan	Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai	<p>Terbatasnya ruangan baca bagi pengunjung onsite</p> <p>Daya tampung gedung yang semakin sempit dengan adanya penambahan koleksi koleksi terbaru sehingga ruang baca bagi pengunjung menjadi terbatas</p> <p>Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir manakala hujan, sehingga dipandang perlu untuk relokasi gedung perpustakaan yang lebih representatif</p>
<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	<p>Masih Rendahnya produksi perikanan budidaya</p> <p>Masih rendahnya produksi perikanan tangkap</p> <p>Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan</p>	<p>Terbatasnya prasarana saluran irigasi</p> <p>Supply ketersediaan benih udang/ikan yang dihasilkan oleh UPTD Balai Benih Udang/Ikan belum optimal</p> <p>Rendahnya kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit</p> <p>Belum oprimalnya penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik</p> <p>Bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan</p> <p>Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal</p> <p>Sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasional yang valid</p> <p>Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan</p> <p>Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern</p> <p>Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p> <p>Minimnya kerjasama bidang usaha perikanan</p> <p>Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang</p> <p>Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah</p> <p>Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal</p>
<b>Pariwisata</b>		
Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan	Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata	Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal



	Masalah	Akar Masalah
pariwisata belum optimal		Belum maksimalnya kerjasama dan sinergitas antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
Masih Rendahnya kontribusinya potensi usaha dari 17 subsektor ekraf	Belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, sebagai pendukung daya tarik wisata. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik)	Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan.
Masih Rendahnya Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah	Belum maksimalnya pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif	Belum optimalnya data subsektor ekonomi kreatif. Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf Belum optimalnya pengembangan subsektor ekraf. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.
Pembangunan destinasi wisata strategis Kalimantan Timur yang belum siap jual untuk didatangi wisatawan.	Belum adanya analisa pasar yang tajam untuk tiap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur menyebabkan kegiatan pemasaran yang selama ini dijalankan bersifat global.	Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh serta Belum dibangun secara maksimal ketersediaan sarpras pendukung untuk kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar Jalan lingkungan, jaringan air bersih, dan listrik, juga permasalahan utiliti dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah/ sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan lain-lain
Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata yang belum tersertifikasi, kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata, dan terbatasnya pengawasan usaha jasa pariwisata.	Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif guna makin mendorong daya saing produk dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.	Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf
<b>Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)</b>		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	Rendahnya Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Teknologi pertanian yang belum dilakukan secara modern Alih fungsi lahan pertanian terbatasnya jalan usaha tani dan jalan produksi kurangnya jaringan irigasi
<b>Pertanian (Peternakan)</b>		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	Populasi dan produktivitas ternak masih rendah	Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang manajemen perkawinan ternak belum optimal Keterbatasan lahan usaha peternakan Penataan kawasan peternakan belum optimal Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang

	Masalah	Akar Masalah
	Daya saing produk peternakan masih rendah	Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal
<b>Pertanian (Perkebunan)</b>		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	Rendahnya Produktivitas Kebun Rakyat	Keterbatasan permodalan Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai Kesulitan dalam mendapatkan saprodi Penggunaan benih yang ilegal Praktek budidaya yang tidak tepat Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS
	Permasalahan pemasaran dan lambat pembangunan industri hilir komoditas perkebunan	Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana Kurangnya sosialisasi dan pengenalan produk produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
Belum optimalnya dukungan ESDM dalam menopang kedaulatan pembangunan Kaltim	Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (masih adanya masyarakat/ rumah tangga yang belum dapat mengakses energi listrik)	1. Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik. 2. Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN. 3. Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
	Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan	1. Teknologi pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih relatif agak tinggi dari segi biaya 2. Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih terbatas 3. Sebagian hewan ternak tidak dikandangkan
<b>Kehutanan</b>		
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak
		Belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan
		kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan
		Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu.

RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

\	Masalah	Akar Masalah
		Biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022.
		Lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November).
	Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan
		Masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan
		Masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi
		Jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.
	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas
		Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan
		Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan
		Belum optimalnya peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
		Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur
		Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman
<b>Perdagangan</b>		
Belum optimalnya ekspor non migas dan batubara	Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (migas dan batubara)	Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara
		Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur
	Rendahnya Daya Saing Produk yang Dipasarkan	Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor
		Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok
		Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan
	Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan	
<b>Perindustrian</b>		
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi	Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah
		Terbatasnya sumber daya manusia industri
		Kelembagaan industri belum efektif
		Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha industri kecil mikro.
<b>Sekretariat Daerah</b>		

	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Simplikasi dalam perumusan pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah	Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan supporting data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan	Masalah ada perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
		Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota
		Belum tersedianya data dan informasi yang terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan baik.
	Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan	Kerjasama belum dianggap sektor yang strategis dalam pembangunan, terlihat dari terbatasnya anggaran Bagian Kerjasama dan Sumber Daya Aparatur yang menangani kurang sesuai pendidikannya, dan belum dibekali dengan Diklat dan Bimtek yang mumpuni.
	Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menelaah Produk Hukum.
		Konsep atau Draft Produk Hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan
		Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.
	belum optimalnya Pengendalian pembangunan sehingga masih ada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
	Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. E-procurement bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Belum diterapkannya kebijakan pengadaan barang dan jasa
		Belum ditaatinya kode etik pengadaan barang dan jasa
Belum di terapkannya prinsip pengadaan barang dan jasa		
Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD	Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah	
	Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah	
Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah masih belum dijadikan budaya / Dasar Budaya Kinerja	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja	
	Belum Optimalnya Penerapan SAKIP, khususnya Penerapan Cascading dan Rencana Aksi Pada Setda	
Kualitas layanan Administrasi Pimpinan belum optimal	Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal	
Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan belum optimal	Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal	
<b>Sekretariat DPRD</b>		
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Tingginya standar pelayanan yang diinginkan (ekspektasi) anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas	Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat

	Masalah	Akar Masalah
	dan fungsi sebagai lembaga perwakilan	Pelayanan pada masa reses, sosper dan sosbang masih belum optimal Minimnya pemahaman SDM terkait prosedur administrasi keuangan Kegiatan anggota DPRD belum diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD
<b>Keuangan</b>		
Belum optimalnya pendapatan daerah	Minimnya sumber-sumber pendapatan daerah	Belum optimalnya Perencanaan, Pengembangan dan Sistem layanan Informasi Pendapatan Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah Belum optimalnya pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
Transformasi kelembagaan BRIDA Kaltim dalam proses (telah terbit Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA).	Transformasi kelembagaan BRIDA Kaltim dalam proses (telah terbit Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA).	Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah serta peraturan teknis pendukung lainnya.
	Masih berfokus pada Litbang, belum pada Litbangjirap inovek (meski sudah mulai ada penerapan hasil riset).	Riset dan inovasi daerah berfokus pada konsep scienced based policy untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan memberdayakan tuisi Litbangjirap inovek.
	Ekosistem riset dan inovasi daerah belum terwujud. Kolaborasi dan sinkronisasi belum terwujud secara optimal (masih parsial).	Terciptanya ekosistem riset dan inovasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan strategis (BRIN, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenkumham, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kab/Kota, Badan Usaha, Lembaga Masyarakat, Penyandang Dana Riset/Yayasan, Mahasiswa, Pelajar, dll.)
	Belum adanya Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan/ Pemajuan Iptek sebagai pedoman arah kebijakan dan program kegiatan.	Tersedianya Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan/ Pemajuan Iptek di Kalimantan Timur.
	Sistem informasi riset dan inovasi daerah belum terbentuk.	Terwujudnya sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi yang terpadu (amanat Perpres 78/2021).
	Belum sinerginya sumber daya manusia (SDM) Iptek secara optimal.	Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Iptek/riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dan sinergi antar Periset dari berbagai lembaga riset, baik pemerintah, swasta, maupun luar negeri.
	Belum ada peta jalan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga litbang Kab/Kota.	Adanya peta jalan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk lembaga riset yang ada di Kab/Kota.
	Belum ada Sentra KI sesuai amanat Kemenkumham.	Terbentuk Sentra HAKI di Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim.
	Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah yang kurang memadai.	Adanya skema pendanaan riset dan inovasi daerah yang optimal.
<b>Penghubung</b>		
Belum optimalnya pelayanan Banhub		PPKM akibat pandemi COVID-19 membatasi pelayanan

\	Masalah	Akar Masalah
	Keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan tata laksana	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan belum dilaksanakan secara benar</p> <p>Kompetensi SDM pelaksana masih kurang</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Penetapan kawasan di TMII sebagai Green Zone sehingga diperlukan kendaraan listrik di lingkungan TMII yang akan berdampak pada jumlah kunjungan</p> <p>Belum tersedianya informasi yang akurat terkait IKN</p> <p>Masih kurangnya koordinasi dengan stakeholder</p>
<b>Pengawasan</b>		
Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi	Belum sepenuhnya SPIP dimplementasikan	<p>Pedoman Pelaksanaan SPIP yang berubah, sehingga harus di Sosialisasikan Kembali</p> <p>Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal</p>
Transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang andal	Kapabilitas APIP pada Level 3	<p>Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal</p> <p>Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodic</p>
Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi	<p>Belum optimalnya program yang terkait Implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pngawasan</p> <p>Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi pada Perangkat Daerah, oleh karena Reformasi Birokrasi hanya merupakan penyelesaian tugas bukan kewajiban</p>	<p>Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survey Penilaian Integritas, Wistle Blowing Sistem, Probitiy Audit, LHPKN dan LHKASN</p> <p>Penguatan dan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas dan berbasis risiko</p> <p>Peran Inspektorat Daerah selaku Quality Assurance (QA) dan Advisory belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan perlu adanya sosialisasi dan monev/ pendampingan terkait reformasi birokrasi yang terus ditingkatkan serta perlunya komitmen perangkat daerah.</p>
Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya	<p>Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan yang internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas</p> <p>Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan - penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Penguatan kegiatan pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reviu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.</p> <p>Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/ bimtek/ diklat dan layanan konsultasi</p>
Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	<p>Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan</p> <p>Masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan cakupan pengawasan</p>	<p>Penguatan kegiatan pelatihan kantor sendiri, peningkatan kemampuan teknis aparat pengawas dan komparasi implementasi kebijakan pengawasan melalui diklat fungsional, substantif dan profesi.</p> <p>Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatory</p>

	Masalah	Akar Masalah
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI	Masih belum optimal nya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah	Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yg belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR serta kurangnya komitmen perangkat daerah
<b>Pemerintahan Umum</b>		
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi
Disintegrasi Bangsa	Masih kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan di hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melemahnya semangat kebersamaan dan menurunnya kepedulian sosial. Meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat

Sumber: hasil analisis, 2022

## 4.2. Isu Strategis

### 4.2.1. Telaahan Isu Internasional

#### a. Komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba namun dalam jangka waktu panjang antara 50 s.d. 100 tahun.

Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim (*climate change*). Berbagai aksi, strategi, dan inovasi dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai diplomasi kepada dunia internasional. Selain diplomasi yang dilakukan melalui aksi di meja perundingan konferensi, aksi nyata juga dilakukan Indonesia melalui *soft diplomacy* yang salah satunya melalui UNFCCC.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara pihak dari UNFCCC telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2016. Untuk menjalankan amanah dari peraturan tersebut, Indonesia telah menyampaikan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim melalui the First NDC (*Nationally Determined Contribution*) pada bulan November 2016. Komitmen tersebut merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap masalah pemanasan global dan perubahan iklim yang akan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

*Nationally Determined Contribution* Indonesia memuat elemen adaptasi, mitigasi, informasi untuk memfasilitasi *Clarity, Transparency and Understanding*, Kerangka Transparansi dan Kerjasama Internasional. Dalam elemen mitigasi, Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% melalui upaya-upaya dengan kemampuan sendiri yang digambarkan sebagai skenario *unconditional* (CM1) dan sampai dengan 41% melalui upaya-upaya dengan dukungan internasional yang digambarkan sebagai skenario *conditional* (CM2) dibanding emisi baseline yang digambarkan sebagai skenario *business as usual* (BAU) (KLHK, 2018). Target penurunan emisi GRK tersebut akan dicapai dari sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk dan pertanian.

#### **b. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19**

Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang berangsur membaik memerlukan dukungan dan arah kebijakan yang dapat mengurangi tekanan fiskal, sekaligus kesiapan ruang fiskal untuk menghadapi krisis, guncangan, dan bencana di masa depan. Sebelum perang Rusia-Ukraina 2022, banyak negara merencanakan penarikan stimulus fiskal selama pandemi mengingat pemulihan ekonomi diproyeksi akan terus menguat secara bertahap. Kekhawatiran terhadap peningkatan beban utang publik di negara berpenghasilan rendah dan berkembang pun menjadi pendorong percepatan rencana konsolidasi fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Di saat yang sama, para pembuat kebijakan dihadapkan dengan dilema antara upaya kesinambungan pemulihan ekonomi dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kemuraman ekonomi global vis a vis menahan tekanan inflasi global yang terus meningkat.



Respon ekonomi terhadap pandemi dan kondisi awal masing-masing negara yang berbeda akan menentukan arah pemulihan ekonomi masing-masing negara. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan juga perlu menggunakan pendekatan yang inovatif dan relevan dengan kondisi sebuah negara. Di dalam negeri, kebijakan fiskal terus melakukan peran strategisnya dalam penguatan pemulihan dan memberi arah pembangunan perekonomian Indonesia ke depan. Di saat yang sama, Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah konsolidasi fiskal dengan menekan kembali angka defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk melalui reformasi fiskal di tengah tren kenaikan harga komoditas global. Di samping itu, berbagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian secara lebih kuat dan inklusif terus dilakukan. Langkah-langkah tersebut vital dalam jangka panjang dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Penguatan kembali sisi suplai terus dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Isu strategis lainnya adalah pentingnya Indonesia bernavigasi dalam dinamika ekonomi global di tengah pelemahan pertumbuhan global, tekanan inflasi yang tinggi, percepatan pengetatan kebijakan moneter, volatilitas di pasar keuangan dan komoditas, serta gangguan pasokan. Pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023 karena proyeksi pemulihan parsial di Tiongkok. Namun, pertumbuhan di kawasan lainnya terutama di Eropa diperkirakan akan melambat karena permintaan yang belum sepenuhnya pulih di tengah tingginya tekanan inflasi. Kondisi geopolitik di tingkat global maupun regional diharapkan membaik ketika memasuki tahun 2023. Kedepan, dukungan kebijakan fiskal dibutuhkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dari guncangan dan transisi menuju model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dengan tetap memperhatikan aspek keadilan pada kelompok miskin dan rentan.

Penciptaan sumber pertumbuhan baru di Indonesia dapat diupayakan melalui pengembangan ekosistem digital dan pemberdayaan industri digital. Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan sektor digital diantaranya peningkatan akses internet, pasar yang cukup besar di

kawasan Asia Tenggara, serta tingginya pengguna moda e-commerce dalam bisnis. Digitalisasi menjadi menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia, walaupun dalam pengembangannya juga disertai tantangan di antaranya perlunya peningkatan keterampilan pekerja menuju high skilled labor yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah pembiayaan penetrasi digital di Indonesia yang memerlukan dukungan tidak hanya dari pembiayaan publik melalui APBN namun juga dari sektor swasta. Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan, termasuk dana pensiun, dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan pengembangan ekonomi digital dalam jangka panjang.

#### **4.2.2. Telaahan Isu Nasional**

##### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Visi Indonesia tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

**b. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara**

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: Bagian Utara pada 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan; Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25.260" Lintang Selatan; Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dan Bagian Timur pada 117° 18' 20.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara meliputi: a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).

Batas wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu:

- 1) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat,

Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

- 2) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 4) sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk: a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
9. Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan TPD di Indonesia, maka Pemerintah dan provinsi di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (untuk pusat) dan Rencana Aksi Daerah (untuk provinsi) TPB. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.

#### **d. Penelaahan Isu Nasional Tahun 2024**

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi isu strategis pada tahun 2024. Isu-isu tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPD untuk sinergi

perencanaan antara pusat dan daerah. Adapun isu-isu penting tersebut, antara lain:

- 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Penanganan Stunting
- 3) Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
- 4) *Middle income trap*
- 5) Percepatan pembangunan infrastruktur
- 6) Pengurangan risiko bencana
- 7) Pasokan Energi dan Pangan
- 8) Peningkatan kualitas SDM
- 9) Reformasi birokrasi
- 10) Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
- 11) Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045
- 12) Digitalisasi

#### **4.2.3. Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi**

##### **a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pembangunan periode 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari tahap ke-5 RPJPD (204-2025).

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan**".

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur tersebut, misi pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan

5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Sasaran pokok pembangunan Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a) Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kalimantan Timur yang terpadu, efisien dan efektif.
  - b) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kalimantan Timur.
  - c) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kalimantan Timur.
  - d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
  - e) Berkembangnya karakter masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - f) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
  - g) Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Timur.
  - h) Makin mantapnya budaya masyarakat Kalimantan Timur yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan per kapita Kalimantan Timur semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.

- b) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.
  - e) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur yang andal, terpadu dan merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
  - b) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
  - c) Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur guna terciptanya masyarakat informasi Kalimantan Timur.
  - d) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
  - b) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.



- c) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
  - d) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kalimantan Timur termasuk wilayah pedalaman, perdesaan dan perbatasan.
  - b) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
  - c) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
  - d) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kalimantan Timur.
  - e) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kalimantan Timur dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencapaian pembangunan yang telah dicapai dalam empat periode, maka RPJM ke-5 (2024-2025) ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup.

Dalam tahap ke-5 ini ditunjukkan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat dalam skala Asia-Pasific. Kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis telah memiliki prasarana yang unggul; pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta penataan ruang menjadi acuan utama.

**b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2016-2036**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Tujuan penataan ruang provinsi adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi, disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
- b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumberdaya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;

- d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
- e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah, disusun strategi penataan ruang wilayah provinsi, yaitu:

1. Strategi pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat, meliputi:
  - a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;
  - b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
  - c. pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi; dan
  - d. membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting.
2. Strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional, meliputi:
  - a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
  - b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;

- c. pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
  - d. pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.
3. Strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
  - b. penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan
  - c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.
4. Strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi meliputi:
  - a. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
  - b. pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - c. pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
  - d. pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.
5. Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan

mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, meliputi:

- a. pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan;
- b. peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
- c. penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya; dan
- d. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif.

**c. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim**

Prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim telah diterapkan di Kalimantan Timur sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dan dunia usaha. Komitmen daerah antara lain diwujudkan melalui:

**1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan

hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi seluruh ekoregion darat dan laut. Target RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Arahan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Provinsi Kaltim Tahun 2020-2049 yaitu:

- a. Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2020 s/d 2029) Menahan Laju Penurunan Daya Dukung & Daya Tampung.
- b. Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2030 s/d 2039) Memperbaiki Kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
- c. Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2040 s/d 2049) Upaya Pengembangan & Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Segala Aspek Pembangunan, Meningkatkan Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim, Efisiensi Konsumsi & Pemanfaatan SDA.

Arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas kab/kota sebagai berikut:

- e. Target RPPLH Kalimantan Timur untuk 5 (lima) sungai yang lintas Kabupaten/Kota selama 30 Tahun kedepan adalah mempertahankan masing-masing kelas sungai sesuai yang telah ditetapkan dalam Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu: Kelas I untuk Sungai Mahakam, Sungai Bontang dan Sungai Kedang Kepala, serta Kelas II untuk Sungai Santan dan Sungai Karang Mumus.

- f. Arahan RPPLH berdasarkan Status Penyedia Air Lintas Kabupaten/Kota

Jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air di masing-masing WS memiliki kategori dari sangat rendah ke sangat tinggi, dimana WS Mahakam memiliki luasan wilayah paling besar yaitu 8.526.182,01 Ha atau 63,23% dari luas seluruh WS yang ada yaitu sebesar 13.482.972,57 Ha. Di WS Mahakam ini terdapat beberapa kabupaten kota sebagaimana telah disampaikan sesuai Tabel 5.1 diatas. Untuk WS Mahakam sendiri memiliki luas paling besar pada kategori sedang yaitu seluas 3.543.100,07 Ha, disusul pada

kategori rendah seluas 3.290.329,07 dengan luasan untuk kategori sangat tinggi hanya mencapai luasan 73.341,69 Ha.

Secara keseluruhan untuk seluruh WS memiliki kategori SEDANG untuk jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air yaitu berkisar antara 36 – 72 %, sehingga bisa dikatakan di seluruh Wilayah Sungai di Kalimantan Timur masih memiliki jasa lingkungan hidup untuk penyedia air yang baik dan harus dijaga agar tetap berkelanjutan. Untuk kategori jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air SANGAT RENDAH yang terluas dimiliki oleh WS Mahakam dengan luasan mencapai 430.321,92 Ha dan untuk kategori yang SANGAT TINGGI memiliki luas sebesar 73.341,69 Ha.

WS Mahakam memiliki luasan yang paling besar untuk daerah yang belum terlampaui dan untuk diketahui bahwa WS Mahakam meliputi banyak kabupaten dan kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa daya dukung untuk penyedia air di WS Mahakam masih sangat baik dan harus dijaga untuk keberlanjutannya. Sedangkan yang harus menjadi perhatian dari WS yang paling kecil luasannya yaitu WS Kendilo dengan luasan 599.325,43 Ha. Perlu lebih ditingkatkan lagi kegiatan konservasi untuk meningkatkan ketersediaan air di Wilayah Sungai Kendilo.

Sedangkan untuk status yang sudah TERLAMPAUI dari hasil analisis untuk WS yang mempunyai luasan paling besar untuk status terlampaui dalam penyedia air berada di WS Mahakam yaitu seluas 745.550,47 Ha, kemungkinan luasan ini terdapat di wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan kondisi air yang masih kekurangan yang diduga karena banyaknya lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan sehingga air hujan yang ada menjadi air larian (run off) . Sedangkan untuk WS yang paling sedikit status daya dukung penyedia air berada di WS Berau- Kelay yaitu seluas 85.640,13 Ha.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka arahan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

Kalimantan Timur untuk lintas kabupaten kota selama 30 tahun kedepan untuk S. Santan, S. Bontang, S. Mahakam, S. Karang Mumus dan S. Kedang Kepala adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan analisis lanskap agroforestri meliputi: daerah Hulu, daerah tengah, dan daerah hilir dari masing-masing sungai;
- 2) Membagi DAS menjadi beberapa jenis tipe tutupan penggunaan lahan (kawasan lindung, konservasi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, permukiman);
- 3) Menginventarisir seluruh kegiatan eksisting pada daerah hulu, tengah dan hilir yang diindikasikan memberikan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air;
- 4) Mengembangkan pemanfaatan SDA dan kegiatan pengelolaan lahan sesuai dengan fungsi kawasan dan dipadusaraskan dengan kegiatan eksisting;
- 5) Mengembangkan kegiatan pengelolaan di daerah hulu, tengah dan hilir DAS, meliputi: reboisasi dan rehabilitasi lahan-lahan kritis, konsolidasi lahan, relokasi permukiman di pinggir sungai, memperindah estetika kawasan, pengerukan lumpur di sungai (khususnya rainase di perkotaan, seperti: Sungai Karang Mumus), pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air, konservasi sempadan sungai pada titik-titik rawan longsor, dan penanaman vegetasi.
- 6) Melakaukan pemantauan kualitas air untuk sungai yang lintas kab/kota secara rutin dan berkala pada segmen yang telah disepakati;
- 7) Mempertahankan fungsi hutan dengan luasan yang cukup dan berimbang di lintas Kabupaten/Kota;
- 8) Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa ekosistem penyedia air tinggi di lintas kab/kota
- 9) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air di lintas kab/kota;
- 10) Membatasi alih fungsi lahan hutan dan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada



daerah-daerah dengan jasa penyedia pangan dan air tinggi di lintas kab/kota;

- 11) Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan serta memprioritaskan pemulihan kawasan tercemar di lintas kab/kota; dan
- 12) Bagi kabupaten/Kota yang batas ekologis (Wilayah Sungai/DAS/Sub DAS/Sungai) lintas dengan kabupaten/kota lain harus dilakukan kerjasama antara daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dapat dilakukan dengan mengimplementasikan instrumen ekonomi lingkungan sesuai PP No. 46/2017).

g. Arahan RPPLH Berdasarkan Status Penyedia Pangan Lintas Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 5 Perda Kaltim No. 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disampaikan bahwa lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 1.916.643 Ha. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Adapun Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:

- 1) Kabupaten Berau dan Mahulu dengan luas paling kurang 142.474 Ha;
- 2) Kabupaten Kutai Timur dengan luas paling kurang 162.028 Ha;
- 3) Kabupaten Kutai Barat dengan luas paling kurang 545.305 Ha;
- 4) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas paling kurang 434.198 Ha;
- 5) Kota Bontang dengan luas paling kurang 2.659 Ha;
- 6) Kota Samarinda dengan luas paling kurang 18.170 Ha;
- 7) Kota Balikpapan dengan luas paling kurang 9.071 Ha;
- 8) Kabupaten PPU dengan luas paling kurang 37.838Ha;dan
- 9) Kabupaten Paser dengan luas paling kurang 317.515 Ha.

Jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan di masing-masing WS memiliki kategori dari sangat rendah ke sangat tinggi, dimana WS Mahakam memiliki luasan wilayah paling besar yaitu 8.526.182,01 Ha atau 63,23 % dari luas seluruh WS yang ada yaitu sebesar 13.482.972,57 Ha. Di WS Mahakam ini terdapat beberapa kabupaten kota sebagaimana telah disampaikan sesuai Tabel 5.1 diatas. Untuk WS Mahakam sendiri memiliki luas paling besar pada kategori sedang yaitu seluas 5.200.690,48 Ha, disusul pada kategori tinggi seluas 2.168.689,28 Ha dengan luasan untuk kategori sangat tinggi hanya mencapai luasan 179.731.20 Ha.

Secara keseluruhan untuk seluruh WS memiliki kategori SEDANG untuk jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan yaitu berkisar antara 58 – 65 %, sehingga bisa dikatakan di seluruh Wilayah Sungai di Kalimantan Timur masih memiliki jasa lingkungan hidup untuk penyedia pangan yang baik dan harus dijaga agar tetap berkelanjutan. Untuk kategori jasa penyedia pangan SANGAT RENDAH hanya dimiliki oleh WS Mahakam dengan luasan mencapai 6.340,09 Ha dan untuk kategori yang SANGAT TINGGI memiliki luas sebesar 179.731,20 Ha.

WS Mahakam memiliki luasan yang paling besar untuk daerah yang belum terlampaui dan untuk diketahui bahwa WS Mahakam meliputi banyak kabupaten dan kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa daya dukung untuk penyedia pangan di WS Mahakam masih sangat baik dan harus dijaga untuk keberlanjutannya. Sedangkan yang harus menjadi perhatian dari WS yang paling kecil luasannya yaitu WS Kendilo dengan luasan 773.772,72 Ha. Perlu lebih ditingkatkan lagi kegiatan penambahan lahan pertanian pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Wilayah Sungai Kendilo. Sedangkan untuk status yang sudah TERLAMPAUI dari hasil analisis untuk WS yang mempunyai luasan paling besar untuk status terlampaui dalam penyedia pangan berada di WS Mahakam yaitu seluas 119.854,85 Ha, kemungkinan luasan ini terdapat di wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dengan kondisi air yang masih kekurangan yang berakibat pada pengairan

terhadap lahan pertanian juga akan terganggu . Sedangkan untuk WS yang paling sedikit status daya dukung penyedia pangan berada di WS Kendilo yaitu seluas 1.710,40 Ha.

Untuk penyusunan arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyedia pangan lintas kabupaten kota untuk tigapuluh (30) tahun ke depan diarahkan terhadap tiga (3) kota yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kota Bontang dengan membedakan penerima manfaat yaitu ketiga kota tersebut dan pemberi manfaat adalah kabupaten yang ada di sekitarnya yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

- h. Arahan RPPLH untuk Kabupaten di Wilayah kalimantan Timur yang Secara Ekologis Lintas DAS dengan Provinsi Lain  
Dari 10 Kab./Kota, khusus untuk Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu, dikarenakan berdasarkan Peta Indikatif Jasa Ekosistem Penyedia Air dan Penyedia Pangan, apabila ditinjau dari batas Wilayah Sungai Berau-Kelay dan batas Wilayah Sungai Mahakam secara ekologis adalah lintas DAS dengan Provinsi Kalimantan Utara, seperti yang ditunjukkan gambar 5.7 s/d 5.10, maka harus dilakukan kerjasama antar daerah dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan yang diatur dalam PP. 46 Tahun 2017.

## 2) **RAD GRK Kalimantan Timur Tahun 2010-2030**

Ekonomi Kalimantan Timur dalam proses transformasi untuk mengantisipasi menyusutnya deposit minyak, gas, dan batubara. Kontribusi nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang pertanian dalam arti luas dan pengolahannya terhadap PDRB akan terus meningkat walaupun mungkin belum dapat menggeser posisi batubara sebagai penyumbang utama PDRB sampai dengan tahun 2030. Melihat perkiraan deposit dan harga batubara sampai tahun 2030, produksi batubara diperkirakan masih di sekitar 230 juta ton per tahun dimana

sekitar 180 juta ton diantaranya diproduksi oleh penambang skala besar. Kegiatan produksi listrik diperkirakan akan meningkat rata-rata sekitar 10% per tahun sampai dengan tahun 2030 yang akan didominasi oleh PLTU batubara. Andalan utama bidang pertanian dalam arti luas adalah perkebunan. Peningkatan produksi akan bersumber dari peningkatan produktivitas dan penambahan luas tanam dari sekitar 1,3 juta ha tahun 2016 menjadi sekitar 2 juta ha pada tahun 2030 yang akan tetap didominasi oleh kebun kelapa sawit. Di kegiatan kehutanan, luas penanaman hutan tanaman masih dapat dimaksimalkan sampai 431.185 ha dari lahan non hutan dalam area konsesi eksisting, dengan tetap mempertahankan hutan primer, hutan mangrove dan hutan rawa.

Pembakaran bahan bakar hidrokarbon pada kegiatan batubara dan produksi listrik serta kegiatan pembalakan dan alihguna lahan untuk perkebunan diperkirakan akan menjadi sumber sumber-sumber utama emisi GRK sampai dengan tahun 2030. Keempat sumber tersebut akan berkontribusi sekitar 70% untuk periode 2010-2030. Pertumbuhan luasan dan produksi kebun kelapa sawit akan memicu penggunaan pupuk nitrogen dan produksi biogas dari limbah cair sawit (POME) yang masing-masing akan berkontribusi sekitar 4% dan 6% dari total emisi GRK pada periode yang sama.

Kalimantan Timur berpeluang menurunkan emisi GRK sampai dengan 20% (setara 194 juta ton CO<sub>2</sub> eq) dibandingkan tingkat BAU sambil tetap meningkatkan nilai tambah kegiatan-kegiatan ekonomi kunci daerah. Fokus kegiatan mitigasi adalah sebagai berikut

- a. Konservasi energi pada kegiatan tambang batubara lewat efisiensi dan penggunaan biodiesel
- b. Peningkatan penggunaan energi terbarukan pada produksi listrik di perdesaan
- c. Pengembangan kebun ramah iklim
- d. Perlindungan hutan alam dan gambut di hutan produksi, lindung dan konservasi, penerapan pembalakan berdampak minimal (RIL-C), pengembangan hutan tanaman dan wanatani di lahan bercadangan karbon rendah
- e. Perbaikan ketepatan penggunaan pupuk N di perkebunan dan sawah
- f. Pengurangan emisi gas metana POME setara metane capture.

Enam aksi mitigasi tersebut dapat berkontribusi sekitar 94% dari total potensi penurunan 194 juta ton CO<sub>2</sub> -eq pada 2010-2030. Kegiatan-kegiatan mitigasi tersebut akan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Konservasi energi dapat meningkatkan PDB sebagaimana dilaporkan hasil kajian terhadap 28 negara OECD (Climate Institute 2013). Peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk listrik perdesaan, termasuk lewat pemanfaatan biogas POME, menciptakan nilai tambah baru pada ekonomi daerah lewat pemanfaatan limbah dan sumber-sumber energi yang sebelumnya tidak dimanfaatkan seperti tenaga surya dan air. Perlindungan hutan alam dan lahan gambut tidak akan mengganggu kegiatan produksi karena diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pembukaan kebun dan hutan tanaman baru pada lahan-lahan dengan cadangan karbon rendah. Penerapan pembalakan dengan dampak minimal (RIL-C) akan meningkatkan produktivitas hutan alam dalam jangka menengah dan panjang. RIL-C mengurangi kerusakan hutan akibat pembalakan sehingga dapat mempercepat pemulihan hutan. Hutan yang pulih lebih cepat membuat waktu daur yang lebih singkat yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

### **3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**

Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi indikator pencapaian keberhasilan pembangunan ramah iklim sampai tahun 2030. Pelaku usaha yang usahanya membidangi sektor berbasis lahan, sektor berbasis energi, sektor berbasis industri dan sektor berbasis limbah wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Adaptasi perubahan iklim di daerah meliputi:

#### **a. Ketahanan Ekonomi**

Kegiatan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan untuk: a. mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian; dan b. mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai

yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air, serta optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati.

b. Ketahanan Sistem Kehidupan

Kegiatan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan untuk penguatan sektor: a. kesehatan; b. pemukiman; dan c. infrastruktur.

c. Ketahanan Ekosistem Dan Wilayah Khusus

Kegiatan adaptasi perubahan iklim meliputi: a. pengelolaan ekosistem dan daerah aliran sungai melalui pengelolaan berkelanjutan kawasan lahan basah; b. penguatan kawasan Perkotaan melalui percepatan pencapaian kota tangguh dan sekolah tangguh bencana dan pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang perkotaan; dan c. pengelolaan pesisir dan pulau kecil melalui pengimplementasian sistem pengelolaan pesisir terpadu, membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tinggi muka air laut, dan pengembangan sarana penangkapan yang tahan terhadap perubahan cuaca serta pengelolaan bencana pesisir serta pulau kecil.

Adaptasi perubahan iklim harus didukung dari sektor ketahanan pangan, kemandirian energi, infrastruktur, kesehatan, pemukiman, dan pengelolaan pesisir serta pulau-pulau kecil. Adaptasi perubahan iklim dilaksanakan oleh dinas bersama dengan perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya.

Mitigasi perubahan iklim di Daerah meliputi bidang: a. tataguna lahan, alih guna lahan, dan hutan; b. pertanian; c. energi; dan d. limbah. Mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga lainnya.

Kegiatan mitigasi antara lain: a. menurunkan laju alih guna hutan alam di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya; b. melakukan dan mempromosikan rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman pangan dan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi serta menghasilkan jasa lingkungan yang penting untuk mendukung sistem kehidupan lokal, daerah, dan global; c. mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan; d. menerapkan teknologi pembalakan berdampak minimal pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu hutan alam; dan e. memfasilitasi perhutanan sosial dan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

#### **4) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)**

Salah satu upaya menjaga agar suhu bumi tetap tidak meningkat lebih dari 1,5°C - 2°C adalah melalui upaya pencegahan penghilangan kawasan berhutan (deforestasi) dan penurunan kualitas tutupan hutan (degradasi hutan). *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) sebagai mekanisme insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi, menjadi salah satu bagian dari program REDD+. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan secara bersama oleh KLHK beserta UPTnya, Pemprov Kaltim beserta perangkat daerah berbasis lahan, Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa, Swasta, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama masyarakat Kaltim telah berkomitmen untuk bersama-sama dalam menyukseskan program FCPF-CF. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah meluncurkan Kelembagaan Pengelola Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada April tahun 2022. FCPF-CF adalah fasilitas insentif penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Bank Dunia dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Program FCPF-Carbon Fund dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan proses pengukuran capaian pada tahun 2022 dan 2024, serta pemberian insentif pada tahun 2023 dan 2025.

Dalam data *Forest Reference Emission Level* (FREL) dan data emisi selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2019 sampai 2020, diperoleh data pengurangan emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO<sub>2</sub>-e. Hal ini jauh melampaui jumlah minimum yang dibayarkan seperti termuat dalam Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) Kaltim yang berkomitmen dengan World Bank, sebesar 5 juta ton CO<sub>2</sub>-e. Hal ini menunjukkan Kaltim surplus pengurangan emisi. Dengan pencapaian tersebut, maka pada tahun 2024 Kalimantan Timur berpotensi menerima sekitar USD 100 juta.

**d. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan TPB sesuai komitmen nasional. Pelaksanaan TPB dipantau dan dievaluasi secara periodik sehingga diperoleh informasi ketercapaian indikator TPB. Adapun pelaksanaan TPB tahun 2022 disajikan secara rinci sebagai berikut:

TPB 1: Tanpa Kemiskinan

1. Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional dari target tahun 2021 sebesar 20 KUBE dan ditahun 2021 mencapai 20 KUBE artinya dari target telah tercapai.
2. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan dari target tahun 2021 sebesar 68.155 KPM pencapaian ditahun 2021 sebesar 68.155 KPM.
3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Formal) dari target tahun 2021 sebesar 100 persen, meningkat sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 81 persen.

TPB 2: Tanpa Kelaparan

1. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita tidak mencapai target yang diharapkan pada 2021 dan naik dari capaian tahun sebelumnya yakni 34,46.
2. Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe turun hampir 1 poin dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 7,91 namun tidak mencapai target yang diharapkan yakni 6.
3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Prevalensi anemia pada ibu hamil tidak mencapai target yang telah ditetapkan bahkan naik sebanyak 4 poin dari capaian tahun lalu, yakni 25,23.



TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

1. Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan persalinan di fasilitas kesehatan cukup baik, namun kenyataannya kejadian kematian ibu di Kaltim masih sebesar 80 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Untuk mempercepat penurunan kematian ibu diperlukan komitmen dan terobosan-terobosan atau inovasi program untuk memenuhi target Roadmap SDGs Kaltim sebesar 80 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021.
2. Capaian Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini harus menjadi perhatian penting pemerintah Provinsi Kaltim dalam menganggulangnya.
3. Kejadian Malaria di Indonesia berhasil dipertahankan di bawah 1%. Namun, target SDGs menurunkan Insiden Tuberkulosis (TB) hingga 297 insiden per 100.000 penduduk pada tahun 2021 memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya.
4. Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2019.
5. Tren konsumsi alkohol oleh penduduk umur  $\geq 15$  tahun sangat fluktuatif dan cenderung meningkat.
6. Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun dan angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan penurunan, namun target RPJMN untuk menurunkan TFR sebesar 2,28 pada tahun 2021 belum tercapai.
7. *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan mencapai 3,85 pada tahun 2021 dimana cenderung membaik pada Tahun 2020 sebesar 4,18.
8. Fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial terus meningkat dari tahun ke tahun.

9. Distribusi tenaga kesehatan telah menunjukkan kemajuan, dimana target RPJMN untuk RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis telah tercapai.

#### TPB 4: Pendidikan Berkualitas

1. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar dan menengah sudah berkembang secara signifikan meski pengajaran dilakukan secara online/daring akibat pandemi Covid-19.
2. Dapat dilihat bahwa capaian pada penyelesaian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah melampaui dari target yang ditentukan dan/atau baseline pada tahun 2020.
3. Namun, tingkat penyelesaian pendidikan pada tingkat perguruan tinggi masih belum melampaui target pada tahun 2021.

#### TPB 5: Kesehatan Gender

1. Jumlah kebijakan yang responsive gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan dari target tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen telah tercapai yaitu 1 Dokumen Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021.
2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada 2021 capaiannya 16,7 kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun.
3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
4. Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam telah mencapai target pada tahun 2021 yaitu 76,88%.

#### TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun pada tahun 2021 sebesar 79,56 persen, meningkat 2,73 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 76,83.
2. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman ditahun 2021 sebesar 2,68% secara tidak langsung menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,72 persen.

#### TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Rasio elektrifikasi di Kaltim terus mengalami peningkatan sebesar 91,98 persen di tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 90,21 persen. Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik. Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan.

#### TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kalimantan Timur sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian memang masih belum stabil. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim secara nasional memang masih rendah (nasional 5,02%). Namun jika melihat tren laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun (2,48% di tahun 2021), hal ini menandakan ekonomi Kaltim bergerak secara dinamis ke arah peningkatan.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan yang memiliki *multiplier effect* besar bagi masyarakat mengalami kemajuan yang baik. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya minat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Kaltim pada tahun 2021 meningkat sebesar 21,75 persen dibandingkan pada tahun 2020.

#### TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

1. Capaian pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas yaitu bandara, Pelabuhan Penyebrangan dan Pelabuhan Strategis. Capaian pada target tahun 2021 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada indikator ini telah tercapai 100%.
2. Untuk indikator Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Tahun 2021 capaiannya melebihi target yaitu 18% dari target 8,5%.

3. Sementara untuk Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita juga masih belum mencapai target.
4. Rasio Emisi CO<sub>2</sub>/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur masih belum mencapai target, namun Kaltim telah berupaya untuk menurunkan emisi GRK melalui peran *blue carbon*.

#### TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan

1. Tujuan 10 pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada mengurangi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan skala Gini Ratio yang berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2021, Gini Rasio Kaltim tercatat sebesar 0,334 lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,328, dimana distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,24 persen, naik 0,55 poin dibandingkan Angka September 2020 (19,69%). Namun angka ini masih masuk dalam kategori Ketimpangan Rendah.
2. Pengurangan kesenjangan dengan mengentaskan jumlah daerah yang tertinggal pada tahun 2021 memang baru mencapai 2 desa dari 4 desa yang ditargetkan, namun melihat perkembangan, pada tahun 2020 target realisasi ini akan tercapai sehingga akan tidak ada daerah tertinggal di Kaltim berdasarkan Indeks Desa Membangun dan akan meningkat statusnya menjadi Desa Berkembang atau Maju begitu pula dengan perkembangan yang ada pada Desa Mandiri.
3. Terkait aspek kebebasan sipil, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur sebesar 77,76. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur 2021 yang capaiannya sebesar 73,88 meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam Katagori sedang.

4. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur.

TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

1. Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS pada tahun 2021 sebesar 24,85 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,08 persen.
2. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi Nasional penanggulangan bencana pada tahun 2021 sebesar 100 persen dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 10 persen, kenaikan ini juga disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2021.

TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kinerja Perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang mencapai ranking minimal ranking biru mencapai total 205 perusahaan, yang terdiri dari: peringkat emas 8 perusahaan; peringkat hijau 73 perusahaan; peringkat biru 124 perusahaan. Kinerja ini dinilai melalui kegiatan pemantauan kualitas udara ambien.

TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim

1. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengukuran penurunan emisi gas rumah dengan kegiatan pelaporan dan evaluasi (MRV) Rencana Aksi Daerah-GRK dan minimal menghasilkan 1 laporan.
2. Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tidak mencapai target yang diinginkan sebab banyak daerah di Kaltim yang tidak membuat dokumen strategi yang baru.

TPB 14: Ekosistem Lautan

1. Kalimantan Timur telah mencapai kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan sangat baik. Bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan.

2. Di sisi lain, masih ada beberapa capaian SDGs yang masih belum bisa tercapai, seperti tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan usaha nelayan. Khusus untuk Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Laut, capaian yang didapatkan hampir melampaui target yang telah ditentukan namun tetap dianggap belum tercapai.

#### TPB 15: Ekosistem Daratan

1. Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan sudah melebihi baseline di tahun 2020 yakni 63,15757932%.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi dalam tiga kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Sampai dengan tahun 2021 capaian jumlah KPH sebanyak 20 KPH sudah mencapai kategori maju.
3. Proporsi Lahan yang terdegradasi jauh menurun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 yakni sebanyak 726,6486186 Ha.

#### TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur sebesar 77.67. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur 2018 yang capaiannya sebesar 73,88 meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam Kategori sedang.
2. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi.
4. Pada Tahun 2021, dua aspek mengalami kenaikan sedangkan satu aspek mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, Tiga aspek yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,89 poin (dari 61,38 naik menjadi 66,27) dan 9,95 poin (dari 72,22 naik menjadi 82,17) dibandingkan Tahun 2018. Sementara itu nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 2,49 poin (dari 90,99 turun menjadi 88,50).
5. Serupa dengan tahun 2020, pada tahun 2021 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi berada pada kategori “baik”.

TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Mengalami tren naik yang sangat signifikan dan tercapai dari target yang ditetapkan hal ini menandakan bahwa peranan proporsi Pajak Domestik mempunyai pengaruh besar terhadap Anggaran dan sarana prasarana Pembangunan, serta Pertumbuhan Ekonomi Kaltim.

Tabel 4.3

## Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
1.TANPA KEMISKINAN	1.1.Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.	1.1.1*.Tingkat kemiskinan ekstrim	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	0	2022	0	1.55	Perlu Perhatian Khusus
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi Nasional.	1.2.1*.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.03	2022	5.78	6.31	Perlu Perhatian Khusus
1.TANPA KEMISKINAN	1.2.Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi Nasional.	1.2.2*.Persentase laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*.Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	%	1.5	2022	3154	3154	Tercapai
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok	1.3.1.(a).Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
1.TANPA KEMISKINAN	1.3.Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1*.Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
1.TANPA KEMISKINAN	1.4.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.2*.Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah orang / 100000	3806.54	2022	0	5102.85	Perlu Perhatian Khusus
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2*.Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Proporsi tanpa satuan	0	2022	0	0	Tercapai
1.TANPA KEMISKINAN	1.5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.4*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	10	40	Tercapai
10.BERKURANG NYA KESEJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.*.Rasio Gini	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0.34	2022	0.33	0.33	Akan Tercapai
10.BERKURANG NYA KESEJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(b).Jumlah Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	150	2022	40	40	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(c).Jumlah Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	7	2022	19	19	Tercapai
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(d).Jumlah Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	4	2022	4	4	Tercapai
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional.	10.1.1.(a).Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.03	2022	5.78	6.31	Perlu Perhatian Khusus
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1.*.Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang	10.3.1.(a).Indeks Kebebasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM InterNasional	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur			2022			
10.BERKURANG NYA KESENJANGAN	10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b).Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTA N	11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	65	2022	85	73.18	Perlu Perhatian Khusus
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTA N	11.2.Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a).Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTA N	11.2.Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam	11.2.1.(b).Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a).Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.4.Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a).Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Rp/Kapita		2022			
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a).Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Tercapai
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	jiwa	3806.54	2022	0	5102.85	Perlu Perhatian Khusus

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a).Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	73	59.3	Perlu Perhatian Khusus
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b).Persentase sampah nasional yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	73	67	Perlu Perhatian Khusus
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2.(a).Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ppm/jiwa		2022			
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.6.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.2.(b).Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (indeks 0-1)	0	2022	0	87.59	Akan Tercapai
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.7.Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a).Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.a.Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan Nasional dan daerah.	11.a.1.(a).Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	76.6	Akan Tercapai
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.b.Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penangan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Seandai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	20	2022	30	50	Tercapai
11.KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.c.Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1.(a).Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	60	2022	70	70	Tercapai
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.3.Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.	12.3.1.(a).Persentase Sisa Makanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	49.3	2022	40	43	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a).Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	4	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(b).Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Rasio (0-1)	150000	2022	200000	34879656	Akan Tercapai



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	150000	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a).Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Ton	86290.1	2022	86000	0	Akan Tercapai
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.*.Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.6.Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a).Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.8.Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(b).Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.b.Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.	12.b.1.(a).Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	2	2022	3	3	Tercapai
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1.*.Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	jiwa	3806.54	2022	0	5102.85	Perlu Perhatian Khusus
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.3.*.Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	30	2022	10	40	Tercapai
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.*.Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO2 eq	51460894	2022	36793422	15060324	Akan Tercapai
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.(a).Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO2 eq	0	2022	14667472	36400571	Akan Tercapai
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan Nasional.	13.2.2.(b).Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO2 eq / Miliar Rp	0	2022	0	22	Akan Tercapai
13.PENANGANA N PERUBAHAN IKLIM	13.3.Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	13.3.1.(a).Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	90	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.1.Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1.(a).Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	74	2022	73	0	Perlu Perhatian Khusus
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.2.Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan laut yang sehat dan produktif.	14.2.1.*.Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	6613145	2022	10	10	Tercapai
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.5.Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1.*.Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	4810820	2022	1065000	1065000	Tercapai
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.6.Pada tahun 2020, melarang bentuk-subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui	14.6.1.(a).Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	200	133	Akan Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).								
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.*.Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak	8	2022	8	8	Tercapai
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(a).Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
14.EKOSISTEM LAUTAN	14.b.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(b).Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Orang (Jumlah)		2022			
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.*.Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	65.74	65.74	Akan Tercapai
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	100622	2022	102500	119243	Tercapai
15.EKOSISTEM DARATAN	15.2.Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a).Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	1	2022	1	5	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
15.EKOSISTEM DARATAN	15.3.Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.*.Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	2	2022	1.25	0.12	Tercapai
15.EKOSISTEM DARATAN	15.4.Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1.*.Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
15.EKOSISTEM DARATAN	15.4.Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.2.*.Indeks tutupan hijau pegunungan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	13.98	12.21	Akan Tercapai
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a).Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a).Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk	0	2022	0	0	Tercapai
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a).Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4.*.Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.10.Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan Nasional dan kesepakatan interNasional.	16.10.1.(a).Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	2	2	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.10.Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan Nasional dan kesepakatan interNasional.	16.10.2.(a).Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)	0	2022	2	1	Akan Tercapai
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a).Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b).Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.2.*.Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.3.Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat Nasional dan interNasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a).Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Orang per 100000 Penduduk		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.3.Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat Nasional dan interNasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b).Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a).Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-5)		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a).Persentase instansi pemerintah yang	Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
KELEMBAGAAN YANG TANGGUH		mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).							
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b).Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	%	71.05	2022	79	89.19	Tercapai
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a).Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	4	Tercapai
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c).Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Provinsi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a).Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan (c) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b).Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(a).Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(b).Indeks Aspek Kebebasan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(c).Indeks Kesetaraan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Tanpa Satuan (Indeks 1-100)		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.*.Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a).Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b).Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
16.PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16.b.Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a).Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
17.KEMITRAAN UNTUK	17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui	17.1.1.*.Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	%		2022			



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
MENCAPAI TUJUAN	dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	terhadap PDB menurut sumbernya.	Daerah Provinsi Kalimantan Timur						
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a).Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	0.74	2022	0.71	2.74	Tercapai
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2.*.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	92.83	2022	49.56	46.45	Akan Tercapai
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.11.Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1.(a).pertumbuhan ekspor produk nonmigas	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a).Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b).Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(c).Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur	Rp	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(a).Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Ada/Tidak	1	2022	1	1	Tercapai
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b).Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	Ada/Tidak		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.2.Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance ODA) termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari pendapatan nasional bruto untuk pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0.15 samapi 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/ GNI untuk negera kurang berkembang.	17.2.1.(a).Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.3.Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.2.(a).Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
17.KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.8.Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.*.Persentase pengguna internet	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	80	50	Perlu Perhatian Khusus
2.TANPA KELAPARAN	2.1.Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*.Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	12.56	Tercapai
2.TANPA KELAPARAN	2.1.Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	4.12	4.29	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
2.TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a).Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	82.6	2022	90	85.9	Akan Tercapai
2.TANPA KELAPARAN	2.2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.3.Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*.Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur			2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1.(a).Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Rp		2022			



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.2*.Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	Rp	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
2.TANPA KELAPARAN	2.4.Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkat produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1.(a).Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	100	0.25	Perlu Perhatian Khusus

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
2.TANPA KELAPARAN	2.5.Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*.Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan	Unit (jumlah)	15	2022	15	17	Tercapai
2.TANPA KELAPARAN	2.a.Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*.Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)	0	2022	0	90.63	Akan Tercapai
2.TANPA KELAPARAN	2.c.engadosi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*.Indikator anomali harga pangan.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)	0	2022	0	0.14	Tercapai
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*.Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 10000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2*.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*.Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a).Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit	3.3.4*.Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 100000		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*.Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a).Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b).Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a).Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b).Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta	3.4.1.(c).Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(b).Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur	Orang	100	2022	20	21	Tercapai
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.5.Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(a).Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur	Orang	136	2022	50	68	Tercapai
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.1*.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	BKKBN Kalimantan Timur	%	50.8	2022	63.1	54	Akan Tercapai
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.2*.Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional.	3.7.2.(a).Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1001		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*.Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (index)		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan	3.8.1.(a).Unmet need pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*.Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a).Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.a.Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*.Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*.Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.3*.Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
3.KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3.c.Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*.Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang / 1000		2022			
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	43	2022	55	54.12	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (b) kelas 8, yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	43	2022	55	55.16	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a).Proporsi anak-anak dan remaja di (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2*.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	100	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.2.(a).Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.2.1*. Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	76	2022	86	84.5	Akan Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.2.2*.Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	75	2022	84	82	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*.Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	62	2022	75	72.33	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	35.64	2022	28.4	40.35	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Umum/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	96.08	2022	96.14	96.25	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	92.57	2022	101.21	94.12	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a).Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	108.02	2022	101.22	103.52	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan,	4.4.1.(a).Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.(a).Proporsi orang dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1a) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	100.25	2022	101.21	99.93	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106	2022	101.21	99.92	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (1c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106	2022	101.21	99.84	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (1d4)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	105	2022	101.21	99.76	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2a) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	95.41	2022	96.14	97.65	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (2b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	101.76	2022	96.14	100.28	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (2c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103.6	2022	96.14	101.03	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (2d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	90	2022	96.14	93.14	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3a) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	106.42	2022	90	89.25	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	113	114.45	Akan Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	perempuan/laki-laki di (4a) Perguruan Tinggi							
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (3b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103.19	2022	100	101.92	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Pedesaan dan Perkotaan (4b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	118	119.23	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (3c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	105.23	2022	100	101.98	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (3d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	103	2022	101	102.24	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat,	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (4c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	125	127.22	Akan Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.*.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (4d)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	115	117.12	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a).Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	98.96	2022	99	98.95	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	72.72	2022	80	81.42	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SMP/MTS/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	79.59	2022	84	85.3	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.*.Proporsi sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	87.5	2022	91	92.5	Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SD atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	20	2022	15	16	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMP atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	22	2022	15	17	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1.(a).Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMA/SMK atau sederajat)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	25	2022	17	20	Akan Tercapai
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama interNasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	88.3	2022	97	95.25	Akan Tercapai



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
		dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)							
4.PENDIDIKAN BERKUALITAS	4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama interNasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1.*.Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	%	40	2022	45	44.5	Akan Tercapai
5.KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1.*.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
5.KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1.*.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
5.KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2.*.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
5.KESETARAAN GENDER	5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2.*.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ kepemimpinan di perusahaan publik/swasta	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
5.KESETARAAN GENDER	5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of	5.6.1.*.Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Provinsi Kalimantan Timur						
5.KESETARAAN GENDER	5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.2.*.Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
5.KESETARAAN GENDER	5.a.Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum Nasional.	5.a.1.*(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
5.KESETARAAN GENDER	5.a.Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum Nasional.	5.a.1.*(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	0	0	Perlu Perhatian Khusus
5.KESETARAAN GENDER	5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1.*.Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	74.3	2022	99	82.37	Akan Tercapai
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.*.Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	34.49	34.49	Perlu Perhatian Khusus
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (a)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman (b)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	2.73	2022	7.5	4.71	Perlu Perhatian Khusus
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Persentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	%		2022			
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	1.08	2022	1.86	1.86	Tercapai
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.*.Persentase rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	1.65	2022	2.85	2.85	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a).Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	%	4.6	2022	2600440 86.6	1185735 6.2	Perlu Perhatian Khusus
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(a).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (a) Air Permukaan	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	0	2022	5.04	5.04	Tercapai
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(b).Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya . (b) Air Tanah	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	%	100	2022	100	74	Tercapai
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.5.Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.	6.5.1.*.Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0- 100)	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Skor		2022			
6.AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.6.Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan,	6.6.1.*.Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Tren Perubahan (%) 5	0	2022	53.8	54.3	Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	ekosistem perairan dari waktu ke waktu.		sub indikator					
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.*.Rasio elektrifikasi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	%	90	2022	93	92.29	Akan Tercapai
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a).Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	KWh/Kapita		2022			
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a).Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	62735	2022	13000	0	Perlu Perhatian Khusus
7.ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b).Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	tanpa satuan (rasio 0-1)	0.05	2022	0.06	0	Perlu Perhatian Khusus
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi Nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.*.Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi Nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a).PDB per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Ribu Rp / Kapita		2022			
8.PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.*.Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia Kalimantan Timur	Unit per 100000 Penduduk		2022			
8.PEKERJAAN LAYAK DAN	8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi	8.2.1.*.Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	Ribu Rp / Kapita		2022			

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
<i>PERTUMBUHAN EKONOMI</i>	teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	PDB riil per orang bekerja per tahun							
<i>8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</i>	8.3. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.*. Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	32.17	2022	26.2	44.26	Perlu Perhatian Khusus
<i>8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</i>	8.5. Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1.*. Upah rata-rata per jam pekerja	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
<i>8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</i>	8.5. Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.*. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	6.6	2022	5.1	5.71	Perlu Perhatian Khusus

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.5. Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a). Tingkat setengah pengangguran	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%	4.22	2022	2.7	4.81	Perlu Perhatian Khusus
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1.*. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1.(a). Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	Orang	2015000	2022	2005000	2511419	Tercapai
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a). Kondisi mantap jalan nasional	Dinas PU, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	%	76.15	2022	76.15	75.8	Akan Tercapai
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi	9.1.2.*. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Orang dan Kg/Jumlah Koli Barang	3,95E+28	2022	6,00E+24	7,78E+28	Tercapai



Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(a).Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	9	2022	9	9	Tercapai
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b).Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	5	2022	5	5	Tercapai
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c).Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Unit (jumlah)	13	2022	13	13	Tercapai
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi Nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.*.Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	%		2022			
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi Nasional, dan meningkatkan dua kali lipat	9.2.1.(a).Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur	%	3.39	2022	3.4	3.39	Akan Tercapai

Kode Tujuan	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
	proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.4.Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1.*.Rasio Emisi CO <sub>2</sub> /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	ton CO <sub>2</sub> eq / Miliar Rp		2022			

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2022

#### 4.2.4. Telaahan Daerah Sekitar

Pembangunan di Kalimantan Timur memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung. Penyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dilakukan telaahan sebab saat ini juga sedang menyusun RPD. Penyajian visi, misi dan sasaran ketiga provinsi sekitar disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 4.4**  
**Identifikasi RPJMD Daerah Lain**

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
<b>I</b>	<b>RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026</b>
	(Perda Nomor 5 Tahun 2021)
	<b>Visi: “TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”</b>
	<b>Misi:</b>
1	Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2	Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3	Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan.
4	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5	Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.
6	Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
7	Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.
8	Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.
9	Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan.
10	Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11	Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan meli batkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12	Memberi bantuan pengembangan sektorproduktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota.

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
13	Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsisesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14	Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.
	<b>Sasaran:</b>
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan
14	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat
19	Meningkatnya Kemandirian Desa
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan
	<b>II RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026</b>
	(Perda Nomor 6 Tahun 2021)
	<b>Visi: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”</b>
	<b>Misi:</b>
1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
	<b>Sasaran:</b>
1	Meningkatnya Ketercukupan Energi
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah
3	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
7	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8	Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
9	Memenuhi Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
10	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi
11	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat
12	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
14	Meningkatnya Kualitas Beribadah
15	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
16	Meningkatnya pemberdayaan perempuan
<b>III</b>	<b>RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026</b>
	(Perda Nomor 2 Tahun 2022)
	<b>Visi: “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”</b>
	<b>Misi:</b>
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
	<b>Sasaran:</b>
1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama
2	Meningkatnya Akses Pendidikan
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
4	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender
6	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
7	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pemuda
8	Menurunnya Pernikahan Anak
9	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Prestasi Olahraga
11	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, dan Pariwisata
12	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah
13	Meningkatnya Pendapatan masyarakat
14	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
15	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar
16	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan
17	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan
18	Terwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN
19	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah
20	Meningkatnya Pelayanan Publik
21	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi
22	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
23	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
24	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana

Sumber: Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

#### **4.2.5. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

Permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan bersama dengan beberapa hal lain menjadi input untuk perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan periode tahun 2024-2026. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis, yaitu:

- a. Permasalahan pembangunan
- b. Isu internasional
- c. Isu atau kebijakan nasional
- d. Isu atau kebijakan Provinsi Kalimantan Timur
- e. Telaahan RPJMD/RPD daerah sekitar

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

##### **1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Membangun sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur adalah bagaimana memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi wilayah Kalimantan Timur menuju ekonomi berkelanjutan serta didukung pengetahuan dan inovasi. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi SDM di Kalimantan Timur. Merespon kondisi tersebut, pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan SDM, antara lain sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang baik dan

bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi perlu terus menjadi perhatian. Selain itu, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan selain untuk peningkatan layanan yang menjangkau masyarakat sampai ke pelosok, juga diharapkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja

Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, penambahan penduduk dan persaingan ekonomi menuntut SDM Kalimantan Timur yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan industri perlu didorong mulai dari perancangan program dan disain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Dengan demikian, dapat dihasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat mengembangkan usaha dan mandiri, bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

c. Peningkatan daya saing perempuan

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau

Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

## **2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

### **a. Diversifikasi ekonomi**

Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Kalimantan Timur berfokus pada pertambangan batubara yang merupakan sektor primer sebesar 76%, yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi sektor perkebunan dan perternakan untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi



digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata dan penggunaan bahan kimia dan produk kimia dan energi rendah karbon.

a. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya diluar non migas dan tambang.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

### **3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur**

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor *Over Dimension* dan *Over Load* di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

### **4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup**

#### **a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan**

Pembangunan Kalimantan Timur selain untuk mengejar pertumbuhan, juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditengah upaya pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha membangun Kalimantan Timur, komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup juga terus dilakukan.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur antara lain industri petrokimia, migas, batubara, pengolahan kayu, perkebunan, permukiman, pertambangan, peternakan, jumlah kendaraan, limbah padat, sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbulan sampah.

b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau ditopang oleh pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan timur bersama berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Program Pengurangan Emisi GRK: Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction/ER* program) dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur yang telah berlangsung sejak 2019-2024, dirancang bersama oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan program berbasis kinerja dibawah skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF merupakan kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. ER Program di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan nilai ekonomi karbon untuk skema RBPs (pembayaran berbasis kinerja).

Kedepan, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi. Penurunan emisi GRK secara khusus diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, *sustainable management of forest*, dan rehabilitasi hutan meruoakan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon, sekaligus mendukung pencapaian target NDC. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, mitra pemerintah maupun penggiat dan aktivis lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kalimantan Timur.

c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/ bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Dari data proyeksi penyediaan energi yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT.

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil. Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT.

Pencapaian target program RUED Kalimantan Timur diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Bauran energi dari EBT ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050. Pencapaian bauran EBT meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

## **5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber

daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK. Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun. Adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan jenis-jenis pelayanan dan kinerja Perangkat daerahnya.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan MPP secara bertahap. Dengan adanya MPP maka pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah akan terintegrasi dalam satu tempat sehingga memberikan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Selain itu, juga dapat berimplikasi dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan berusaha.

## BAB V

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 khususnya tahap terakhir (kelima). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga mempertimbangkan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan. Keempat tujuan pembangunan dan sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM. Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender.

Sasaran strategis pada tujuan ke-3 meliputi:

- 1.1. Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat; yang dimaksud adalah terpenuhinya akses pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dan masyarakat putus sekolah pada jenjang pendidikan wajib 12 tahun, serta mendukung akses dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada masyarakat.

- 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; yang dimaksud adalah pemerataan akses, sarana dan layanan fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui peningkatan kualitas dan perluasan layanan fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan mendukung Rumah Sakit Swasta serta pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.
- 1.3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja; yang dimaksud adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari para pencari kerja (utamanya tenaga kerja lokal) di jenjang pendidikan menengah, Diploma dan Universitas oleh pasar kerja di wilayah Kaltim (secara keseluruhan pencari kerja, tidak hanya yang terdata/terdaftar mengikuti pelatihan di BLKI).
- 1.4. Meningkatnya daya saing perempuan; yang dimaksud adalah meningkatnya daya saing perempuan dibidang ekonomi, keterwakilan diparlemen dan tenaga profesional melalui implementasi pengarusutamaan gender pada program/kegiatan di seluruh perangkat daerah.

## **2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Sasaran strategis pada tujuan ke-2 meliputi:

- 2.1. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi; yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, PTPH), sektor industri dan sektor pariwisata. Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi

secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

- 2.2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin; yang dimaksud adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui intervensi program/kegiatan pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi kerakyatan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrim di daerah melalui usaha-usaha ekonomi seperti usaha pertanian dalam arti luas, pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif.
- 2.3. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar; yang dimaksud adalah pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi meliputi public utilities, telekomunikasi, sanitasi (air minum, air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) dan ketenagalistrikan, sehingga infrastruktur dasar sudah dianggap termasuk di dalamnya.

### **3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Tujuan ini diarahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, air laut, udara, lahan, bersinergi dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Sasaran strategis pada tujuan ke-3 meliputi:

- 3.1. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan; yang dimaksud adalah terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan yang secara dominan dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
- 3.2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan; yang dimaksud adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang



lebih difokuskan pada pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan serta pengendalian pemanfaatan lahan.

- 3.3. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; yang dimaksud adalah upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya mendukung transisi energi.

#### **4. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik**

Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Sasaran strategis pada tujuan ke-4 meliputi:

- 4.1. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas; yang dimaksud adalah pengembangan profesionalisme aparatur guna meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik.
- 4.2. Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel; yang dimaksud adalah meningkatkan birokrasi yang transparan dan berintegritas.

Keempat tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke beberapa sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2026. Penjabaran masing-masing tujuan ke sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan target per tahun disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023*	2024	2025	2026	
<b>Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Poin</b>	<b>76,88</b>	<b>77,44</b>	<b>77,75</b>	<b>78,14</b>	<b>78,53</b>	<b>78,92</b>	<b>78,92</b>
	<b>2</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>6,83</b>	<b>5,71</b>	<b>5,63</b>	<b>5,46</b>	<b>5,30</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,81	13,84	14,13	14,04	14,09	14,15	14,15
	2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40	10,40
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,61	74,62	74,75	74,88	75,02	75,15	75,15
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	15,79	26,10	26,60	27,20	27,60	28,10	28,10
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,64	N/A	66,97	67,31	67,64	67,98	67,98
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>1</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	<b>Persen</b>	<b>2,55</b>	<b>4,48</b>	<b>4,66</b>	<b>4-5</b>	<b>4-5</b>	<b>4-5</b>	<b>4-5</b>
	<b>2</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>6,54</b>	<b>6,44</b>	<b>5,9</b>	<b>5,78</b>	<b>5,67</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>
	<b>3</b>	<b>Indeks Gini (Poin)</b>	<b>Poin</b>	<b>0,331</b>	<b>0,317</b>	<b>0,308</b>	<b>0,307</b>	<b>0,306</b>	<b>0,305</b>	<b>0,305</b>
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		LPE Non Migas dan Batubara	Persen	2,81	6,11	6,45	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5
	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1,223	0,989	N/A	0,940	0,917	0,894	0,894

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023*	2024	2025	2026	
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,337	0,226	N/A	0,215	0,209	0,204	0,204
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	N/A	76,65	N/A	80,19	83,25	86,05	86,05
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>75,06</b>	<b>74,46</b>	<b>74,68</b>	<b>75,00</b>	<b>75,10</b>	<b>75,20</b>	<b>75,20</b>
	<b>2</b>	<b>Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)</b>	<b>Persen</b>	<b>41,96</b>	<b>70,68</b>	<b>30,80</b>	<b>31,05</b>	<b>31,89</b>	<b>32,03</b>	<b>32,03</b>
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Poin	51,92	53,02	53,29	53,52	53,62	53,72	53,72
	2	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,4	81,45	81,86	81,95	82,05	82,15	82,15
	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,84	87,59	88,03	88,17	88,27	88,37	88,37
	4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	82,21	81,85	82,26	82,35	82,45	82,55	82,55
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dan Penggunaan Lahan		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	N/A	187,12	22,30	23,32	24,40	25,49	25,49
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	N/A	7,27	8,65	10,39	12,39	14,68	14,68

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023*	2024	2025	2026	
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Poin</b>	<b>68,47 (B)</b>	<b>67,70 (B)</b>	<b>68,81 (B)</b>	<b>69,00 (B)</b>	<b>69,50 (B)</b>	<b>70,01 (BB)</b>	<b>70,01 (BB)</b>
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,57	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	2	Sistem Merit	Poin	256	263,5	267,00	272,00	275,00	280,00	280,00
	3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,22	2,11	2,55	2,90	3,00	3,10	3,10
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,10 (BB)	77,84 (BB)	(78,50) (BB)	(79,30) (BB)	(80,01) (A)	(80,01) (A)
	2	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3 Skor 3,476	3 Skor 3,726	3 Skor 3,976	3 Skor 3,976

Sumber: hasil proyeksi, 2023 Ket: \*proyeksi

Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang disajikan pada tabel di atas mempedomani dan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pembangunan jangka panjang memuat 5 (lima) misi dengan sasaran pokoknya masing-masing. Selain kelima misi RPJPD, 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 juga menjadi pertimbangan penentuan tujuan RPD yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu sumber daya manusia, perekonomian termasuk infrastruktur sebagai pendukung, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

**Tabel 5.2**

**Keterkaitan RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025, RPJMN 2020-2024,  
 dan RPD Kalimantan Timur 2024-2026**

<b>Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 (Perda 15 Tahun 2008)</b>	<b>Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)</b>	<b>Isu Strategis RPD Kaltim 2024-2026</b>
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan SDM Berdaya Saing
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik

Sumber: hasil analisis, 2023

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2024-2026 memiliki rentang waktu yang terbatas, sehingga perlu dilakukan secara fokus dan terpadu. Untuk itu pemerintah provinsi menetapkan prioritas pembangunan daerah provinsi. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPD periode 2024-2026, maka ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya.
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

## BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

### 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

### 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran RPD akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dipilih akan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program prioritas. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD.

Strategi yang dipilih dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran saling berkaitan, maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran RPD yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 6.1**

### **Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing</b>		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1 Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
		4 Optimalisasi Boarding School
		5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
		6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		7 Peningkatan literasi dan numerasi

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		8	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu kesehatan	1	Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		2	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
		3	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		4	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya
		6	Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		7	Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan
		8	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Perluasan kesempatan kerja	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		2	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		3	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
		4	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
		5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
	Peningkatan mutu dan daya saing tenaga konstruksi	1	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
		2	Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3	Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
		4	Pemberdayaan gender antarwilayah
		5	Peningkatan perlindungan perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak



Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>		
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Pembangunan ekonomi inklusif	1 Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir
		2 Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
		3 Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
		4 Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
		5 Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir
		6 Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM
		7 Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata
		8 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan
		9 Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.
		10 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan
		11 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		12 Peningkatan produksi dan produktivitas ternak
		13 Penguatan kelembagaan peternakan
		14 Peningkatan produksi perikanan
		15 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
		16 Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura
		17 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
		18 Peningkatan iklim usaha dan investasi
		19 Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1 Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
		2 Peningkatan keberfungsian sosial PPKS
		3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
		5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
		6 Peningkatan Daya Saing UMKM
		7 Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha
		8 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		9 Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi pemenuhan infrastruktur terutama pada kawasan strategis	1 Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi
		2 Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi
		3 Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi
		4 Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		5 Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air
		6 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir
		7 Peningkatan pemenuhan akses sanitasi
		8 Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		9 Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil
		10 Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan
		11 Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik
		12 Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		13 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		14 Pengimplementasian kebijakan satu peta

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Pengendalian pencemaran air
		3	Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
		4	Pengendalian pencemaran udara
		5	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan
		6	Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		7	Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Penurunan emisi GRK dari sektor lahan	1	Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan
		2	Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan
		3	Peningkatan Peranan Konservasi Hutan
		4	Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)
		5	Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan)
		6	Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi)
		7	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		8	Peningkatan pengelolaan DAS
		9	Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan
		10	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari fosil	1	Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya
		2	Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
		3	Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan
		4	Pengembangan infrastruktur EBT
		5	Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan EBT
		6	Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik</b>			
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
		2	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
		3	Deregulasi Kebijakan
		4	Penyederhanaan Organisasi
		5	Perbaikan Tata Laksana
		6	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel		1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
		2	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
		3	Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		4	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur
		5	Penguatan Pengawasan
		6	Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN

Sumber: hasil analisis, 2023

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara khusus, tema pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan.

**Tabel 6.2**  
**Fokus/Tema Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

2024	2025	2026
Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan	Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing	Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN

Sumber: hasil analisis, 2023

### **6.3. Arahannya Pembangunan Kewilayahan**

#### **a. Pengembangan Wilayah sesuai Arahannya Tata Ruang dalam RTRW**

Hasil analisis terhadap tata ruang Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi substansi penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW), menjadi masukan dalam arahannya pembangunan kewilayahan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN. Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;
- b. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;
- c. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi;
- d. pelestarian kawasan berfungsi lindung;
- e. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- f. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat;
- g. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- h. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;
- i. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
- j. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- k. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas, meliputi

- a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan,

- pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa;
- b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara;
  - c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
  - d. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawasan Permukiman yang handal; dan
  - e. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan.

Strategi pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua, meliputi:

- a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia; dan
- b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan Wilayah Provinsi.

Strategi pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antarsistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian;
- e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antarpulau;
- f. mengembangkan alur-pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung pelayaran nasional dan internasional;

- g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah; dan
- k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung, meliputi:

- a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
- b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan;
- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat;
- d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat;
- e. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Lindung geologi;
- f. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya;
- g. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove.

Strategi pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir, meliputi:

- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Wilayah darat;
- b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil;
- c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut; dan
- d. memadukan dan menselaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi.

Strategi pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi

- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
- c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro, industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan;
- d. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut; dan
- e. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri.

Strategi pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
- b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan;
- b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap;
- c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
- d. mengembangkan prasarana sarana kawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kawasan lainnya.

Strategi pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara; dan
- d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut.



Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil; dan
- c. mengembangkan KSP.

Strategi pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meliputi:

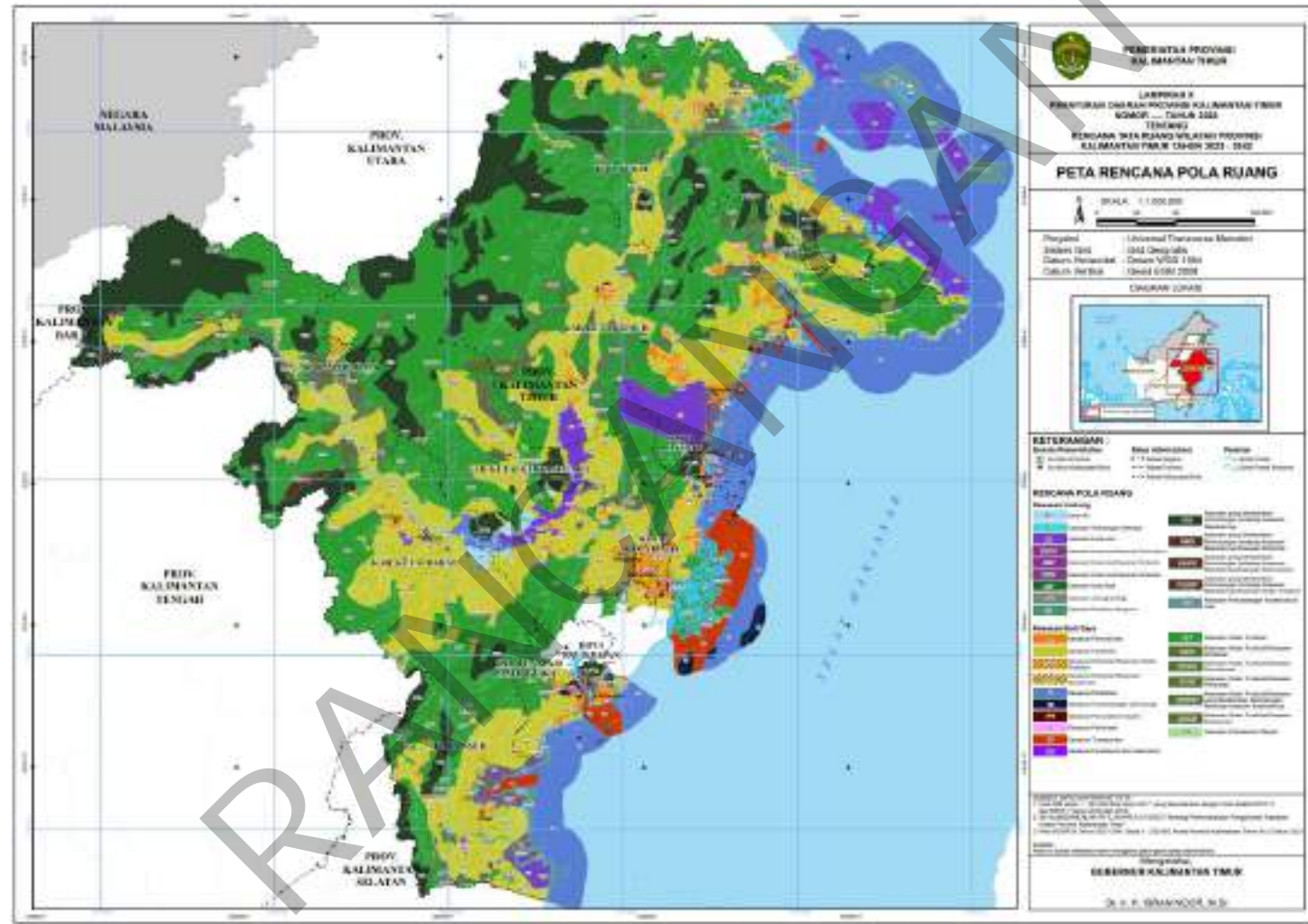
- a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana; dan
- b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

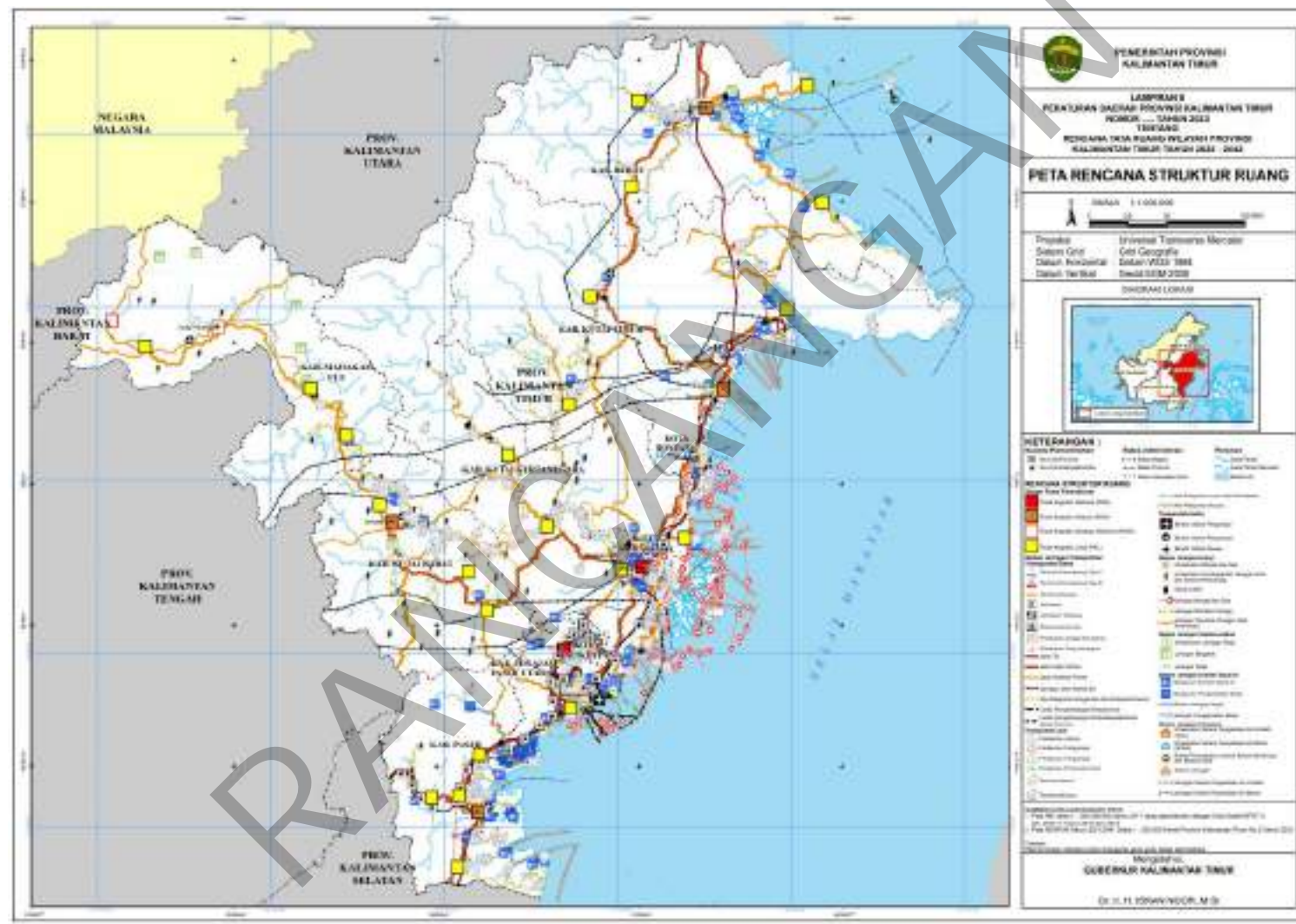
Adapun arahan rencana pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis provinsi disajikan pada Gambar 3.1, Gambar 3.2, dan Gambar 3.3.

**Gambar 6.1.**  
**Pet Arahlan Pengembangan Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur**



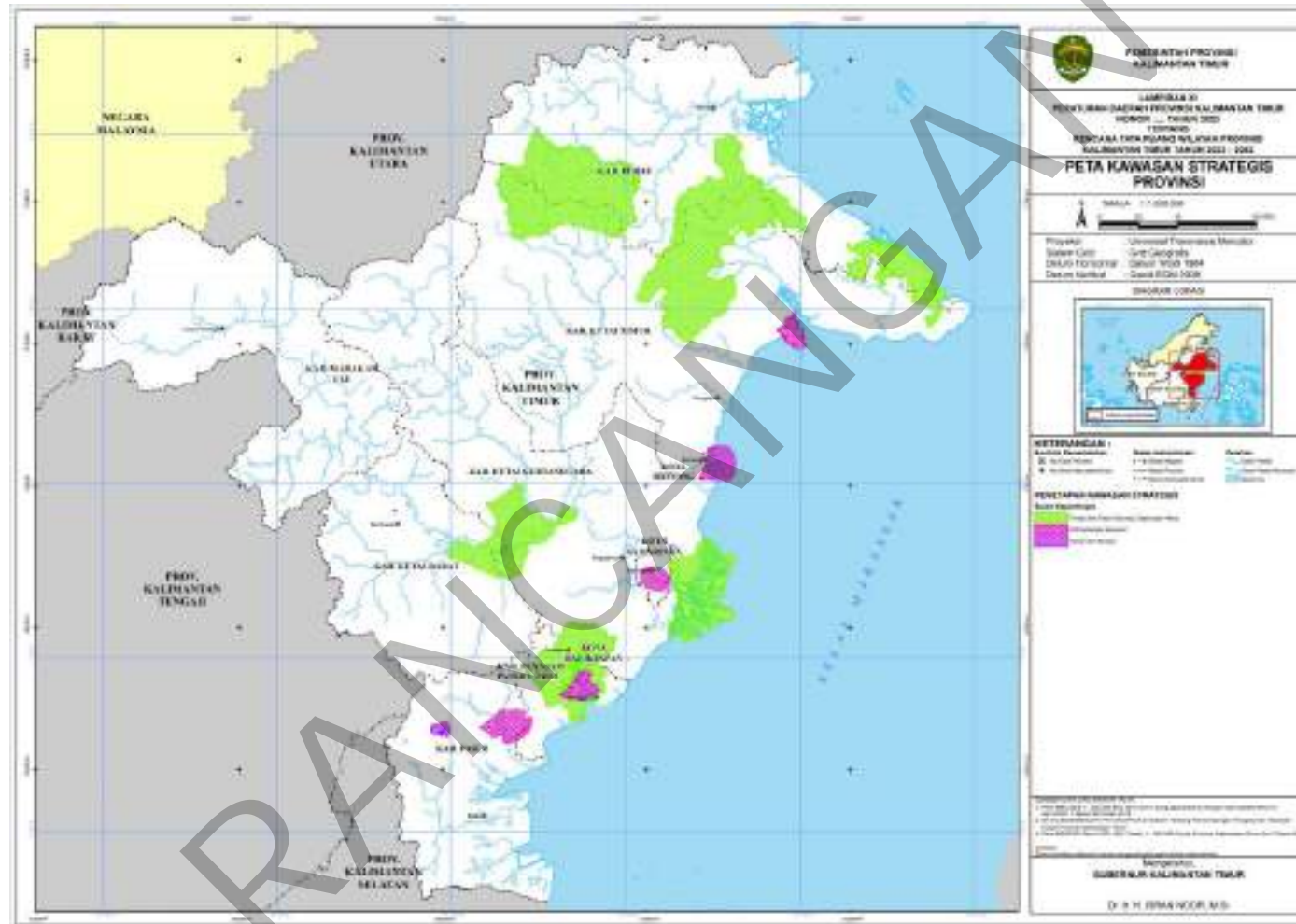
Gambar 6.2.

Peta Arah Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 6.3.

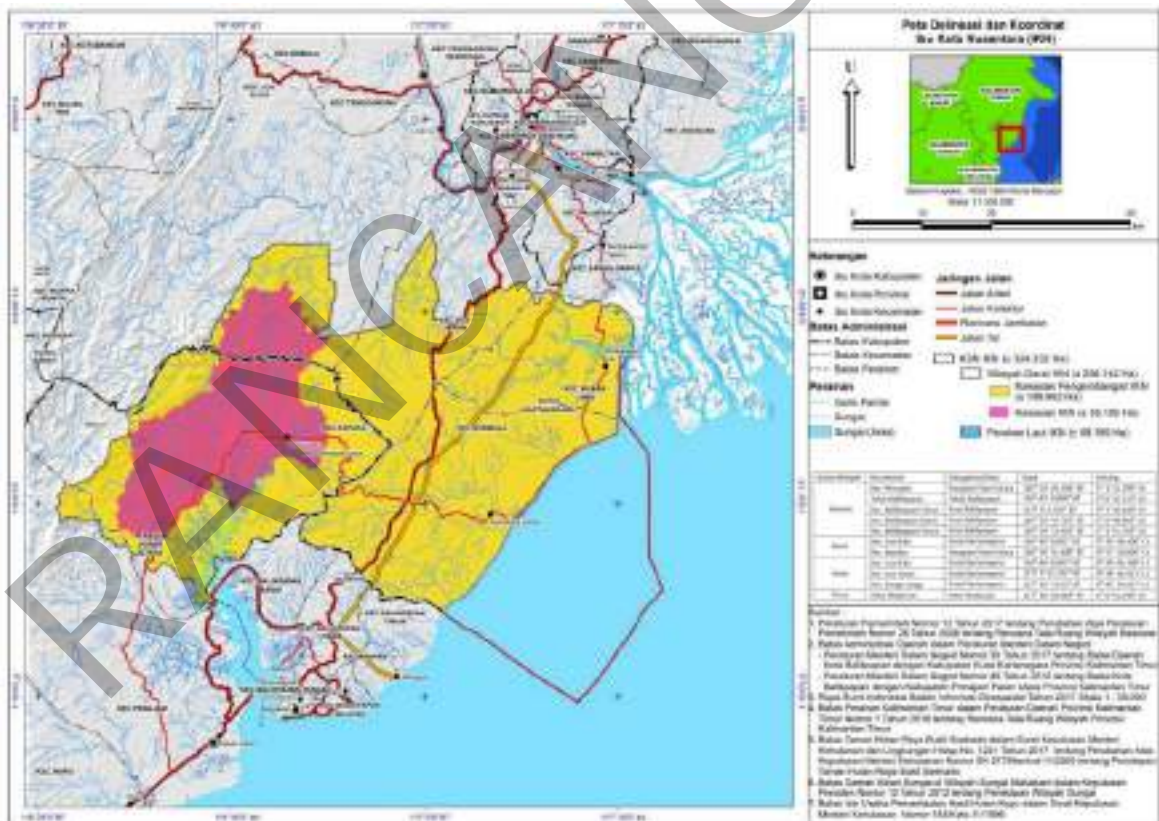
Peta Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur



**e. Pengembangan Wilayah Terintegarsi dengan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang leblh 256.142 hektare. Sementara Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara memiliki luas kurang lebih 56.180 hektare, terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Gambar 6.4.**  
**Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara**



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi, yang

akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kerjasama IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka implementasi kerjasama pembangunan IKN yang diarahkan oleh Pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

1. Sektor Ekonomi dan Industri

- a. Kawasan Industri Kariangau (Kota Balikpapan).
- b. Kawasan Industri Buluminung (Kabupaten Penajam Paser Utara).
- c. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur).

Kerjasama: Perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastuktur, peningkatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat dan promosi investasi.

2. Logistik dan Konektivitas

- a. Logistik dan konektivitas antarpusat kegiatan di wilayah IKN.
- b. Simpul dan jaringan di luar wilayah IKN (Kota Balikpapan dan Samarinda).
- c. Akses jalur nasional dan internasional.

Kerjasama: Penguatan sistem logistik dan konektivitas pengembangan IKN sebagai superhub ekonomi, penguatan simpul dan jaringan tingkat regional (pintu masuk dan hub ke IKN).

3. SDM dan Ketenagakerjaan

Sarana pendidikan dan kejuruan (wilayah IKN dan daerah mitra).

Kerjasama: Penambahan sarana pendidikan dan kejuruan, pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kuantitas tenaga kerja, penguatan pendidikan tinggi di daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Hutan lindung Sungai Wain
- b. Kawasan Ekosistem riparian Sungai Wain
- c. Kawasan Ekosistem Teluk Balikpapan

d. Sungai Mahakam

e. Koridor Sawa

Kerjasama: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mitra, pembagian peran dalam pemulihan ekosistem terdegradasi serta pertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem diluar wilayah IKN, pemeliharaan kawasan ekosistem esensial.

5. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Wisata alam, religi buatan dan kuliner (Kota Samarinda)

b. Wisata alam Pesut Mahakam (Kabupaten Kutai Kartanegara)

c. Ekowisata pertanian hulu (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Kerjasama: Pengembangan potensi pariwisata dan dapat didukung dengan konektivitas transportasi massal yang memadai.

6. Energi dan Ketenagalistrikan

a. Smart grid (daerah mitra)

b. Pembangkit listrik (Pulau Kalimantan)

c. Jaringan transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans Kalimantan

d. Produksi gas hydrogen (diluar wilayah IKN)

Kerjasama: Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan dan produksi gas serta pembangunan sistem smart grid yang akan melalui area di daerah mitra.

7. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan perikanan (Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kerjasama: Permanfaatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi, sarana produksi perikanan, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung sektor pertanian hulu dan kebutuhan pangan.

8. Pengelolaan SDA

Wilayah intake Sungai Mahakam (Kota Samarinda dan Balikpapan)

Bendungan Batu Lepek (Provinsi Kalimantan Timur)

Kerjasama: Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lewat pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu.

#### **6.4. Program Prioritas**

Strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih untuk mencapai sasaran pembangunan, akan menjadi panduan dalam menentukan program prioritas. Program prioritas adalah program perangkat daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Program-program yang dipilih diharapkan akan berkontribusi besar bagi pencapaian target sasaran. Sebuah sasaran strategis didukung oleh lebih dari satu program dan dapat lintas urusan (*crosscutting*). Kinerja sebuah program dapat menunjang lebih dari satu sasaran, namun mengingat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menerapkan mekanisme satu program hanya dapat mendukung satu sasaran, maka penentuan program prioritas tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan memilih program yang paling berkontribusi pada sasaran yang mana. Program prioritas pada setiap sasaran disajikan pada tabel berikut



**Tabel 6.3**  
**Program Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2024-2026**

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing									
Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK (%)							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar SLB (%)							
		Angka Kelulusan Sekolah Menengah (%)							
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit yang terakreditasi (%)							Dinas Kesehatan
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							
Sasaran 3: Meningkatkan daya saing tenaga kerja									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (orang)							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SDM Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik & Hukum yang melaksanakan KG (%)							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas									
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
8	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan kayu (m3/tahun)							Dinas Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor (UKM)							Dinas Perindustrian, Perdagangan,

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
									Koperasi dan UKM
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO	Jumlah Rumah Produksi Bersama							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara berdasarkan SKA (%)							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Pertumbuhan UKM Ekspor (%)							
		Pertumbuhan nilai ekspor UKM (%)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan Peruntukan Industri / Kawasan Industri (industri)							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
13	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (orang)							Dinas Pariwisata

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Jumlah pergerakan wisatawan mancanegara (orang)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
14	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan (%)							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur (minat)							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
16	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Minat calon investor (calon investor)							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)							Dinas Perkebunan
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)							Dinas Perkebunan
19	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)							Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
26	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)							Dinas Kelautan dan Perikanan
27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)							Dinas Kelautan dan Perikanan
28	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas							Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		(SNI) yang dipasarkan (Jenis)							
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
29	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial							Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
30	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
31	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang tertangani							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase pengurangan luas kawasan kumuh							
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Konektivitas Transportasi Darat							Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan							
		Persentase penyediaan kapasitas air baku							
		Persentase panjang pantai kritis yang ditangani							
35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang berfungsi baik							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak perpipaan (%)							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

RANCANGAN  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026**

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
38	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan lingkungan yang tertata							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
39	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU permukiman yang ditingkatkan							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									
40	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 jam							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran							Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan									



No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>									
42	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)							Dinas Kehutanan
		Penurunan kerusakan kawasan hutan (%)							
43	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha)							Dinas Kehutanan
44	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)							Dinas Kehutanan
45	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat							Dinas Kehutanan
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
46	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO <sub>2</sub> eq)							Dinas Perkebunan
<b>Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
47	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik (KK)							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
48	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengembangan EBT (unit)							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik									
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
KEPEGAWAIAN									
49	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pemenuhan aspek-aspek Sistem Merit							Badan Kepegawaian Daerah
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
		Persentase ASN dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Baik (76 – 90)							
		Persentase ASN yang disiplin							
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
50	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat PIM							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Fungsional							

RANCANGAN  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Teknis 20 JP							
		Persentase ASN yang sudah mengikuti Seminar/workshop/sejenis							
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
51	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal B							Biro Organisasi
		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP dan proses bisnis							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah							Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program							

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Prioritas Nasional dan prioritas daerah							
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi							
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)							
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan							

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
53	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda							Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah								
		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE								
		Persentase ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE								
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel										
SEKRETARIAT DAERAH										
54	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan								Biro Organisasi

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		nilai SAKIP dengan predikat minimal B							
		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP dan proses bisnis							
<b>PERENCANAAN</b>									
56	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian program RKPD dan RPD							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah							
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)							Inspektorat
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan							
		Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah							

## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Kerangka pendanaan pembangunan menggambarkan proyeksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun 2024-2026. Pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 membutuhkan pendanaan yang diarahkan untuk mencapai kinerja pembangunan yang telah ditargetkan. Kerangka pendanaan pembangunan pada subbab ini merupakan hasil proyeksi pada Bab III RPD dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.1

**Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

Kode Rek	Uraian	Target		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>16.442.341.253.591</b>	<b>14.621.856.687.106</b>	<b>16.224.886.190.490</b>	<b>17.841.559.589.081</b>	<b>19.336.104.581.775</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>8.731.281.736.065</b>	<b>8.045.500.965.106</b>	<b>9.162.333.562.580</b>	<b>10.321.882.916.398</b>	<b>11.240.655.408.217</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.604.003.377	7.010.000.000.000	7.952.500.000.000	9.035.100.000.000	9.865.700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.866.174.340	20.052.388.240	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	777.548.891.826	782.707.685.568	951.308.953.588	1.007.373.953.589	1.063.423.953.590
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>7.693.912.437.526</b>	<b>6.562.497.042.000</b>	<b>7.048.691.091.947</b>	<b>7.505.812.280.166</b>	<b>8.081.581.923.900</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.693.912.437.526	6.562.497.042.000	7.048.691.091.947	7.505.812.280.166	8.081.581.923.900
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	6.562.497.042.000	7.038.691.091.947	7.495.812.280.166	8.071.581.923.900
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5.021.968.600.000	5.495.021.432.110	5.934.852.021.371	6.493.048.575.856
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	857.919.020.000	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	190.152.584.000	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	492.456.838.000	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>17.147.080.000</b>	<b>13.858.680.000</b>	<b>13.861.535.964</b>	<b>13.864.392.517</b>	<b>13.867.249.658</b>
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	13.861.535.964	13.864.392.517	13.867.249.658
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.446.958.526.374</b>	<b>2.578.143.312.894</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.958.526.374	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					



Kode Rek	Uraian	Target		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.1	Penerimaan Piutang Daerah					
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
	<b>Total Penerimaan Daerah</b>	<b>18.889.299.779.965</b>	<b>17.200.000.000.000</b>	<b>16.724.886.190.490</b>	<b>18.441.559.589.081</b>	<b>20.036.104.581.775</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.254.119.047.139</b>	<b>17.031.194.223.080</b>	<b>16.555.842.110.030</b>	<b>18.272.276.868.666</b>	<b>19.866.582.884.518</b>
<b>5.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.900.060.438.024</b>	<b>7.414.552.277.521</b>	<b>7.272.758.764.170</b>	<b>7.595.910.348.851</b>	<b>7.933.592.312.723</b>
5.01.01	Belanja Pegawai	2.333.723.802.442	2.796.363.758.450	2.578.256.951.255	2.707.169.798.818	2.842.528.288.759
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.083.330.472.969	4.207.685.257.571	4.379.873.970.576	4.559.109.064.447	4.745.678.894.224
5.01.05	Belanja Hibah	432.065.962.614	395.879.061.500	300.000.000.000	315.000.000.000	330.750.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.940.200.000	14.624.200.000	14.627.842.339	14.631.485.586	14.635.129.740
<b>5.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.942.103.130.958</b>	<b>4.097.300.945.741</b>	<b>3.763.563.884.584</b>	<b>4.896.268.350.846</b>	<b>6.358.613.448.554</b>
<b>5.03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.688.799.413</b>	<b>129.340.999.818</b>	<b>129.519.461.276</b>	<b>129.698.168.970</b>	<b>129.877.123.241</b>
<b>5.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>4.405.266.678.744</b>	<b>5.390.000.000.000</b>	<b>5.390.000.000.000</b>	<b>5.650.400.000.000</b>	<b>5.444.500.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>236.600.000.000</b>	<b>168.805.776.920</b>	<b>169.044.080.460</b>	<b>169.282.720.414</b>	<b>169.521.697.257</b>
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	169.044.080.460	169.282.720.414	169.521.697.257
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	<b>Total Pengeluaran Daerah</b>	<b>12.490.719.047.139</b>	<b>17.200.000.000.000</b>	<b>16.724.886.190.490</b>	<b>18.441.559.589.081</b>	<b>20.036.104.581.775</b>

Sumber: hasil proyeksi, 2022

## **7.2. Program Perangkat Daerah**

Rencana pembangunan Kalimantan Timur periode tahun 2024 sampai dengan 2026 dilaksanakan dengan berbagai program sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan 2026 ditujukan untuk menjawab permasalahan pembangunan, isu strategis, serta potensi dan tantangan.

Program perangkat daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disajikan pada Lampiran. Program tersebut disajikan berdasarkan urusan, dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal, target dan pagu tahun 2024-2026, serta perangkat daerah penanggung jawab. Kebutuhan anggaran untuk mendanai program perangkat daerah diperoleh dari proyeksi Belanja Daerah sebagaimana dimuat pada Tabel 7.1. di atas.

Tabel 7.2

**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar SLB												
				Angka Kelulusan Sekolah Menengah												
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Peersentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Kesehatan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit yang terakreditasi												Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan												
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar												Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha												Dinas Kesehatan
				Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan												
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota sehat												Dinas Kesehatan
				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan PHBS												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3															
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan												
				Persentase penyediaan kapasitas air baku												
				Persentase panjang pantai kritis yang ditangani												
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak perpipaan (%)												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang berfungsi baik												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dalam kondisi baik												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan lingkungan yang tertata												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	4		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni												
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH yang tertangani												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Persentase pengurangan luas kawasan kumuh												
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU permukiman yang ditingkatkan												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	5		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Satuan Polisi Pamong Praja
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi												Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi yang ditangani												
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan												Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan												
				Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran												
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal												Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pendampingan penanganan pasca bencana												
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana												



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>													
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Sosial
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya												Dinas Sosial
				Persentase keluarga kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya												
				Persentase Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya												
				Persentase PSKS kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya												
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti												Dinas Sosial
				Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti												

## RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti												
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi												
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang terpenuhi pemeliharannya												
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	7		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>													
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti														
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).												
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>2</b>	<b>8</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SDM Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik & Hukum yg melaksanakan KG (Paralegal, advokat, dll)												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif												
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provins												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase keluarga yang mendapatkan Layanan Komprehensif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota												
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>9</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>													
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan												Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Angka Kecukupan Energi												
				Angka Kecukupan Protein												
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan												Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan												Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
<b>2</b>	<b>11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>															
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Lingkungan Hidup
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana lingkungan hidup yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas areal keanekaragaman hayati yang dikelola												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi												Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan pemerintah provinsi														
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH mendapatkan penghargaan												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan												Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan												Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	12															
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0- 17 tahun												
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan												
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan												
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat pemanfaatan data kependudukan												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun												



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	13															
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>														
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi penataannya sesuai kewenangan provinsi												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerja samanya sesuai kewenangan provinsi												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )												
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i> )												
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)												Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Perhubungan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Transportasi Darat												Dinas Perhubungan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)												Dinas Perhubungan
2	15	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase rencana perkeretaapian yang disusun												Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>16</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Komunikasi dan Informatika
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah												Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah												
				Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik												

RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi														
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)														
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan														
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda												Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah												
				Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE												
				Persentase ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE														
2	17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>														
2	17	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase UKP/USP yang dinilai kesehatannya dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi														

## RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Rumah Produksi Bersama												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor (UKM)												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>													
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Minat calon investor												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan (%)												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>													
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pemuda dan Olah Raga
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi												Dinas Pemuda dan Olah Raga
				Persentase Wirusahawan Muda di tingkat Provinsi												
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir												Dinas Pemuda dan Olah Raga
				Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas												
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda												Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah												Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah												
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik												
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar												
2	21		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>													
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,5												Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah												
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>													
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		pengarusutamaan kebudayaan														
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni														
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni														
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah												
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan												
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>														
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk												
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk												
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk												
2	24		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>													
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku												
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
<b>3</b>	<b>25</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional												Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)												Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)												Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak												Dinas Kelautan Dan Perikanan

## RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		sumberdaya kelautan dan perikanan														
		Persentase pelaku usaha KP yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku														
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)												Dinas Kelautan Dan Perikanan
<b>3</b>	<b>26</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>													
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Pariwisata
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (orang)												Dinas Pariwisata
				Jumlah pergerakan wisatawan mancanegara (orang)												
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													Dinas Pariwisata
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI EMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan												Dinas Pariwisata

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		KEKAYAAN INTELEKTUAL														
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif												Dinas Pariwisata
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>													
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Perkebunan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)												Dinas Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)												Dinas Perkebunan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)												Dinas Perkebunan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)												Dinas Perkebunan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)												Dinas Perkebunan
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												DPTPH
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)												DPTPH
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura												DPTPH
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT												DPTPH
				Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT												
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan dan Hortikultura)												
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Dibina dan Diawasi												DPTPH

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura yang dibentuk/dibina												DPTPH
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Peternakan dan KH
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi komoditas Peternakan												Dinas Peternakan dan KH
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Peternakan												Dinas Peternakan dan KH
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular												Dinas Peternakan dan KH
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Dibina dan Diawasi												Dinas Peternakan dan KH
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan peternak yang dibentuk/dibina												Dinas Peternakan dan KH
3	27	8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)												Dinas Peternakan dan KH
<b>3</b>	<b>28</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>BIDANG KEHUTANAN</b>														
3	28	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Kehutanan
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan kayu (m3/tahun)												Dinas Kehutanan
				Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)												
				Penurunan kerusakan kawasan hutan (%)												
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha)												Dinas Kehutanan
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat												Dinas Kehutanan
				Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya												
3	28	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)												Dinas Kehutanan



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	29		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>													
3	29	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan												Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara												Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengembangan EBT (unit)												Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 jam												Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Jumlah KK Berlistrik (KK)												
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>													
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK)												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang pokok dan penting												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Inflasi Pangan Bergejolak												
				Persentase kinerja realisasi pupuk												
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara berdasarkan SKA (%)												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Pertumbuhan UKM Ekspor (%)												
				Pertumbuhan nilai ekspor UKM (%)												
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan												
<b>3</b>	<b>31</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>													
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas													
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang dapat dipantau perkembangannya													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>3</b>	<b>32</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>														
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya													Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri													Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
4	1		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Sekretariat Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal B												Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP dan proses bisnis												
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Indeks pencapaian Satndar pelayanan Minimal (SPM)												Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara tepat waktu												
				Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti												
				Persentase kerja sama daerah yang memberi manfaat bagi pembangunan												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti												Sekretariat Daerah
				Persentase lembaga bina spiritual yang difasilitasi												
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi penyusunannya												Sekretariat Daerah
				Persentase masalah hukum serta masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan												
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kontribusi BUMD terhadap PAD												Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti												
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)												Sekretariat Daerah
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah												Sekretariat Daerah
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>														
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Sekretariat DPRD
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Skor Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD												Sekretariat DPRD
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
5	1		<b>PERENCANAAN</b>													
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian program RKPD dan RPD												Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah												
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
		Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
		Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														
		Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>														
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Pendapatan Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah												Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan PerGub tentang APBD/P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu												Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Tingkat kesesuaian nomenklatur program APBD dengan KUA-PPAS												
				Tingkat kesesuaian pagu program APBD dengan KUA-PPAS												
				Tingkat penyerapan anggaran dalam APBD												
				Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan												
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya												
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik												Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>													
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Kepegawaian Daerah
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan aspek-aspek Sistem Merit												Badan Kepegawaian Daerah



## RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)														
		Persentase ASN dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Baik (76 – 90)														
		Persentase ASN yang disiplin														
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>														
5	4	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan													Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													
5	4	2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat PIM													Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Fungsional													
			Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Teknis 20 JP													
			Persentase ASN yang sudah mengikuti Seminar/workshop/sejenis													
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>														
5	5	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan													Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>	<b>7</b>		<b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>														
5	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan													Badan Penghubung Provinsi
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung													Badan Penghubung Provinsi
<b>6</b>			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6</b>	<b>1</b>		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>														
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan													Inspektorat
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti													
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)													Inspektorat
				Persentase tindak lanjut hasil pengawasan													

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM												Inspektorat
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
8	1		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>													
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti												
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Ormas yang terdaftar dan aktif												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021	2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase ormas yang melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik/konflik sosial yang ditangani												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja pembangunan daerah merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dimuat pada Bab V dokumen ini. Pelaksanaan pembangunan pada periode tersebut diharapkan mencapai kinerja tujuan dan sasaran, yang akan diukur dengan beberapa alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Peristilahan kinerja sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 memiliki peristilahan yang berbeda, namun memiliki arsitektur atau penjenjangan kinerja yang sama. Adapun pemetaan penjenjangan kinerja kedua aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran pada RPD memiliki kinerja Dampak (*impact*) sama dengan *Ultimate outcome*.
- b. Tujuan dan sasaran pada Renstra PD memiliki kinerja Dampak (*impact*) sama dengan *Intermediate outcome* urusan.
- c. Program pada Renstra PD memiliki kinerja Hasil (*outcome*) sama dengan *Intermediate outcome* sub urusan.
- d. Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja Keluaran (*output*) sama dengan *Immediate outcome*.
- e. Sub Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja Keluaran (*output*) sama dengan *Output*.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2024-2026. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

### 8.1. Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan. Indikator makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang memuat 6 (enam) indikator beserta target per tahun disajikan pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Makro Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,44	77,75	78,14	78,53	78,92	78,92
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,71	5,63	5,46	5,30	5,14	5,14
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,48	4,66	4-5	4-5	4-5	4-5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,44	5,9	5,78	5,67	5,55	5,55
5	Indeks Gini	Poin	0,317	0,308	0,307	0,306	0,305	0,305
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	70,68	30,80	31,05	31,89	32,03	32,03

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Adapun IKU dan target per tahun disajikan pada Tabel 8.2

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

1	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,88	77,44	77,75	78,14	78,53	78,92	78,92
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,83	5,71	5,63	5,46	5,30	5,14	5,14
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,55	4,48	4,66	4-5	4-5	4-5	4-5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,54	6,44	5,9	5,78	5,67	5,55	5,55
5	Indeks Gini	Poin	0,331	0,317	0,308	0,307	0,306	0,305	0,305
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,06	74,46	74,68	75,00	75,10	75,20	75,20
7	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	41,96	70,68	30,80	31,05	31,89	32,03	32,03
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,47 (B)	67,70 (B)	68,81 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,81	13,84	13,91	14,04	14,09	14,15	14,15
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40	10,40
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,61	74,62	74,75	74,88	75,02	75,15	75,15
4	Persentase penempatan tenaga kerja	Persen	15,79	26,10	N/A	94,54	94,70	94,86	94,86
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,64	66,84	66,97	67,31	67,64	67,98	67,98
6	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	2,81	6,11	6,45	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1,04	0,989	0,76	0,940	0,917	0,894	0,894
8	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,23	0,226	0,12	0,215	0,209	0,204	0,204
9	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	N/A	76,65	N/A	80,19	83,25	86,05	86,05
10	Indeks Kualitas Air	Poin	51,92	53,02	53,29	53,52	53,62	53,72	53,72
11	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,4	81,45	81,86	81,95	82,05	82,15	82,15
12	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,84	87,59	88,03	88,17	88,27	88,37	88,37
13	Indeks Kualitas Lahan	Poin	82,21	81,85	82,26	82,35	82,45	82,55	82,55

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	N/A	81,28	22,30	23,32	24,40	25,49	25,49
15	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	N/A	7,27	8,65	10,39	12,39	14,68	14,68
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,57	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
17	Sistem Merit	Poin	N/A	263,5	267,00	270,00	275,00	280,00	280,00
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,22	2,11	2,55	2,90	3,00	3,10	3,10
19	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,10 (BB)	77,84 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
20	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Ket: \*: realisasi \*\* target



## **8.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penyajian IKD dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator-indikator kinerja pada tingkat dampak, sementara pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator-indikator yang memiliki kinerja outcome. Indikator pada Aspek Pelayanan Umum merupakan indikator program-program perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan urusan masing-masing. Indikator kinerja dan target setiap tahun mulai 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel 8.3.

**Tabel 8.3**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,88	77,44	77,75	78,14	78,53	78,92	78,92
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,81	13,84	13,91	14,04	14,09	14,15	14,15
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40	10,40
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,61	74,62	74,75	74,88	75,02	75,15	75,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,83	5,71	5,63	5,46	5,30	5,14	5,14
6	Persentase penempatan tenaga kerja	Persen	15,79	26,10	N/A	94,54	94,70	94,86	94,86
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,55	4,48	4,66	4-5	4-5	4-5	4-5
8	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	2,81	6,11	6,45	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,54	6,31	5,9	5,78	5,67	5,55	5,55
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1,04	0,989	0,76	0,940	0,917	0,894	0,894
11	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,23	0,226	0,12	0,215	0,209	0,204	0,204
12	Indeks Gini	Poin	0,331	0,327	0,308	0,307	0,306	0,305	0,305
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,64	66,84	66,97	67,31	67,64	67,98	67,98
<b>II.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,06	74,46	74,68	75,00	75,10	75,20	75,20
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	N/A	76,65	N/A	80,19	83,25	86,05	86,05
3	Indeks Kualitas Air	Poin	51,92	53,02	53,29	53,52	53,62	53,72	53,72
4	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,4	81,45	81,86	81,95	82,05	82,15	82,15
5	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,84	87,59	88,03	88,17	88,27	88,37	88,37

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Indeks Kualitas Lahan	Poin	82,21	81,85	82,26	82,35	82,45	82,55	82,55
7	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	41,96	70,68	30,80	31,05	31,89	32,03	32,03
8	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	N/A	81,28	22,30	23,32	24,40	25,49	25,49
9	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	N/A	7,27	8,65	10,39	12,39	14,68	14,68
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,47	67,70	68,81	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,57	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
12	Sistem Merit	Poin	N/A	263,5	267,00	270,00	275,00	280,00	280,00
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,22	2,11	2,55	2,90	3,00	3,10	3,10
14	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,10 (BB)	77,84 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
15	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
<b>III. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>								
1	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK								
2	Angka Partisipasi Kasar SLB								
3	Angka Kelulusan Sekolah Menengah								
4	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal								
5	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>								
1	Persentase rumah sakit yang terakreditasi								
2	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan								
3	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar								
4	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha								
5	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan								
6	Persentase kabupaten/kota sehat								
7	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan PHBS								
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi								
2	Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan								
3	Persentase penyediaan kapasitas air baku								
4	Persentase panjang pantai kritis yang ditangani								
5	Akses air minum layak perpipaan (%)								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi								
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota								
8	Panjang drainase yang berfungsi baik								
9	Persentase Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dalam kondisi baik								
10	Bangunan dan lingkungan yang tertata								
11	Rasio Kemantapan Jalan								
12	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat								
13	Skoring penyelenggaraan penataan ruang								
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni								
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni								
3	Persentase RTLH yang tertangani								
4	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh								
5	Persentase PSU permukiman yang ditingkatkan								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara di provinsi								
2	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi yang ditangani								
3	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan								
4	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan								
5	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran								
6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal								
7	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana								
8	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana								
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya								
2	Persentase keluarga kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya								
4	Persentase PSKS kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya								
5	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti								
6	Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti								
7	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti								
8	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti								
9	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial								
10	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi								
11	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang terpenuhi pemeliharannya								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>								
1	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja								
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan								
3	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya								
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).								
5	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan								
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	Persentase SDM Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik & Hukum yg melaksanakan KG (Paralegal, advokat, dll)								
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)								
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif								



RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provins								
5	Persentase keluarga yang mendapatkan Layanan Komprehensif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota								
6	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak								
7	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak								
8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif								
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>								
1	Persentase cadangan pangan								
2	Angka Kecukupan Energi								
3	Angka Kecukupan Protein								
4	Jumlah Desa Rawan Pangan								
5	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan								
<b>10</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>								
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu								
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi								
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Luas Tanah yang direncanakan penggunaannya dalam kewenangan provinsi								
<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1	Persentase rencana lingkungan hidup yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah								
2	Indeks Pencemaran								
3	Persentase luas areal keanekaragaman hayati yang dikelola								
4	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)								
5	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi								
6	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan pemerintah provinsi								
7	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH								
8	Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH mendapatkan penghargaan								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan								
10	Persentase Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan								
<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)								
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0- 17 tahun								
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan								
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan								
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan								
6	Tingkat pemanfaatan data kependudukan								
7	Tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun								
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase desa yang difasilitasi penataannya sesuai kewenangan provinsi								
2	Persentase desa yang difasilitasi kerja samanya sesuai kewenangan provinsi								
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang								
4	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan								
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun								
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )								
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )								
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i> )								
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)								
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat								
2	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase rencana perkeretaapian yang disusun								
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	Persentas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah								
2	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah								
3	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
4	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi								
5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)								
6	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda								
8	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah								
9	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE								
10	Persentase ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE								
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>								
1	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti								
2	Persentase UKP/USP yang dinilai kesehatannya dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota								
3	Persentase koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota								
4	Jumlah Koperasi berkualitas								
5	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Jumlah Rumah Produksi Bersama								
7	Jumlah UKM Potensial Ekspor (UKM)								
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								
1	Minat calon investor								
2	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur								
3	Persentase Penyelesaian Perizinan (%)								
4	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM								
5	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan								
<b>19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
1	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi								
2	Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Provinsi								
3	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir								
4	Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas								
5	Persentase pramuka yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah								
3	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik								
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadada sektoral sesuai standar								
<b>21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
1	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,5								
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah								
<b>22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								



RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan								
2	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni								
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni								
4	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan								
5	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina								
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah								
7	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan								
8	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan								
9	Persentase Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan								
<b>23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>								
1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan								
2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk								
4	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk								
<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional								
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								
3	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi								
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku								
<b>25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	Persentase kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional								
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)								
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)								
4	Persentase wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								
5	Persentase pelaku usaha KP yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku								
6	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)								
<b>26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>								
1	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (orang)								
2	Jumlah pergerakan wisatawan mancanegara (orang)								
3	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan								
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif								
<b>27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>								
1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)								
2	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)								
3	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO <sub>2</sub> eq)								
4	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)								
6	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan (%)								
7	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura								
8	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT								
9	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT								
10	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan dan Hortikultura)								
11	Persentase Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Dibina dan Diawasi								
12	Persentase kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura yang dibentuk/dibina								
13	Jumlah Produksi komoditas Peternakan								
14	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Peternakan								
15	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Dibina dan Diawasi								
17	Persentase kelembagaan peternak yang dibentuk/dibina								
18	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)								
<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>								
1	Produksi hasil hutan kayu (m3/tahun)								
2	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)								
3	Penurunan kerusakan kawasan hutan (%)								
4	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Ha)								
5	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat								
6	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya								
7	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)								
8	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial								
<b>29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>								
1	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan								
2	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Jumlah pengembangan EBT (unit)								
4	Jumlah Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 jam								
5	Jumlah KK Berlistrik (KK)								
<b>30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								
1	Persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB								
2	Pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK)								
3	Persentase stabilitas harga barang pokok dan penting								
4	Inflasi Pangan Bergejolak								
5	Persentase kinerja realisasi pupuk								
6	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara berdasarkan SKA (%)								
7	Pertumbuhan UKM Ekspor (%)								
8	Pertumbuhan nilai ekspor UKM (%)								
9	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku								
10	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								
1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan Peruntukan Industri / Kawasan Industri								
2	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan								
3	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas								
4	Persentase industri yang dapat dipantau perkembangannya								
<b>32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>								
1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya								
2	Persentase Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri								
3	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya								
4	Nilai rata-rata indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi								
<b>33</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal B								
2	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP dan proses bisnis								
3	Indeks pencapaian Satndar pelayanan Minimal (SPM)								

RANCANGAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara tepat waktu								
5	Persentase kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti								
6	Persentase kerja sama daerah yang memberi manfaat bagi pembangunan								
7	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti								
8	Persentase lembaga bina spiritual yang difasilitasi								
9	Persentase produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi penyusunannya								
10	Persentase masalah hukum serta masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan								
11	Kontribusi BUMD terhadap PAD								
12	Persentase kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti								
13	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)								
14	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah								
<b>34</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
1	Skor Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD								
<b>35</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
1	Tingkat kesesuaian program RKPD dan RPD								



NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rata-rata tingkat capaian indikator program seluruh perangkat daerah								
3	Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
4	Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
5	Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
6	Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
7	Tingkat kesesuaian program Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
8	Rata-rata tingkat capaian indikator program perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
<b>36</b>	<b>KEUANGAN</b>								
1	Persentase Realisasi Pajak Daerah								
2	Persentase Perda dan PerGub tentang APBD/P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu								
3	Tingkat kesesuaian nomenklatur program APBD dengan KUA-PPAS								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Tingkat kesesuaian pagu program APBD dengan KUA-PPAS								
5	Tingkat penyerapan anggaran dalam APBD								
6	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan								
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya								
8	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik								
<b>37</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>								
1	Persentase pemenuhan aspek-aspek Sistem Merit								
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
3	Persentase ASN dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Baik (76 – 90)								
4	Persentase ASN yang disiplin								
<b>38</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
1	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat PIM								
2	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Fungsional								
3	Persentase ASN yang sudah mengikuti Diklat Teknis 20 JP								
4	Persentase ASN yang sudah mengikuti Seminar/workshop/sejenis								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			2021 (realisasi)	2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>39</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
1	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat								
<b>40</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>								
1	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung								
<b>41</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								
1	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)								
2	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan								
3	Persentase perangkat daerah yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM								
<b>42</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
1	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan								
2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya								
3	Persentase Ormas yang terdaftar dan aktif								
4	Persentase ormas yang melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya								
5	Persentase potensi konflik/konflik sosial yang ditangani								

Sumber: hasil proyeksi, 2023

## BAB IX PENUTUP

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan sampai dengan pilkada serentak pada tahun 2024, dimuat dalam RPD Tahun 2024-2026. Pelaksanaan RPD serta Renstra Perangkat Daerah pada periode tersebut menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan RPD sehingga diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan beberapa kaidah, yaitu:

1. Pejabat Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan memperhatikan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait untuk sinergi pembangunan.
3. Kepala perangkat daerah dan seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran tujuan dan sasaran. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah daerah sekitar terutama badan otorita IKN, serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
4. Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024, 2025 dan 2026. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman untuk penyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5. Pejabat Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappeda dan seluruh kepala perangkat daerah melakukan evaluasi hasil terhadap RPD dan Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan evaluasi hasil RKPD dan Renja PD secara periodik.
6. Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah menjadi tolok ukur kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RPD kabupaten.
8. Dokumen RPD digunakan sebagai pedoman pembangunan sampai dengan disusunnya RPJMD periode berikutnya yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program prioritas gubernur terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi tersebut akan berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  
**BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>